



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029





RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan terarah diperlukan perencanaan pembangunan daerah guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah, menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi.

12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
15. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

Ruang Lingkup RPJMD meliputi:

- a. Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. Tujuan dan Sasaran pembangunan;
- c. Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan;
- d. program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;

- b. gambaran umum Daerah;
- c. Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun Daerah.
- (2) RPJMD menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan jika:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 17 November 2025
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 17 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR URUT PERDA 6.29 /TAHUN 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat, maka untuk periode pembangunan Tahun 2025-2029 disusunlah RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Bangka Barat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program perangkat daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu penyusunan RPJMD juga berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat pada setiap tahun perencanaan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 15



Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2025-2029
Nomor 6 Tahun 2025
Tanggal 17 November 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika Penulisan	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-57
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-88
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-117
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-160
2.1.6 Kerjasama Daerah	II-167
2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD Provinsi di Kabupaten/ Kota	II-188
2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah	II-191
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-196
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024	II-199
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029	II-205
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-219
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-219
2.3.2 Isu Strategis Daerah	II-229
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1 Visi dan Misi	III-1



3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	III-6
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-11
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	III-11
3.2.2 Arah Pembangunan dan Strategi Pengembangan Wilayah.....	III-22
3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	III-29
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV-5
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-39
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-41
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	IV-43
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.....	V-2
LAMPIRAN	
A. Metadata Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	
B. Rumusan Indikator Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/ Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.....	II-2
Tabel 2. 2	Jumlah Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (ton) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2. 3	Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2. 4	Luas Panen Padi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020—2024	II-7
Tabel 2. 5	Produksi Padi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020—2024	II-8
Tabel 2. 6	Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020—2024.....	II-9
Tabel 2. 7	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2. 8	Jumlah Produksi Perikanan (Ton) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2. 9	Nilai Produksi Perikanan (Miliar Rupiah) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-12
Tabel 2. 10	Indikator Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-12
Tabel 2. 11	Potensi Wisata di Kabupaten Bangka Barat	II-13
Tabel 2. 12	Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-16
Tabel 2. 13	Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2023	II-17
Tabel 2. 14	Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II-18
Tabel 2. 15	Potensi Kulong Sebagai Sumber Air Baku PDAM di Kabupaten Bangka Barat.....	II-19
Tabel 2. 16	Kapasitas Air Baku di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-20



Tabel 2. 17	Daya Dukung Demografis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2029	II-21
Tabel 2. 18	Kebutuhan Beras di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-21
Tabel 2. 19	Produktivitas Lahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-22
Tabel 2. 20	Produksi Beras di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-22
Tabel 2. 21	Daya Dukung Lahan Sawah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-23
Tabel 2. 22	Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan.....	II-23
Tabel 2. 23	Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Bangka Barat.....	II-24
Tabel 2. 24	Kebutuhan Air Kabupaten di Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-24
Tabel 2. 25	Persentase Luas Status Daya Dukung Penyediaan Air Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	II-25
Tabel 2. 26	Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Bangka Barat	II-27
Tabel 2. 27	Daya Dukung Permukiman dan Daya Tampung Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-28
Tabel 2. 28	Kesimpulan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-28
Tabel 2.29	Jasa Lingkungan di Kabupaten Bangka Barat.....	II-29
Tabel 2. 30	Proporsi Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023	II-39
Tabel 2. 31	GRK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024	II-39
Tabel 2. 32	Potensi Bencana di Kabupaten Bangka Barat.....	II-41
Tabel 2. 33	Jumlah dan Distribusi Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2. 34	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 (per Km2).....	II-50
Tabel 2. 35	Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 (Dalam Persen).....	II-51
Tabel 2. 36	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024.....	II-53



Tabel 2. 37	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-56
Tabel 2. 38	Pertumbuhan TPT dengan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2. 39	Pertumbuhan Indeks Gini Rasio dengan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung Tahun 2021-2024	II-66
Tabel 2. 40	Pertumbuhan Penduduk Miskin dengan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung Tahun 2021-2024	II-68
Tabel 2. 41	Angka/Kemampuan Literasi pada Rapor Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-76
Tabel 2. 42	Penerima Bantuan Anggaran Bansos Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II-80
Tabel 2. 43	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, 2022-2024	II-81
Tabel 2. 44	Indeks Zakat Nasional Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030	II-81
Tabel 2. 45	Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2. 46	Data Sanggar Seni per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	II-84
Tabel 2. 47	Capaian Indeks Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024	II-85
Tabel 2. 48	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024	II-88
Tabel 2. 49	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2. 50	Return on Asset BUMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024	II-101
Tabel 2. 51	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK dan ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2. 52	Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024	II-104
Tabel 2. 53	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024.....	II-104
Tabel 2. 54	Nilai dan Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel 2. 55	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-110



Tabel 2. 56	Capaian Indikator Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2024	II-112
Tabel 2. 57	Penanganan Persampahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-113
Tabel 2. 58	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2. 59	Capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024	II-118
Tabel 2. 60	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024	II-119
Tabel 2. 61	Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024	II-120
Tabel 2. 62	Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-120
Tabel 2. 63	Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel 2. 64	Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024	II-122
Tabel 2. 65	Capaian Indikator Kondisi Pembangunan Hukum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2. 66	Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024	II-124
Tabel 2. 67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2. 68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2. 69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2. 70	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2. 71	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2. 72	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2. 73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II-134



Tabel 2. 74	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2. 75	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2. 76	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2. 77	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2. 78	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2. 79	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024.....	II-141
Tabel 2. 80	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel 2. 81	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2. 83	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2. 84	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2. 85	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel 2. 86	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2. 87	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2. 88	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2. 89	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	II-151
Tabel 2. 90	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2. 91	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2. 92	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020-2024	II-154



Tabel 2. 93	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2. 94	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2. 95	Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2. 96	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2. 97	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2. 98	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2. 99	Database Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.....	II-172
Tabel 2. 100	Daftar Dukungan Infrastruktur Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	II-189
Tabel 2. 101	Kinerja Keuangan Perumdam Tirta Sejiran Setason.....	II-192
Tabel 2. 102	Profil Indikator Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	II-197
Tabel 2. 103	Kapasitas Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	II-199
Tabel 2. 104	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2. 105	Realisasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-201
Tabel 2. 106	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2. 107	Neraca Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-204
Tabel 2. 108	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030	II-209
Tabel 2. 109	Proyeksi Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030	II-212
Tabel 2. 110	Proyeksi Prioritas Belanja 2025-2030	II-214
Tabel 2. 111	Proyeksi Neraca Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-218
Tabel 2. 112	Permasalahan Daerah Aspek Geografis.....	II-220
Tabel 2. 113	Permasalahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-222
Tabel 2. 114	Permasalahan Daerah Aspek Daya Saing Daerah	II-225



Tabel 2. 115	Permasalahan Daerah Aspek Pelayanan Umum	II-227
Tabel 2. 116	Pemetaan Isu Strategis Daerah.....	II-247
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029.....	III-9
Tabel 3. 2	Tahapan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 – 2030	III-15
Tabel 3. 3	Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029	III-16
Tabel 3. 4	Lokasi Prioritas dan Intervensi Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.....	III-25
Tabel 3. 5	Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	III-40
Tabel 3. 6	Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Program Perangkat Daerah.....	III-43
Tabel 4. 1	Daftar Program Perangkat Daerah.....	IV-2
Tabel 4. 2	Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.....	IV-6
Tabel 4. 3	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2030	IV-39
Tabel 4. 4	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030	IV-41
Tabel 4. 5	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030	IV-43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kerangka Pikir RPJMN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029	I-4
Gambar 1. 2	Bagan Alir Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat.....	I-5
Gambar 1. 3	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I-10
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat	II-3
Gambar 2. 2	Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-18
Gambar 2. 3	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Bangka Barat.....	II-26
Gambar 2. 4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen) di Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023.....	II-32
Gambar 2. 5	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-34
Gambar 2. 6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2. 7	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-36
Gambar 2. 8	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-37
Gambar 2. 9	Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-41
Gambar 2. 10	Tren Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-43
Gambar 2. 11	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk Kab. Bangka Barat	II-44
Gambar 2. 12	Jumlah dan Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 – 2030.....	II-46
Gambar 2. 13	Proyeksi Penduduk Per Jenis Kelamin (dalam Jiwa) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030.....	II-47



Gambar 2. 14	Distribusi Penduduk Kabupaten Bangka Barat Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-47
Gambar 2. 15	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II-54
Gambar 2. 16	Rata-Rata Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Barat dan Kota/Kabupaten Lainnya di Provinsi Bangka Belitung	II-57
Gambar 2. 17	LPE dan PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 2. 18	Perbandingan LPE dengan Kabupaten/ Kota sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2. 19	Perbandingan PDRB per Kapita Harga Berlaku dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2. 20	Perbandingan TPT dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2. 21	Perbandingan Indeks Gini Rasio dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-65
Gambar 2. 22	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-67
Gambar 2. 23	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2. 24	Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024	II-70
Gambar 2. 25	Perbandingan UHH dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-71
Gambar 2. 26	Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-72
Gambar 2. 27	Perbandingan RLS dengan Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-73



Gambar 2. 28	Perbandingan HLS dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	II-74
Gambar 2. 29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2021-2024	II-78
Gambar 2. 30	Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2. 31	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2. 32	Rasio Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2. 33	Tingkat Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-90
Gambar 2. 34	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-92
Gambar 2. 35	Nilai Realisasi dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-93
Gambar 2. 36	Kontribusi PDRB Provinsi dari Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2. 37	Persentase Kontribusi PDRB Per Sektor di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-95
Gambar 2. 38	Kontribusi Tiga Sektor PDRB Terbesar Kabupaten di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2. 39	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-97
Gambar 2. 40	Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Dengan Kota/Kabupaten Lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	II-98
Gambar 2. 41	Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-99
Gambar 2. 42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-99
Gambar 2. 43	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah dengan Kab/Kota sekitar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	II-100



Gambar 2. 44	Realisasi dan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-106
Gambar 2. 45	Realisasi dan Net Ekspor Barang Jasa Terhadap PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-107
Gambar 2. 46	Rata-Rata Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-108
Gambar 2. 47	Nilai Indeks Kesulitan Geografis Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II-109
Gambar 2. 48	Jumlah Arus Penumpang (Orang) dan Arus Barang (Ton) Masuk dan Keluar di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-111
Gambar 2. 49	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-113
Gambar 2. 50	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-114
Gambar 2. 51	Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	II-115
Gambar 2. 52	Inflasi Month-to-Month Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.....	II-116
Gambar 2. 53	Rasio Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.....	II-117
Gambar 2. 54	Jumlah Kerjasama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2025	II-167
Gambar 2. 55	Jangka Waktu Kerjasama Kabupaten Bangka Barat	II-168
Gambar 2. 56	Kategori Pihak Kerjasama Kabupaten Bangka Barat.....	II-169
Gambar 2. 57	Kategori Tema Kerjasama Kabupaten Bangka Barat.....	II-170
Gambar 2. 58	Pendekatan Proyeksi Keuangan Kabupaten Bangka Barat.....	II-206
Gambar 2. 59	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat 2025-2030	II-208
Gambar 2. 60	Proyeksi Belanja Kabupaten Bangka Barat 2025-2030.....	II-211
Gambar 2. 61	Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Barat.....	II-216
Gambar 3. 1	Keterkaitan Misi RPJMD Bangka Barat dengan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-4



Gambar 3. 2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029	III-8
Gambar 3. 3	Pentahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045	III-11
Gambar 3. 4	Arah Kebijakan Pembangunan Periode 1 (Tahun 2025- 2029) RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2045	III-12
Gambar 3. 5	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026-2030.....	III-14
Gambar 3. 6	Arah Pembangunan Kewilayahan Kota/ Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029	III-23
Gambar 3. 7	Tema Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2045	III-24
Gambar 3. 8	Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka Barat	III-27
Gambar 3. 9	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat.....	III-28



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menanggulangi kemiskinan. Dalam konteks otonomi daerah, pembangunan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah melalui perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan terukur.

Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan regional, dengan luas wilayah 2.851,41 km² yang terbagi atas enam kecamatan, yaitu Kelapa, Tempilang, Mentok, Simpang Teritip, Jebus, dan Parittiga. Jumlah penduduk mencapai 217.859 jiwa pada Tahun 2024, dengan kekayaan sumber daya alam berada di sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan yang mendukung struktur ekonomi lokal. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,48% pada Tahun 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi yang cukup baik. Namun demikian, beberapa tantangan mendasar tetap dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas fiskal akibat defisit anggaran, kesenjangan antarwilayah, dan ketergantungan pada sektor ekonomi sekunder, khususnya pada lapangan usaha industri pengolahan. Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbaikan, dari 69,08 pada Tahun 2020 menjadi 71,36 pada Tahun 2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Dalam konteks dinamika tersebut, diperlukan arah pembangunan yang adaptif dan strategis untuk menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan



potensi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai rencana pembangunan lima tahunan yang menerjemahkan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih termasuk janji dan agenda pembangunan ke dalam sasaran, program, dan indikator kinerja daerah. Seluruh tahapan penyusunannya diarahkan untuk memastikan keterpaduan antara mandat kepala daerah, kerangka regulasi, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pelantikan Bupati Markus dan Wakil Bupati Yus Derahman pada 2 Juni 2025 menandai periode kepemimpinan definitif yang menjadi dasar penetapan perencanaan lima tahunan dimaksud. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta RPJMN Tahun 2025-2029, dan mengacu pada kerangka regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai instrumen yang wajib dilaksanakan, penyusunan RPJMD harus disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS berfungsi memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dilengkapi dengan KLHS. Dengan demikian, KLHS tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Konteks lokal Bangka Barat memperlihatkan tantangan nyata keberlanjutan pembangunan. Degradasi hutan, konversi lahan untuk pertambangan dan perkebunan, serta ancaman abrasi pantai menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa 45% wilayah Bangka Barat masih berupa hutan, namun sebagian besar menghadapi tekanan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. Sementara itu, data BPBD mencatat terjadinya peningkatan frekuensi banjir dan longsor dalam beberapa tahun terakhir, dengan kerugian material yang cukup besar dan berdampak terhadap ribuan keluarga. Kualitas air sungai utama seperti Sungai Sukal,



Sungai Antan dan Sungai Kampak juga menunjukkan penurunan dengan tingkat pencemaran yang melebihi baku mutu. Kondisi ini menandakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan Bangka Barat menghadapi tekanan serius yang perlu ditangani secara terencana dan sistematis, sekaligus memperhatikan risiko dampak terhadap masyarakat, kinerja jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta kerentanan iklim yang semakin nyata.

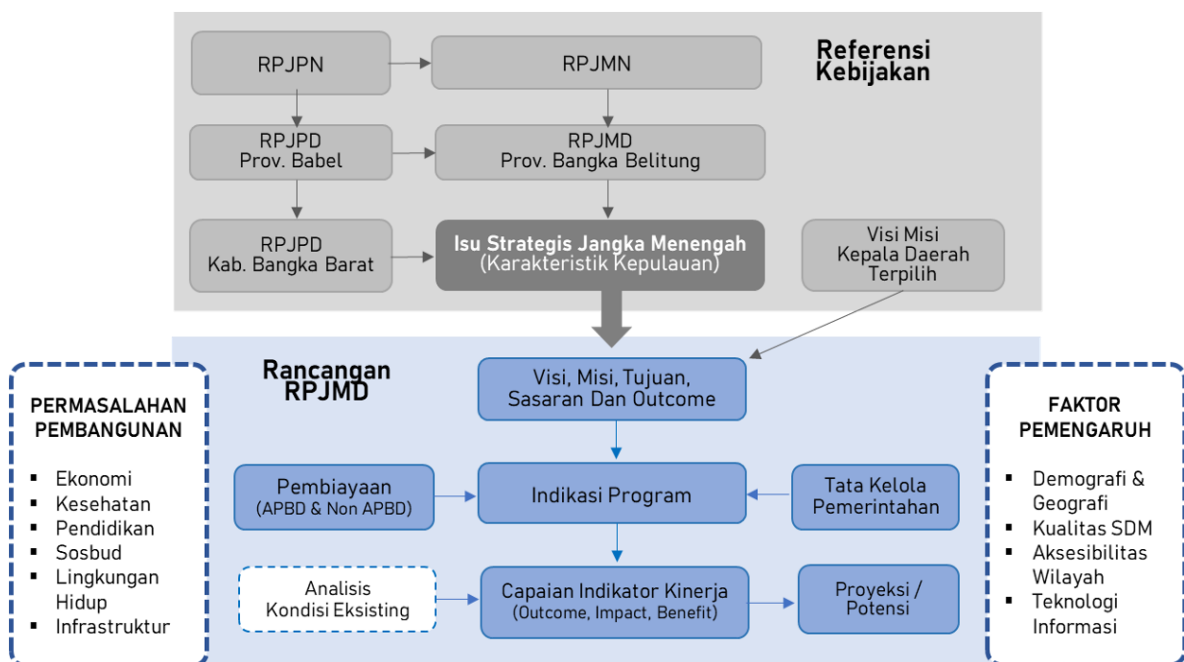
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat dilakukan secara komprehensif melalui penerapan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui metode ilmiah dan analisis data untuk merumuskan tujuan secara rasional dan terukur, sementara pendekatan partisipatif menjamin keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Pendekatan politis mencerminkan hasil pemilu kepala daerah, dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan lokal. Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD 2025–2029 juga diharapkan mampu mengintegrasikan pendekatan *Thematic, Holistic, Integrative, and Spatial* (THIS) serta mengadopsi prinsip manajemen strategis, *logic model*, sistem berpikir (*system thinking*), dan sistem dinamis (*system dynamic*) untuk menguatkan logika intervensi pembangunan.

Selain sebagai instrumen pengendali arah pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bangka Barat juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas nasional seperti Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Proyek Quick Wins yang menjadi fondasi kebijakan nasional pada periode RPJMN 2025–2029. Sejalan dengan komitmen pembangunan global, seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RPJMD juga wajib mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) guna menjamin keberlanjutan pembangunan lintas generasi. Dengan integrasi ini, RPJMD Bangka Barat tidak hanya selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian agenda global, khususnya dalam merespons *triple planetary crisis* yang mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Proses penyusunannya dilaksanakan melalui forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan, serta dilakukan sinkronisasi dan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan berbagai pendekatan tersebut, RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang mampu

menjawab kebutuhan riil pembangunan, sekaligus mengarahkan transformasi daerah menuju tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat dibangun atas kerangka pikir yang menyelaraskan kebijakan nasional hingga daerah dengan kondisi aktual dan proyeksi strategis wilayah. Dokumen ini disusun dalam koridor hierarki mulai dari RPJPN dan RPJMN di tingkat nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga RPJPD Kabupaten Bangka Barat, serta dipadukan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam kerangka tersebut, isu strategis jangka menengah, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik kepulauan, menjadi simpul penting dalam arah kebijakan dan sasaran pembangunan lima tahunan.

Gambar 1. 1
Kerangka Pikir RPJMN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029



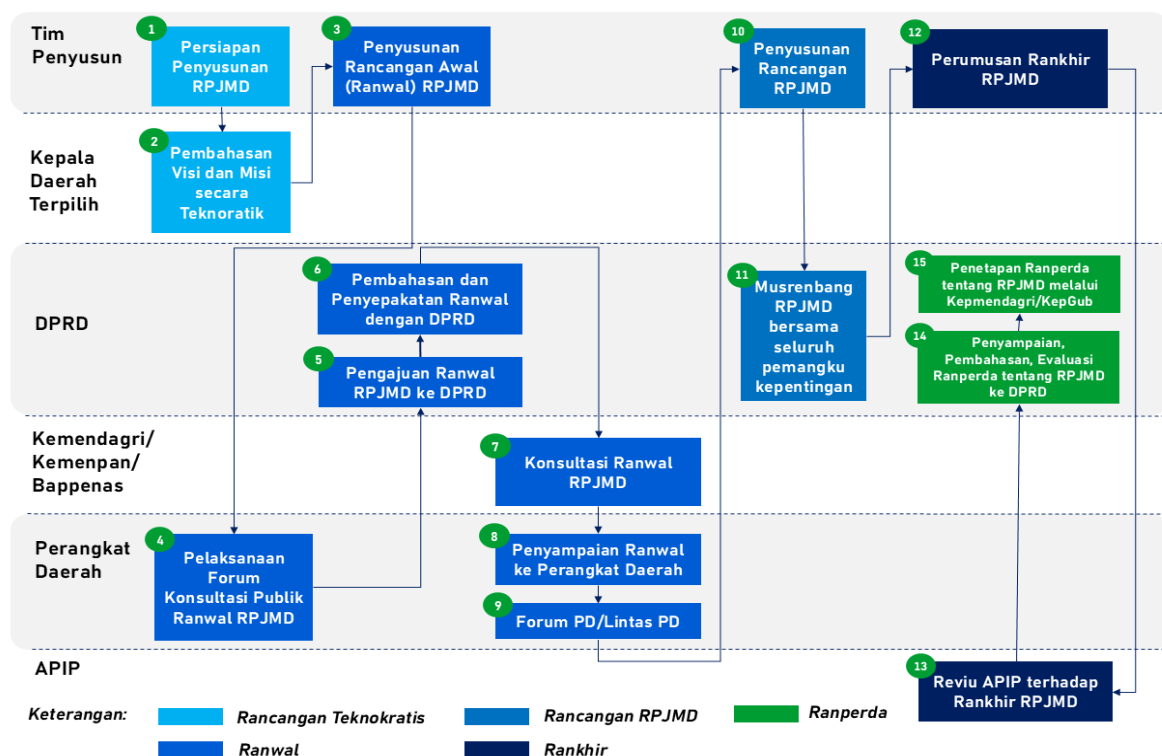
Sumber: Tim Penyusun, 2025

Kerangka pikir tersebut diterjemahkan ke dalam tahapan konseptual yang mencakup identifikasi permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Analisis ini dilengkapi dengan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan, seperti demografi, kualitas SDM, aksesibilitas wilayah, serta perkembangan teknologi informasi. Hasilnya kemudian dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam indikasi program dengan memperhatikan aspek pembiayaan, potensi daerah, tata

kelola pemerintahan, serta capaian indikator kinerja yang terukur dari sisi outcome, impact, dan benefit.

Untuk memastikan penyusunan RPJMD berlangsung terstruktur, partisipatif, dan akuntabel, tahapan-tahapan penyusunan dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Proses dimulai dari persiapan dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya, perumusan visi dan misi kepala daerah, hingga penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD yang wajib mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ranwal ini dibahas melalui forum konsultasi publik dan DPRD, kemudian dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, dan Bappenas. Selanjutnya Ranwal dibahas kembali bersama perangkat daerah dalam forum PD/Lintas PD, sebelum dirumuskan menjadi Rancangan RPJMD yang disepakati melalui Musrenbang.

Gambar 1. 2
Bagan Alir Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tahapan berikutnya adalah penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD yang direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menilai kualitas perencanaan dan kepatuhan pada ketentuan normatif.



Rankhir kemudian disampaikan dalam bentuk Ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui, sebelum ditetapkan sebagai Perda RPJMD melalui evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan demikian, alur ini memastikan kesinambungan pembangunan jangka menengah sekaligus memperkuat legitimasi politik, teknokratik, dan partisipatif RPJMD sebagai instrumen strategis pembangunan daerah.

Setelah Musrenbang, tahapan selanjutnya adalah menyusun dokumen rancangan akhir (Rankhir) RPJMD yang kemudian direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menilai kualitas perencanaan serta kepatuhan terhadap ketentuan normatif dan kebijakan yang berlaku. Rankhir RPJMD yang telah direviu disampaikan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui, sebelum ditetapkan sebagai Perda RPJMD melalui evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan demikian, keseluruhan tahapan ini tidak hanya menjamin kesinambungan arah pembangunan jangka menengah, tetapi juga memperkuat legitimasi politik, teknokratik, dan partisipatif dari dokumen RPJMD sebagai instrumen strategis pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);



13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun



- 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D) mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); dan
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 4 Seri E).

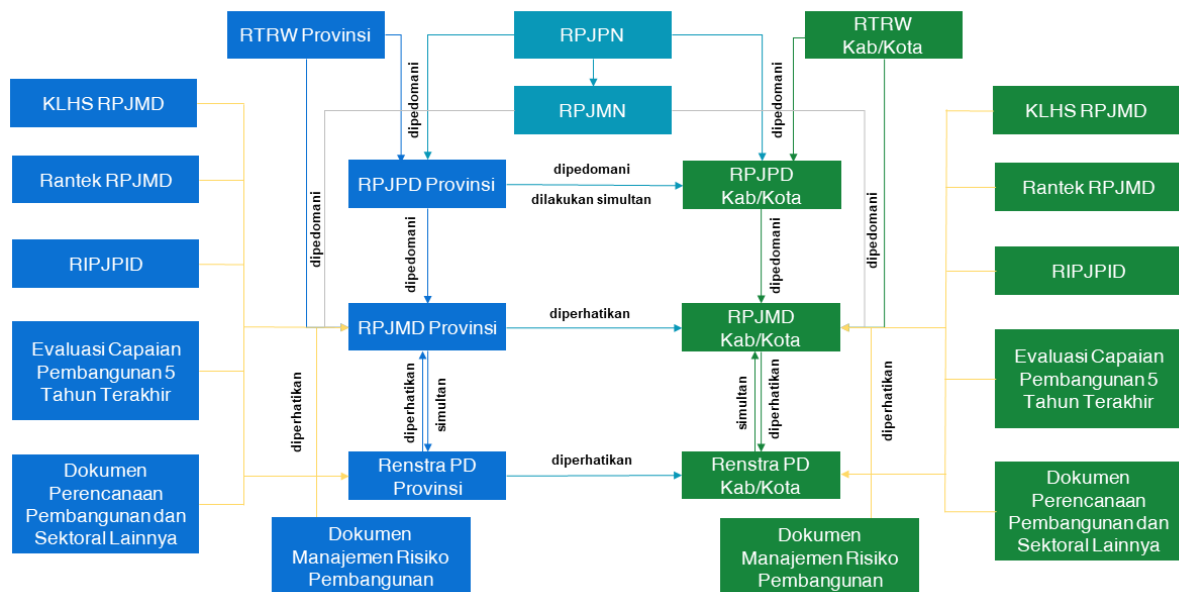
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dalam sebuah ekosistem perencanaan yang terintegrasi. Proses ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya integrasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan RPJMD untuk menciptakan alur pembangunan yang koheren dari tingkat pusat hingga daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat memegang peranan sentral sebagai titik hubung strategis yang menjembatani berbagai kepentingan sebagaimana ditunjukkan pada skema berikut. Di satu sisi, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih menjadi kerangka kerja yang terukur. Di sisi lain, RPJMD menjadi referensi utama yang memastikan agenda pembangunan

daerah selaras dengan prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, 83 kegiatan prioritas utama, serta 77 proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, RPJMD menjamin bahwa setiap program yang dirancang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Gambar 1. 3
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat memegang peranan sentral sebagai titik hubung strategis yang menjembatani berbagai kepentingan sebagaimana ditunjukkan pada skema berikut. Di satu sisi, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih menjadi kerangka kerja yang terukur. Di sisi lain, RPJMD menjadi referensi utama yang memastikan agenda pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, 83 kegiatan prioritas utama, serta 77 proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, RPJMD menjamin bahwa setiap program yang dirancang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

a. Keterkaitan Vertikal

Keterkaitan vertikal menggambarkan hubungan hierarkis antara RPJMD Kabupaten Bangka Barat dengan dokumen perencanaan di tingkat atasnya sebagai acuan dan di tingkat bawahnya sebagai pedoman.



- **RPJPD Kabupaten Bangka Barat:** RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah ke dalam sasaran dan strategi pembangunan lima tahunan. Kepatuhan ini memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan jangka menengah tidak menyimpang dari koridor strategis yang telah disepakati untuk periode 20 tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen taktis yang menerjemahkan visi besar daerah menjadi program-program yang lebih konkret dan terukur dalam setiap periode kepemimpinan.
- **RPJMN dan RPJMD Provinsi:** Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Bangka Barat memperhatikan dan menyelaraskan diri dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan memastikan program daerah mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi. Penyelarasan ini tidak hanya sebatas pada sinkronisasi tema pembangunan, tetapi juga mencakup harmonisasi target indikator kinerja dan alokasi sumber daya untuk program-program prioritas, sehingga akselerasi pembangunan daerah dapat terwujud secara lebih efektif.
- **Renstra Perangkat Daerah (PD):** RPJMD menjadi pedoman utama bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Setiap PD wajib menyusun Renstra yang berpedoman pada sasaran dan program dalam RPJMD, demi memastikan seluruh kegiatan selaras dan berkontribusi pada pencapaian visi-misi kepala daerah. Hubungan ini menciptakan kaskade kinerja yang jelas dari tingkat daerah hingga unit kerja terkecil, memastikan setiap program memiliki kontribusi terukur. Keterkaitan ini juga menjadi dasar sistem akuntabilitas kinerja, di mana keberhasilan PD dinilai dari kemampuannya menerjemahkan dan melaksanakan arahan strategis RPJMD.

b. Keterkaitan Horizontal

Keterkaitan horizontal menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD harus selaras dan mempertimbangkan berbagai dokumen teknis, sektoral, dan spasial lainnya untuk menjamin perencanaan yang komprehensif dan implementatif.



- **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW):** RPJMD memperhatikan arahan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat. Seluruh program pembangunan fisik yang direncanakan harus sesuai dengan alokasi dan struktur ruang yang telah diatur untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang. Keterkaitan ini bersifat mengikat, di mana RTRW berfungsi sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang yang memiliki kekuatan hukum. Dengan memastikan lokasi proyek pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat menjamin kepastian hukum bagi investasi serta mewujudkan pembangunan yang tertib, efisien, dan berkelanjutan secara spasial.
- **Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah:**
Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029, substansi perencanaan pembangunan daerah diturunkan lebih lanjut ke dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang menegaskan peran ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi dalam menjawab permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten dan ditujukan untuk mempercepat pencapaian target program tersebut. Penyusunannya melalui proses koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sekaligus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini memberikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi daerah guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, mutu kebijakan berbasis bukti, penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah. Dengan demikian, RIPJPID menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029.
- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):** Penyusunan RPJMD wajib memperhatikan rekomendasi dari dokumen KLHS RPJMD. Ini memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta memitigasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan. KLHS berfungsi sebagai instrumen proaktif untuk memastikan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup telah terintegrasi sejak tahap awal perumusan kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi input



krusial untuk menyempurnakan arah kebijakan RPJMD agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masa depan.

- **Dokumen Pendukung dan Evaluasi:** RPJMD disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen input krusial lainnya, seperti Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun Terakhir, Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Pemanfaatan beragam dokumen ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang berbasis bukti (evidence-based), realistis, dan komprehensif. Evaluasi periode sebelumnya memberikan pelajaran berharga, Rantek menyediakan landasan teknokratis yang objektif, sementara dokumen sektoral dan manajemen risiko memastikan bahwa perencanaan mempertimbangkan sinergi antar-sektor serta potensi tantangan dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, jaringan keterkaitan vertikal dan horizontal ini membentuk sebuah kerangka kerja yang solid dan memastikan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah instrumen strategis yang hidup. Kepatuhan terhadap alur keterkaitan ini menjadi kunci untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, harmonis, dan efektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat secara terpadu dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Bangka Barat. Dokumen ini disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial (THIS), serta sebagai bagian dari upaya untuk menyelaraskan RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Bangka Belitung tahun 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029. Melalui pendekatan ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus relevan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan lokal. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:



- a. Tersusunnya dokumen RPJMD yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional;
- b. Tersusunnya dokumen RPJMD yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi, inovasi, dan pengembangan daerah;
- c. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024);
- d. Memberikan informasi dan analisis atas permasalahan dan isu strategis yang terjadi atau dialami masyarakat serta prediksi untuk lima tahun ke depan;
- e. Memberikan informasi mengenai kapasitas dan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan selama lima tahun lalu dan proyeksinya untuk periode 2025–2029;
- f. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah ke dalam strategi pembangunan, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama kurun waktu perencanaan;
- g. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat; dan
- h. Berfungsi sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, disajikan dengan sistematika:

Bab I. Pendahuluan	Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
Bab II. Gambaran Umum Daerah	Bab ini menyajikan tiga Sub Bab utama meliputi Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Aspek geografis dan demografis; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum. Beberapa Sub Bab



lainnya sesuai dengan kondisi daerah juga ditambahkan, seperti: Standar Pelayanan Minimal; Kerjasama daerah; Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/ kota; dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

Subbab kedua yaitu Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025–2029. Pada Sub Bab ketiga yaitu Permasalahan dan Isu Strategis memuat Permasalahan pembangunan daerah dan Isu strategis daerah.

**Bab III.
Visi, Misi, dan
Program
Prioritas
Pembangunan
Daerah**

Bab ini menyajikan dua Sub Bab utama yaitu Sub Bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 serta Sub Bab kedua yaitu Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan daerah dan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.

**Bab IV.
Program
Perangkat
Daerah dan
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah**

Bab ini menyajikan dua Sub Bab utama yaitu Sub Bab Program Perangkat Daerah yang memuat program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 Tahun 2025–2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program,. Pada Sub Bab kedua yaitu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

**Bab V.
Penutup**

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan



pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi wilayah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan serta mengatasi berbagai permasalahan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Bab II mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bangka Barat menyajikan penjelasan tentang keadaan daerah dan pencapaian pembangunan Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam merancang rencana pembangunan lima tahun ke depan, melalui pemetaan kondisi daerah secara objektif, mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, dan lainnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Bangka Barat dekat dengan Pulau Sumatera sehingga menjadi pintu gerbang masuknya barang dan penumpang dari Pulau Sumatera yang melewati laut. Secara geografis, Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00'–02° 10' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka Barat terletak di bagian barat Pulau Bangka dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Selat Bangka
- Sebelah Timur : Kab Bangka
- Sebelah Utara : Laut Natuna
- Sebelah Selatan : Selat Bangka

Berdasarkan Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025, Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah 285.141 Ha terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan dan 60 desa. Lebih jelasnya untuk luas wilayah, persentase luas wilayah, kecamatan, jumlah desa/kelurahan di yang ada di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/ Kelurahan Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat

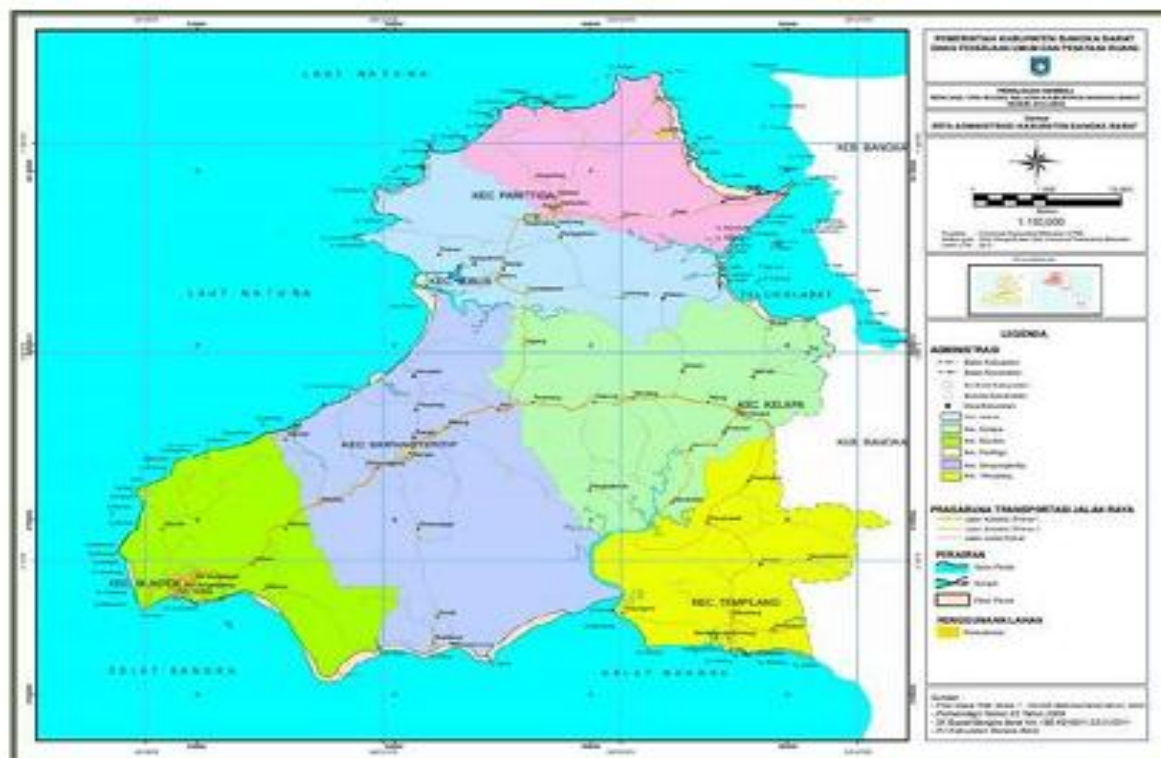
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
1	Kelapa	584,772	20,51	Kelurahan: 1 Desa: 13	1. Air Bulin, 2. Dendang 3. Kacung 4. Kayu Arang 5. Kelapa 6. Mancung 7. Pusuk 8. Tebing 9. Tugang 10. Tuik, 11. Terentang 12. Pangkal Beras 13. Sinar Sari 14. Beruas
2	Tempilang	388,628	13,63	Desa: 9	1. Air Lintang 2. Benteng Kota 3. Buyan Kelumbi 4. Penyampak 5. Sangku 6. Simpang Yul 7. Sinar Surya 8. Tanjung Niur 9. Tempilang
3	Mentok	371,774	13,04	Kelurahan: 5 Desa: 4	1. Air Belo 2. Air Limau 3. Air Putih 4. Belo Laut 5. Sungai Baru 6. Sungai Daeng 7. Tanjung 8. Keranggan 9. Menjelang
4	Simpang Teritip	789,458	27,69	Desa: 13	1. Air Nyatoh 2. Berang 3. Ibul 4. Kundi 5. Mayang 6. Pelangas, 7. Rambat, 8. Simpang Gong, 9. Simpang Tiga 10. Bukit Terak 11. Air Menduyung 12. Pangek 13. Peradong
5	Jebus	389,755	13,67	Desa: 11	1. Jebus 2. Ketap 3. Limbung 4. Ranggi Asam 5. Rukam 6. Sungai Buluh 7. Tumbak Petar 8. Mislak 9. Air Kuang, 10. Pebuar 11. Sinar Manik

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
6	Parittiga	327,022	11,47	Desa: 10	1. Air Gantang 2. Bakit 3. Cupat 4. Kapit 5. Kelabat 6. Puput 7. Sekar Biru 8. Semulut 9. Telak 10. Teluk Limau
Kabupaten Bangka Barat		2.851,408	100	66	

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, seluruh wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berada di Pulau Bangka. Wilayah daratan tersebut terbagi dalam enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa dengan luas wilayah 584,772 km², Kecamatan Tempilang dengan luas wilayah 388,628 km², Kecamatan Mentok dengan luas wilayah 371,774 km², Kecamatan Simpang Teritip dengan luas wilayah 789,458 km², Kecamatan Jebus dengan luas wilayah 389,755 km², dan Kecamatan Parittiga dengan luas wilayah 327,022 km².

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014-2034

Terlihat dari data tersebut bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Simpang Teritip dengan persentase luas 27,69%, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Parittiga dengan persentase luas hanya 11,47% dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Apabila dilihat dari jumlah kelurahan dan desa, Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan paling banyak, sedangkan Kecamatan Mentok memiliki jumlah desa dan kelurahan paling sedikit, sama dengan Kecamatan Tempilang.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan dokumen Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024, arah pembangunan daerah difokuskan pada sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Fokus pembangunan ini kemudian dibedakan menurut karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Mentok diarahkan pada pengembangan sektor industri pengolahan dan perdagangan;
- b. Kecamatan Simpang Teritip memprioritaskan sektor pertanian dan perkebunan sebagai fokus pembangunannya;
- c. Kecamatan Jebus menitikberatkan pembangunan pada sektor pertambangan dan perkebunan;
- d. Kecamatan Kelapa difokuskan pada sektor pertanian, perkebunan, serta perdagangan;
- e. Kecamatan Tempilang mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan dalam pengembangannya; dan
- f. Kecamatan Parittiga mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor perdagangan dan pengolahan.

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Keberagaman potensi ini menjadi modal strategis bagi pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat, diklasifikasikan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Potensi Pertanian

Kabupaten Bangka Barat memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, khususnya pada subsektor perkebunan yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Keunggulan ini didukung oleh kondisi agroklimat yang relatif ideal untuk pertumbuhan tanaman tahunan, seperti



curah hujan yang merata sepanjang tahun, topografi lahan yang cenderung datar hingga bergelombang, serta kesesuaian tanah untuk komoditas unggulan. Komoditas perkebunan yang mendominasi adalah kelapa sawit, karet, lada, kelapa, kakao, dan aren, masing-masing dengan dinamika produksinya tersendiri.

Data produksi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas dengan pertumbuhan paling pesat dan signifikan. Produksi kelapa sawit meningkat dari 220.512 ton pada tahun 2020 menjadi 424.161 ton pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 92,4 persen dalam lima tahun. Lonjakan ini menandakan keberhasilan ekspansi lahan dan/atau intensifikasi budidaya sawit, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai komoditas unggulan utama di Bangka Barat. Di sisi lain, komoditas kelapa menunjukkan produksi yang cenderung stagnan, bahkan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 466 ton setelah sebelumnya sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kurangnya dinamika pengembangan pada sektor kelapa meskipun potensi tetap ada.

Tabel 2. 2
Jumlah Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (ton) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Produksi Jenis Tanaman (ton)	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit	220.512,82	266.406,50	326.316,33	373.398,49	424.161,00
Kelapa	481,65	559,88	568,12	591,40	466,25
Karet	12.053,93	10.847,00	10.714,24	10.023,40	6.234,51
Lada	3.456,92	3.019,77	2.138,43	1.581,80	181,03
Kakao	5,57	8,94	9,47	8,04	5,81
Aren	3,2	8,94	2,42	2,19	2,18

Sumber: Bangka Barat dalam Angka Tahun 2021-2025

Sebaliknya, dua komoditas tradisional yaitu karet dan lada mengalami penurunan produksi yang cukup tajam. Produksi karet turun hampir setengahnya dari 12.054 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 6.234 ton pada tahun 2024. Produksi lada bahkan menurun drastis sebesar 94,8 persen dalam periode yang sama, dari 3.456 ton menjadi hanya 181 ton. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan menurunnya harga komoditas, rendahnya peremajaan tanaman, serta peralihan petani ke tanaman lain yang lebih menguntungkan seperti sawit. Komoditas lainnya seperti kakao dan aren masih menunjukkan volume produksi yang sangat kecil, dengan tren yang tidak stabil. Namun kedua tanaman ini menyimpan potensi ekonomi tersendiri apabila dikembangkan secara spesifik dalam ceruk pasar produk olahan seperti cokelat lokal atau gula aren.



Melihat dinamika tersebut, pengembangan sektor perkebunan di Bangka Barat ke depan perlu diarahkan pada beberapa strategi. Seperti penguatan budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan, termasuk penerapan sertifikasi ISPO/RSP0 dan pengembangan industri hilir. Kemudian perlu dilakukan revitalisasi tanaman karet dan lada melalui program peremajaan, pengendalian hama terpadu, serta diversifikasi produk olahan. Selanjutnya, komoditas hortikultura dan tanaman minor seperti kakao dan aren dapat menjadi alternatif pengembangan ekonomi lokal apabila dibarengi dengan dukungan teknologi, pasar, dan kemitraan. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis potensi wilayah, sektor perkebunan dan hortikultura di Bangka Barat memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai penopang ketahanan pangan dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, terkait data perkembangan luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 berdasarkan jenis komoditas utama, yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, lada, kakao, dan aren. Data ini memberikan gambaran dinamika pemanfaatan lahan perkebunan di wilayah tersebut, sekaligus menunjukkan kecenderungan pertumbuhan atau penurunan luas tanam yang dapat mencerminkan perubahan orientasi ekonomi, kebijakan tata guna lahan, maupun kondisi pasar komoditas.

Tabel 2. 3
Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Luas Lahan Jenis Tanaman (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit	18.554,02	19.954,47	21.138,72	22.503,43	42.336,51
Kelapa	1.485,35	1.460,20	1.411,32	1.441,32	1.189,57
Karet	17.986,70	17.825,19	17.117,49	16.347,49	9.685,35
Lada	3.904,24	6.080,70	5.051,55	4.023,05	1.066,55
Kakao	24,69	27,19	34,19	30,99	22,99
Aren	13,22	13,88	13,88	13,88	13,53

Sumber: Kabupaten Bangka Barat dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada Tabel di atas, komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan yang sangat tajam, dari 18.554,02 ha pada tahun 2020 menjadi 42.336,51 ha pada tahun 2024, mengindikasikan adanya ekspansi besar-besaran yang berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi namun sekaligus menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Sebaliknya, beberapa komoditas tradisional justru mengalami penurunan, seperti kelapa yang turun dari 1.485,35 ha menjadi 1.189,57 ha, karet dari 17.986,70 ha menjadi 9.685,35 ha, dan lada dari 3.904,24 ha menjadi hanya



1.066,55 ha pada periode yang sama. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh alih fungsi lahan ke komoditas yang lebih menguntungkan, terutama kelapa sawit, serta tantangan harga dan produktivitas. Sementara itu, kakao menunjukkan fluktuasi dengan tren sedikit menurun dari 24,69 ha menjadi 22,99 ha, dan aren relatif stabil di kisaran 13 ha. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi perkebunan di Kabupaten Bangka Barat menuju monokultur kelapa sawit, yang meskipun menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek, memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, keragaman komoditas, dan keseimbangan ekosistem daerah.

Selain komoditas perkebunan, subsektor tanaman pangan juga memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Salah satunya adalah padi, yang merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran vital dalam menjamin ketersediaan pangan di Indonesia. Dalam bentuk beras, padi menjadi makanan utama bagi mayoritas masyarakat, termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Mengingat perannya sebagai sumber utama kalori dan gizi, memastikan ketersediaan serta kemudahan akses terhadap beras menjadi aspek yang sangat krusial. Produksi padi yang mencukupi secara langsung mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi beras di tingkat lokal, sehingga turut memperkuat ketahanan pangan di tingkat provinsi.

Tabel 2. 4
Luas Panen Padi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024

No	Wilayah	Luas Panen (Hektare)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bangka	1.402,00	1.600,00	1.443,00	1.270,00	1.862,00
2	Kabupaten Belitung	406,00	293,00	332,00	294,00	317,00
3	Kabupaten Bangka Barat	1.989,00	2.386,00	763,00	657,00	1.948,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	99,00	122,00	112,00	112,00	121,00
5	Kabupaten Bangka Selatan	12.424,00	12.657,00	11.749,00	12.323,00	13.141,00
6	Kabupaten Belitung Timur	1.521,00	1.220,00	709,00	629,00	815,00
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-
	Kepulauan Bangka Belitung	17.841,00	18.278,00	15.108,00	15.285,00	18.204,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, luas panen padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Tahun 2020–2024. Kabupaten Bangka Selatan secara konsisten menjadi kontributor terbesar dengan luas panen tertinggi, meskipun mengalami penurunan dari 12.657 ha (2021) menjadi 10.134 ha (2024). Kabupaten Bangka Barat mengalami



penurunan drastis dari 2.386 ha pada 2021 menjadi hanya 1.948 ha pada 2024, setelah sempat turun tajam menjadi 657 ha pada 2023. Sebaliknya, Kabupaten Bangka menunjukkan tren positif, dengan peningkatan signifikan dari 1.402 ha (2020) menjadi 1.862 ha (2024). Secara total, luas panen padi di provinsi ini menurun dari 18.278 ha (2021) menjadi 18.204 ha pada 2024. Walaupun penurunan yang terjadi hanya 74 ha, namun tetap perlu menjadi perhatian serius dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan mendorong upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi lahan pertanian di wilayah-wilayah strategis.

Kabupaten Bangka Barat perlu menyusun pemetaan yang komprehensif terkait keberlanjutan komoditas padi, baik dari aspek rantai pasok maupun kapasitas produksi mandiri di tingkat daerah. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai potensi wilayah, mencakup ketersediaan lahan, kondisi infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya kemandirian pangan. Untuk memperkuat peran padi sebagai bahan pangan utama masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka penting untuk mengetahui distribusi luas panen padi menurut kabupaten/ kota.

Tabel 2. 5
Produksi Padi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020–2024

No	Wilayah	Produksi Padi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bangka	3.981,00	4.764,00	4.575,00	4.097,00	4.944,00
2	Kabupaten Belitung	876,00	697,00	807,00	701,00	700,00
3	Kabupaten Bangka Barat	4.358,00	6.464,00	2.153,00	1.957,00	4.220,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	365,00	370,00	310,00	395,00	486,00
5	Kabupaten Bangka Selatan	43.875,00	54.504,00	52.191,00	57.586,00	65.030,00
6	Kabupaten Belitung Timur	3.870,00	3.697,00	1.389,00	1.733,00	2.111,00
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-
	Kepulauan Bangka Belitung	57.324,00	70.496,00	61.425,00	66.469,00	77.490,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Produksi padi di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi cukup tajam selama periode 2020–2024. Pada Tahun 2020, produksi padi tercatat sebesar 4.358 ton dan mengalami lonjakan signifikan menjadi 6.464 ton pada 2021. Namun, pada dua tahun berikutnya terjadi penurunan drastis, masing-masing menjadi 2.153 ton pada 2022 dan 1.957 ton pada 2023. Tren ini kembali membaik pada tahun 2024 dengan produksi meningkat menjadi 4.220 ton. Pola naik-turun ini mencerminkan belum stabilnya sistem produksi padi di wilayah tersebut, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan luas panen, kondisi cuaca, ketersediaan sarana produksi, serta efektivitas



dukungan infrastruktur pertanian. Diperlukan upaya perencanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan produktivitas padi sebagai komoditas pangan strategis di Kabupaten Bangka Barat.

Produktivitas padi di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup nyata. Pada Tahun 2020, produktivitas tercatat sebesar 2,19 ton per hektare dan meningkat menjadi 2,71 ton per hektare pada 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Selanjutnya, angka produktivitas cenderung stagnan, yaitu 2,82 ton per hektare pada 2022 dan 2,98 ton per hektare pada 2023, sebelum akhirnya mengalami penurunan signifikan menjadi 2,17 ton per hektare pada 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, karena mencerminkan potensi penurunan efisiensi produksi lahan. Ketidakstabilan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan sarana produksi, perubahan iklim, atau gangguan eksternal lainnya. Upaya untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan menjadi kunci penting dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2. 6
Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020–2024

No	Wilayah	Produksi Padi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bangka	2,84	2,98	3,17	3,23	2,65
2	Kabupaten Belitung	2,16	2,38	2,43	2,38	2,21
3	Kabupaten Bangka Barat	2,19	2,71	2,82	2,98	2,17
4	Kabupaten Bangka Tengah	3,69	3,03	2,77	3,53	4,01
5	Kabupaten Bangka Selatan	3,53	4,31	4,44	4,67	4,95
6	Kabupaten Belitung Timur	2,54	3,03	1,96	2,76	2,59
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-
	Kepulauan Bangka Belitung	3,21	3,86	4,07	4,35	4,26

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Selain sektor pertanian, dinamika perkembangan sektor usaha non-pertanian juga menjadi indikator penting dalam menilai struktur ekonomi dan diversifikasi sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pergeseran sektor ekonomi masyarakat, perlu dianalisis proporsi jumlah usaha mikro non-pertanian selama lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2. 7
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian	%	29,42	38,76	39,07	39,8	42,44

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi usaha mikro non-pertanian di Kabupaten Bangka Barat mengalami tren peningkatan yang konsisten dari 29,42% pada tahun 2020 menjadi 42,44% pada tahun 2024. Kenaikan lebih dari 13 poin persentase ini mengindikasikan pergeseran struktur ekonomi mikro masyarakat dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya peluang di bidang perdagangan, jasa, dan industri rumahan, serta menandakan menurunnya ketergantungan terhadap sektor pertanian. Dukungan terhadap tren ini kemungkinan diperkuat oleh akses teknologi, pelatihan usaha, dan kebijakan pro-UMKM. Meski demikian, pertumbuhan jumlah usaha non-pertanian perlu diiringi peningkatan kualitas dan daya saing. Peran pemerintah daerah penting dalam memberikan pendampingan, akses permodalan, dan penguatan pasar agar kontribusi UMKM non-pertanian terhadap ekonomi lokal semakin optimal.

B. Potensi Perikanan

Subsektor perikanan, khususnya perikanan laut, memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Bangka Barat, mengingat letak geografis Pulau Bangka yang dikelilingi lautan dengan potensi sumber daya laut yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, dan sirip ikan menjadi andalan dalam aktivitas perikanan tangkap. Di samping itu, perikanan budidaya di wilayah pesisir juga menyimpan potensi besar, meskipun saat ini belum tergarap secara optimal oleh masyarakat. Meningkatnya jumlah nelayan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor ini cukup diminati sebagai mata pencaharian. Namun demikian, agar sumber daya alam perikanan dan tenaga kerja lokal dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat mencakup tiga subsektor utama, yaitu perikanan tangkap, budidaya air tawar, dan budidaya air laut. Dalam periode 2020 hingga 2024, ketiga subsektor ini menunjukkan dinamika pertumbuhan yang bervariasi. Perikanan tangkap mengalami



pertumbuhan yang cukup stabil dari 19.341,90 ton pada tahun 2020 menjadi 41.355,35 ton pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunannya mencapai sekitar 20,9 persen. Sementara itu, budidaya air tawar juga mengalami peningkatan produksi, dari 105,81 ton pada tahun 2020 menjadi 184,23 ton pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 15,0 persen.

Berbeda dengan dua subsektor lainnya, produksi budidaya air laut mengalami fluktuasi cukup tajam selama lima tahun terakhir. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1.206,18 ton, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 640,56 ton pada 2023, sebelum kembali naik menjadi 1.051,71 ton pada tahun 2024. Ketidakstabilan ini antara lain disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem, keterbatasan akses bibit unggul, serta gangguan aktivitas pertambangan laut yang berdampak pada ekosistem perairan budidaya.

Tabel 2. 8
Jumlah Produksi Perikanan (Ton) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan tangkap	19.341,90	28.204,33	33.016,58	39.185,07	41.435,35
2	Perikanan budidaya air tawar	105,81	95,09	113,94	139,15	184,23
3	Perikanan budidaya air laut	823,31	1.206,18	1.115,34	640,56	1.051,714

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat, 2025

Peningkatan jumlah produksi perikanan juga mendorong naiknya nilai produksi selama periode 2020-2024. Nilai produksi dari subsektor perikanan tangkap mengalami lonjakan signifikan, dari Rp632,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.140,66 miliar pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024, nilai ini mengalami koreksi cukup tajam menjadi Rp1.258,35 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika harga pasar, volume tangkapan, serta efisiensi distribusi hasil perikanan.

Pada subsektor budidaya air tawar, nilai produksi meningkat secara konsisten dari Rp2,75 miliar di tahun 2020 menjadi Rp5,23 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari inovasi teknik budidaya serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi air tawar secara produktif. Sementara itu, nilai produksi budidaya air laut menunjukkan pola yang tidak stabil. Setelah mencapai Rp66,41 miliar pada tahun 2021, nilainya menurun menjadi Rp29,74 miliar di tahun 2023, lalu kembali melonjak menjadi Rp74,99 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan adanya pemulihan produksi dan membaiknya kondisi lingkungan budidaya, namun



tetap mencerminkan risiko tinggi terhadap ketergantungan pada faktor eksternal.

Tabel 2. 9
Nilai Produksi Perikanan (Miliar Rupiah) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	NilaiProduksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Tangkap	632,9	961,5	1.502,98	2.140,66	1.258,35
2	Budidaya Air Tawar	2,75	2,49	3,14	3,75	5,23
3	Budidaya Air Laut	30,53	66,41	57,73	29,74	74,99

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat, 2025

C. Potensi Pariwisata

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata diartikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mengunjungi suatu lokasi tertentu. Aktivitas ini dapat bertujuan untuk rekreasi, pengembangan diri, maupun untuk mengenal dan mempelajari keunikan daya tarik wisata yang ada di lokasi tersebut, dalam kurun waktu tertentu dan bersifat sementara. Guna mendukung aktivitas pariwisata di Kabupaten Bangka Barat, beberapa indikator dapat menjadi acuan guna menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam sektor pariwisata. Berikut merupakan indikator sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat, mulai dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 10
Indikator Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

N o	Indikator	Satu an	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	67.660	87.562	319.611	294.067	337.448
2	Jumlah Hotel & Penginapan	Unit	33	31	41	58	58
3	Jumlah Wisatawan yang Menginap	Orang	9.547	10.844	28.216	23.014	22.653
4	PAD sektor Pariwisata	Rp	2.607.616.874	2.715.251.535	3.627.183.300	3.591.673.737	3.061.824.417
5	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,29	0,50	3,15	5,95	3,95

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan data pada Tabel di atas, sektor pariwisata Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup dinamis selama periode 2020-2024. Jumlah kunjungan wisata meningkat signifikan dari 67.660 orang pada tahun 2020 menjadi 337.448 orang pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Fasilitas akomodasi juga mengalami peningkatan dari 33 unit hotel dan penginapan pada tahun 2020 menjadi 58 unit pada tahun 2024, yang selaras dengan kenaikan jumlah wisatawan yang menginap dari 9.547 orang menjadi 22.653 orang dalam periode yang sama. Dampak positif dari pertumbuhan ini terlihat



pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, yang naik dari Rp 2,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 3,06 miliar pada tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga mengalami lonjakan signifikan, dari hanya 0,29% pada tahun 2020 menjadi 5,95% pada puncaknya di tahun 2023, meskipun sedikit menurun ke 3,95% pada tahun 2024.

Kabupaten Bangka Barat sendiri memiliki kekayaan potensi pariwisata yang beragam, mencakup situs geologi (geosite), situs non-geologi (budaya dan hayati). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, guna menjaga identitas lokal serta melestarikan warisan sejarah dan tradisi khas daerah. Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, memiliki daya tarik tersendiri di setiap kecamatannya. Berdasarkan data dan pemetaan dalam dokumen warisan geologi (*geoheritage*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, berikut adalah lokasi-lokasi yang dapat menjadi potensi pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 11
Potensi Wisata di Kabupaten Bangka Barat

No.	Nama Kecamatan	Nama Lokasi	Jenis Potensi
1	Mentok	Air Terjun Bukit Tani	Situs Geosite
		Pantai Batu Rakit	Situs Geosite
		Pantai Teluk Inggris	Situs Geosite
		Batu Berani	Situs Geosite
		Batu Balai	Situs Geosite
		Bukit Kukus	Situs Geosite
		Pantai Tanjung Ular	Situs Geosite
		Tanjung Pandan	Situs Geosite
		Air Biat	Situs Geosite
		Pantai Prigi Batu	Situs Geosite
		Bukit Menumbing	Situs Geosite
		Der Batoe Balei	Situs Geosite
		Pantai Tanjung Kalian	Situs Geosite
		Bukit Nibung	Situs Geosite
		Batu Licin Ranggalang	Situs Geosite
		Pesanggrahan Menumbing	Situs Budaya
		Rumah Mayor China	Situs Budaya
		Kelenteng Kong Fuk Miao	Situs Budaya
		Masjid Jami Mentok	Situs Budaya
		Museum Timah Indonesia	Situs Budaya
2	Simpang Teritip	Hutan Rambat Menduyung	Situs Hayati
		Hutan Nyatoh	Situs Hayati
		Bukit Penyabung	Situs Geosite
		Air Panas Kundi	Situs Geosite
		Pantai Kundi	Situs Geosite
		Pantai Air Nyatoh	Situs Geosite
		Pantai Seribu Bagan	Situs Geosite
		Pantai Tanjung Mundung	Situs Geosite



No.	Nama Kecamatan	Nama Lokasi	Jenis Potensi
3	Kelapa	Batu Betapa	Situs Geosite
		Bukit Mentulut	Situs Geosite
		Gunung Galang	Situs Geosite
		Pantai Pangkal Perahu	Situs Geosite
		Air Panas Desa Beruas	Situs Geosite
		Umpal Watu	Situs Geosite
4	Jebus	Gunung Galang	Situs Geosite
		Pantai Bembang	Situs Geosite
		Bukit Telaga 7	Situs Geosite
		Pantai Jerangkat	Situs Geosite
		Diabas Penyabung	Situs Geosite
		Pulau Tenung	Situs Geosite
5	Parittiga	Pulau Kijang	Situs Geosite
		Batu Belimbing	Situs Geosite
		Pantai Siangau	Situs Geosite
		Pantai Bukit Pala	Situs Geosite
		Pantai Penganak	Situs Geosite
		Pantai Boom	Situs Geosite
6	Tempilang	Batu Memohon	Situs Geosite
		Tanjung Ru	Situs Geosite
		Pulau Semumbang	Situs Geosite
		Gunung Pandan	Situs Geosite
		Benteng Kota	Situs Budaya
		Pantai Basun	Situs Geosite
		Pantai Pasir Kuning	Situs Geosite
		Tanjung Resang	Situs Geosite

Sumber: Dokumen Warisan Geoheritage Kabupaten Bangka Barat, 2020

Berdasarkan hasil identifikasi potensi wisata di Kabupaten Bangka Barat, dapat disimpulkan bahwa potensi utama wilayah ini terletak pada kekayaan geosite yang tersebar merata di seluruh kecamatan dengan proporsi mencapai 85% dari total jenis potensi wisata yang teridentifikasi. Keberadaan bentang alam yang unik seperti air terjun, pantai, bukit, batuan, dan formasi geologis lainnya menjadikan daerah ini memiliki nilai strategis tinggi untuk dikembangkan sebagai Geopark Nasional bahkan menuju Geopark Global UNESCO, khususnya apabila dikembangkan dalam bentuk kawasan terpadu lintas kecamatan.

Selain potensi geologi, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki kekayaan budaya yang terkonsentrasi di Kecamatan Mentok dan sebagian kecil di Tempilang. Lokasi-lokasi seperti Rumah Mayor China, Museum Timah Indonesia, dan Masjid Jami Mentok menjadi penanda penting warisan sejarah kolonial, industri pertimahan, dan akulturasi budaya Tionghoa. Potensi ini sangat ideal untuk dikembangkan dalam bentuk wisata sejarah dan heritage, memperkuat identitas lokal sekaligus menambah daya tarik wisata edukatif. Di sisi lain, potensi hayati meskipun jumlahnya terbatas, tetap memiliki nilai penting, khususnya di Simpang Teritip dengan dua lokasi utama yaitu Hutan Rambat Menduyung dan Hutan Nyatoh. Kedua kawasan ini memiliki



karakteristik ekosistem yang mendukung pengembangan ekowisata dan wisata edukasi kehutanan, termasuk pelestarian spesies lokal dan penyadartahuan lingkungan.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa strategi pengembangan wisata yang dapat diterapkan di Kabupaten Bangka Barat, meliputi:

1. Pengembangan kawasan geopark yang mengintegrasikan seluruh geosite lintas kecamatan ke dalam satu sistem manajemen terpadu.
2. Mendorong integrasi antara kekayaan budaya dan geologi, terutama di Kecamatan Mentok, melalui paket wisata tematik “Geoheritage + Budaya”.
3. Memanfaatkan potensi hayati di Simpang Teritip sebagai basis pengembangan ekowisata berbasis hutan lindung.
4. Perlunya digitalisasi dan *branding* destinasi wisata, seperti pengembangan peta digital interaktif dan narasi branding “Geopark Bangka Barat” untuk menarik wisatawan.
5. Perlu ditopang oleh pelibatan/peran aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata melalui penyediaan homestay, pelatihan pemandu wisata, dan promosi kuliner tradisional, guna menciptakan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar.

Pada intinya, pertumbuhan indikator pariwisata tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan promosi yang tepat dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Integrasi antara potensi geoheritage dengan pengembangan fasilitas pendukung seperti hotel, transportasi, dan atraksi wisata lainnya menjadi kunci untuk mendorong kunjungan wisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi potensi wisata di setiap kecamatan tidak hanya akan memperkuat identitas lokal, tetapi juga memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap sektor-sektor lain seperti UMKM, kuliner, dan transportasi.

D. Potensi Energi

[1] Listrik

Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat berperan penting sebagai penggerak utama dalam mendukung berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menampilkan gambaran kondisi energi dan sumber daya mineral dalam konteks pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Dalam



struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Barat, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi yang cukup besar, menempati posisi keempat setelah sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan. Komoditas utama dari sektor pertambangan yang banyak dieksploitasi di wilayah ini adalah timah, yang pengelolaannya dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat lokal dan pihak swasta dalam skala besar.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/ kota dalam bidang energi dan sumber daya mineral terbatas pada energi baru terbarukan, khususnya dalam hal penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi yang berada dalam wilayah administratifnya. Hingga saat ini, Kabupaten Bangka Barat belum memiliki sumber panas bumi yang dikelola atau dimanfaatkan. Kendati demikian, isu energi dan sumber daya mineral tetap menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, termasuk terkait ketersediaan dan pemanfaatan energi listrik. Saat ini, jaringan listrik di Kabupaten Bangka Barat telah mencakup seluruh wilayah pedesaan atau mencapai cakupan 100 persen.

Tabel 2. 12
Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	RumahTangga	Pelanggan	60.880	63.483	65.770	68.163	70.579
2	Industri	Pelanggan	59	78	109	113	124
3	Dinas/Instansi/Gudang	Pelanggan	456	470	489	503	516
4	BadanSosial	Pelanggan	1.503	1.587	1.651	1.656	1.769
5	PeneranganJam	Pelanggan	96	99	120	190	336
6	Bisnis	Pelanggan	2.637	2.936	3.339	3.776	4.435
7	Layanan Khusus	Pelanggan	95	91	90	92	93
Jumlah			63.576	65.726	71.568	74.493	77.852

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan yang konsisten dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 63.576 pelanggan, dan meningkat menjadi 77.852 pelanggan pada Tahun 2024. Kategori pelanggan terbesar berasal dari rumah tangga, yang tumbuh dari 60.880 menjadi 70.579 pelanggan dalam lima tahun. Kenaikan signifikan juga terlihat pada kategori bisnis, yang naik dari 2.637 pada 2020 menjadi 4.435 pada 2024, mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal. Pelanggan industri mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat, dari 59 menjadi 124 pelanggan. Seluruh kategori, termasuk



dinas/instansi, badan sosial, penerangan jalan, dan layanan khusus, menunjukkan tren kenaikan, yang mengindikasikan semakin luasnya jangkauan layanan listrik dan meningkatnya kebutuhan energi seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Indikator lainnya adalah mengenai jumlah serta target konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Bangka Barat, yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 633,21 kWh dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 922,94 kWh pada tahun 2023. Kenaikan sebesar hampir 46% dalam empat tahun mencerminkan pertumbuhan kebutuhan energi masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta meluasnya akses terhadap jaringan listrik. Peningkatan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai indikator pertumbuhan kesejahteraan, karena konsumsi listrik umumnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup, akses terhadap teknologi, dan aktivitas produktif di sektor rumah tangga maupun usaha. Namun demikian, tren ini juga menuntut perhatian pada aspek keberlanjutan pasokan energi dan efisiensi pemanfaatannya, terutama jika pertumbuhan konsumsi tidak diiringi oleh pengembangan energi terbarukan atau kebijakan konservasi energi.

Tabel 2. 13
Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2023

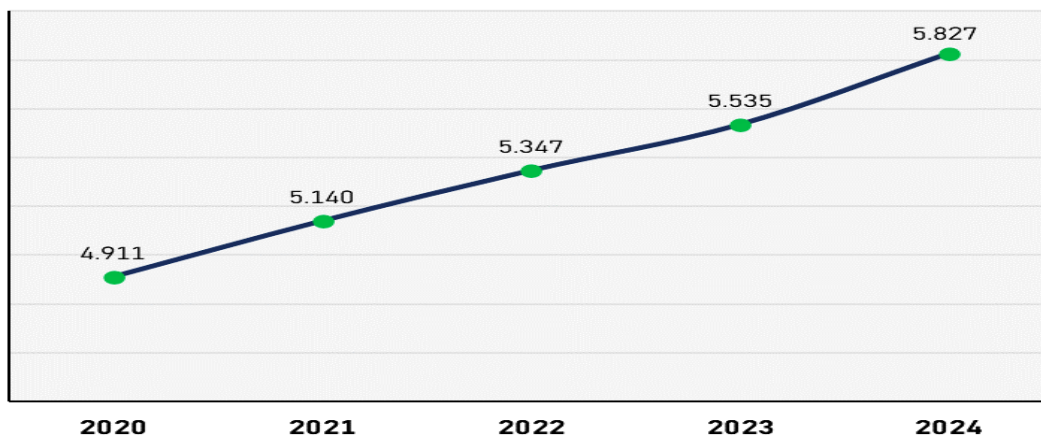
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	633,21	720,49	797,14	922,94

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

[2] Air

Kabupaten Bangka Barat memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bernama PDAM Tirta Sejiran Setason yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011. PDAM ini bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pendistribusian air bersih serta air minum bagi masyarakat. Saat ini, cakupan pelayanan PDAM Tirta Sejiran Setason masih terbatas pada empat wilayah kecamatan, yaitu Tempilang, Mentok, Jebus, dan Parittiga, masing-masing dilengkapi dengan Instalasi Kota Kecamatan (IKK) sebagai sarana pendukung operasional distribusi air.

Gambar 2. 2
Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Grafik di atas, jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 4.911 pelanggan, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 5.827 pelanggan pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya perluasan layanan air bersih oleh PDAM Tirta Sejiran Setason, meskipun wilayah pelayanannya masih terbatas pada tiga kecamatan. Kenaikan jumlah pelanggan secara bertahap juga mengindikasikan meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih serta membaiknya infrastruktur dan manajemen pelayanan air minum di Kabupaten Bangka Barat. Secara lebih rinci, jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan (m³) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 14
Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
1	Kelapa	-	-	-
2	Tempilang	269	38.614	317.978.052
3	Mentok	4.868	1.021.046	7.823.268.752
4	Simpang Teritip	-	-	-
5	Jebus	163	12.773	108.180.913
6	Parittiga	395	80.682	641.353.644
Kabupaten Bangka Barat		5.827	1.132.077	8.890.781.361

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, total pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka Barat mencapai 5.827 pelanggan dengan volume air yang disalurkan sebesar 1.132.077 m³ dan nilai pendapatan mencapai



Rp8,89 miliar. Kecamatan Mentok mendominasi kontribusi dengan 4.868 pelanggan, suplai air sebesar 1.021.046 m³, dan pendapatan tertinggi sebesar Rp7,82 miliar. Disusul oleh Kecamatan Parittiga (395 pelanggan) dan Tempilang (269 pelanggan), sementara Kecamatan Jebus memiliki 163 pelanggan. Kecamatan Kelapa dan Simpang Teritip belum tercatat menerima layanan PDAM. Data ini menunjukkan bahwa distribusi layanan PDAM masih terfokus di Kecamatan Mentok, dan perluasan cakupan pelayanan ke kecamatan lain, khususnya Kelapa dan Simpang Teritip, menjadi penting untuk mendukung pemerataan akses air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2. 15
Potensi Kulong Sebagai Sumber Air Baku PDAM di Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	NamaKulong	Luas (m ²)	Kapasitas	Keterangan
1	Mentok	Kulong Menjelang 1	11,634	20lt/detik	Sudah Dimanfaatkan
		Kulong Menjelang 11	12,057	20 lt/detik	Sudah Dimanfaatkan
		Kulong Argotirto	20	30 lt/detik	Sudah Dimanfaatkan
		Kulong Terabek	32,684	20 lt/detik	Sudah Dimanfaatkan
		Kulong Bujang TJ Ular	15,133	20 lt/detik	Belum Dimanfaatkan
		Kulong Retensi Menumbing	25	50 lt/detik	Belum Dimanfaatkan
2	Simpang Teritip	Lubuk Kelubi Peradong	50,728	20 lt/detik	Belum Dimanfaatkan
3	Jebus	Kulong Kerang	10	10 lt/detik	Belum Dimanfaatkan
		Kulong Angga Sungai Buluh	15,753	20 lt/detik	Belum Dimanfaatkan
4	Parittiga	Kulong Sekar Biru	22,953	20 lt/detik	Sudah Dimanfaatkan
5	Tempilang	Kulong Alang	22,153	20 lt/detik	Sudah Dimanfaatkan
		Kulong Angga Benteng Kota	20	20 lt/detik	Belum Dimanfaatkan

Sumber: PDAM Kabupaten Bangka Barat, 2021

Selain itu, di Kabupaten Bangka Barat memiliki sejumlah kulong yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (tercantum pada Tabel di atas). Kulong sendiri merupakan bekas lubang galian timah yang dapat dioptimalkan sebagai cadangan air. Berdasarkan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kulong yang telah berusia lebih dari 10 tahun dapat digunakan sebagai sumber air baku. Di Kecamatan Mentok, beberapa kulong telah dimanfaatkan, sementara di kecamatan lain masih terdapat kulong yang belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kulong sebagai sumber air baku di Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga peluang pemanfaatannya masih terbuka untuk mendukung penyediaan air minum bagi masyarakat.



Tabel 2. 16
Kapasitas Air Baku di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	0,07	0,13	0,15	0,13	0,185

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Indikator yang ditinjau selanjutnya yaitu kapasitas air baku yang menunjukkan tren peningkatan secara bertahap selama lima tahun terakhir, meskipun diselingi oleh sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, kapasitas air baku masih berada pada angka 0,07 m³/detik. Nilai ini kemudian meningkat signifikan menjadi 0,13 m³/detik pada 2021, dan terus bertambah menjadi 0,15 m³/detik pada 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali ke angka 0,13 m³/detik, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor teknis seperti penurunan debit sumber air, gangguan operasional, atau belum optimalnya pengelolaan infrastruktur penyediaan air baku. Meski demikian, pada tahun 2024 tercatat peningkatan kapasitas tertinggi dalam periode ini, yakni sebesar 0,185 m³/detik. Peningkatan kapasitas air baku ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan dasar dan mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Tren positif ini perlu terus dijaga dengan memastikan keberlanjutan pasokan, penguatan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan batas maksimal kemampuan lingkungan dalam menopang pertumbuhan populasi, di mana ketika jumlah populasi melebihi kapasitas tersebut, lingkungan tidak lagi mampu menyediakan sarana, sumber daya, dan layanan yang memadai. Secara umum, daya dukung lingkungan dapat dimaknai sebagai kapasitas suatu wilayah untuk menghasilkan produk atau layanan dari sumber daya alam yang terbatas, dengan tetap menjaga kelestarian kualitas dan kuantitasnya. Di Kabupaten Bangka Barat, evaluasi daya dukung lingkungan dilakukan melalui sejumlah komponen utama, yakni daya dukung demografi, pangan, air, fungsi lindung, permukiman, serta daya tampung wilayah secara keseluruhan.

Selain itu, Daya dukung demografis merujuk pada kemampuan suatu wilayah dalam menampung dan mendistribusikan penduduk secara proporsional. Aspek ini sangat terkait dengan ketersediaan dan karakteristik lahan, yang merupakan bagian dari lanskap fisik mencakup elemen-elemen seperti iklim, topografi, hidrologi, serta vegetasi alami. Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi potensi pemanfaatan lahan. Berdasarkan



proyeksi jumlah penduduk hingga akhir periode perencanaan, daya dukung demografis tertinggi tercatat berada di Kecamatan Simpang Teritip, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Mentok dan Parittiga.

Tabel 2. 17
Daya Dukung Demografis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2029

No	Kecamatan	DDL Demografis							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kelapa	0,162	0,159	0,155	0,152	0,149	0,146	0,143	0,140
2	Tempilang	1,585	1,554	1,522	1,492	1,462	1,433	1,404	1,376
3	Mentok	0,933	0,914	0,896	0,878	0,860	0,843	0,826	0,810
4	Simpang Teritip	2,022	1,982	1,942	1,903	1,865	1,827	1,791	1,755
5	Jebus	1,517	1,487	1,457	1,428	1,399	1,371	1,344	1,317
6	Parittiga	0,976	0,956	0,937	0,918	0,900	0,882	0,864	0,847
Kabupaten Bangka Barat		1,375	1,347	1,320	1,294	1,268	1,242	1,218	1,193

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Dalam hal daya dukung pangan, hasil analisis yang membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa wilayah ini diproyeksikan belum mampu mencapai kondisi swasembada pangan pada periode akhir perencanaan tahun 2025 hingga 2029. Artinya, jumlah penduduk yang ada telah melampaui kapasitas optimal dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan (beras) masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai daya dukung lahan (Q) tercatat kurang dari 1, yang menandakan bahwa ketersediaan lahan untuk produksi pangan tidak mencukupi. Tabel proyeksi menunjukkan adanya tren peningkatan kebutuhan beras setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal ini, Kabupaten Bangka Barat perlu mendorong peningkatan produksi beras secara signifikan, baik melalui perluasan areal tanam maupun peningkatan produktivitas lahan, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Tabel 2. 18
Kebutuhan Beras di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	223.051	227.656	232.354	237.150	242.045
2	Indeks Konsumsi Beras (kg/kap/th)	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89
3	Kebutuhan Beras (ton)	27.856,84	28.431,96	29.018,69	29.617,66	30.229,00
4	Kebutuhan padi/GKG (ton)	43.635,40	44.536,27	45.455,34	46.393,58	47.351,19
5	Kebutuhan Luas Panen (Ha)	5.387,09	5.498,31	5.611,77	5.727,60	5.845,83

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bangka Barat belum mampu menyesuaikan diri dengan laju pertumbuhan penduduk, yang mengakibatkan



terjadinya defisit beras secara terus-menerus selama periode 2025 hingga 2029. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan produksi beras atau optimalisasi pengelolaan lahan secara lebih efisien guna mencukupi kebutuhan pangan yang terus mengalami peningkatan.

Tabel 2. 19
Produktivitas Lahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	223.051	227.656	232.354	237.150	242.045
2	Produksi Beras (Ton)	4.287,81	4.287,81	4.287,81	4.287,81	4.287,81
3	Konsumsi Fisik Beras Minimum/Tahun (ton)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4	Tingkat Produktivitas Lahan Sawah/Supply beras (ton/orang/tahun)	0,0192	0,0188	0,0185	0,0181	0,0177
Keterangan		Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Pada periode 2025 hingga 2029, produksi beras di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tingkat kestabilan yang tinggi, ditandai dengan tidak adanya perubahan signifikan pada luas baku sawah maupun volume produksinya. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga efisiensi dan kesinambungan sistem produksi beras. Meskipun demikian, perlu diperhitungkan pula faktor lain yang memengaruhi ketahanan pangan, seperti tingkat produktivitas lahan sawah dan peningkatan kebutuhan beras seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel 2. 20
Produksi Beras di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Luas Baku Sawah (Ha)	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
2	Produksi Padi/GKG (Ton)	6.716,50	6.716,50	6.716,50	6.716,50	6.716,50
3	Indeks Konversi Beras	0,6384	0,6384	0,6384	0,6384	0,6384
4	Produksi Beras (Ton)	4.287,81	4.287,81	4.287,81	4.287,81	4.287,81

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Kemudian mengacu pada tabel di bawah, terlihat bahwa daya dukung lahan sawah di Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan secara konsisten selama periode 2025 hingga 2029. Sementara itu, kebutuhan akan lahan sawah tercatat tetap stabil setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lahan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan lahan sawah yang diperlukan untuk mendukung produksi pangan selama periode tersebut.



Tabel 2. 21
Daya Dukung Lahan Sawah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Luas Lahan yang Tersedia (x)	0,01906	0,01867	0,01829	0,01792	0,01756
2	Luas Lahan yang Diperlukan(k)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
3	Daya Dukung Lahan (Q)	0,1003	0,0983	0,0963	0,0943	0,0924
Keterangan		Q < 1	Q < 1	Q < 1	Q < 1	Q < 1

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Selanjutnya, daya dukung air merujuk pada kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan sumber daya air yang memadai untuk mencukupi kebutuhan penduduk dan mendukung aktivitas ekonomi setempat. Dalam konteks pembangunan daerah, daya dukung air memegang peranan krusial karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, pertumbuhan sektor ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan dan praktik yang mendorong konservasi air, pengelolaan limbah yang efektif, serta peningkatan infrastruktur air bersih menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan air di masa mendatang.

Dokumen ini memfokuskan pembahasan pada koefisien limpasan tertimbang yang dihitung berdasarkan tutupan lahan, serta volume ketersediaan air di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, dibahas pula tingkat kebutuhan air sebagai bagian dari analisis pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Berikut disajikan pada tabel-tabel di bawah ini pembahasan ketiga fokus tersebut.

Tabel 2. 22
Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Penggunaan Lahan	Luas (Ai)	Koefisien (Ci)	Ai x Ci
Tidak ada data	1.108,1		0
Hutan Lahan Kering Primer	476,9	0,18	85,83834558
Hutan Lahan Kering Sekunder/Bebas Tebangan	9.885,4	0,18	1.779,37027
Hutan Mangrove Primer	10.648,2	0,18	1.916,667921
Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan	10.984,1	0,18	1.977,140799
Hutan Rawa Primer	103,6	0,18	18,6462592
Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan	3.306,0	0,18	595,0778816
Perkebunan/Kebun	55.338,9	0,2	11.067,77688
Permukiman/Lahan Terbangun	9.137,2	0,7	6.396,035137
Pertambangan/Tambang	24.233,7	0,7	16.963,5638
Pertanian Lahan Kering	6.101,1	0,3	1.830,331856
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	120.482,8	0,3	36.144,85086
Rawa	187,4	0,2	37,47056428
Sawah/Persawahan	1.439,3	0,2	287,8678124
Semak Belukar	22.220,3	0,07	1.555,422951
Semak Belukar Rawa	9.545,3	0,07	668,1697609
Tambak	199,7	0,2	39,93892759



Penggunaan Lahan	Luas (Ai)	Koefisien (Ci)	Ai x Ci
Tanah Terbuka	1.934,6	0,3	580,3890966
Tubuh Air	1.082,4	0,1	108,2438007
Jumlah	288.415,0		82.052,8
Koefisien Tertimbang		0,28	
Curah Hujan Tahunan		2.508,5	
Ketersediaan Air		2.058.294.561,22	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai koefisien limpasan tertimbang di Kabupaten Bangka Barat mencapai 0,28. Total ketersediaan air tahunan di wilayah ini tercatat melebihi 2 miliar meter kubik. Temuan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang hati-hati dan terencana untuk menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan keberlanjutan pemanfaatannya bagi berbagai kebutuhan.

Tabel 2. 23
Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Bangka Barat

Potensi Ketersediaan Air Tahun 2025-2029	Debit (m ³ /tahun)
Potensi Ketersediaan air berdasarkan hasil perhitungan koefisien limpasan (SA)	2.058.294.561
Potensi ketersediaan air baku	6.473.548.527
Total	8.531.843.088

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Kabupaten Bangka Barat diperkirakan memiliki cadangan air yang melimpah selama periode 2025 hingga 2029. Ketersediaan ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun sektor pertanian dan industri. Selain itu, pasokan air tersebut juga mencukupi untuk berbagai kebutuhan lain sepanjang periode tersebut.

Tabel 2. 24
Kebutuhan Air Kabupaten di Bangka Barat Tahun 2025-2029

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Air (liter/org/hari)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)
Jumlah Penduduk tahun 2025	222.928	Orang	120	26.751.359
Jumlah Penduduk tahun 2026	227.487	Orang	120	27.298.477
Jumlah Penduduk tahun 2027	232.140	Orang	120	27.856.786
Jumlah Penduduk tahun 2028	236.888	Orang	120	28.426.513
Jumlah Penduduk tahun 2029	241.732	Orang	120	29.007.892
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Kebun	54.703,0	Ha	0,231	12.636,39
Sawah	1.422,8	Ha	0,231	328,67
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	1.711	ekor	40	68.440
Kambing	496	ekor	5	2.480
Babi	521	ekor	6	3.126
Unggas	972.793	ekor	0,6	583.676



Total Kebutuhan Air Kabupaten di Bangka Barat Tahun 2025-2029	
Total Kebutuhan Air Tahun 2025	27.422.045,44
Total Kebutuhan Air Tahun 2026	27.969.164,22
Total Kebutuhan Air Tahun 2027	28.527.472,68
Total Kebutuhan Air Tahun 2028	29.097.199,67
Total Kebutuhan Air Tahun 2029	29.678.578,71

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Kebutuhan total air di Kabupaten Bangka Barat untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian dan peternakan sebesar 27.422.045,44 m³/ tahun pada Tahun 2025, pada Tahun 2026 sebesar 27.969.164,22 m³/ tahun, pada Tahun 2027 sebesar 28.527.472,68 m³/ tahun, pada Tahun 2028 sebesar 29.097.199,67 m³/ tahun, serta Tahun 2029 sebesar 29.678.578,71 m³/ tahun. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2025 hingga 2029 lebih kecil dari ketersediaan air Tahun 2025 hingga 2029 (8.531.843.088 m³/ tahun).

Tabel 2. 25

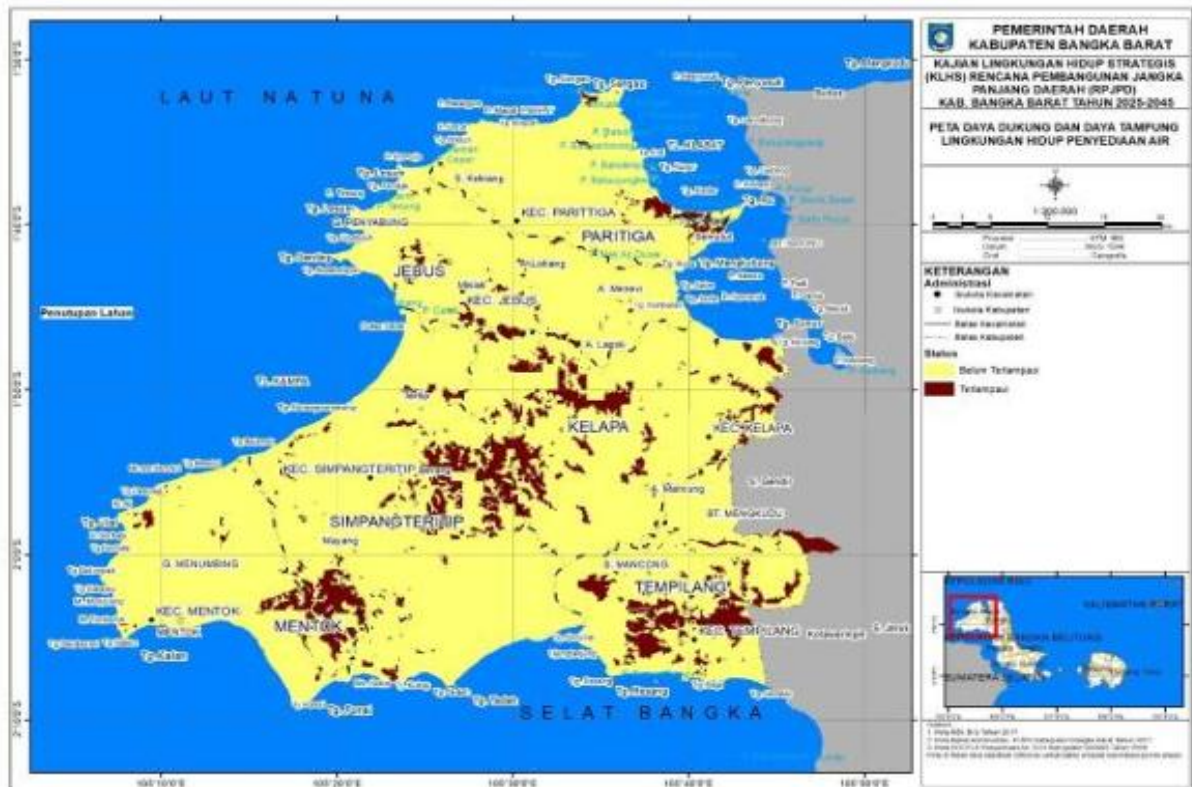
Persentase Luas Status Daya Dukung Penyediaan Air Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Persentase Luas Status Air Terhadap Kecamatan		
	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
Jebus	96,09	3,91	100,00
Kelapa	85,75	14,25	100,00
Mentok	94,12	5,88	100,00
Parittiga	95,49	4,51	100,00
Simpang Teritip	90,00	10,00	100,00
Tempilang	80,96	19,04	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Secara merinci, daya dukung air yang sebelumnya menunjukkan kondisi surplus pada tingkat kabupaten selama periode 2025-2029, ternyata belum sepenuhnya merata jika dianalisis berdasarkan tingkat kecamatan. Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam persentase luas wilayah yang daya dukung penyediaan airnya telah terlampaui di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Jebus, Mentok, dan Parittiga menunjukkan kondisi relatif aman, dengan lebih dari 94% luas wilayahnya masih dalam status "belum terlampaui", yang berarti ketersediaan air di wilayah tersebut masih mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan aktual. Sebaliknya, Kecamatan Tempilang mencatatkan kondisi paling mengkhawatirkan, di mana 19,04% wilayahnya telah mengalami tekanan daya dukung air, diikuti oleh Kelapa (14,25%) dan Simpang Teritip (10%).

Gambar 2. 3
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Bangka Barat



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara agregat Kabupaten Bangka Barat berada dalam kondisi surplus air, terdapat kantong-kantong wilayah di tingkat kecamatan yang telah menunjukkan gejala tekanan terhadap daya dukung penyediaan air. Tekanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan tata guna lahan, atau infrastruktur penyediaan air bersih yang belum merata. Dengan demikian, strategi pembangunan wilayah ke depan perlu memperhatikan dimensi spasial dalam pengelolaan sumber daya air, tidak hanya berdasarkan data makro kabupaten. Kecamatan-kecamatan seperti Tempilang, Kelapa, dan Simpang Teritip harus menjadi prioritas intervensi, baik melalui penguatan sistem penyediaan air bersih, peningkatan efisiensi penggunaan air, maupun konservasi daerah tangkapan air. Pendekatan ini akan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dan keadilan akses air antar wilayah dalam jangka panjang.

Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Bangka Barat dihitung berdasarkan rasio antara luas lahan yang memiliki fungsi lindung dan koefisien lindung terhadap total luas wilayah. Hasil perhitungan menunjukkan



bahwa daya dukung fungsi lindung Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 0,46, yang menempatkannya dalam kategori sedang. Artinya, Kabupaten Bangka Barat ini memiliki kapasitas yang cukup untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui fungsi lindung lahannya, meskipun masih perlu upaya peningkatan.

Tabel 2. 26
Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Bangka Barat

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Koefisien Lindung	Daya Dukung Lindung
Tidak ada data	1.095,4		0,00
Hutan Lahan Kering Primer	471,4	1	471,40
Hutan Lahan Kering Sekunder/Bebas Tebangan	9.771,8	0,68	6.644,82
Hutan Mangrove Primer	10.525,8	1	10.525,80
Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan	10.857,9	0,68	7.383,37
Hutan Rawa Primer	102,4	1	102,40
Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan	3.268,0	0,8	2.614,40
Perkebunan/Kebun	54.703,0	0,54	29.539,62
Permukiman/Lahan Terbangun	9.032,2	0,18	1.625,80
Pertambangan/Tambang	23.955,2	0,18	4.311,94
Pertanian Lahan Kering	6.031,0	0,46	2.774,26
Pertanian Lahan Kering Campur Semak Rawa	119.098,4	0,46	54.785,26
Sawah/Persawahan	185,2	0,98	181,50
Semak Belukar	1.422,8	0,46	654,49
Semak Belukar Rawa	21.965,0	0,21	4.612,65
Tambak	9.435,6	0,34	3.208,10
Tanah Terbuka	197,4	0,21	41,45
Tubuh Air	1.912,4	0,01	19,12
	1.070,0	0,98	1.048,60
Jumlah	285.100,9		130.544,99
Daya Dukung Lindung			0,46

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Dalam hal daya dukung permukiman dan daya tampung wilayah, konsep daya tampung diukur sebagai kebalikan dari kepadatan penduduk dengan mempertimbangkan kebutuhan lahan berdasarkan standar tertentu. Daya tampung suatu wilayah dihitung berdasarkan luas lahan yang tersedia untuk fungsi tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan per kapita.



Tabel 2. 27
Daya Dukung Permukiman dan Daya Tampung Wilayah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Luas Wilayah	288.415	288.415	288.415	288.415	288.415
2	Jumlah Penduduk	223.051	227.656	232.354	237.150	242.045
3	Daya Dukung Lahan (Ha/Jiwa)	1,29	1,27	1,24	1,22	1,19

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan, daya dukung lahan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan nilai yang menurun secara bertahap, yakni sebesar 1,29 hektare per jiwa (2025), 1,27 hektare per jiwa (2026), 1,24 hektare per jiwa (2027), 1,22 hektare per jiwa (2028), dan 1,19 hektare per jiwa (2029). Jika dibandingkan dengan standar daya tampung Yeates, angka-angka ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bangka Barat masih mampu menampung jumlah penduduk hingga akhir periode perencanaan. Selain itu, nilai daya dukung lahan terbangun (DDLb) tercatat sebesar 17,19, yang termasuk dalam kategori baik (>3), sehingga memungkinkan dilakukannya pengembangan ruang terbangun secara lebih luas di masa mendatang.

Tabel 2. 28
Kesimpulan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2025-2029

No	Daya Dukung	Kondisi
1	Daya dukung demografi	Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga akhir periode perencanaan, daya dukung demografi tertinggi tercatat di Kecamatan Simpang Teritip, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Mentok dan Parittiga.
2	Daya dukung pangan	Sampai dengan akhir Tahun 2029, Kabupaten Bangka Barat diperkirakan belum mampu mencapai swasembada pangan, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang melebihi kapasitas optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat.
3	Daya dukung air	Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Bangka Barat selama periode perencanaan tetap berada dalam kondisi surplus jika dibandingkan dengan total kebutuhan air.
4	Daya dukung fungsi lindung	Tingkat daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Bangka Barat tergolong dalam kategori sedang, mencerminkan kapasitas ekologis wilayah yang cukup namun masih memerlukan peningkatan.
5	Daya dukung permukiman	Nilai daya dukung lahan permukiman Kabupaten Bangka Barat sebesar 17,19 menunjukkan bahwa wilayah ini masih memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung pengembangan kawasan terbangun secara berkelanjutan.
6	Daya tampung wilayah	Kabupaten Bangka Barat diproyeksikan masih memiliki daya tampung wilayah yang memadai untuk menampung jumlah



No	Daya Dukung	Kondisi
		penduduk hingga akhir periode rencana pembangunan jangka menengah tahun 2029.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Daya dukung lingkungan memiliki kaitan erat dengan jasa ekosistem, karena keberlanjutan dan kualitas layanan ekosistem sangat tergantung pada bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan dan dikelola. Jika kapasitas daya dukung lingkungan terlampaui, maka jasa ekosistem yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan menurun, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan jasa ekosistem dan pelestarian lingkungan. Beberapa acuan untuk keberlanjutan dan kualitas layanan ekosistem, atau dapat dikatakan jasa lingkungan di Kabupaten Bangka Barat sendiri dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Jasa Lingkungan di Kabupaten Bangka Barat

No	Jasa Lingkungan	Kategori			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	pengatur pengendalian hama	74.675,92	129.689,04	-	-
2	pengatur penyerbukan alami	-	-	120.883,41	78.840,97
3	pendukung pembentukan dan regenerasi tanah	-	197.298,58	45.617,43	-
4	pengatur penyerbukan alami	87.780,78	133.133,44	-	-
5	pengatur pencegahan dan perlindungan bencana alam berupa banjir	-	187.103,98	59.462,88	-
6	pengatur pencegahan dan perlindungan bencana alam berupa longsor	-	144.475,28	79.910,63	-
7	pendukung siklus hara	-	186.468,29	69.825,20	-
8	pendukung produksi primer	-	121.281,19	91.360,60	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029

Analisis potensi jasa lingkungan di Kabupaten Bangka Barat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas ekosistem dalam mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan pembangunan. Setiap jenis jasa lingkungan memiliki kontribusi penting, mulai dari pengaturan hama, penyerbukan alami, pembentukan tanah, pengaturan iklim, hingga



pencegahan bencana dan pendukung produktivitas hayati. Data yang disajikan berikut ini menggambarkan distribusi kelas jasa lingkungan pada berbagai aspek tersebut, sekaligus menunjukkan tingkat kemampuan ekologis wilayah dalam menghadapi tekanan lingkungan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

- 1) Jasa lingkungan pengatur hama, sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Barat masuk dalam kelas sedang seluas 129.689,04 hektare (44,97 persen), diikuti oleh kelas rendah sebesar 74.675,92 hektare (25,89 persen). Hal ini menunjukkan bahwa secara ekologis, lingkungan masih memiliki kemampuan alami dalam mengendalikan populasi hama.
- 2) Jasa penyerbukan alami wilayah didominasi oleh kelas tinggi seluas 120.883,41 hektare (41,91 persen) dan kelas sangat tinggi seluas 78.840,97 hektare (27,34 persen), yang menunjukkan potensi pengembangan sektor pertanian melalui pemilihan komoditas yang sesuai.
- 3) Jasa lingkungan pembentukan dan regenerasi tanah, mayoritas wilayah berada pada kelas sedang dengan luas 197.298,58 hektare (68,41 persen) dan kelas tinggi seluas 45.617,43 hektare (15,82 persen), menandakan bahwa proses regenerasi tanah berjalan cukup baik.
- 4) Jasa lingkungan pengatur penyerbukan alami, sebagian besar wilayah berada pada kelas sedang seluas 133.133,44 hektare (45,47 persen) dan kelas rendah seluas 87.780,78 hektare (30,44 persen), yang mengindikasikan kondisi ekosistem yang masih cukup memadai dalam mendukung stabilitas iklim meskipun terdapat tekanan di beberapa area.
- 5) Jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir, Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berada pada kelas sedang seluas 187.103,98 hektare (64,87 persen), serta kelas tinggi seluas 59.462,88 hektare (20,62 persen), menunjukkan kapasitas ekologis wilayah yang masih kuat dalam menghadapi risiko banjir.
- 6) Jasa lingkungan pencegahan longsor, wilayah Kabupaten Bangka Barat juga didominasi oleh kelas sedang (144.475,28 hektare atau 50,09 persen) dan kelas tinggi (79.910,63 hektare atau 26,67 persen), mengindikasikan tingkat perlindungan lingkungan yang cukup baik.
- 7) Jasa lingkungan pendukung siklus hara di Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh kelas sedang (186.468,29 hektare atau 64,65 persen) dan kelas tinggi (69.825,20 hektare), ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Bangka Barat berada pada kategori sedang hingga baik.
- 8) Jasa lingkungan yang berkenaan dengan produksi primer, mencerminkan kemampuan ekosistem dalam mengubah energi matahari menjadi



biomassa melalui fotosintesis, didominasi oleh kelas sedang (121.281,19 hektare atau 41,05 persen) dan kelas sangat tinggi (91.360,60 hektare atau 31,68 persen), menunjukkan bahwa di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi lingkungan yang tinggi dalam mendukung produktivitas hayati.

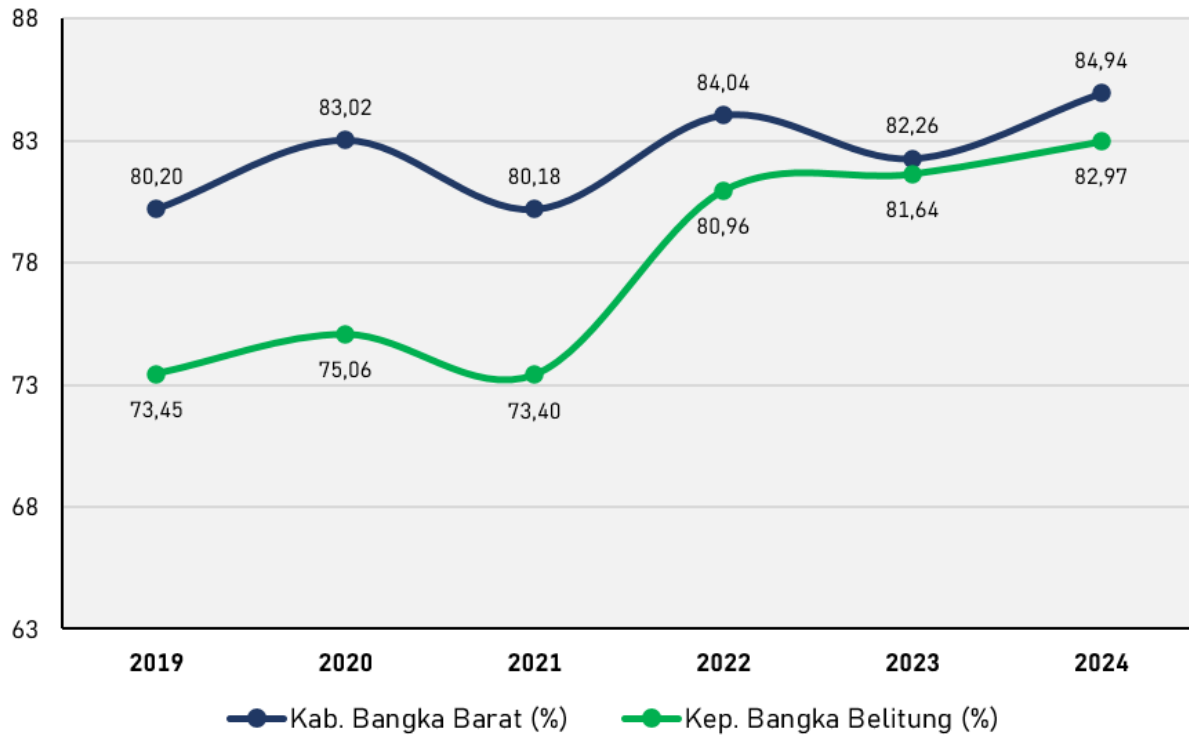
4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan di bidang energi, air, dan kemandirian pangan merupakan fondasi krusial untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat. Ketiga elemen ini tidak hanya berperan penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menggambarkan tingkat kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan fluktuasi harga pangan. Di Kabupaten Bangka Barat, kestabilan ketahanan energi, ketersediaan air minum yang memadai, serta kemandirian pangan yang terjaga menjadi dasar utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif.

Kondisi akses air minum layak di Kabupaten Bangka Barat selama 2019–2024 menunjukkan perbaikan dengan dinamika musiman yang terkendali. Persentase rumah tangga berakses layak naik dari 80,20% (2019) menjadi 83,02% (2020), sempat melemah ke 80,18% (2021), lalu meningkat tajam ke 84,04% (2022), turun tipis ke 82,26% (2023), dan kembali mencapai titik tertinggi 84,94% pada 2024. Pola ini menegaskan bahwa kinerja layanan relatif stabil dan cenderung membaik, dengan kemampuan pemulihan yang cepat setelah penurunan jangka pendek.

Pada saat yang sama, kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan akselerasi yang konsisten: dari 73,45% (2019) menjadi 75,06% (2020), turun sementara ke 73,40% (2021), kemudian melesat ke 80,96% (2022), 81,64% (2023), dan 82,97% (2024). Sepanjang periode, capaian Kabupaten Bangka Barat berada di atas rerata provinsi, namun kesenjangan antarwilayah mengalami penyempitan yang nyata pada 2022–2023 sebelum kembali melebar sedikit pada 2024 seiring lonjakan capaian kabupaten. Dinamika ini mencerminkan dua hal: keunggulan historis Bangka Barat dalam penyediaan akses air minum layak tetap terjaga, dan percepatan peningkatan di kabupaten/ kota lain dalam provinsi mulai mengurangi kesenjangan secara struktural.

Gambar 2. 4
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
(Persen) di Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Implikasi bagi perencanaan 2025-2029 adalah perlunya menjaga tingkat capaian yang telah tinggi sambil menutup sisa kesenjangan intra-kabupaten. Upaya konsolidasi diarahkan pada peningkatan kontinuitas layanan (keandalan sumber dan jam layanan), perluasan jangkauan ke kantong-kantong rumah tangga yang belum terlayani, dan penguatan kualitas air minum sesuai standar kesehatan. Mengingat fluktuasi yang pernah terjadi, fokus pengelolaan risiko terutama terhadap variabilitas musim, kualitas sumber air baku, serta keberlanjutan operasi dan pemeliharaan perlu ditingkatkan agar tren capaian tidak hanya naik tetapi juga stabil.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketimpangan akses air minum layak antara Kabupaten Bangka Barat dan wilayah induknya semakin mengecil dari waktu ke waktu. Kabupaten Bangka Barat perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap unggul, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus memperkuat dan memperluas program akses air minum layak di seluruh kabupaten/ kota di provinsi tersebut. Dengan demikian, upaya sinergi antara kabupaten dan



provinsi sangat penting untuk mencapai target akses universal secara merata dan berkelanjutan.

Grafik di atas tidak hanya menunjukkan peningkatan akses air minum layak di kedua wilayah, tetapi juga memperlihatkan tren positif menuju pemerataan layanan antara Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai induknya. Langkah strategis yang konsisten dan berkelanjutan perlu terus dijalankan agar seluruh rumah tangga di provinsi ini dapat menikmati akses air minum yang layak tanpa kesenjangan wilayah yang signifikan.

Selanjutnya, dalam kemandirian pangan yang dinilai dari Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 72,53 yang tergolong dalam kategori “Tahan” (Prioritas 5), menandakan ketahanan pangan yang cukup baik. Pada tahun berikutnya, 2021, terjadi peningkatan indeks menjadi 78,58 dan masuk ke kategori “Sangat Tahan” (Prioritas 6), yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang sangat kuat dan risiko kekurangan pangan yang sangat rendah.

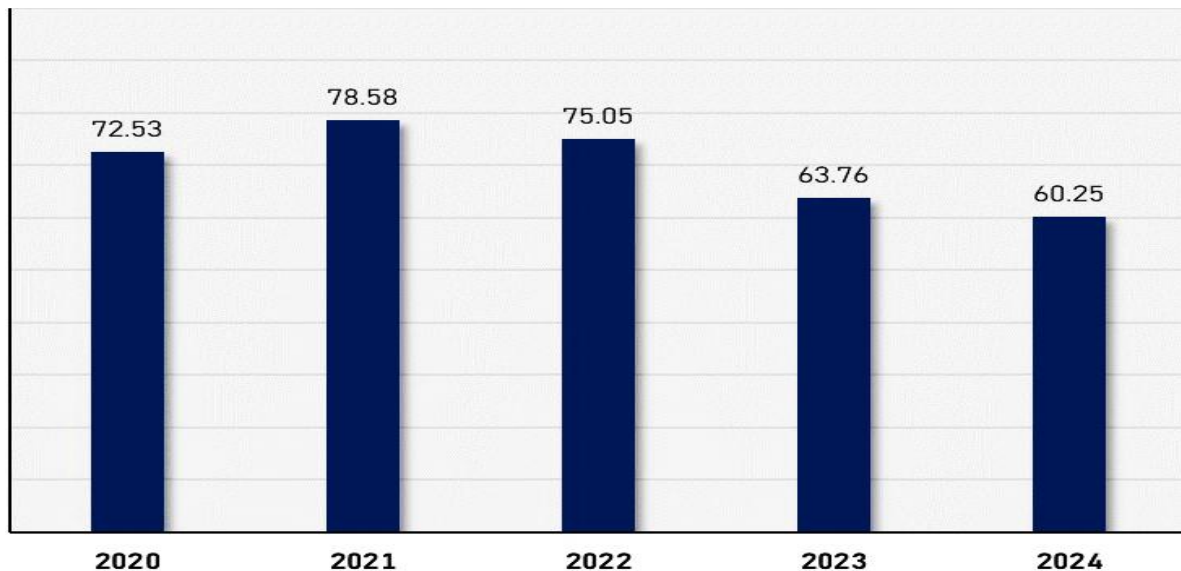
Namun, setelah mencapai puncaknya pada 2021, indeks ketahanan pangan mulai mengalami penurunan. Tahun 2022 mencatat indeks sebesar 75,05 yang masih berada dalam kategori “Tahan” (Prioritas 5), meskipun sudah menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan indeks masing-masing sebesar 63,76 dan 60,25, yang masuk dalam kategori “Agak Tahan” (Prioritas 4). Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan pangan dan meningkatnya kerentanan terhadap gangguan yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakstabilan pangan di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar di bawah, menunjukkan penurunan indeks ketahanan pangan dalam dua tahun terakhir, yang mana ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab antara lain gangguan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pertanian, masalah distribusi dan akses pangan, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, tekanan ekonomi dan faktor eksternal lain juga dapat berkontribusi terhadap melemahnya ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab utama penurunan ketahanan pangan serta pengembangan strategi yang tepat. Upaya penguatan ketahanan pangan harus difokuskan pada peningkatan produktivitas dan diversifikasi sumber pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, serta pengembangan sistem penyimpanan yang

efisien. Dukungan teknologi pertanian dan peningkatan kapasitas petani juga menjadi aspek krusial untuk menjaga ketahanan pangan dalam periode jangka panjang.

Gambar 2. 5
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

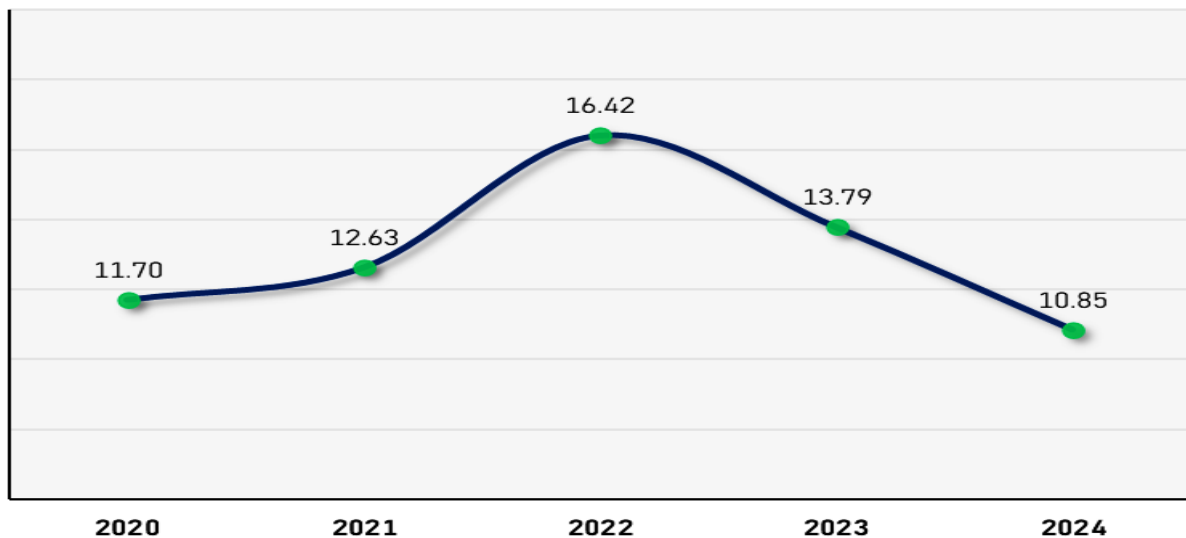


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Bangka Barat sempat mencapai status “Sangat Tahan” dalam ketahanan pangan pada Tahun 2021, tren penurunan indeks yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan perlunya tindakan cepat dan terintegrasi. Dengan kebijakan yang tepat dan intervensi berkelanjutan, ketahanan pangan di Kabupaten Bangka Barat dapat diperkuat kembali, sehingga dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi masyarakat.

Selanjutnya, Gambar di bawah menunjukkan data mengenai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (dalam %) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024. Apabila dilihat pada grafik, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 11,70 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan secara bertahap menjadi 12,63 persen pada Tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 dengan nilai 16,42 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan yang cukup serius dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup bagi sebagian rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2. 6
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Namun setelah Tahun 2022, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan mulai menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2023, angka ini turun menjadi 13,79 persen dan terus menurun hingga mencapai 10,85 persen pada Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan ketersediaan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih baik. Meski demikian, angka ketidacukupan konsumsi pangan yang masih di atas 10 persen mengindikasikan bahwa sebagian penduduk Kabupaten Bangka Barat masih menghadapi risiko kekurangan gizi atau pangan.

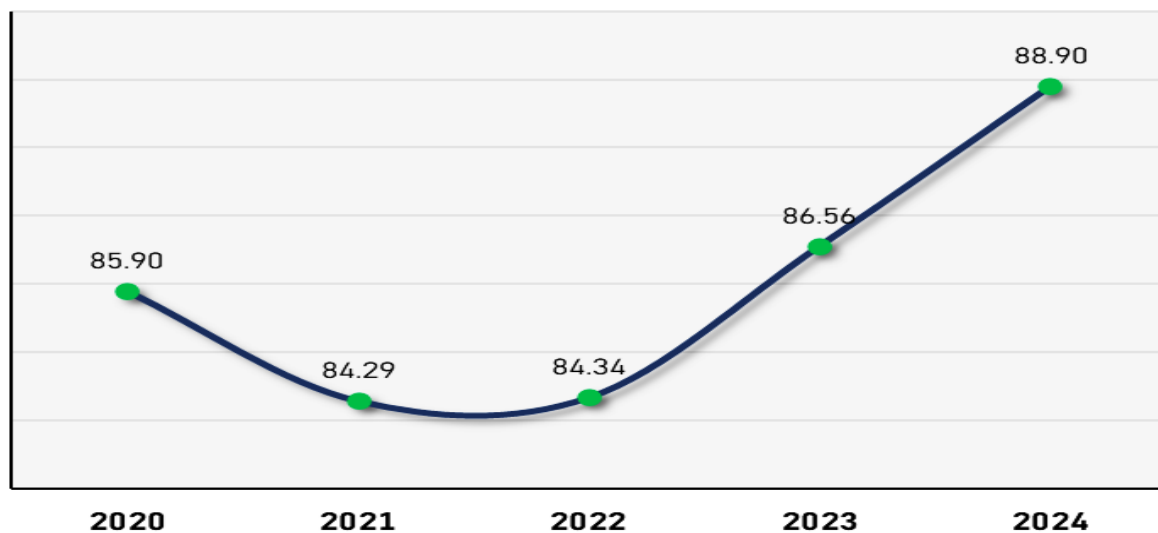
Pergerakan tren ini menggarisbawahi pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Bangka Barat. Lonjakan prevalensi pada Tahun 2022 dapat menjadi sinyal adanya gangguan dalam sistem pangan, seperti gangguan produksi, distribusi, atau faktor ekonomi yang membatasi daya beli masyarakat. Sementara penurunan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan respons positif dari kebijakan atau program intervensi yang dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memantau dan memperkuat upaya-upaya untuk menekan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan distribusi yang merata, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan seluruh rumah tangga dapat memenuhi

kebutuhan pangan yang cukup, yang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain kedua indikator seperti IKP dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor PPH memiliki tujuan yaitu, untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Gambar 2. 7
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

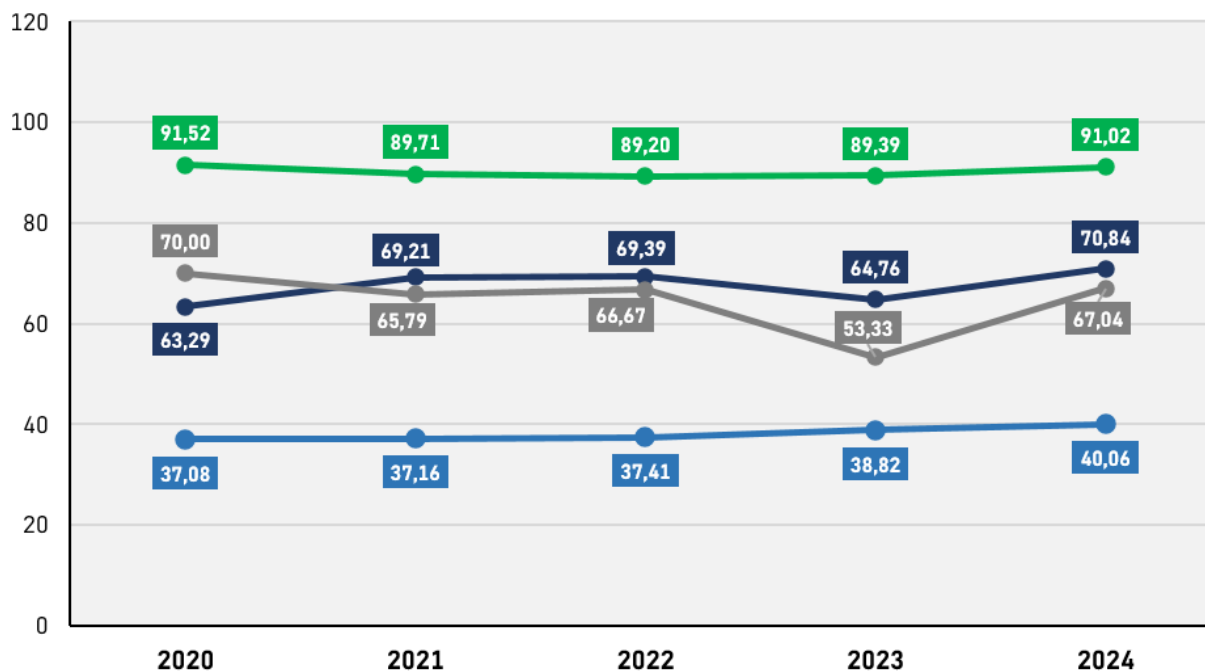
Berdasarkan gambar di atas, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada Tahun 2020, skor PPH tercatat sebesar 85,90, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada Tahun 2021, yaitu 84,29. Skor mulai membaik pada Tahun 2022 sebesar 84,34, lalu meningkat signifikan pada Tahun 2023 menjadi 86,56 dan mencapai puncaknya pada Tahun 2024 sebesar 88,90. Peningkatan skor PPH menunjukkan perbaikan dalam keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat, yang mencerminkan upaya positif pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pola makan dan ketersediaan pangan bergizi di Kabupaten Bangka Barat.

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

Pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Implementasi pengelolaan ini dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta mengacu pada hasil inventarisasi lingkungan hidup yang dilakukan di tingkat nasional, pulau, maupun ekoregion. Salah satu indikator nasional yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan pada suatu waktu adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang disusun berdasarkan tiga komponen utama: Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dengan demikian, IKLH memberikan gambaran awal mengenai kondisi lingkungan pada wilayah dan periode tertentu, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tepat. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada Grafik di bawah ini, mengenai capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024.

Gambar 2. 8

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

Selama lima tahun, dinamika IKLH merupakan hasil interaksi tiga komponen penyusunnya: IKU, IKA, dan IKTL dengan bobot pengaruh yang tidak sama. IKU berada konsisten pada level sangat baik, sehingga berfungsi



sebagai “jangkar” stabilitas. IKTL meningkat perlahan namun konsisten, memberi dorongan kecil namun berkesinambungan, sementara IKA berfluktuasi paling tajam dan menjadi penentu naik-turunnya agregat.

Pada fase 2020-2022, IKLH naik dari 63,29 menjadi 69,39 seiring kombinasi tiga faktor. Pertama, meski IKU sedikit menurun, levelnya tetap sangat tinggi sehingga tetap menopang skor agregat. Kedua, IKA bergerak dari 70,00 turun ke 65,79 lalu membaik ke 66,67, menjaga kontribusi air pada kisaran menengah. Ketiga, IKTL merayap naik dari 37,08 ke 37,41, memberi tambahan kecil namun konsisten pada perbaikan IKLH.

Tahun 2023 menjadi titik balik ketika IKLH turun ke 64,76 akibat guncangan kuat pada IKA. Penurunan IKA ke 53,33 menyeret agregat, meski IKU tetap tinggi di 89,39 dan IKTL terus naik ke 38,82. Peristiwa ini menunjukkan sensitivitas IKLH terhadap perubahan kualitas air, ketika IKA melemah signifikan, dukungan stabil dari IKU dan kenaikan bertahap IKTL tidak cukup untuk menahan penurunan total. Memasuki 2024, IKLH bangkit ke titik tertinggi 70,84 karena sinergi pemulihan IKA dan penguatan dua komponen lain. IKA pulih ke 67,04, menghapus sebagian besar penurunan tahun sebelumnya; IKTL melanjutkan tren naik ke 40,06; dan IKU kembali menanjak ke 91,02. Pola ini menegaskan bahwa menjaga udara tetap sangat baik dan memperluas tutupan lahan memberi fondasi stabil, tetapi keberlanjutan kenaikan IKLH sangat ditentukan oleh pengendalian variabilitas kualitas air.

Dalam konteks Kabupaten Bangka Barat, kondisi lingkungan lima tahun terakhir memperlihatkan stabilitas kualitas udara, kenaikan bertahap tutupan lahan, namun volatilitas kualitas air yang sesekali menekan kinerja agregat; artinya, ekosistem relatif “tahan” terhadap emisi ambien, tetapi masih rentan terhadap beban pencemar air dan perubahan pemanfaatan ruang mikro. Implikasinya ke belakang, sejumlah capaian IKLH lebih banyak ditopang “jangkar” IKU dan dorongan gradual IKTL, sementara guncangan pada IKA segera tercermin sebagai koreksi pada IKLH, menandakan air sebagai komponen paling sensitif sekaligus penentu. Ke depan lima tahun, prioritas perlu diarahkan pada pengendalian beban pencemar air (domestik, usaha kecil, serta titik-titik rawan drainase), percepatan rehabilitasi lahan kritis yang terukur dan terarah di daerah tangkapan air, serta penguatan tata kelola pemanfaatan lahan dan infrastruktur sanitasi; dengan kombinasi ini, tren perbaikan IKTL dapat terus menguat, volatilitas IKA ditekan, dan IKLH berpeluang naik konsisten sambil menjaga IKU tetap pada kategori sangat baik.



Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa perbaikan IKLH belum didorong secara signifikan oleh upaya rehabilitasi lahan kritis. Peningkatan tersebut kemungkinan lebih banyak dipengaruhi oleh perbaikan kualitas udara (IKU) dan perlindungan lahan (IKTL). Padahal, lahan kritis memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya dukung ekosistem, termasuk pengendalian erosi, penyimpanan air, dan produktivitas lahan.

Tabel 2. 30
Proporsi Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0,042	0,070	0,057	0,070	0,033	0,030

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

Dengan demikian, ke depan perlu ada peningkatan komitmen dan alokasi sumber daya untuk percepatan rehabilitasi lahan kritis secara lebih masif dan sistematis, agar kontribusinya terhadap IKLH lebih nyata dan terukur, serta mendukung target nasional rehabilitasi 5,5 juta hektar yang hingga kini belum tercapai. Tren dari capaian IKLH serta data terkait lahan kritis tersebut berdampak juga pada indikator lainnya, yaitu emisi gas rumah kaca (GRK). Data mengenai emisi GRK di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 31
Emisi GRK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	CO ₂ eq Gg	-868,04	290,48

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

Data emisi GRK di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perubahan drastis antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, tercatat nilai emisi sebesar -868,04 Gg CO₂eq, yang menunjukkan kondisi net sink, artinya wilayah ini mampu menyerap lebih banyak emisi GRK dibandingkan yang dihasilkan. Nilai negatif ini umumnya mencerminkan peran signifikan kawasan hutan, lahan gambut, atau vegetasi alami lainnya dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan besar dengan emisi GRK meningkat menjadi 290,48 Gg CO₂eq, menandakan pergeseran dari kondisi penyerapan bersih (net sink) menjadi sumber emisi bersih (net



source). Perubahan ekstrem ini mengindikasikan adanya penurunan kapasitas penyerapan karbon atau peningkatan emisi yang signifikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, penurunan tutupan hutan, peningkatan aktivitas industri atau transportasi, serta pertumbuhan sektor energi dan limbah.

Perubahan status ini menjadi peringatan penting bagi keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bangka Barat. Meskipun capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan, lonjakan emisi GRK menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan pengendalian emisi. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat dalam konservasi hutan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

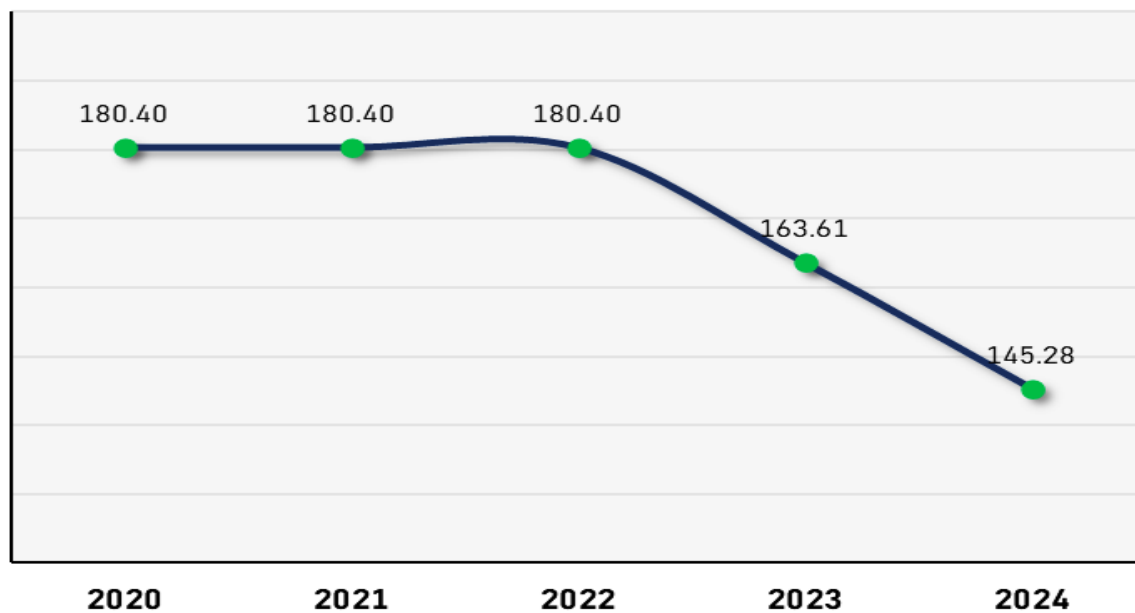
6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Bangka Barat, kemampuan untuk menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak bencana alam maupun perubahan iklim semakin penting mengingat meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem, abrasi pantai, dan kerentanan wilayah pesisir. Oleh karena itu, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat, sistem peringatan dini, serta integrasi aspek mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa mendatang.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020-2024 yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Bangka Barat menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020 hingga 2022, nilai indeks berada pada angka yang sama, yaitu 180,40, yang mencerminkan tingkat risiko bencana yang tergolong tinggi dan relatif stagnan dalam tiga tahun awal. Namun, mulai Tahun 2023, terjadi penurunan tajam menjadi 163,61, dan kembali menurun secara signifikan pada Tahun 2024 menjadi 145,28. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek kerentanan wilayah, kapasitas kesiapsiagaan, dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Tren positif ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangka Barat mulai menunjukkan peningkatan resiliensi terhadap bencana melalui strategi adaptasi, perencanaan tata ruang yang lebih tangguh, serta sistem peringatan dini yang lebih responsif. Meski demikian,

nilai indeks yang masih berada di atas 100 menandakan bahwa risiko bencana masih cukup tinggi dan memerlukan penguatan lanjutan, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan potensi bencana hidrometeorologi di masa depan.

Gambar 2. 9
Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BNPB InaRISK, 2025

Meskipun indeks risiko bencana di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan penurunan, sumber kajian lain mengungkapkan bahwa wilayah ini masih termasuk kategori “tinggi” untuk beberapa jenis potensi bencana jika dilihat dari luas lahannya (ha). Kategori tersebut mencerminkan tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai meskipun tren indeks menurun. Potensi bencana beserta kategori kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32
Potensi Bencana di Kabupaten Bangka Barat

Potensi Bencana	Luas Lahan (Ha)			Total	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Banjir	1.796	43.293	51.665	96.755	Tinggi
Cuaca Ekstrem	13.765	95.192	157.388	266.345	Tinggi
Gelombang Ekstrem & Abrasi	2.406	410	2.134	4.950	Tinggi
Gempa Bumi	282.061	0	0	282.061	Rendah
Kebakaran Hutan & Lahan	17.103	191.520	25.65	234.273	Rendah
Kekeringan	0	282.061	0	282.061	Sedang
Tanah Longsor	601	1.503	1.934	4.038	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022-2026



Tabel di atas menggambarkan sebaran potensi bencana di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan luas lahan terdampak dan tingkat risikonya. Terdapat tujuh jenis potensi bencana yang dikaji, yaitu banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Dari keseluruhan jenis bencana tersebut, cuaca ekstrem menempati posisi tertinggi dengan total luas wilayah terdampak mencapai 266.345 hektare, di mana sebagian besar berada dalam kategori risiko tinggi (157.388 ha). Disusul oleh banjir dengan total 96.755 ha, dan tanah longsor dengan cakupan 4.038 ha, keduanya juga berada dalam kelas risiko tinggi. Sementara itu, kekeringan menjadi satu-satunya bencana dengan risiko dominan pada kelas sedang, dan gempa bumi serta kebakaran hutan dan lahan cenderung masuk ke dalam kategori risiko rendah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem, banjir, dan gelombang ekstrem. Ketergantungan wilayah terhadap garis pantai, serta dampak dari perubahan iklim global, memperbesar eksposur wilayah terhadap intensitas dan frekuensi bencana yang bersifat iklim, terutama pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Korelasi antara data ini dengan IRBI yang sebelumnya ditampilkan, menunjukkan bahwa penurunan nilai IRBI dari 180,40 (Tahun 2020-2022) menjadi 145,28 (Tahun 2024) bukan berarti bahwa potensi bahaya menurun, melainkan lebih menunjukkan peningkatan kapasitas resiliensi dan mitigasi daerah. Hal ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, penyusunan rencana kontinjensi bencana, serta perlindungan infrastruktur dan komunitas rentan.

Sehingga, upaya dari pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem resiliensi adaptif berbasis risiko, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Strategi yang bisa ditempuh meliputi: 1) pemetaan zona rawan bencana secara lebih rinci; 2) perlindungan kawasan pesisir dari abrasi dan banjir rob; 3) peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan; 4) integrasi mitigasi risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah; dan 5) mendorong infrastruktur hijau untuk menekan dampak banjir dan cuaca ekstrem.

7) Demografi

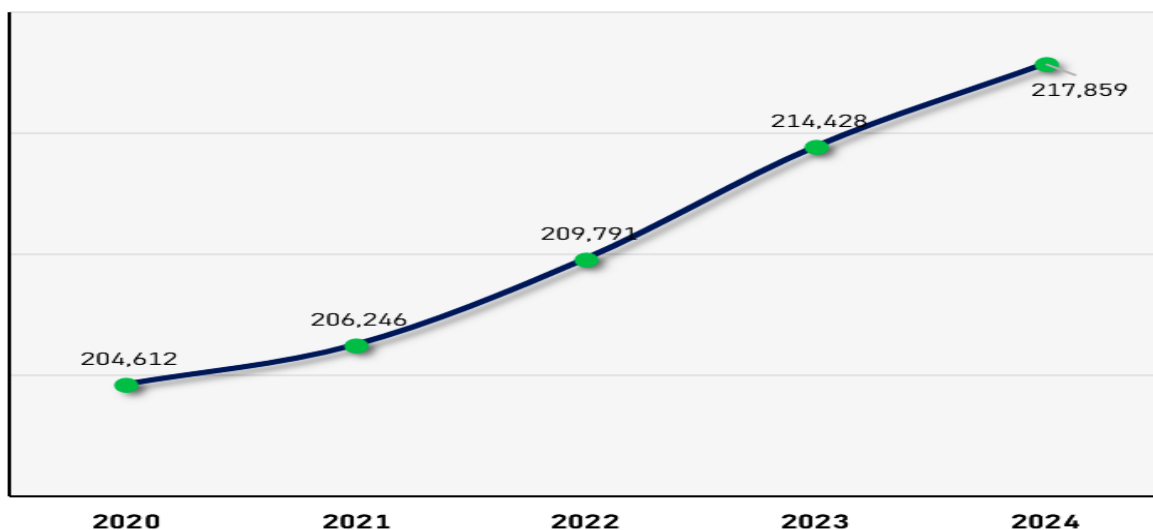
A. Struktur Penduduk

[1] Jumlah dan Distribusi Penduduk

Kependudukan adalah salah satu aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagai objek dan

subjek dalam pembangunan wilayah, penduduk merupakan potensi internal yang sangat penting dalam pengembangan daerah tersebut. Selain itu, dalam kerangka pengembangan wilayah, penduduk merupakan aset sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara arif dan berkelanjutan. Dalam proses pembangunan, penduduk berfungsi sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Selain itu, penduduk dapat menjadi kekuatan pendorong maupun tantangan dalam pembangunan. Ketika memiliki kualitas yang baik, jumlah penduduk akan menjadi potensi yang mendukung kemajuan wilayah. Namun sebaliknya, apabila kualitasnya rendah, maka penduduk justru dapat menjadi hambatan dan beban dalam upaya pembangunan.

Gambar 2. 10
Tren Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



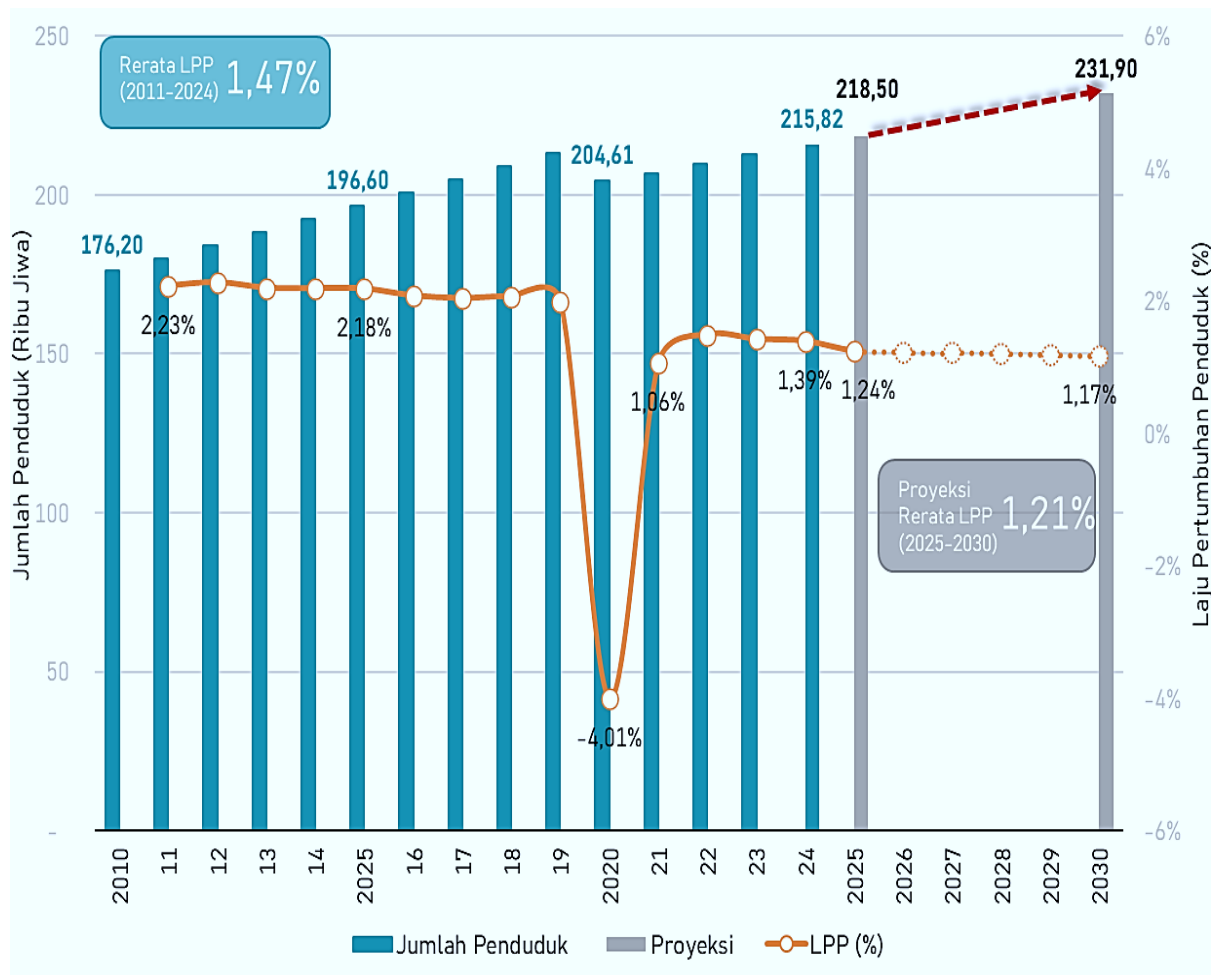
Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 204.612 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 206.246 jiwa pada Tahun 2021. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada Tahun 2022 dengan jumlah penduduk mencapai 209.791 jiwa, kemudian meningkat signifikan menjadi 214.428 jiwa pada Tahun 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar 217.859 jiwa pada Tahun 2024.

Data di atas menjelaskan bahwa, Kabupaten Bangka Barat menempati peringkat ketiga terbesar setelah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang mengenai jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Barat mencerminkan dinamika

kependudukan yang stabil dan terus berkembang, yang dapat disebabkan oleh faktor alami seperti angka kelahiran yang lebih tinggi dari kematian, serta kemungkinan adanya migrasi masuk. Peningkatan jumlah penduduk ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga berdampak pada kebutuhan lahan dan sumber daya alam, sehingga dibutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan agar daya dukung lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk ini harus disikapi secara cermat agar menjadi potensi pembangunan, bukan beban bagi daerah.

Gambar 2. 11
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk Kab. Bangka Barat



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat (2010-2024), Proyeksi Penyusun (2025-2030), 2025

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Bangka Barat tahun 2010-2030, terlihat bahwa dinamika demografi wilayah ini mengalami perubahan yang



cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada periode 2010 hingga 2019, pertumbuhan penduduk cenderung stabil di kisaran ± 2 persen per tahun. Stabilitas ini kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi pertumbuhan alami melalui angka kelahiran yang masih relatif tinggi serta adanya arus migrasi masuk yang cukup konsisten. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam hingga $-4,01$ persen. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tidak hanya memengaruhi angka kematian dan kelahiran, tetapi juga mendorong terjadinya migrasi keluar penduduk.

Memasuki periode 2021 hingga 2023, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bangka Barat kembali menunjukkan tren positif, meskipun berada pada tingkat yang lebih rendah, yaitu berkisar antara 1,06 hingga 1,49 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses pemulihan bertahap, baik dari sisi peningkatan aktivitas ekonomi maupun stabilisasi arus migrasi masuk dan keluar daerah. Rata-rata LPP selama periode 2011–2024 tercatat sebesar 1,47 persen, yang mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan penduduk dibandingkan periode sebelumnya.

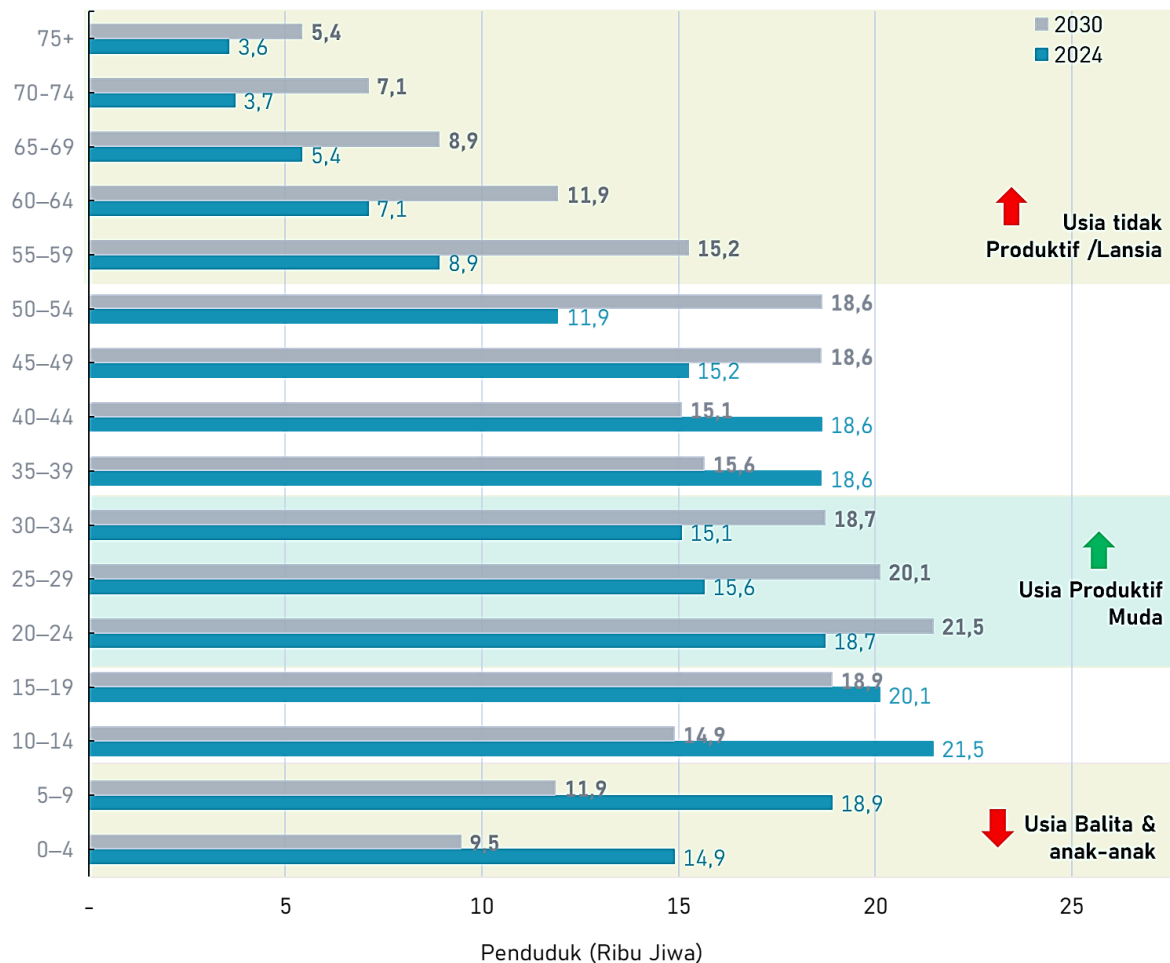
Perlambatan tersebut sejalan dengan kecenderungan umum transisi demografi, di mana angka kelahiran cenderung menurun seiring meningkatnya tingkat pendidikan, pergeseran pola kerja ke sektor non-pertanian, dan meningkatnya urbanisasi. Faktor-faktor ini secara tidak langsung mengurangi laju pertambahan penduduk, meskipun kualitas sumber daya manusia menunjukkan peningkatan. Berdasarkan proyeksi untuk tahun 2025–2030, pertumbuhan penduduk diperkirakan akan berada pada kisaran $\pm 1,21$ persen per tahun, mencerminkan tren penurunan yang relatif stabil.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan tersebut, proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai struktur demografi di Kabupaten Bangka Barat dalam jangka menengah. Proyeksi ini dibedakan antara penduduk laki-laki dan perempuan, serta dihitung menggunakan metode proyeksi geometrik berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan dari data dasar tahun 2024. Metode ini memperhitungkan laju pertumbuhan tahunan (r) melalui perbandingan jumlah penduduk tahun 2024 dan 2015, dengan rumus:

$$P_t = P_{2024} \times (1 + r)^{(t-2023)} \text{ dengan } r = \left(\frac{P_{2024}}{P_{2015}} \right)^{\frac{1}{2024-2015}} - 1$$

P_t adalah jumlah penduduk pada tahun ke- t , P_{2024} merupakan jumlah penduduk pada tahun dasar, dan r adalah tingkat pertumbuhan tahunan.

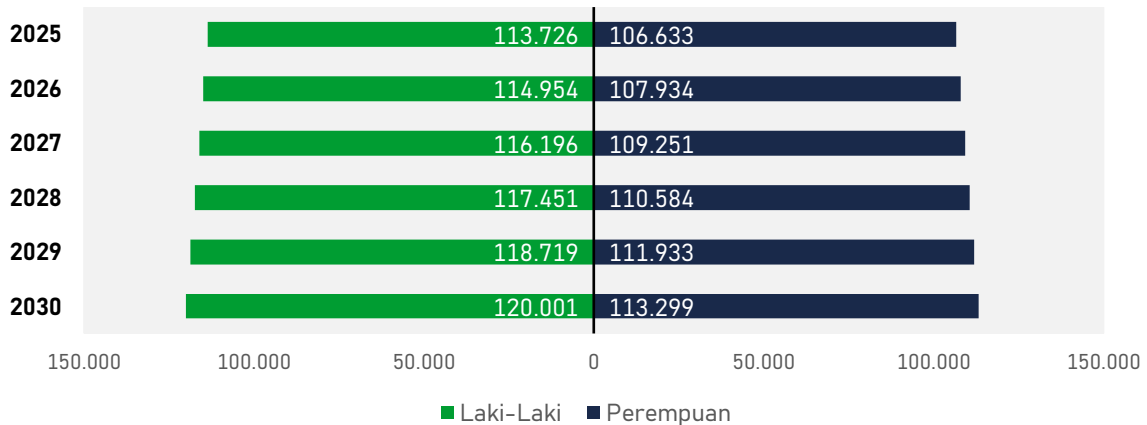
Gambar 2. 12
Jumlah dan Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2024 – 2030



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat (2024), Proyeksi Penyusun (2030), 2025

Hasil proyeksi menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke tahun, baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 113.726 jiwa dan perempuan sebanyak 106.633 jiwa, dengan total 220.364 jiwa. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2030, dengan proyeksi penduduk laki-laki mencapai 120.001 jiwa dan perempuan sebanyak 113.299 jiwa, sehingga total penduduk diperkirakan mencapai 233.300 jiwa. Rasio penduduk laki-laki konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan sepanjang periode tersebut. Proyeksi ini menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap dinamika kependudukan.

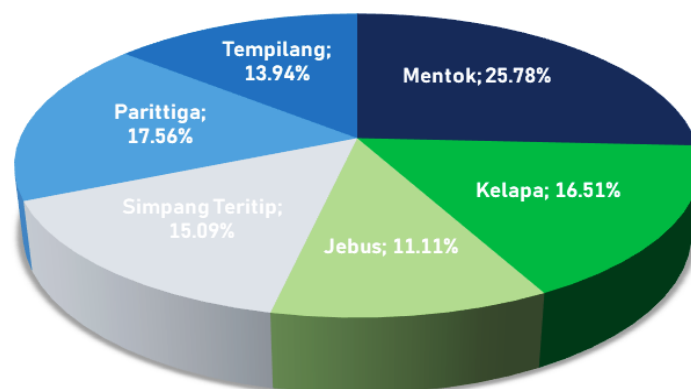
Gambar 2. 13
Proyeksi Penduduk Per Jenis Kelamin (dalam Jiwa) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Selanjutnya, mengenai distribusi penduduk Kabupaten Bangka Barat menurut kecamatan pada tahun 2024, terlihat bahwa Kecamatan Mentok merupakan wilayah dengan proporsi penduduk terbesar, yakni sebesar 25,78% dari total populasi kabupaten. Ini menunjukkan bahwa Mentok sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik memiliki konsentrasi penduduk yang paling tinggi. Disusul oleh Kecamatan Parittiga dengan 17,56% dan Kecamatan Kelapa dengan 16,51%, yang juga mencerminkan wilayah-wilayah dengan aktivitas permukiman dan sosial ekonomi yang cukup berkembang.

Gambar 2. 14
Distribusi Penduduk Kabupaten Bangka Barat Menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Sementara itu, Kecamatan Simpang Teritip dan Tempilang masing-masing menyumbang 15,09% dan 13,94% terhadap total penduduk di



Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran menengah dalam distribusi penduduk dan kemungkinan memiliki potensi sebagai wilayah pengembangan baru. Adapun Kecamatan Jebus memiliki porsi terkecil, yaitu 11,11%, yang bisa jadi menunjukkan persebaran permukiman yang lebih menyebar atau kondisi geografis dan infrastruktur yang masih terbatas.

Distribusi yang belum merata ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mendorong strategi pengembangan berbasis wilayah yang adaptif terhadap kondisi demografis masing-masing kecamatan agar tercipta keseimbangan antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland, serta untuk menghindari konsentrasi beban penduduk di daerah tertentu seperti Mentok.

Tabel 2. 33
Jumlah dan Distribusi Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa	34.823	34.981	35.463	35.851	35.963
2	Tempilang	28.246	28.595	29.080	29.778	30.380
3	Mentok	53.008	53.441	54.239	55.445	56.160
4	Simpang Teritip	30.658	31.001	31.518	32.127	32.883
5	Jebus	22.531	22.738	23.193	23.807	24.215
6	Parittiga	35.261	35.490	36.298	37.420	38.258
Kabupaten Bangka Barat		204.527	206.246	209.791	214.428	217.859

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Analisis kependudukan berdasarkan jumlah dan struktur komposisi penduduk di suatu wilayah merupakan elemen penting yang berperan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini sangat krusial untuk memperkirakan kebutuhan masa depan, seperti permintaan terhadap barang, layanan publik, serta kebutuhan lahan. Tanpa adanya kajian kependudukan yang memadai, proses perencanaan akan kehilangan keakuratan, sehingga hasilnya berisiko tidak relevan, sulit dilaksanakan, dan tidak memiliki arah yang jelas dalam mendukung tujuan pembangunan.

Berdasarkan data jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020–2024, terlihat tren peningkatan populasi secara konsisten di seluruh kecamatan. Jumlah total penduduk meningkat dari 204.527 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 217.859 jiwa pada Tahun 2024, atau mengalami pertumbuhan sekitar 6,52% selama lima tahun. Kecamatan Mentok tercatat sebagai wilayah dengan populasi tertinggi setiap tahunnya, yakni dari 53.008



jiwa di Tahun 2020 menjadi 56.116 jiwa pada 2024. Hal ini mengindikasikan peran strategis Mentok sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan lainnya adalah Parittiga, yang mengalami peningkatan dari 35.261 jiwa menjadi 38.258 jiwa selama periode tersebut. Demikian pula, Simpang Teritip dan Tempilang menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, masing-masing dari 30.658 menjadi 32.883 jiwa, dan dari 28.246 menjadi 30.388 jiwa. Kelapa mencatatkan pertumbuhan lebih moderat, dari 34.823 jiwa menjadi 35.963 jiwa, sedangkan Kecamatan Jebus tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terendah, meskipun mengalami kenaikan dari 22.531 jiwa menjadi 24.215 jiwa.

Pola distribusi ini memperlihatkan kecenderungan konsentrasi penduduk di wilayah barat dan pusat administratif, dengan ketimpangan yang relatif rendah antar wilayah. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta alokasi ruang dan lahan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Bangka Barat perlu diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan antar kecamatan.

[2] Kepadatan Penduduk

Secara umum, masyarakat cenderung memilih menetap di wilayah yang menawarkan peluang ekonomi yang besar, didukung oleh ketersediaan fasilitas sosial yang memadai, akses transportasi yang baik, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih menguntungkan. Ketimpangan dalam penyebaran penduduk dapat menimbulkan permasalahan kepadatan dan beban berlebih pada wilayah tertentu. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi biasanya mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, sedangkan daerah dengan kepadatan rendah umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih terbatas. Kepadatan penduduk sendiri merujuk pada jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah dalam satuan luas tertentu.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan secara bertahap selama periode 2020 hingga 2024, Rata-rata kepadatan penduduk kabupaten meningkat dari 70,94 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 76,47 jiwa/km² pada Tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan penduduk yang konsisten di sebagian besar kecamatan, Secara spasial, Kecamatan Mentok secara konsisten mencatat kepadatan penduduk tertinggi setiap tahun, yakni dari 104,25 jiwa/km² pada 2020 meningkat signifikan menjadi 152,63 jiwa/km² pada 2024, Hal ini menegaskan posisi Mentok sebagai



pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi, yang menarik lebih banyak penduduk untuk bermukim di sana, Kecamatan Parittiga menempati urutan kedua, dengan kepadatan meningkat dari 101,82 jiwa/km² menjadi 117,10 jiwa/km², menunjukkan dinamika pertumbuhan permukiman dan aktivitas sosial ekonomi yang cukup pesat di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020-2024 dijelaskan melalui Tabel berikut ini.

Tabel 2. 34
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 (per Km²)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	60,04	61,00	61,80	61,23	60,81
Tempilang	61,73	62,00	63,08	76,63	77,86
Mentok	104,25	105,00	107,20	143,77	152,63
Simpang Teritip	47,66	48,00	49,45	40,77	41,92
Jebus	64,00	65,00	69,90	61,34	62,39
Parittiga	101,82	103,00	102,50	114,54	117,10
Kabupaten Bangka Barat	70,94	72,00	72,74	74,91	76,47

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Sebaliknya, Kecamatan Simpang Teritip dan Jebus memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah dibanding kecamatan lainnya, Simpang Teritip bahkan mengalami tren penurunan, dari 47,66 jiwa/km² pada 2020 menjadi 41,92 jiwa/km² pada 2024, yang mungkin disebabkan oleh karakter geografis wilayah, ketersediaan akses, atau terbatasnya fasilitas pelayanan dasar, Jebus, meskipun sempat mengalami fluktuasi, mencatat kepadatan 62,39 jiwa/km² di Tahun 2024, Peningkatan tajam juga terlihat di Kecamatan Tempilang, yang mengalami lonjakan kepadatan dari 61,73 jiwa/km² pada 2020 menjadi 77,86 jiwa/km² pada 2024, Begitu pula Kecamatan Kelapa, yang meskipun lebih stabil, masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir.

Secara umum, data ini menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi penduduk di kecamatan-kecamatan dengan aktivitas ekonomi lebih tinggi, seperti Mentok dan Parittiga, yang perlu diantisipasi dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang seimbang, Pemerintah daerah perlu mengarahkan pengembangan wilayah agar tidak hanya terfokus di pusat-pusat pertumbuhan, melainkan juga menjangkau wilayah dengan kepadatan rendah melalui peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan peluang ekonomi, guna mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata dan berkelanjutan.



[3] Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting untuk memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan, yang pada gilirannya berguna untuk merencanakan kebutuhan dasar seperti infrastruktur pelayanan publik dan fasilitas umum lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ini antara lain adalah angka kelahiran, angka kematian, serta arus migrasi masuk dan keluar. Apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai positif, hal ini berarti jumlah kelahiran dan pendatang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang meninggal atau keluar dari wilayah tersebut. Sebaliknya, laju pertumbuhan negatif terjadi ketika jumlah kematian dan penduduk yang keluar lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran dan penduduk yang datang.

Tabel 2. 35
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	2,25	0,45	1,38	1,09	0,31
Tempilang	2,60	1,24	1,70	2,40	2,02
Mentok	2,34	0,82	1,49	2,22	1,29
Simpang Teritip	3,82	1,12	1,67	1,93	2,35
Jebus	2,99	0,92	2,00	2,65	1,71
Parittiga	2,97	0,65	2,28	3,09	2,24
Kabupaten Bangka Barat	2,76	0,84	1,72	2,21	1,60

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel di atas mengenai pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kecamatan Tahun 2020–2024, terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tingkat kabupaten mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 2,76%, sementara pertumbuhan terendah tercatat pada Tahun 2021 sebesar 0,84%. Setelah mengalami perlambatan tersebut, laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 2,21% pada 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 1,60% pada Tahun 2024. Hal ini mencerminkan dinamika demografis yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti arus migrasi, kelahiran, dan kematian.

Secara spasial, Kecamatan Simpang Teritip mencatat pertumbuhan tertinggi pada awal periode (2020) sebesar 3,82%, dan mempertahankan tren



pertumbuhan cukup tinggi di tahun-tahun berikutnya dengan mencapai 2,35% pada 2024. Kecamatan Parittiga juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil, misalnya 3,09% pada 2023 dan 2,24% pada 2024, menunjukkan dinamika penduduk yang aktif, kemungkinan karena faktor ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kecamatan Kelapa mengalami laju pertumbuhan paling rendah secara konsisten dibandingkan kecamatan lainnya. Tahun 2021 hanya tercatat 0,45%, dan terus menurun menjadi 0,31% pada 2024. Ini menunjukkan kecenderungan stagnasi atau rendahnya daya tarik demografis, yang bisa berkaitan dengan keterbatasan fasilitas ekonomi atau sosial. Kecamatan Mentok, sebagai pusat pemerintahan, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup stabil, dengan puncaknya pada Tahun 2023 sebesar 2,22%, sebelum sedikit menurun pada 2024 (1,29%). Sementara Jebus mencatat angka pertumbuhan tertinggi Tahun 2023 sebesar 2,65%, tetapi mulai menurun pada Tahun 2024.

Analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, meskipun dengan variasi antar kecamatan. Kecenderungan pertumbuhan yang tinggi terutama di Simpang Teritip, Parittiga, dan Mentok perlu diantisipasi dengan kebijakan perencanaan ruang, infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai. Di sisi lain, kecamatan dengan pertumbuhan rendah seperti Kelapa memerlukan strategi intervensi yang tepat untuk meningkatkan daya tarik wilayah, seperti pembangunan ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan fasilitas layanan dasar. Dengan demikian, pengelolaan pertumbuhan penduduk yang seimbang menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

[4] Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, angka kematian, serta mobilitas penduduk (migrasi) yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin. Rasio Penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2. 36

Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	110,11	109,80	109,09	109,36	109,78
Tempilang	109,02	108,72	109,60	109,72	109,72
Mentok	103,82	103,54	103,20	103,23	103,43
Simpang Teritip	104,72	104,44	104,65	104,89	105,85
Jebus	107,08	106,79	106,62	106,41	106,91
Parittiga	107,52	107,23	106,99	107,13	107,52
Kabupaten Bangka Barat	106,72	106,43	106,31	106,41	106,80

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, rasio jenis kelamin di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih banyak dibandingkan perempuan di seluruh kecamatan. Rasio jenis kelamin diukur sebagai perbandingan jumlah laki-laki terhadap 100 perempuan, dan pada tingkat kabupaten nilainya berkisar antara 106,31 hingga 106,80, yang berarti terdapat sekitar 106-107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Secara spasial, Kecamatan Kelapa mencatat rasio tertinggi hampir setiap tahun, dengan nilai mencapai 110,11 pada 2020 dan 109,78 pada 2024, menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang cukup signifikan. Rasio tinggi ini dapat mencerminkan aktivitas ekonomi berbasis tenaga kerja laki-laki seperti pertanian atau perkebunan yang dominan di wilayah tersebut.

Kecamatan Mentok, sebagai pusat pemerintahan, menunjukkan rasio yang relatif stabil, dengan nilai berkisar antara 103,53 hingga 103,83, yang cenderung lebih seimbang dibandingkan kecamatan lainnya. Sementara itu, Kecamatan Parittiga juga mencatat nilai cukup tinggi, mencapai 107,23 pada 2021 dan tetap berada di atas 106 sepanjang periode, mencerminkan kecenderungan serupa dalam struktur penduduk. Kecamatan Simpang Teritip memiliki rasio jenis kelamin yang tertinggi pada tahun 2022, yaitu 105,84, dan tetap berada di atas 104 sepanjang periode. Sementara Kecamatan Jebus memperlihatkan rasio paling rendah di tahun 2021 sebesar 106,79, tetapi meningkat kembali menjadi 107,91 pada 2024.

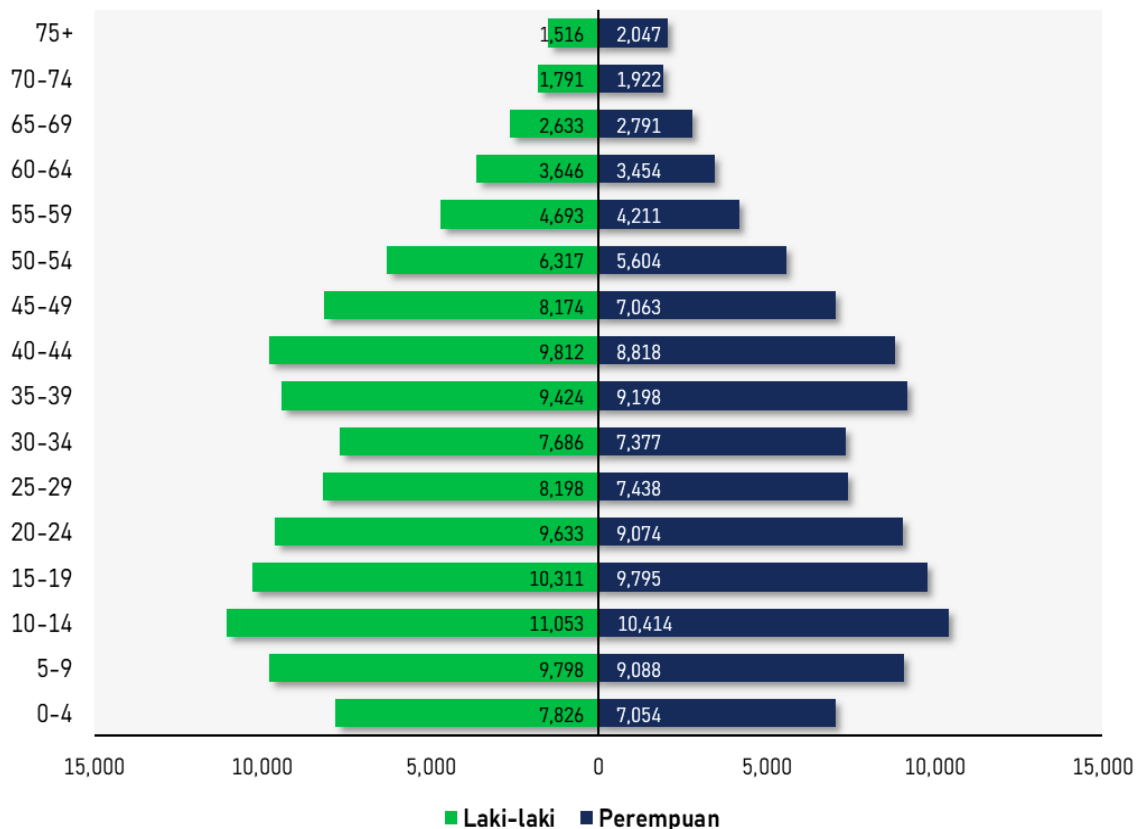
Rasio jenis kelamin yang selalu di atas 100 di seluruh kecamatan menunjukkan adanya ketidakseimbangan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti migrasi kerja laki-laki, struktur demografi usia produktif, atau perbedaan angka kelahiran dan kematian. Implikasi dari rasio jenis kelamin yang tidak seimbang perlu diperhatikan dalam perencanaan sosial dan ekonomi, khususnya dalam kebijakan tenaga kerja, pelayanan kesehatan reproduksi, serta pembangunan

berbasis gender yang inklusif dan responsif terhadap dinamika penduduk lokal.

B. Penduduk Menurut Kelompok Usia

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dimanfaatkan untuk menghitung angka beban ketergantungan (dependency ratio). Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu kelompok umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas, terhadap jumlah penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan menjadi salah satu indikator demografi yang penting karena dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, berarti semakin besar beban yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif dalam menopang kebutuhan hidup penduduk yang belum atau tidak lagi berada dalam usia kerja. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang rendah mencerminkan bahwa beban tersebut lebih ringan, sehingga potensi pembangunan ekonomi cenderung lebih besar karena proporsi tenaga kerja yang lebih dominan.

Gambar 2. 15
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025



Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (dapat dilihat pada gambar di atas), komposisi penduduk menunjukkan struktur yang relatif produktif dan seimbang, meskipun masih terdapat ciri khas populasi berkembang dengan dasar yang lebar. Penduduk usia muda (0–14 tahun) tetap mendominasi bagian bawah piramida, terutama kelompok usia 10–14 tahun yang terdiri dari 11.053 laki-laki dan 10.414 perempuan, serta kelompok usia 5–9 tahun dengan 9.798 laki-laki dan 9.088 perempuan. Hal ini menandakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, akan ada lonjakan penduduk usia produktif baru yang memasuki pasar kerja.

Di kelompok usia produktif (15–64 tahun), proporsi penduduk cukup besar dan merata, dengan dominasi terbesar pada kelompok umur 40–44 tahun (9.812 laki-laki dan 8.818 perempuan) serta kelompok 20–24 tahun (9.633 laki-laki dan 9.074 perempuan). Kekuatan kelompok usia ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat saat ini berada dalam masa bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia kerja lebih tinggi dibandingkan dengan usia non-produktif. Hal ini dapat menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila disertai dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit, terlihat dari kelompok 70–74 tahun yang hanya terdiri dari 1.791 laki-laki dan 1.922 perempuan, serta kelompok usia 75 tahun ke atas sebanyak 1.516 laki-laki dan 2.047 perempuan. Komposisi ini mencerminkan bahwa beban ketergantungan dari penduduk lanjut usia terhadap penduduk produktif masih relatif rendah.

C. Penduduk Menurut Agama

Informasi mengenai komposisi penduduk berdasarkan agama sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan sosial di Kabupaten Bangka Barat. Data ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan kebutuhan akan sarana dan prasarana peribadatan, tetapi juga sebagai referensi dalam merancang program yang mendorong keharmonisan antarumat beragama. Sampai dengan Tahun 2024, masyarakat Kabupaten Bangka Barat menganut enam agama utama, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, serta satu aliran kepercayaan hingga Tahun 2023. Keberagaman ini menggambarkan pluralitas masyarakat yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun kehidupan sosial yang



inklusif dan toleran. Lebih lengkapnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat menurut agama dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2020-2024

No	Agama	Penduduk Menurut Agama (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	184.121	190.367	193.995	198.543	193.510
2	Protestan	2.902	3.049	3.028	3.062	3.026
3	Katolik	981	1.023	1.041	1.083	1.175
4	Hindu	18	24	28	32	43
5	Budha	8.142	8.089	7.938	7.220	6.705
6	Konghucu	3.682	3.690	3.757	3.743	6.186
7	Kepercayaan	7	4	4	3	N/A

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, mayoritas penduduk Kabupaten Bangka Barat menganut agama Islam, dengan jumlah yang terus meningkat dari 184.121 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 193.510 jiwa pada Tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan tren pertumbuhan penduduk secara keseluruhan di wilayah ini. Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan juga menunjukkan fluktuasi kecil, dengan angka tertinggi pada Tahun 2023 sebanyak 3.062 jiwa, meskipun sedikit menurun menjadi 3.026 jiwa pada Tahun 2024. Sementara itu, pemeluk agama Katolik mengalami peningkatan yang stabil dari 981 jiwa di tahun 2020 menjadi 1.175 jiwa pada Tahun 2024, mencerminkan keberlangsungan dan pertumbuhan masyarakat penganut agama ini.

Agama Buddha juga memiliki jumlah penganut yang cukup signifikan, meskipun mengalami tren penurunan dari 8.899 jiwa pada 2021 menjadi 6.705 jiwa pada Tahun 2024. Hal serupa terjadi pada pemeluk agama Konghucu yang sempat stabil di angka 3.600-an jiwa namun mengalami lonjakan signifikan pada Tahun 2024 menjadi 6.186 jiwa. Penganut agama Hindu dan aliran kepercayaan relatif sangat kecil, dengan masing-masing tidak lebih dari 50 orang dalam lima tahun terakhir.

Secara umum, data ini mencerminkan keragaman keyakinan di Kabupaten Bangka Barat yang perlu dikelola dengan prinsip keadilan dan inklusivitas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh kelompok agama memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik dan fasilitas keagamaan. Di sisi lain, pertumbuhan dan penurunan jumlah pemeluk agama tertentu juga dapat menjadi indikator sosial yang perlu ditelaah lebih lanjut dalam konteks dinamika sosial, urbanisasi, atau migrasi internal. Oleh karena itu, data ini tidak hanya berfungsi sebagai statistik administratif, tetapi juga

sebagai alat analisis sosial untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap realitas masyarakat multikultural.

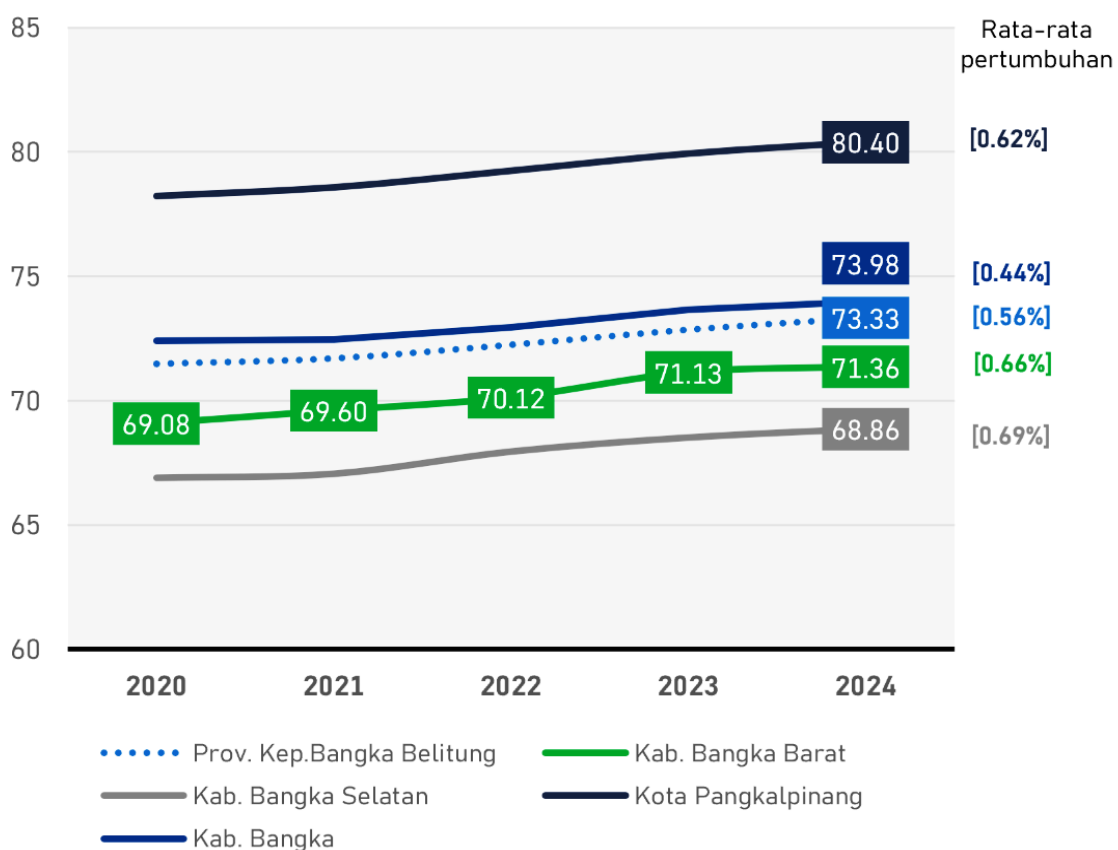
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), akses terhadap pendidikan yang layak, dan standar hidup yang layak. IPM menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat tercapai dalam konteks pembangunan daerah.

Gambar 2. 16
Rata-Rata Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Barat dan Kota/Kabupaten Lainnya di Provinsi Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Grafik di atas memperlihatkan tren pertumbuhan IPM di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, seluruh daerah menunjukkan tren peningkatan



IPM, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan IPM dari 69,08 pada tahun 2020 menjadi 71,36 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan bertahap dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

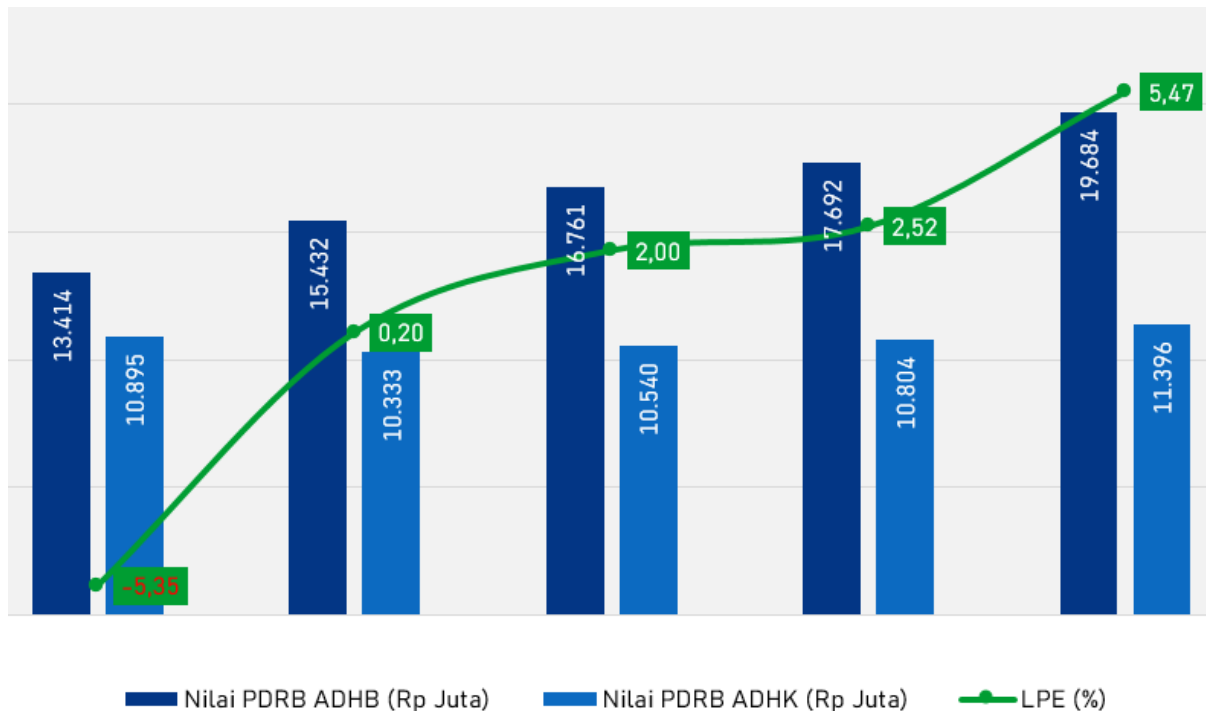
Dibandingkan daerah lain, Kota Pangkalpinang secara konsisten berada pada peringkat tertinggi dengan capaian IPM sebesar 80,40 pada tahun 2024 dan rata-rata pertumbuhan 0,62% per tahun, menandakan kualitas pembangunan manusia yang sudah sangat tinggi. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 0,69% per tahun, meskipun nilai IPM-nya masih berada di bawah Bangka Barat, yaitu 68,86 pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa daerah dengan IPM awal yang relatif rendah cenderung mengalami akselerasi pembangunan yang lebih cepat.

Secara regional, rata-rata IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 tercatat sebesar 73,33 dengan pertumbuhan tahunan 0,56%. Capaian IPM Bangka Barat yang masih berada di bawah rata-rata provinsi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan manusia di wilayah ini, terutama melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, strategi pembangunan SDM di Kabupaten Bangka Barat ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi keluarga, serta penyediaan kesempatan belajar sepanjang hayat yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya setahun. PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi di daerah dan menjadi salah satu ukuran utama pertumbuhan ekonomi. Adapun LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) sendiri mengukur seberapa cepat PDRB suatu wilayah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, LPE menunjukkan perubahan atau pertumbuhan PDRB antar tahun. Keduanya saling terkait erat: semakin tinggi PDRB, semakin tinggi kontribusinya terhadap LPE, yang pada akhirnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Gambar 2. 17
LPE dan PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

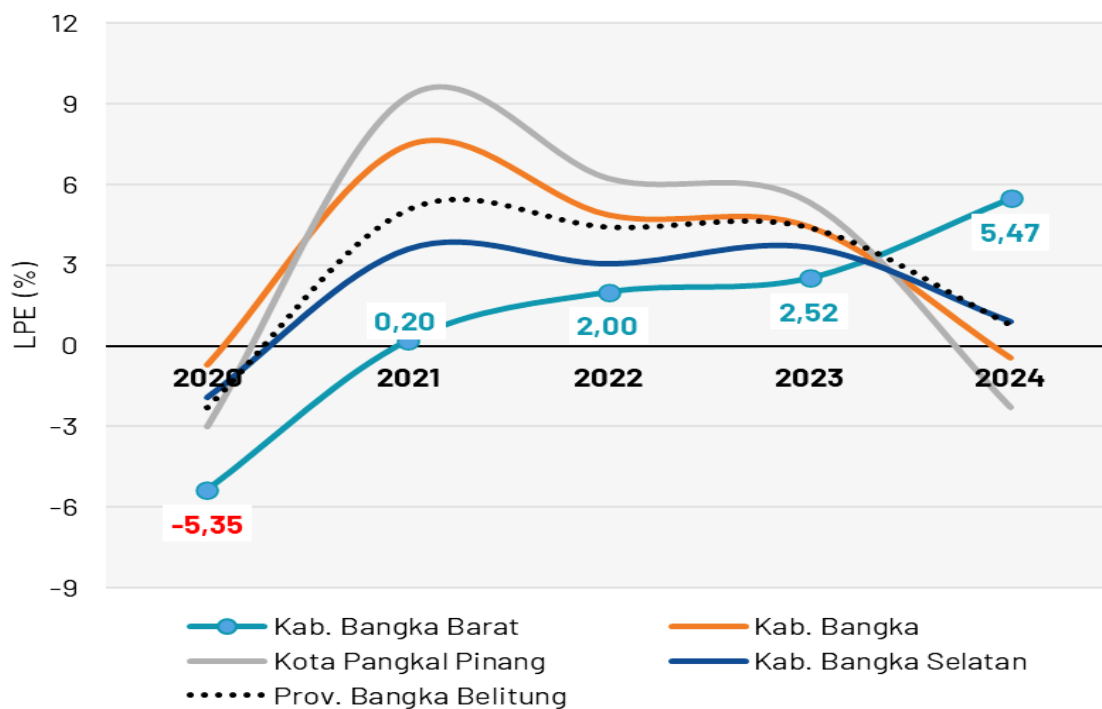
Perhitungan LPE didasarkan pada pertumbuhan PDRB yang mencerminkan penambahan nilai ekonomi pada periode 1 Tahun. Pertumbuhan LPE Kab. Bangka Barat menunjukan tren positif yang konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, meskipun terjadi kontraksi sebesar -5,35% dengan PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 10,31T. Pola LPE dan PDRB menggambarkan penurunan yang tajam akibat dampak pandemi, meskipun demikian pemulihan ekonomi di Kab. Bangka Barat berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya nilai PDRB ADHK dan LPE yang menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini berhasil tumbuh. Tercatat pada tahun 2023, angka LPE meningkat menjadi 2,52% dan 5,47% pada tahun 2024 yang merupakan angka tertinggi setelah pandemi, mencerminkan pemulihan ekonomi yang cukup signifikan.

Beberapa langkah strategis perlu dilakukan Pemerintah guna menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan memperkuat sektor-sektor yang mendukung pemulihan seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Kebijakan yang mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru akan sangat membantu dalam meningkatkan LPE lebih lanjut. Pemerintah perlu menciptakan dan mendukung iklim usaha yang lebih kondusif dengan mempermudah proses

perizinan dan memberikan insentif kepada pengusaha, terutama yang bergerak di sektor-sektor unggulan Kab Bangka Barat. Secara keseluruhan, pencapaian LPE yang positif pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat terus berupaya menuju pemulihan ekonomi, untuk menjaga momentum tersebut pemerintah perlu melanjutkan upaya yang konsisten dengan strategi yang lebih terencana dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan terus berkembang di masa depan.

Aspek kesejahteraan ekonomi juga dilakukan perbandingan berbagai indikator-indikator ekonomi Kab Bangka Barat dengan Kota Pangkalpinang yang merupakan Ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kabupaten/kota yang Berbatasan Langsung (Darat) dengan Bangka Barat, yaitu Kabupaten Bangka (bagian timur) dan Kabupaten Bangka Selatan (bagian tenggara). Perbandingan LPE Kabupaten Bangka Barat dengan kabupaten/kota sekitar serta Provinsi Bangka Belitung memberikan gambaran tentang bagaimana perekonomian di daerah tersebut berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 18
Perbandingan LPE dengan Kabupaten/ Kota sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025



Pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan yang cukup tajam dengan LPE sebesar -5,35%. Angka penurunan ini lebih buruk dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain sekitarnya dan Bangka Belitung, meskipun mengalami pertumbuhan negatif namun tidak sedalam penurunan yang terjadi di Bangka Barat. Pada tahun 2021, pemulihan mulai terlihat di Bangka Barat dengan LPE positif sebesar 0,20%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti Kota Pangkal Pinang yang mengalami pemulihan lebih cepat dengan LPE sebesar 9,27%.

Performa ekonomi Kabupaten Bangka Barat semakin membaik pada tahun 2022 dan 2023 namun masih lebih rendah dibandingkan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung. Di tahun 2024, LPE Kabupaten Bangka Barat mencapai 5,47% ini menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah pandemi, tercatat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya termasuk Provinsi Bangka Belitung dengan LPE sebesar 0,77%. Angka LPE meningkat tajam menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tidak hanya pulih tetapi juga berkembang pesat, sementara beberapa daerah lain masih menghadapi tantangan untuk kembali ke jalur pertumbuhan positif.

C. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran jumlah nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun per kapita. Pola PDRB per kapita di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat tercatat sebesar Rp 65,71 ribu, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, angka ini mencapai Rp 91,21 ribu, menunjukkan kenaikan yang stabil dan berkelanjutan sepanjang periode tersebut. Pencapaian ini juga tercermin dari rata-rata pertumbuhannya (selama 2021-2024) yang cukup tinggi, yakni 8,6%.

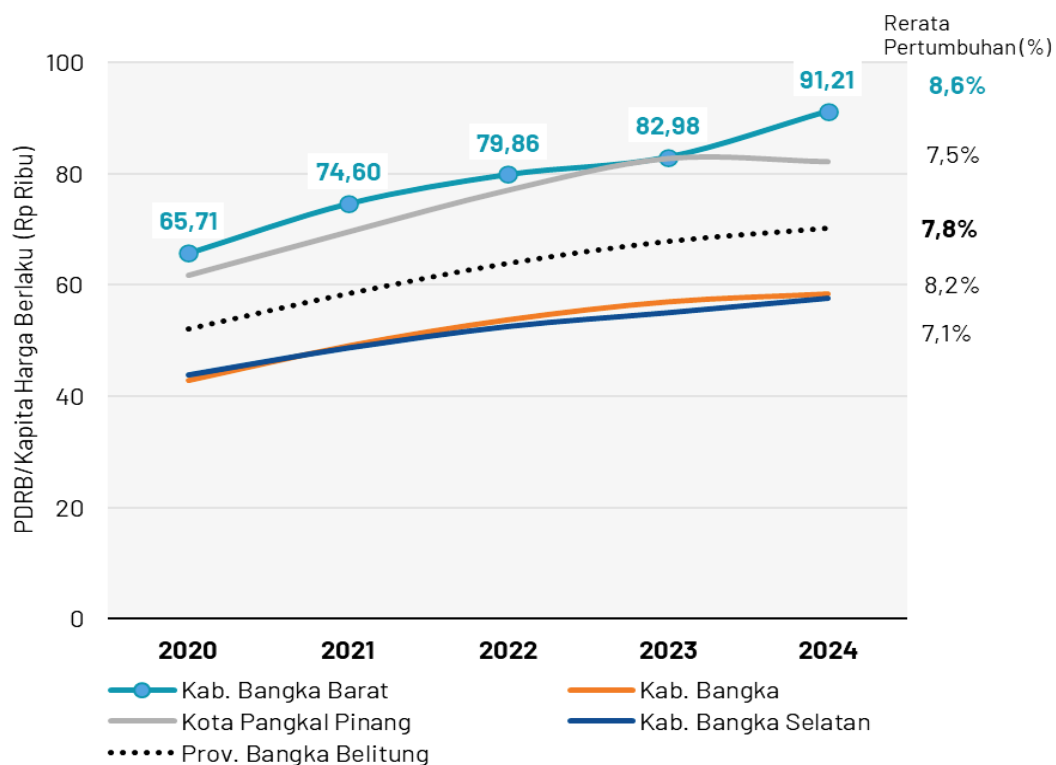
Dibandingkan dengan daerah lainnya, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat terus mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Pada tahun 2024, Kabupaten Bangka Barat memiliki angka PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten sekitar bahkan dengan Kota Pangkal Pinang Rp 82,19 ribu dan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 70,19 ribu pada 2024.

Tren positif ini mencerminkan keberhasilan ekonomi Kabupaten Bangka Barat dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif, dengan sektor-sektor pendorong ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Keberhasilan ini juga menunjukkan

adanya upaya yang efektif dalam meningkatkan daya saing daerah, yang tentu saja berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun tren PDRB per kapita menunjukkan kemajuan yang sangat positif, penting bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ini. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor-sektor unggulan yang dapat meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan terus mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, Kabupaten Bangka Barat dapat memastikan pemerataan kesejahteraan yang lebih luas di masa depan.

Gambar 2. 19
Perbandingan PDRB per Kapita Harga Berlaku dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



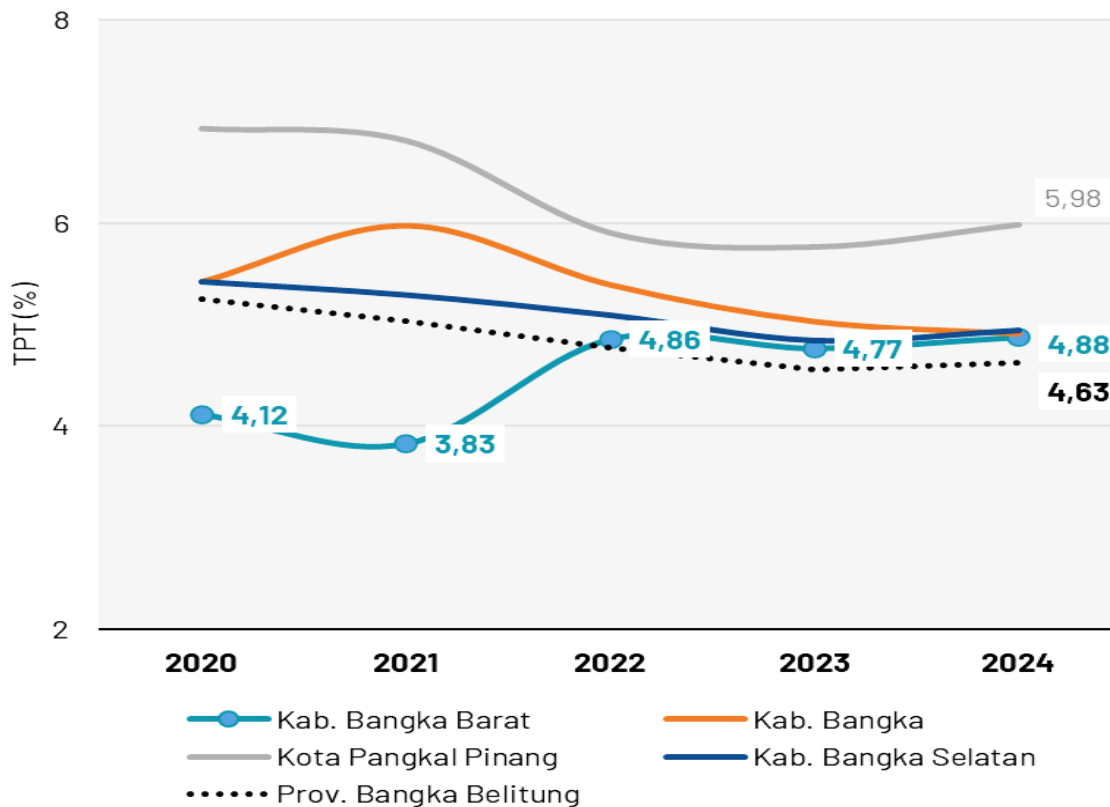
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

D. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan seberapa banyak angkatan kerja yang belum dapat terserap dalam dunia kerja, dan angka yang lebih rendah menandakan kondisi ekonomi yang lebih sehat dengan lebih banyaknya peluang kerja. TPT di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuasi, dengan tren yang cenderung meningkat

di akhir periode. Meskipun ada penurunan TPT yang signifikan pada 2021, angka TPT di Kabupaten Bangka Barat pada 2024 sebesar 4,88%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan Kab/Kota sekitarnya Namun, TPT Kabupaten Bangka Barat masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 4,63%. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun TPT sempat mengalami perbaikan, tingkat pengangguran di Bangka Barat masih menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penguatan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, serta peningkatan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mengurangi angka pengangguran ke depannya.

Gambar 2. 20
Perbandingan TPT dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Pada tahun 2021, Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan pertumbuhan TPT sebesar -7,0%, yang menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2022, terjadi



lonjakan yang cukup tinggi dengan angka pertumbuhan TPT sebesar 26,9%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran meningkat drastis, dan kondisi ini mungkin terkait dengan dampak dari pandemi yang mengganggu stabilitas lapangan pekerjaan. Pola ini berbanding terbalik dengan Kab/Kota sekitar serta Bangka Belitung dimana daerah-daerah tersebut mengalami penurunan TPT. Pada tahun 2023, Kabupaten Bangka Barat mencatatkan penurunan TPT yang menunjukkan terjadinya sedikit pemulihan. Selanjutnya Pada tahun 2024, TPT di Kabupaten Bangka Barat mengalami sedikit peningkatan dengan angka 2,3%.

Kondisi TPT yang ditunjukkan pada kolom merah ini menandakan bahwa meskipun ada perbaikan, situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya pulih. Idealnya, TPT seharusnya mengalami penurunan, bukan kenaikan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu lebih fokus dalam memperbaiki kualitas SDM, peningkatan ketrampilan khususnya di sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri lokal. Pemerintah juga perlu mempercepat program-program penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan agar TPT bisa mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 2. 38
Pertumbuhan TPT dengan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

Pertumbuhan TPT (%)	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka	Kota Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Prov. Bangka Belitung
2021	-7,0%	10,1%	-1,7%	-2,40%	-4,2%
2022	26,9%	-9,7%	-13,4%	-3,78%	-5,2%
2023	-1,9%	-6,7%	-2,4%	-4,91%	-4,4%
2024	2,3%	-2,4%	3,8%	2,07%	1,5%
Rata-rata	5,1%	-2,2%	-3,4%	-2,3%	-3,1%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

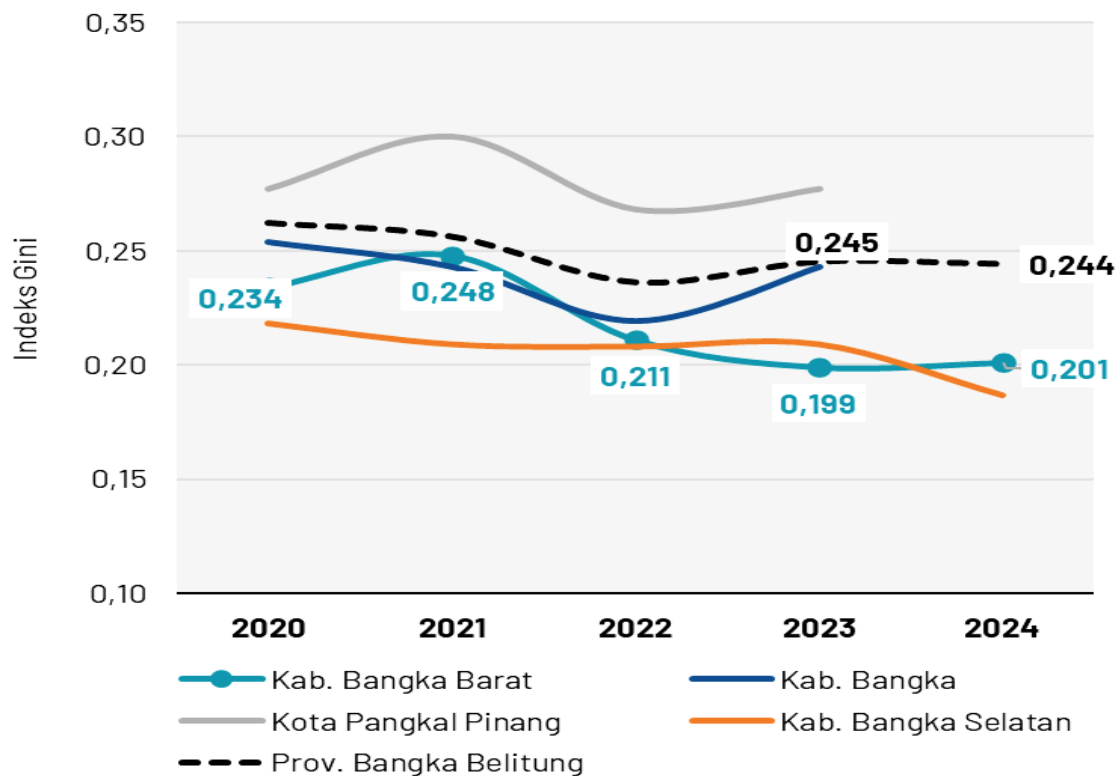
E. Indeks Gini Rasio

Gini rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah. Nilai Gini rasio berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 berarti distribusi pendapatan sangat merata (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), dan 1 berarti distribusi sangat timpang (semua pendapatan dikuasai oleh satu orang). Semakin tinggi nilai Gini rasio, semakin besar ketimpangan ekonomi yang terjadi. Sebaliknya, semakin rendah nilai Gini rasio, semakin merata pendapatan antar penduduk.

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang konsisten. Nilai indeks tercatat sebesar 0,234 pada tahun 2020 dan sempat meningkat menjadi 0,248

pada 2021. Namun, tren membaik mulai terlihat sejak 2022 dan mencapai titik terendah di angka 0,199 pada 2023. Pada tahun 2024, indeks Gini Bangka Barat mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,201, namun tetap berada dalam kategori rendah dan menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2. 21
Perbandingan Indeks Gini Rasio dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota sekitar, Bangka Barat masih menempati posisi yang cukup baik. Pada 2024, Bangka Selatan mencatat indeks sebesar 0,187 dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,244. Hal ini menegaskan bahwa secara regional, Bangka Barat memiliki tingkat ketimpangan yang terkendali dan mendekati pola distribusi pendapatan yang inklusif.

Lebih lanjut, rata-rata pertumbuhan tahunan indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama periode 2021-2024 tercatat sebesar -4,9%, menandakan penurunan ketimpangan dari tahun ke tahun. Tren ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Meskipun demikian, upaya pengurangan ketimpangan perlu terus diperkuat melalui



kebijakan yang mendukung inklusi ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan. Peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan vokasi, serta penguatan ekonomi lokal menjadi kunci untuk menjaga dan memperdalam capaian positif ini di masa mendatang.

Tabel 2. 39
Pertumbuhan Indeks Gini Rasio dengan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung Tahun 2021-2024

Pertumbuhan Indeks Gini Rasio (%)	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka	Kota Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Prov. Bangka Belitung
2021	6,0%	-4,3%	8,3%	-4,13%	-2,3%
2022	-14,9%	-9,9%	-10,7%	-0,48%	-7,8%
2023	-5,7%	11,0%	3,4%	0,48%	3,8%
2024				-10,53%	-0,4%
Rata-rata	-4,9%	-1,1%	0,3%	-3,7%	-1,7%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

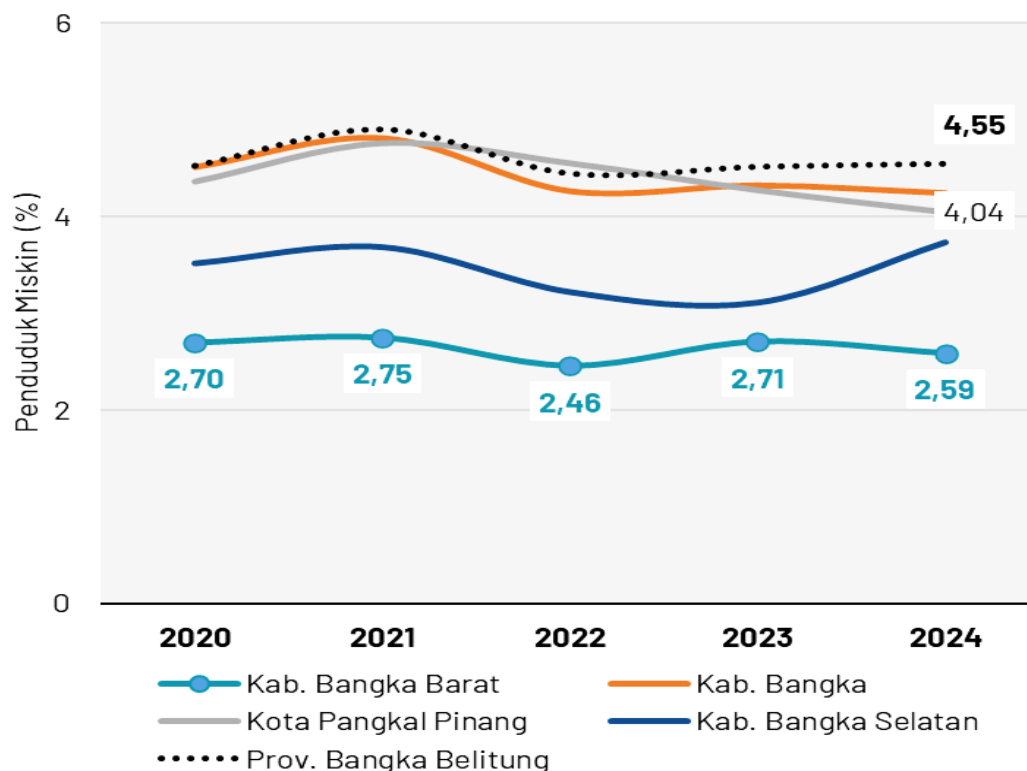
F. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan total penduduk, kemudian mengalikannya dengan 100. Persentase tersebut berfungsi sebagai indikator untuk memantau tingkat kesejahteraan dan mengukur efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Bangka Barat tetap rendah dan stabil, mencerminkan keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat tercatat sebesar 2,70%, dan meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2,75%, angka ini kembali menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 2,46%, dan terus berlanjut turun hingga 2,59% pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat, yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten/ kota lainnya.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,59% lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Bangka Belitung masing-masing 4,04% dan 4,55%. Meskipun terjadi sedikit penurunan di Provinsi Bangka Belitung dan Kota Pangkal Pinang, angka kemiskinan di kedua daerah ini tetap lebih tinggi, yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 2. 22
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dengan lebih efektif, meskipun tantangan pengentasan kemiskinan masih ada. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan sosial dan ekonomi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak kembali meningkat.

Tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan penduduk miskin di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Bangka Belitung, termasuk Bangka Barat. Secara rata-rata, pertumbuhan penduduk miskin di Bangka Barat tercatat sebesar -0,7%. Artinya, selama periode ini terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Bangka Barat, meskipun laju penurunannya masih relatif moderat dibandingkan kabupaten/ kota lainnya.

Dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka menunjukkan penurunan yang lebih signifikan, masing-masing -1,7% dan -1,3%. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan justru



mengalami pertumbuhan positif penduduk miskin sebesar 2,2%, menandakan adanya peningkatan kemiskinan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Provinsi Bangka Belitung mencatatkan pertumbuhan penduduk miskin rata-rata 0,3%, yang menandakan kenaikan meskipun tidak terlalu besar.

Fenomena di Bangka Barat ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam mengurangi kemiskinan, laju pengurangan kemiskinan di Bangka Barat belum sekuat beberapa wilayah lain, sehingga masih menjadi fokus penting untuk kebijakan pembangunan ke depan.

Tabel 2. 40
Pertumbuhan Penduduk Miskin dengan Kab/Kota Sekitar dan Bangka Belitung Tahun 2021-2024

Pertumbuhan Penduduk Miskin(%)	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka	Kota Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Prov. Bangka Belitung
2021	1,9%	6,7%	9,2%	4,83%	8,2%
2022	-10,5%	-11,4%	-4,4%	-12,74%	-9,2%
2023	10,2%	1,4%	-6,2%	-3,42%	1,6%
2024	-4,4%	-1,9%	-5,4%	20,26%	0,7%
Rata-rata	-0,7%	-1,3%	-1,7%	2,2%	0,3%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

G. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja

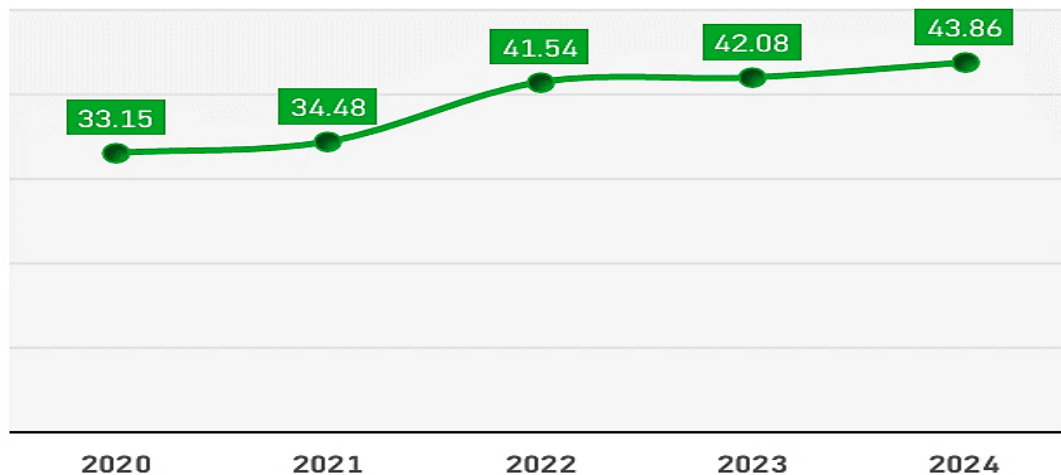
Sebagai salah satu tolok ukur penting dalam kesejahteraan ekonomi, persentase pekerja terdidik yang terserap di pasar kerja secara langsung mencerminkan kemampuan ekonomi daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Indikator ini menjadi cerminan penting dari daya serap pasar kerja lokal terhadap tenaga kerja terdidik, sekaligus mengukur keberhasilan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data, pada tahun 2020 persentase pekerja terdidik berada di angka 33,15% dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 43,86% pada tahun 2024. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2022, di mana angkanya melonjak menjadi 41,54%. Lonjakan ini mencerminkan momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mulai menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi lebih tinggi secara lebih optimal.

Tren positif yang berkelanjutan ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, adanya penguatan struktur ekonomi daerah yang semakin membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik. Kedua, ini menjadi sinyal membaiknya keselarasan (link and match) antara output sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan ini merupakan salah

satu indikator kunci dalam kesejahteraan ekonomi, karena secara langsung menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan berhasil diterjemahkan menjadi peluang kerja yang produktif bagi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup.

Gambar 2. 23
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2025

2) Kesehatan untuk Semua

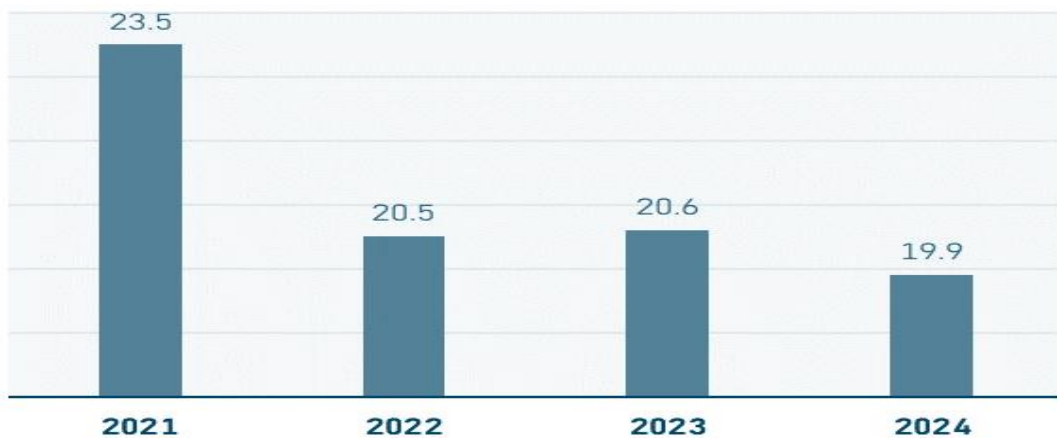
A. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya dan berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, penurunan daya tahan tubuh, serta rendahnya produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Prevalensi stunting di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren penurunan secara umum selama periode 2021 hingga 2024, meskipun sempat stagnan di tengah periode. Pada tahun 2021, angka stunting berada pada tingkat tertinggi, yaitu 23,5%. Angka ini kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 20,5% pada tahun 2022, yang mencerminkan keberhasilan intervensi awal dalam percepatan penurunan stunting, baik melalui program spesifik seperti pemberian gizi maupun program sensitif seperti peningkatan sanitasi dan edukasi gizi keluarga. Namun pada tahun 2023, angka prevalensi sedikit meningkat menjadi 20,6%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam

mempertahankan tren penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti cakupan program yang belum merata, tantangan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, atau kurangnya kepatuhan terhadap praktik pemberian makan anak yang baik.

Gambar 2. 24
Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Bangka Barat, 2025

Meski demikian, pada tahun 2024 tren menunjukkan perbaikan dengan penurunan prevalensi stunting menjadi 19,9%. Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa Kabupaten Bangka Barat berada di jalur yang tepat menuju target nasional. Target tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2024 sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

B. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting untuk mengukur kesehatan masyarakat, layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan hidup. UHH menunjukkan tren kenaikan yang stabil selama lima tahun terakhir, meskipun dengan kenaikan moderat sekitar 0,1–0,2 tahun per tahun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, gizi, dan sanitasi, dengan fokus pada layanan primer di pedesaan, pencegahan penyakit kronis, dan penanganan kelompok rentan.

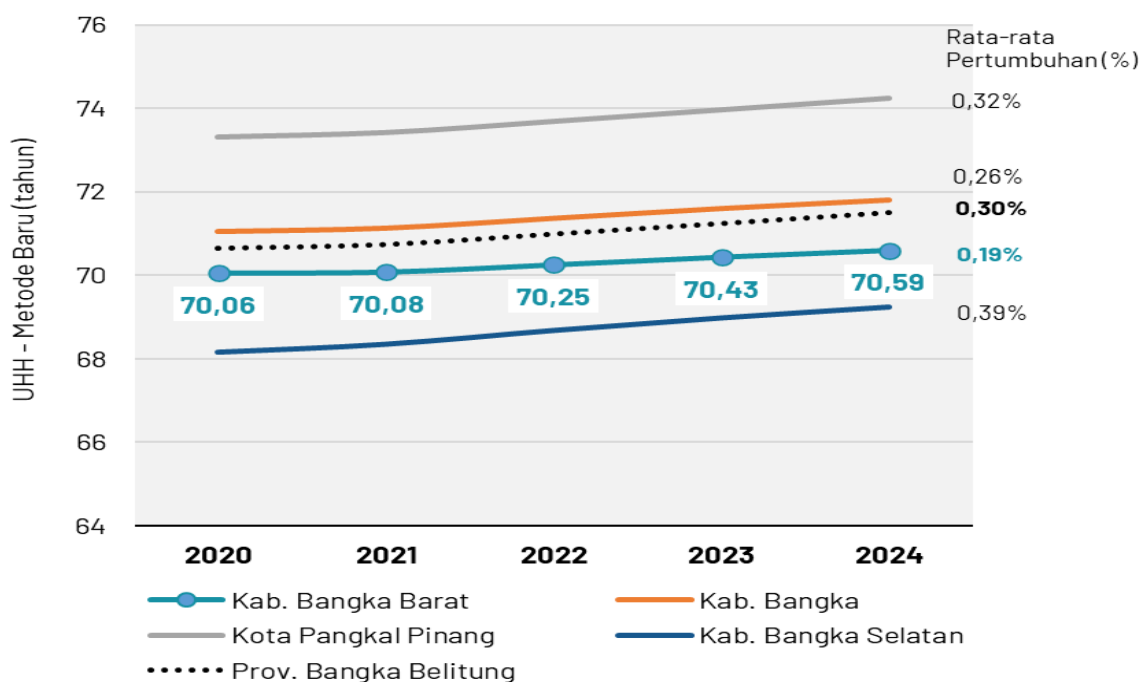
UHH Kabupaten Bangka Barat mengalami tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Bangka Barat tercatat sebesar 70,06 tahun. Angka ini perlahan meningkat menjadi 70,08 tahun pada 2021, 70,25 tahun pada 2022, 70,43 tahun pada 2023, dan akhirnya mencapai 70,59 tahun pada 2024.

Meskipun angka pertumbuhan UHH Kabupaten Bangka Barat tergolong moderat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19%, hal ini tetap menunjukkan adanya perbaikan secara perlahan. Peningkatan ini kemungkinan mencerminkan adanya peningkatan layanan kesehatan dasar, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta program kesehatan yang mulai berjalan dengan baik.

Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan rata-rata Provinsi Bangka Belitung, UHH Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah mereka. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa upaya-upaya peningkatan kualitas hidup dan layanan kesehatan di Bangka Barat perlu terus ditingkatkan agar kesenjangan tersebut bisa dipersempit.

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk terus memperbaiki angka UHH, namun dibutuhkan intervensi yang lebih terarah. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi menjadi beberapa faktor kunci yang harus terus diperkuat dalam rencana pembangunan ke depan. Dengan demikian, peningkatan UHH di Kabupaten Bangka Barat diharapkan tidak hanya berjalan stabil, tetapi juga semakin cepat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Gambar 2. 25
Perbandingan UHH dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

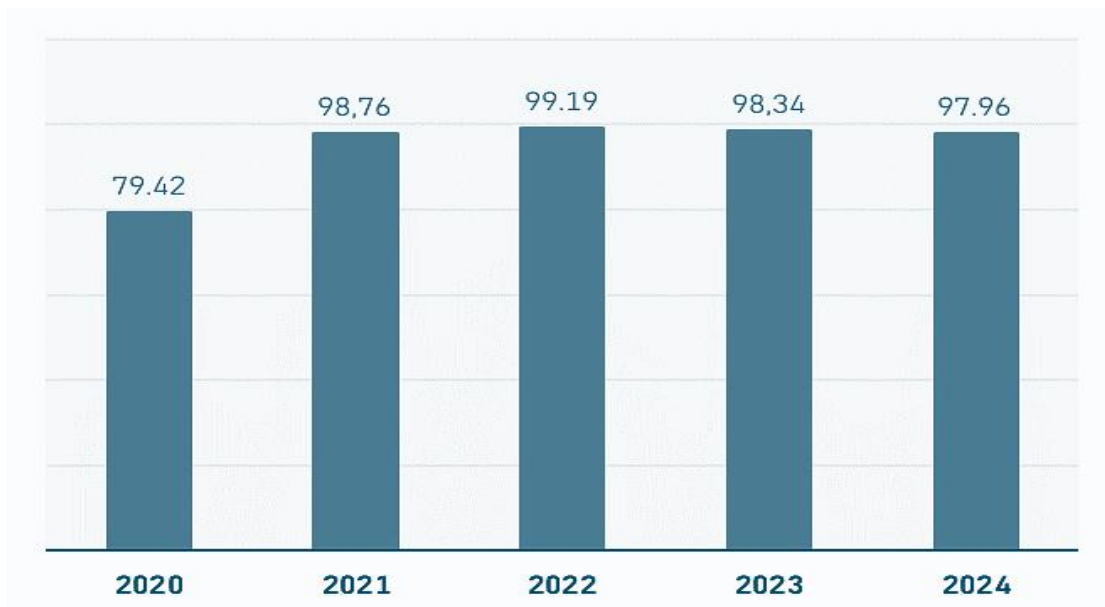
C. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Setelah membahas indikator Usia Harapan Hidup yang mencerminkan capaian pembangunan kesehatan secara jangka panjang, penting juga untuk meninjau indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu fondasi sistem perlindungan sosial yang mendukung akses layanan kesehatan secara merata di masyarakat. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif JKN, baik melalui jalur mandiri, bantuan iuran (PBI), maupun sebagai pekerja formal, dan mencerminkan sejauh mana perlindungan kesehatan telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Berdasarkan grafik capaian di Kabupaten Bangka Barat, terlihat peningkatan signifikan dari 79,42% pada tahun 2020 menjadi 97,89% pada 2021 dan mencapai puncaknya sebesar 99,19% di tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 98,51% dan 97,96%, cakupan tersebut tetap menunjukkan hampir seluruh penduduk telah terlindungi oleh skema jaminan kesehatan. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, namun tetap membutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan, validitas data kepesertaan, serta kesinambungan pembiayaan agar partisipasi tetap tinggi dan tidak bersifat temporer.

Gambar 2. 26

Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



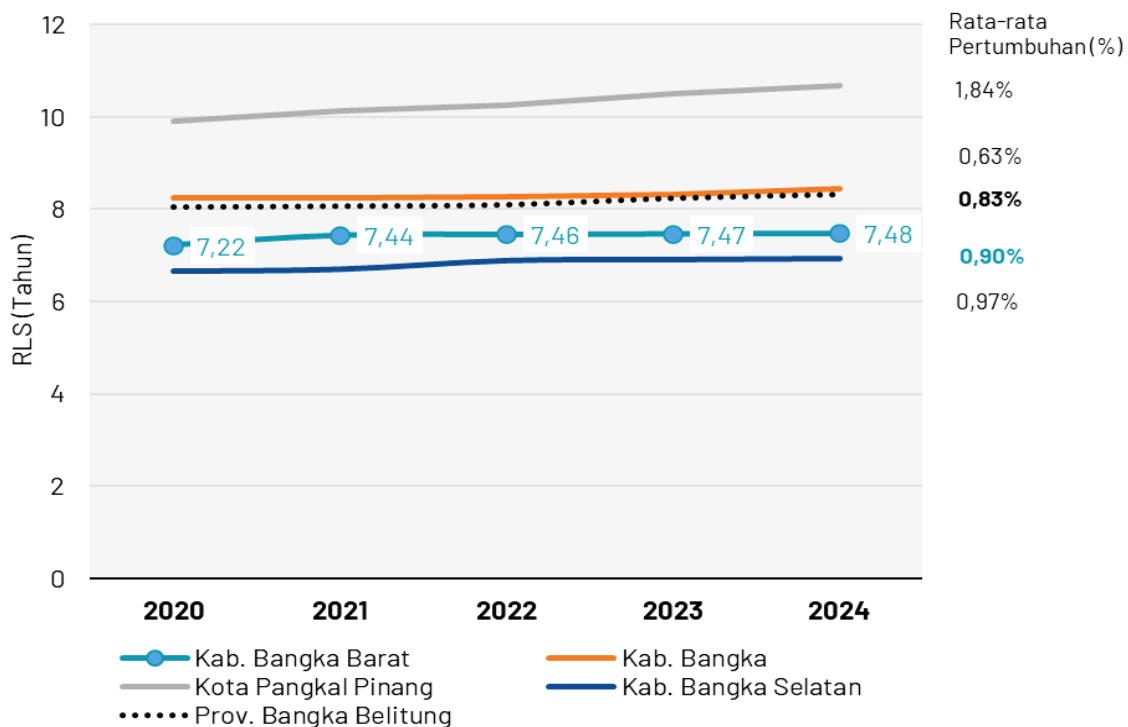
Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2025

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting yang mengukur jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini tidak hanya mencerminkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi cerminan kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren peningkatan RLS yang cukup konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 7,22 tahun dan meningkat secara bertahap menjadi 7,48 tahun pada 2024. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,90%, capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan provinsi yang sebesar 0,83%. Meski demikian, posisi RLS Kabupaten Bangka Barat masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka yang telah mencapai angka di atas 8 tahun.

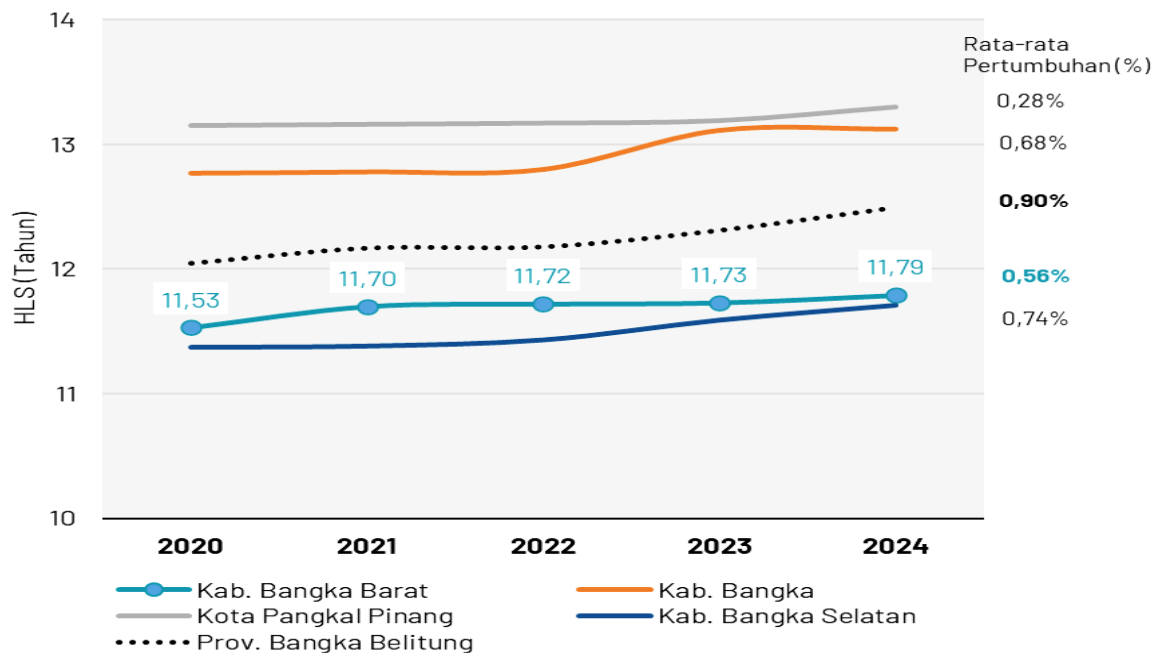
Gambar 2. 27
Perbandingan RLS dengan Kabupateb/Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Rendahnya angka RLS di Kabupaten Bangka Barat dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pendidikan lanjutan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil yang belum sepenuhnya terlayani oleh fasilitas pendidikan menengah. Kedua, tingkat partisipasi sekolah di jenjang SMP dan SMA masih belum optimal, yang mengindikasikan bahwa banyak penduduk dewasa di Bangka Barat hanya menamatkan pendidikan dasar. Ketiga, tekanan sosial ekonomi, seperti kebutuhan untuk bekerja sejak usia muda di sektor informal seperti pertanian dan pertambangan rakyat, turut menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gambar 2. 28
Perbandingan HLS dengan Kabupaten/ Kota Sekitar dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Untuk meningkatkan RLS secara lebih signifikan, diperlukan upaya pembenahan yang menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain memperluas program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, membangun atau meningkatkan sarana pendidikan lanjutan di wilayah yang belum terjangkau, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik. Selain itu, penguatan program pendidikan nonformal dan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C juga perlu diperluas untuk menjangkau penduduk dewasa yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Dengan



intervensi yang tepat, RLS Kabupaten Bangka Barat memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup serta daya saing daerah dalam jangka panjang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menunjukkan perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang sedang bersekolah pada suatu periode tertentu. Data grafik memperlihatkan bahwa HLS di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan secara bertahap dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 11,53 tahun pada 2020 menjadi 11,79 tahun pada 2024. Laju pertumbuhan ini berada pada angka 0,56%, yang meskipun terbilang moderat, tetap mencerminkan adanya perbaikan akses dan motivasi pendidikan di wilayah tersebut.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Bangka Belitung, HLS Bangka Barat masih berada di bawah Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Bangka Belitung yang menempati posisi tertinggi. Kota Pangkal Pinang menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan angka HLS yang lebih tinggi, menggambarkan kualitas pendidikan yang sudah lebih mapan. Sementara itu, Kabupaten Bangka mencatatkan tren pertumbuhan yang relatif cepat, khususnya pada tahun 2023 dan 2024, yang mendorong posisinya mendekati Kota Pangkal Pinang.

Kabupaten Bangka Selatan, meskipun memiliki angka HLS yang lebih rendah dari Bangka Barat, juga menunjukkan perbaikan bertahap. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan masih menjadi isu utama yang sedang dihadapi secara umum oleh wilayah kabupaten/ kota di Bangka Belitung. Kondisi di Kabupaten Bangka Barat yang menunjukkan peningkatan HLS, meski laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan daerah lain, menjadi sinyal bahwa masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penguatan intervensi. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa dan dorongan bagi keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan HLS ke depan. Tren ini menjadi pijakan optimisme bahwa dengan intervensi kebijakan yang lebih fokus dan kolaborasi antar sektor, Kabupaten Bangka Barat dapat terus memperbaiki capaian HLS dan mengejar ketertinggalan dari daerah sekitar, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan generasi muda di masa mendatang.

B. Indeks Literasi

Angka atau kemampuan literasi adalah indikator penting yang mengukur sejauh mana peserta didik mampu memahami, menggunakan,

mengevaluasi, dan terlibat secara aktif dalam proses membaca dan menulis. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur kualitas pendidikan dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan pembelajaran yang lebih lanjut.

Pada jenjang SD, angka literasi tercatat berada pada angka 70,64% pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan cukup tajam menjadi 55,21% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 angka ini berhasil mengalami rebound yang cukup signifikan menjadi 73,93%. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi fluktuasi dalam kualitas pembelajaran di tingkat SD, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adaptasi kurikulum, ketersediaan tenaga pengajar, maupun situasi pasca pandemi yang memengaruhi proses belajar-mengajar.

Sementara itu, pada jenjang SMP, angka literasi juga mengalami fluktuasi, meski tidak sedrastis di tingkat SD. Pada tahun 2022, angka literasi SMP berada pada 72,22%, lalu turun menjadi 65,55% pada 2023. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dengan angka literasi kembali naik menjadi 72,25%. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan pada tahun 2023, upaya perbaikan dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan di tingkat SMP mulai memberikan hasil positif.

Fluktuasi yang terjadi pada kedua jenjang ini menjadi refleksi bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi di Kabupaten Bangka Barat masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam hal kesinambungan program literasi, pelatihan guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Konsistensi dalam pembinaan dan dukungan terhadap pembelajaran literasi menjadi kunci untuk menjaga tren positif yang mulai terlihat pada tahun 2024. Dengan demikian, meski menghadapi tantangan di beberapa tahun terakhir, optimisme tetap dapat dijaga untuk peningkatan literasi yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan merata.

Tabel 2. 41
Angka/Kemampuan Literasi pada Rapor Pendidikan Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Literasi (%)	
	SD	SMP
2022	70,64	72,22
2023	55,21	65,55
2024	73,93	72,25

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat 2021-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang mengukur sejauh mana kemampuan literasi dan aktivitas membaca menjadi



bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. IPLM mencakup aspek ketersediaan sarana literasi (seperti perpustakaan, taman baca), tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, dan kemampuan dasar membaca serta menulis yang menjadi pondasi pembangunan pengetahuan.

Dari grafik yang ditampilkan, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan pada capaian IPLM di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, angka IPLM berada di level 35,48, yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber literasi. Nilai ini bahkan sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 34,07 pada tahun 2022, yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas literasi masyarakat, serta adaptasi kebijakan dalam penyediaan layanan literasi di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur.

Namun, memasuki tahun 2023, IPLM Kabupaten Bangka Barat mengalami lonjakan yang sangat signifikan, melonjak ke angka 78,87. Lonjakan ini mengindikasikan adanya intervensi yang kuat dan terarah dari pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mendorong kembali budaya literasi setelah masa pemulihan pandemi. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi adalah optimalisasi program literasi berbasis komunitas, penguatan peran perpustakaan desa, serta adanya kampanye literasi yang lebih gencar di sekolah-sekolah dan di ruang publik.

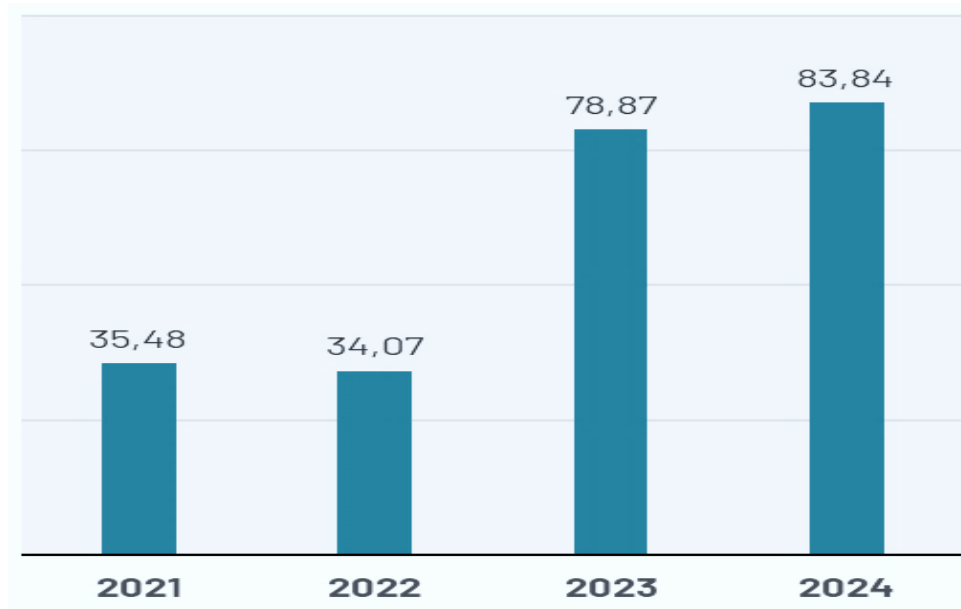
Peningkatan yang konsisten pada tahun 2024, dengan capaian IPLM sebesar 83,84, menjadi bukti bahwa upaya membangun ekosistem literasi yang inklusif dan merata mulai memberikan hasil nyata. Peningkatan ini juga menandakan adanya kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat mengenai pentingnya literasi sebagai modal utama dalam pembangunan diri dan peningkatan kesejahteraan.

Meski demikian, angka IPLM yang sebelumnya fluktuatif di tahun-tahun awal menjadi pengingat bahwa pembangunan literasi tidak hanya soal program jangka pendek, tetapi perlu didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, perpustakaan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan akses literasi yang merata, meningkatkan kualitas tenaga pengelola literasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Keberhasilan Kabupaten Bangka Barat dalam memperbaiki IPLM hingga mencapai level yang lebih baik pada 2024 adalah pijakan yang penting. Namun, upaya konsisten dan inovatif tetap diperlukan agar literasi tidak hanya menjadi capaian angka, tetapi juga menjadi budaya yang mengakar di tengah masyarakat. Dengan demikian, literasi dapat benar-benar menjadi fondasi

utama untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas wawasan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 2. 29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2021-2024



Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat 2021-2024

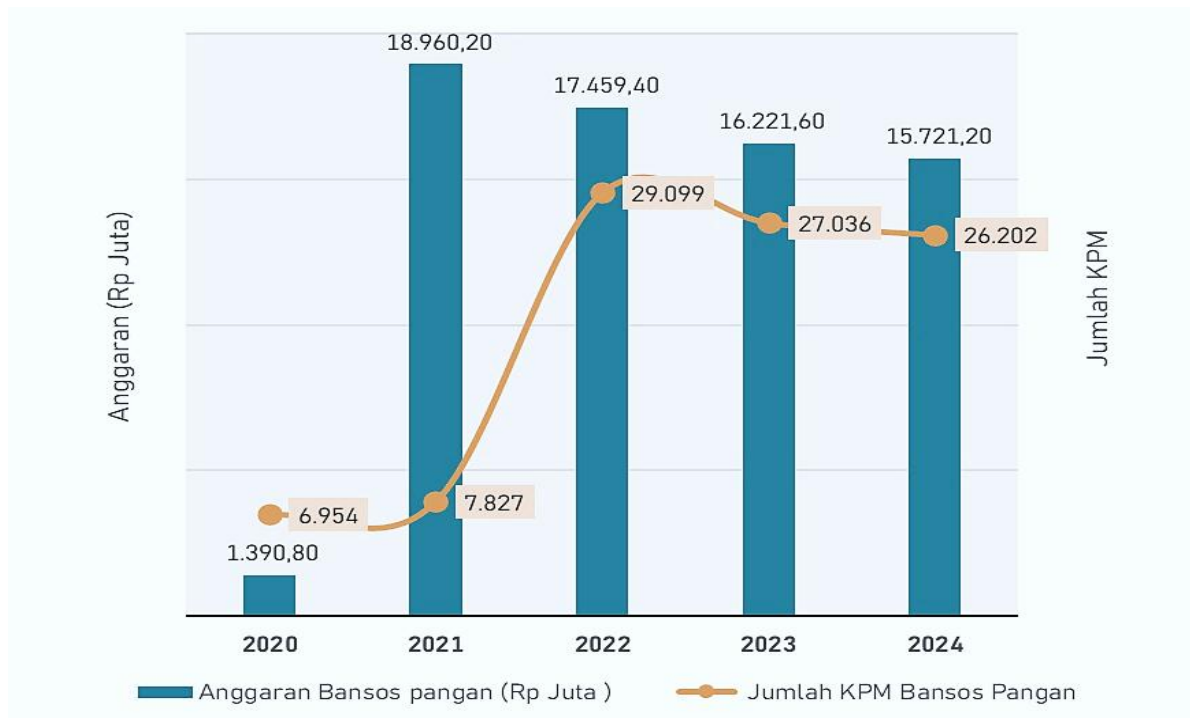
4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif. Di Kabupaten Bangka Barat, pelaksanaan kebijakan ini tampak melalui penyediaan bantuan sosial pangan yang menyasar kelompok masyarakat rentan secara konsisten. Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan tercatat stabil, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjaga kontinuitas intervensi sosial terhadap rumah tangga miskin dan berisiko. Program bansos ini menjadi garda depan dalam menjaga ketahanan sosial, khususnya dalam merespons tekanan ekonomi akibat pandemi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Pada tahun 2024, sebanyak 7.860 penerima manfaat tercatat menerima bantuan sosial pangan di Bangka Barat, dengan total anggaran mencapai Rp16,93 miliar. Dari jumlah tersebut, 6.484 kepala keluarga menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp15,56 miliar. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada 1.090 penerima perorangan sebesar Rp1,15 miliar dan 286 kepala keluarga dengan total Rp214,5 juta. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dukungan dana

pusat menandakan bahwa sistem perlindungan sosial di daerah masih memerlukan penguatan dari sisi fiskal dan kelembagaan lokal agar lebih mandiri dan responsif.

Gambar 2. 30
Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2025

Arah penguatan perlindungan sosial di daerah ini dapat didorong melalui perluasan partisipasi program jaminan sosial, baik bagi pekerja formal maupun informal. Pemerintah daerah dapat meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk sektor informal seperti nelayan, petani, pekerja harian, dan pelaku UMKM. Di samping itu, akurasi dan pembaruan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi prasyarat penting agar intervensi sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga adaptif terhadap kondisi darurat seperti bencana, inflasi, dan krisis ekonomi lokal.



Tabel 2. 42
Penerima Bantuan Anggaran Bansos Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Penerima Bantuan Anggaran Bansos Pangan	Penerima	Anggaran (Rp)
Penerima Bantuan (Perorangan) dari APBD	1.090	1.155.240.000
Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dari APBD	286	214.500.000
Penerima Bantuan (KK) dari APBN	6.484	15.561.600.000

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2025

Tingginya jumlah penerima bantuan sosial juga mencerminkan masih adanya ketimpangan kesejahteraan yang signifikan di tengah masyarakat. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sensitivitas sosial yang tinggi; namun di sisi lain, dibutuhkan transformasi perlindungan sosial dari yang bersifat kuratif menuju perlindungan sosial produktif. Dengan memperkuat keterhubungan antara program bantuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan kerja, dan perlindungan tenaga kerja, Kabupaten Bangka Barat dapat membangun sistem sosial yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan, menuju masyarakat yang lebih inklusif dan resilien.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Data yang ditampilkan memberikan gambaran mengenai ketersediaan rumah peribadatan di Kabupaten Bangka Barat, yang menjadi salah satu indikator penting dalam mencerminkan keragaman agama dan toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. Berdasarkan tabel, terdapat beberapa jenis rumah peribadatan yang tersebar di berbagai kecamatan, antara lain masjid, mushola, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, vihara, dan klenteng.

Rumah peribadatan yang paling dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah masjid dan mushola, dengan jumlah masing-masing sebanyak 230 dan 283 unit. Hal ini mencerminkan mayoritas penduduk Kabupaten Bangka Barat yang beragama Islam, serta menunjukkan tingginya ketersediaan fasilitas ibadah untuk mendukung kehidupan spiritual masyarakat Muslim.

Selain itu, tercatat juga 4 gereja Protestan dan 21 gereja Katolik yang tersebar di beberapa kecamatan. Ini menunjukkan keberagaman agama yang diakomodasi oleh pemerintah daerah melalui ketersediaan rumah ibadah bagi umat Kristen dan Katolik. Sementara itu, tercatat pula 9 vihara dan 29 klenteng yang menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha dan Konghucu. Tidak terdapat data mengenai pura di Kabupaten Bangka Barat, yang menunjukkan



bahwa komunitas Hindu di wilayah ini kemungkinan kecil atau tidak memiliki rumah ibadah resmi.

Tabel 2. 43
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, 2022–2024

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
Kelapa	40	49	-	1	-	-	1
Tempilang	27	34	-	2	-	-	2
Mentok	97	93	1	9	-	4	10
Simpang Teritip	23	46	-	3	-	-	3
Jebus	24	30	1	-	-	1	1
Parittiga	19	31	2	6	-	4	12
Kabupaten Bangka Barat	230	283	4	21	-	9	29

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Keberadaan rumah peribadatan yang beragam ini menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan keharmonisan sosial di Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan rumah-rumah ibadah ini dapat berfungsi optimal, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Namun, meski ketersediaan rumah ibadah telah merata, tantangan ke depan adalah memastikan pemerataan kualitas fasilitas, perawatan, dan dukungan bagi aktivitas keagamaan yang inklusif, sehingga semua umat beragama merasa nyaman dan aman dalam menjalankan ibadahnya. Dengan demikian, kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka Barat dapat terus terjaga.

Selain ketersediaan sarana ibadah, penguatan peran agama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan sosial juga dapat diukur melalui Indeks Zakat Nasional (IZN), yang menjadi salah satu indikator kinerja sosial-keagamaan di tingkat daerah. IZN merupakan ukuran komposit yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menilai kontribusi zakat dalam pembangunan, meliputi aspek pengelolaan zakat, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan mustahik, serta penguatan kohesi sosial dan toleransi antar-umat beragama.

Tabel 2. 44
Indeks Zakat Nasional Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2030

Penilaian	2025	2026
Indeks Zakat Nasional	0,20	0,23

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, nilai Indeks Zakat Nasional di Kabupaten Bangka Barat diarahkan meningkat secara bertahap dengan



target awal 0,20 pada Tahun 2025 dan ditargetkan 0,23 di Tahun 2026. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah bersama BAZNAS untuk memperluas cakupan layanan zakat, meningkatkan efektivitas distribusi, dan mengoptimalkan program pemberdayaan mustahik agar berdampak berkelanjutan. Keberhasilan mencapai target tersebut bergantung pada sinergi erat antara pengelola zakat, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat secara profesional, transparan, dan terukur. Setelah meninjau peran zakat dalam memperkuat kesejahteraan dan kohesi sosial melalui capaian Indeks Zakat Nasional, pembahasan berikutnya akan menyoroti pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kohesi sosial masyarakat Bangka Barat.

Kabupaten Bangka Barat memiliki kekayaan warisan budaya yang menjadi salah satu aset penting dalam mendukung pembangunan daerah. Data menunjukkan perkembangan positif dalam jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan dan dilakukan pemeringkatan selama periode 2020 hingga 2024. Cagar budaya merupakan bagian penting dari warisan sejarah dan identitas masyarakat lokal, sehingga pelestariannya menjadi indikator strategis dalam pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Tabel 2. 45
Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan	24	24	24	28	33
a	Benda cagar budaya	2	2	2	2	6
b	Bangunan cagar budaya	17	17	17	20	20
c	Struktur cagar budaya	5	5	5	6	7
d	Situs cagar budaya	0	0	0	0	0
e	Kawasan cagar budaya	0	0	0	0	0
2	Pemeringkatan Cagar Budaya	24	24	24	28	33
a	Cagar budaya tingkat nasional	2	2	2	2	2
b	Cagar budaya tingkat provinsi	11	11	11	11	11
c	Cagar budaya tingkat kabupaten	11	11	11	15	20

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2025

Pada Tahun 2020, jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan sebanyak 24 unit, terdiri dari 2 benda cagar budaya, 17 bangunan, dan 5 struktur. Jumlah ini tetap konstan hingga Tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 28 unit pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 33 unit pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini terutama berasal dari penambahan bangunan dan struktur cagar budaya, termasuk lonjakan jumlah benda cagar budaya dari hanya 2 unit menjadi 6 unit pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya



intensifikasi proses identifikasi dan penetapan oleh pemerintah daerah, serta respons positif dari masyarakat terhadap pentingnya pelestarian aset budaya.

Pemeringkatan cagar budaya menunjukkan pola yang sejalan dengan penetapan. Jumlah cagar budaya yang telah diberi peringkat meningkat dari 24 pada tahun 2020 menjadi 28 pada tahun 2023 dan 33 pada tahun 2024. Cagar budaya tingkat nasional tetap berjumlah 2 unit sepanjang periode, sementara tingkat provinsi stabil di angka 11 unit. Perubahan terjadi pada cagar budaya tingkat kabupaten, yang meningkat dari 11 unit menjadi 15 unit pada 2023, dan kemudian melonjak menjadi 20 unit pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin aktif dalam melakukan klasifikasi tingkat pelestarian sesuai kewenangan.

Stabilitas dan tren peningkatan jumlah cagar budaya yang dilestarikan mencerminkan komitmen Kabupaten Bangka Barat dalam menjaga warisan sejarah sebagai bagian integral dari identitas daerah. Tidak hanya fokus pada pelestarian fisik, proses ini juga merupakan bagian dari edukasi masyarakat mengenai nilai-nilai historis dan pentingnya menjaga memori kolektif. Selain itu, peningkatan jumlah peringkat pada level kabupaten menjadi indikator bahwa pelestarian tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi, melainkan turut diarusutamakan dalam kebijakan lokal.

Tantangan kedepannya yang perlu dihadapi adalah memastikan bahwa upaya pelestarian ini tidak berhenti pada penetapan administratif semata. Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata berbasis budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus terus dikembangkan. Meningkatkan keterlibatan generasi muda, mengintegrasikan materi pelestarian ke dalam kurikulum sekolah, dan menciptakan kegiatan kreatif di sekitar situs budaya merupakan langkah strategis agar pelestarian cagar budaya benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan.

Sanggar seni merupakan salah satu wadah penting untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal, sekaligus sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan memperkuat identitas budaya daerah. Berdasarkan tabel di atas, tercatat total ada 92 sanggar seni yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Parittiga menempati posisi tertinggi dengan 26 sanggar seni, diikuti oleh Kecamatan Mentok dengan 17 sanggar seni. Kecamatan Simpang Teritip memiliki 15 sanggar seni, sementara Kecamatan Jebus dan Kelapa masing-masing tercatat memiliki 13 dan 11 sanggar seni. Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Simpang Teritip berada pada posisi terbawah dengan jumlah masing-masing 5 dan 15 sanggar seni.



Sebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat relatif merata, dengan beberapa kecamatan yang memiliki konsentrasi sanggar seni lebih tinggi. Hal ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan karakteristik budaya, kepadatan penduduk, dan dukungan dari pemerintah daerah maupun komunitas lokal yang mendorong munculnya sanggar seni sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.

Fenomena tingginya jumlah sanggar seni di Parittiga, Mentok, dan Simpang Teritip mengindikasikan bahwa wilayah ini menjadi pusat aktivitas seni budaya yang cukup aktif. Sanggar-sanggar seni ini tidak hanya menjadi tempat latihan dan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pelestarian nilai-nilai tradisi, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata budaya dan ekonomi kreatif.

Tantangan yang muncul ke depan adalah memastikan keberlanjutan aktivitas sanggar seni ini melalui pembinaan, dukungan infrastruktur, dan program yang mampu mendorong inovasi seni budaya lokal. Upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menjaga agar sanggar seni tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga sebagai ruang yang produktif dan inklusif bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2. 46
Data Sanggar Seni per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kelapa	14
2	Tempilang	10
3	Mentok	32
4	Simpang Teritip	14
5	Jebus	12
6	Parittiga	10
Total		92

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2025

Setelah meninjau capaian jumlah tempat peribadatan, pelestarian cagar budaya, dan keberadaan sanggar seni yang mencerminkan dimensi fisik dan kelembagaan dalam penguatan budaya dan spiritualitas masyarakat, penting untuk melengkapi analisis tersebut dengan indikator kuantitatif yang lebih menyeluruh, yaitu Indeks Pelestarian Kebudayaan. Indikator ini merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan lokal secara berkelanjutan.



Tabel 2. 47
Capaian Indeks Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
Indeks Pelestarian Kebudayaan	%	9,16	7,7

Sumber: LPPD Bangka Barat 2021-2024

Selanjutnya terdapat indikator Indeks Pelestarian Kebudayaan merupakan indikator yang mencerminkan upaya suatu daerah dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal, termasuk warisan budaya benda maupun tak benda, ekspresi seni, tradisi, bahasa, dan kelembagaan budaya. Di Kabupaten Bangka Barat, indeks ini baru mulai dihitung sejak tahun 2023, sehingga data yang tersedia masih terbatas untuk analisis tren jangka panjang.

Pada tahun pertama pencatatan, yakni 2023, indeks pelestarian kebudayaan Bangka Barat tercatat sebesar 9,16%. Namun, pada tahun 2024, nilai ini justru mengalami penurunan menjadi 7,7%, yang mengindikasikan berkurangnya intensitas atau efektivitas pelestarian budaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, seperti terbatasnya program perlindungan dan revitalisasi budaya lokal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, atau lemahnya dokumentasi dan pendataan aset budaya yang dimiliki daerah.

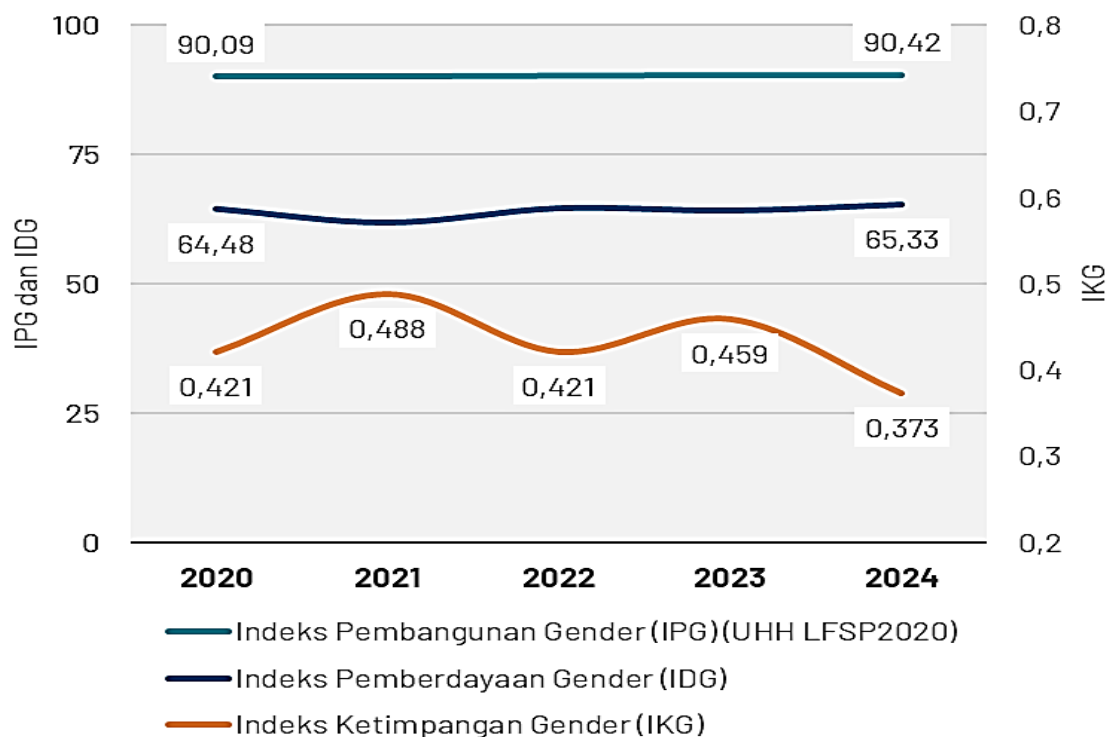
Kondisi ini menjadi catatan penting, mengingat pelestarian budaya tidak hanya berdampak pada identitas dan kohesi sosial masyarakat, tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui sektor pariwisata budaya dan industri kreatif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu memperkuat kebijakan dan program pelestarian kebudayaan, termasuk dengan melibatkan komunitas budaya, pendidikan, dan generasi muda dalam berbagai kegiatan dan inisiatif. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas institusi kebudayaan daerah dan penguatan kerja sama lintas sektor untuk mendukung upaya pelestarian yang lebih terukur dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap kelemahan dalam pelaksanaan program tahun sebelumnya juga penting sebagai dasar perbaikan ke depan.

6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan, khususnya terkait dengan kesempatan hidup yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki. IPG tidak hanya mencerminkan seberapa besar kesetaraan antara gender di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tetapi juga

memberikan gambaran umum mengenai kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan memperhitungkan akses dan hasil yang dicapai oleh masing-masing gender. IPG merupakan yang mengukur kesetaraan gender dalam hal kesempatan hidup yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai 90,09 dan terus meningkat hingga 90,42 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pembangunan gender Kabupaten Bangka Barat mengalami kemajuan yang sangat positif, dengan peningkatan kualitas hidup yang dirasakan oleh kedua gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Gambar 2. 31
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat 2021-2024

IPG yang terus mengalami kenaikan, dapat diartikan bahwa ada upaya yang lebih intensif dan efektif dalam mengurangi kesenjangan gender, sehingga perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang lebih setara terhadap berbagai sumber daya dan peluang. Selain itu, peningkatan IPG juga mencerminkan perubahan positif dalam persepsi masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki. Masyarakat semakin menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang memberikan peluang yang sama, tetapi juga tentang menghilangkan stereotip gender yang membatasi potensi individu,



baik perempuan maupun laki-laki. Sebagai contoh, peran perempuan dalam kepemimpinan dan sektor ekonomi yang lebih luas semakin mendapat pengakuan, yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai ranah yang didominasi oleh laki-laki.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG Kabupaten Bangka Barat menunjukkan kemajuan yang sangat positif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki berjalan ke arah yang benar, namun tetap diperlukan evaluasi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada guna memastikan keberlanjutan dan pemerataan hasil pembangunan gender ke depannya.

Sementara itu, pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mengukur pemberdayaan perempuan dalam hal pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan peran dalam sektor sosial-ekonomi, mengalami sedikit fluktuasi. IDG Bangka Barat tercatat sebesar 64,48 pada tahun 2020, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 65,33 pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan, fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kenaikan yang terjadi terbilang lambat, yang mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada upaya pemberdayaan perempuan, proses tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengubah struktur sosial dan ekonomi yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai IDG yang lebih tinggi, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis, termasuk pemberian akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial. Di samping itu, upaya untuk mengubah norma dan persepsi sosial tentang peran perempuan juga sangat penting agar mereka dapat memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal peluang dan akses, menunjukkan angka yang menurun secara signifikan dalam periode ini. Pada tahun 2020, IKG Kabupaten Bangka Barat tercatat 0,421, namun seiring berjalannya waktu, angka ini menurun menjadi 0,373 pada tahun 2024. Penurunan IKG ini menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender, di mana kesenjangan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil.

Meskipun IPG menunjukkan kemajuan positif di Kabupaten Bangka Barat, IDG dan IKG menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender.



Pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif, memperluas akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, fokus pada pendidikan dan pelatihan bagi perempuan serta penguatan peran mereka dalam sektor ekonomi dapat menjadi langkah strategis yang penting untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender yang lebih baik di masa depan.

Setelah membahas capaian IPG, IDG, dan IKG yang merefleksikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, penting untuk meninjau indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai cerminan kualitas dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial paling mendasar dalam masyarakat. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi utama dalam pembangunan keluarga, yaitu ketenteraman (harmoni keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, keterlibatan dalam kegiatan sosial), kemandirian (akses ekonomi, pendidikan, dan peran produktif), serta kebahagiaan (kepuasan hidup, hubungan emosional antar anggota keluarga).

Berdasarkan data capaian di Kabupaten Bangka Barat, skor IPK menunjukkan perbaikan dari 60,74 pada tahun 2023 menjadi 61,03 pada tahun 2024. Kenaikan skor ini, meskipun tidak terlalu besar, menunjukkan adanya pergerakan positif dalam indeks yang digunakan secara nasional untuk menilai pembangunan keluarga. Nilai IPK yang masih berada di kisaran awal 60-an mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kualitas keluarga tetap perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sosial daerah, terutama untuk memastikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mampu menjalankan perannya secara optimal dalam pembangunan manusia dan sosial secara berkelanjutan.

Tabel 2. 48

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	60,74	61,03

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Barat, 2025

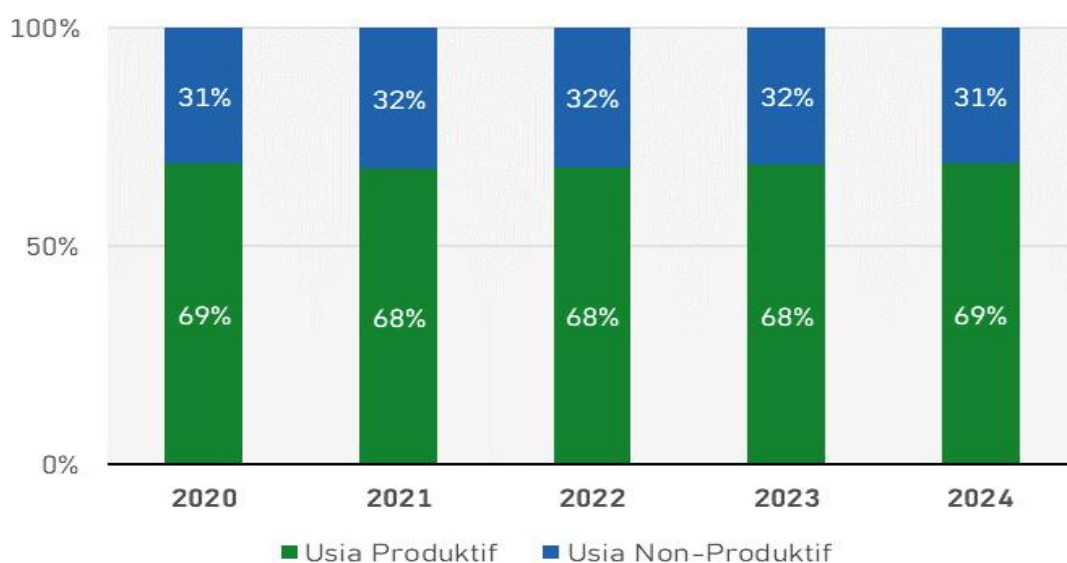
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama bagi pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan, karena kualitas SDM mempengaruhi produktivitas, inovasi, dan kapasitas adaptasi terhadap

perubahan ekonomi. Dalam konteks ini, penguatan SDM di Kabupaten Bangka Barat menjadi strategi yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memaksimalkan potensi bonus demografi. Dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencakup 68-69% dari total populasi pada tahun 2024, serta proporsi penduduk usia non-produktif yang relatif stabil pada angka 31%, kondisi demografis Kabupaten Bangka Barat menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan daya saing SDM.

Gambar 2. 32
Rasio Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



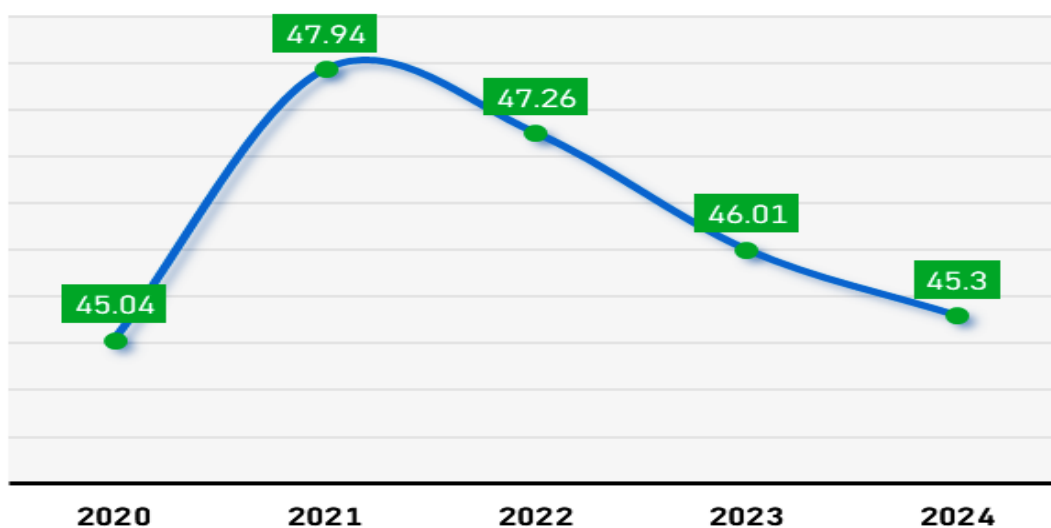
Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Sebagai langkah awal dalam mendorong daya saing SDM, rasio penduduk usia produktif terhadap non-produktif menjadi indikator penting untuk melihat keseimbangan struktural penduduk. Pada periode 2020-2024, penduduk usia produktif terus mendominasi, yang memberikan ruang besar bagi peningkatan kualitas tenaga kerja. Namun, rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan fluktuasi yang perlu dicermati. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk non-produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencerminkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia kerja.

Rasio ketergantungan penduduk Bangka Barat sempat melonjak pada 2021, tetapi kemudian pulih kembali, dengan angka 45,04 pada 2020 dan sedikit meningkat menjadi 45,30 pada 2024. Meskipun demikian, kenaikan kecil ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk

memaksimalkan pemanfaatan bonus demografi dengan kebijakan yang lebih terfokus pada penguatan sektor pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan kerja. Di sisi lain, meskipun jumlah lansia meningkat secara bertahap, tren ini masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Bangka Barat untuk merencanakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial serta layanan bagi lansia yang lebih memadai seiring dengan pertumbuhan penduduk lanjut usia.

Gambar 2. 33
Tingkat Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Tingkat pendidikan di Kabupaten Bangka Barat juga menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing SDM. Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada periode 2020-2023, terlihat bahwa lulusan pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) mendominasi, dengan rata-rata masing-masing sebesar 25,5% dan 22,5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dasar dan menengah cukup merata, namun kualitas tenaga kerja yang dihasilkan masih terbatas pada lapangan pekerjaan yang lebih rendah tingkat keterampilannya. Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah atas, lulusan SMA dan SMK menunjukkan perkembangan yang positif dengan rata-rata masing-masing 19% dan 16,5%, yang mencerminkan peningkatan kapasitas tenaga kerja di sektor-sektor yang lebih teknis dan terampil. Namun, meskipun terdapat perkembangan di tingkat pendidikan menengah, angka lulusan pendidikan tinggi masih terbatas. Rata-rata lulusan diploma hanya sebesar 8,5%, dan lulusan universitas sebesar 8%, yang menandakan adanya tantangan besar



dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan kesinambungan antara pendidikan dengan dunia kerja.

Keterbatasan akses pendidikan tinggi ini menciptakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, baik dalam hal peningkatan kualitas pendidikan tinggi maupun dalam penyediaan beasiswa dan pelatihan berbasis keterampilan. Keberlanjutan peningkatan kapasitas SDM di masa depan memerlukan investasi besar dalam sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, penguatan daya saing SDM Kabupaten Bangka Barat harus mencakup peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta pelatihan vokasi yang mengarah pada peningkatan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri dan ekonomi global.

Tabel 2. 49
Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/belum sekolah	Persen	26.42	26.42	17.97	19.24	20,65
Belum/tidak tamat SD	Persen	12.73	12.73	14.68	14.29	14,01
Tamat SD	Persen	29.95	29.95	31.65	30.98	30,29
Tamat SMP	Persen	12.24	12.24	15.43	15.35	14,98
Tamat SMA	Persen	15.14	15.14	16.51	16.31	16,11
Diploma I/II/III	Persen	1.38	1.38	1.36	1.34	1,32
Minimal S1	Persen	2.11	2.11	2.40	2.50	2,64

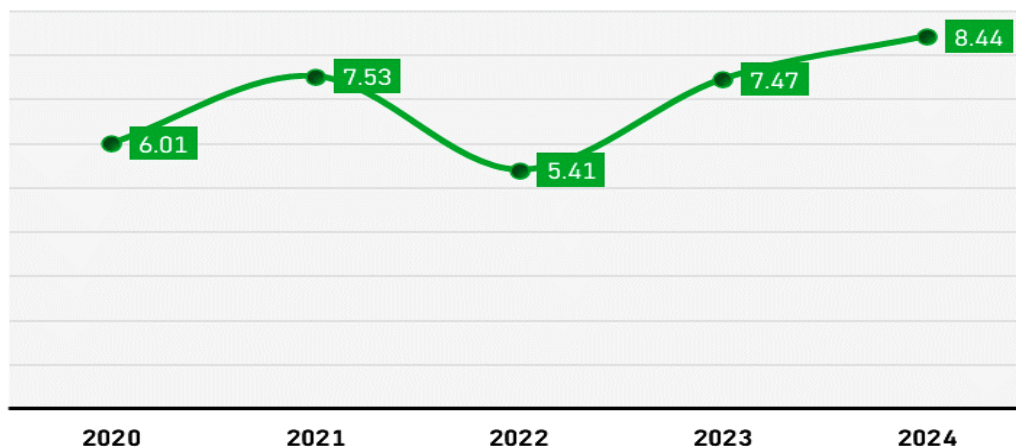
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2025

Dikutip dari sumber yang berbeda, terdapat pula data tambahan yang secara khusus memotret proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 0.1. Data ini berasal dari sumber berbeda dan berfokus pada kelompok usia produktif dan dewasa muda yang telah menyelesaikan jenjang Diploma (I/II/III) dan Sarjana (S1 ke atas), sehingga memberikan gambaran lebih terarah terhadap potensi tenaga kerja terampil di daerah. Indikator ini penting sebagai refleksi kesiapan SDM dalam mengakses lapangan pekerjaan berketerampilan menengah hingga tinggi, serta keterhubungannya dengan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan Gambar di bawah, capaian Kabupaten Bangka Barat dalam indikator ini menunjukkan tren fluktuatif namun secara umum meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tinggi tercatat sebesar 6,01%, meningkat

signifikan menjadi 7,53% pada 2021. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan cukup tajam di tahun 2022 menjadi 5,41%, sebelum kembali naik ke 7,47% pada 2023 dan 8,44% pada 2024. Meskipun capaian keseluruhan masih tergolong rendah, peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam memperluas akses pendidikan tinggi di daerah, meski masih menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan lembaga pendidikan tinggi lokal, biaya pendidikan, serta kesenjangan akses antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan afirmatif dalam pendidikan tinggi dan perluasan program beasiswa menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan proporsi SDM terdidik secara berkelanjutan.

Gambar 2. 34
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

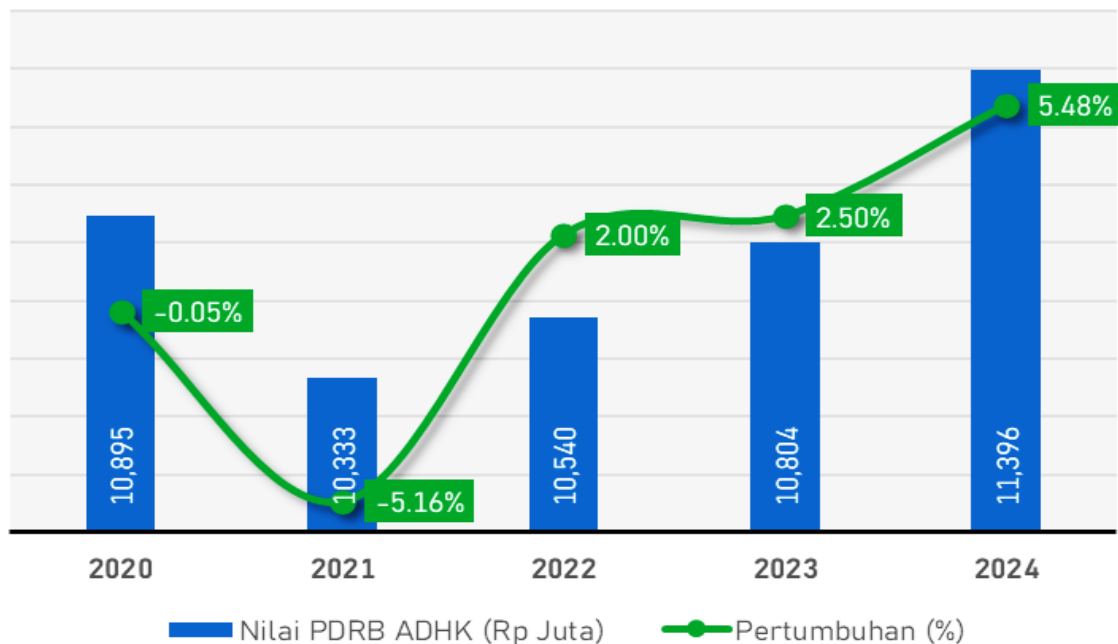
2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pembangunan daya saing daerah Kabupaten Bangka Barat sangat dipengaruhi oleh Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), inovasi, serta produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing, penting untuk mengukur capaian yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah analisis indikator-indikator utama yang berperan dalam mendukung daya saing ekonomi Kabupaten Bangka Barat.

Selama periode 2020 hingga 2024, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB tercatat sebesar Rp10,895 juta dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir stagnan

sebesar -0,05%. Tahun 2021 mengalami kontraksi cukup dalam dengan pertumbuhan negatif sebesar -5,16% dan nilai PDRB turun menjadi Rp10,333 juta. Namun, pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan positif sebesar 2,00% dan peningkatan nilai PDRB menjadi Rp10,540 juta. Pertumbuhan berangsur stabil di tahun 2023 dengan laju 2,50% dan nilai PDRB mencapai Rp10,804 juta. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi melonjak menjadi 5,48% dengan nilai PDRB sebesar Rp11,396 juta. Tren ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang konsisten, dengan perbaikan signifikan pada aktivitas ekonomi dan produktivitas daerah.

Gambar 2. 35
Nilai Realisasi dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



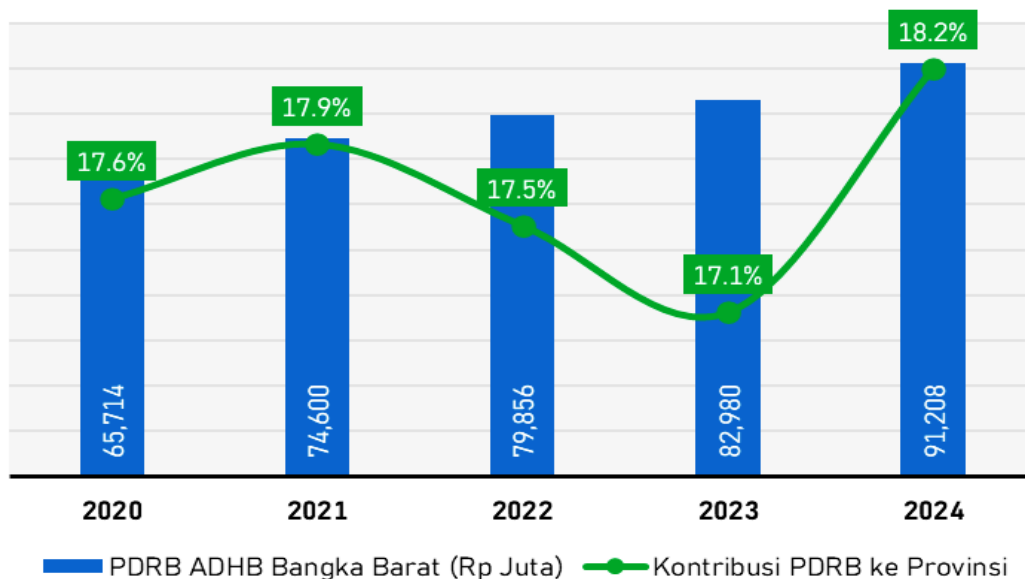
Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Sebagai lanjutan dari tren pemulihan ekonomi tersebut, kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Barat terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, kontribusi Bangka Barat terhadap provinsi berada di angka 17,6%, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp65,71 juta. Tahun 2021 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 17,9%, sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB menjadi

Rp74,60 juta, meskipun secara riil terjadi kontraksi akibat inflasi dan penurunan aktivitas ekonomi.

Namun pada tahun 2022 dan 2023, kontribusi PDRB Bangka Barat terhadap provinsi menurun secara berturut-turut menjadi 17,5% dan 17,1%. Penurunan ini dapat diartikan sebagai perlambatan relatif dibandingkan kabupaten/ kota lain di provinsi yang tumbuh lebih cepat pada periode tersebut. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terlihat lonjakan signifikan kontribusi hingga 18,2% dengan nilai PDRB ADHB mencapai Rp91,21 juta, mencerminkan akselerasi pertumbuhan ekonomi Bangka Barat yang melampaui laju provinsi secara umum. Peningkatan kontribusi ini menegaskan bahwa pemulihan ekonomi daerah tidak hanya terjadi dalam dimensi lokal, tetapi juga memperkuat posisi strategis Kabupaten Bangka Barat dalam struktur ekonomi regional.

Gambar 2. 36
Kontribusi PDRB Provinsi dari Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



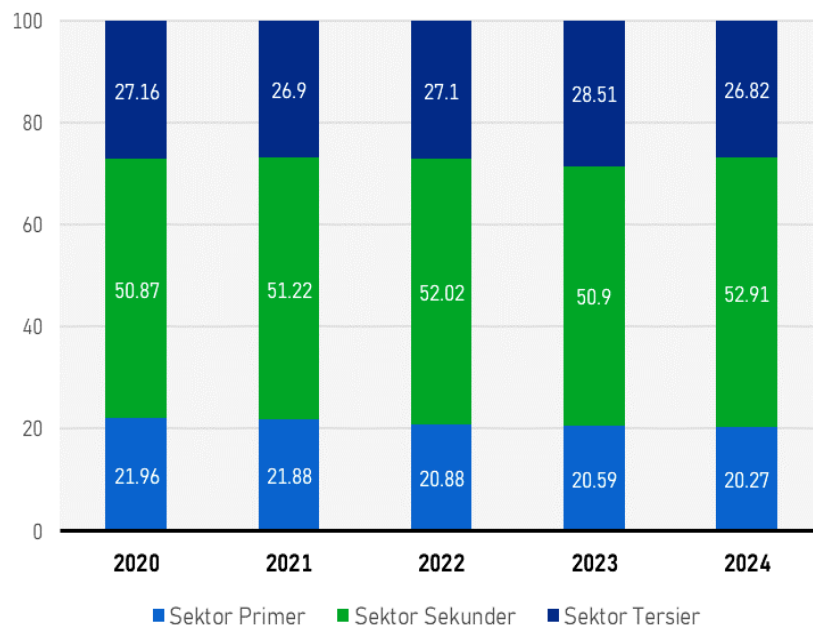
Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020 hingga 2024 didominasi oleh sektor sekunder, yang secara konsisten menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2024, kontribusinya tercatat sebesar 52,91 persen, menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan, konstruksi, dan sektor-sektor pengolahan lainnya menjadi pilar utama ekonomi daerah. Di posisi kedua, sektor tersier yang mencakup perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pendidikan, dan layanan publik lainnya memberikan kontribusi

sekitar 26–28 persen, dengan capaian 26,82 persen pada tahun 2024. Ini menandakan adanya pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang secara bertahap menguat.

Sementara itu, sektor primer, yang terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, menunjukkan tren penurunan kontribusi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, sektor ini hanya berkontribusi 20,27 persen terhadap total PDRB. Penurunan ini mencerminkan transisi ekonomi Bangka Barat dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju struktur ekonomi yang lebih mengandalkan sektor industri dan jasa. Ketimpangan kontribusi antar sektor ini sekaligus menegaskan arah pembangunan ekonomi daerah yang semakin terfokus pada hilirisasi dan pengembangan nilai tambah.

Gambar 2. 37
Persentase Kontribusi PDRB Per Sektor di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Jika dilihat dari tiga sektor penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat tahun 2024, yaitu industri pengolahan (46,47%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,53%), serta perdagangan besar dan eceran (13,52%), terlihat bahwa ketiganya berasal dari kelompok sektor ekonomi yang berbeda. Industri pengolahan mewakili sektor sekunder, pertanian dan perikanan tergolong sektor primer, sementara perdagangan besar dan eceran termasuk sektor tersier. Komposisi ini mencerminkan keragaman struktur ekonomi daerah yang cukup seimbang dan saling menopang.

Gambar 2. 38
Kontribusi Tiga Sektor PDRB Terbesar Kabupaten di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

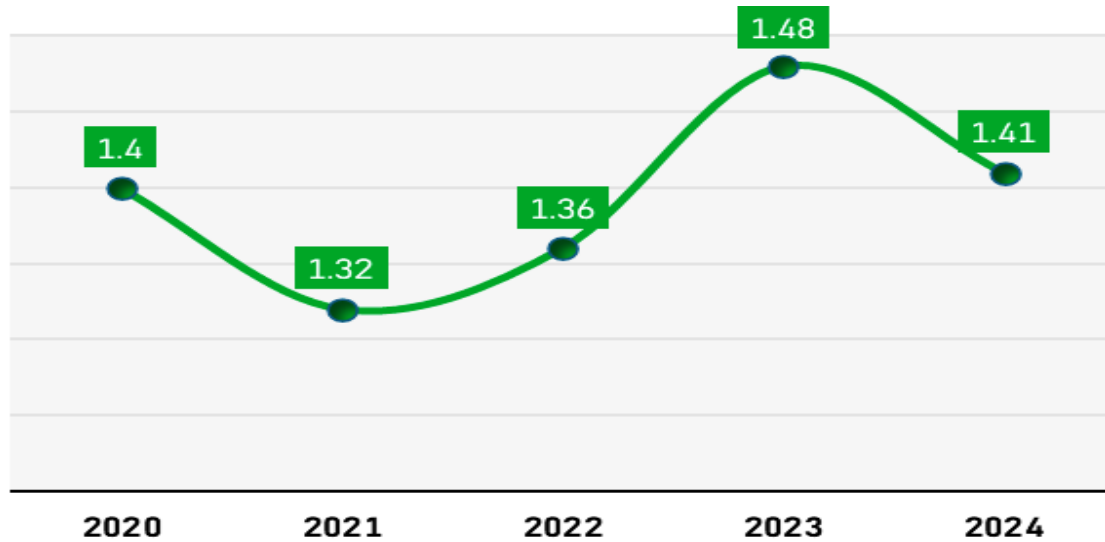


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Industri pengolahan secara konsisten menjadi tulang punggung ekonomi daerah, menunjukkan daya saing sektor sekunder dalam menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal. Sektor pertanian dan perikanan tetap mempertahankan kontribusi signifikan, mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas berbasis alam. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran memperlihatkan peran penting dalam aktivitas distribusi barang dan jasa, memperkuat fungsi intermediasi ekonomi. Ketiga sektor ini secara kolektif membentuk struktur ekonomi Bangka Barat yang beragam, tangguh, dan memiliki potensi untuk tumbuh secara inklusif.

Sebagai pelengkap dari gambaran struktur ekonomi tersebut, sektor akomodasi serta makan dan minum juga menunjukkan peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi tersier di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini tercermin dari dinamika rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB selama periode 2020-2024 yang mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan kecenderungan positif. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 1,4%, lalu menurun menjadi 1,32% pada tahun 2021, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas wisatawan dan konsumsi publik.

Gambar 2. 39
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

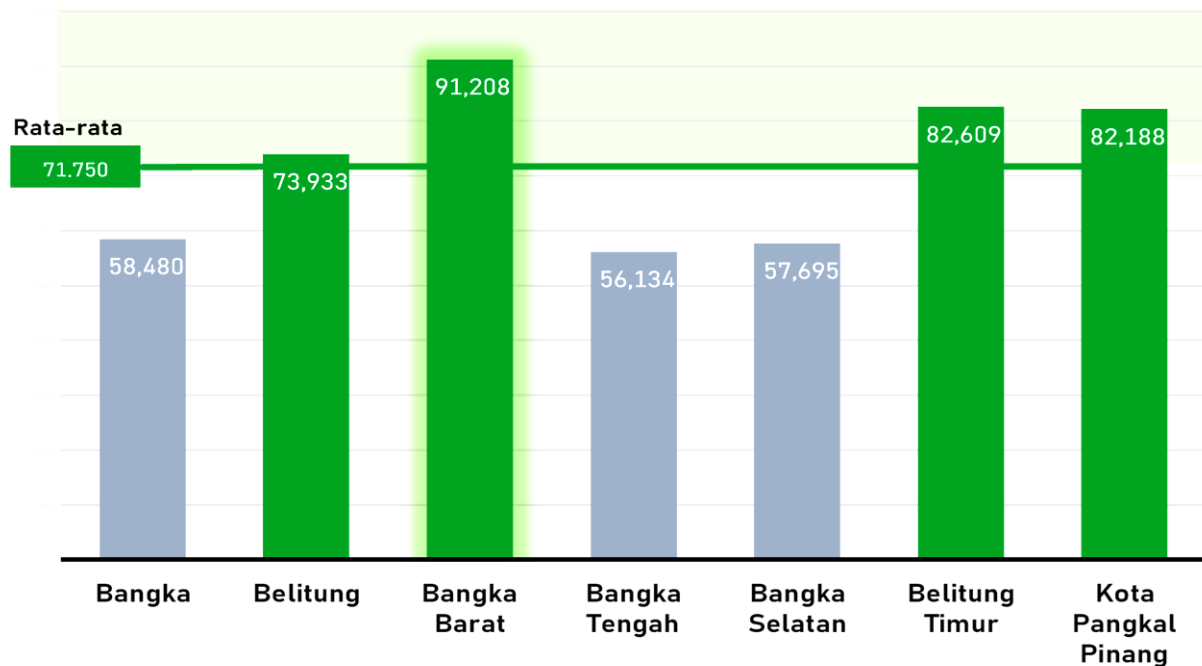


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Namun demikian, pemulihan mulai tampak pada tahun 2022 dengan peningkatan rasio menjadi 1,36%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 1,48%. Capaian tertinggi ini merefleksikan mulai pulihnya sektor pariwisata lokal dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat serta pelaku usaha. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 1,41% di tahun 2024, angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan kondisi awal 2020. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah apabila didukung oleh promosi pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan ekosistem UMKM lokal yang bergerak di bidang kuliner dan perhotelan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menempati posisi tertinggi dalam capaian PDRB per kapita tahun 2024, yakni sebesar Rp91.208 ribu, jauh melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp71.750 ribu. Posisi ini diikuti oleh Kota Pangkalpinang (Rp82.609 ribu), Belitung (Rp82.188 ribu), dan Belitung Timur (Rp73.933 ribu), yang seluruhnya mencatat angka di atas rata-rata provinsi. Sebaliknya, Kabupaten Bangka (Rp58.480 ribu), Bangka Selatan (Rp56.134 ribu), dan Bangka Tengah (Rp57.695 ribu) masih berada di bawah rata-rata. Tingginya PDRB per kapita Bangka Barat mencerminkan kuatnya sektor unggulan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan efektivitas daerah dalam mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata kepada masyarakat.

Gambar 2. 40
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Dengan Kota/Kabupaten Lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

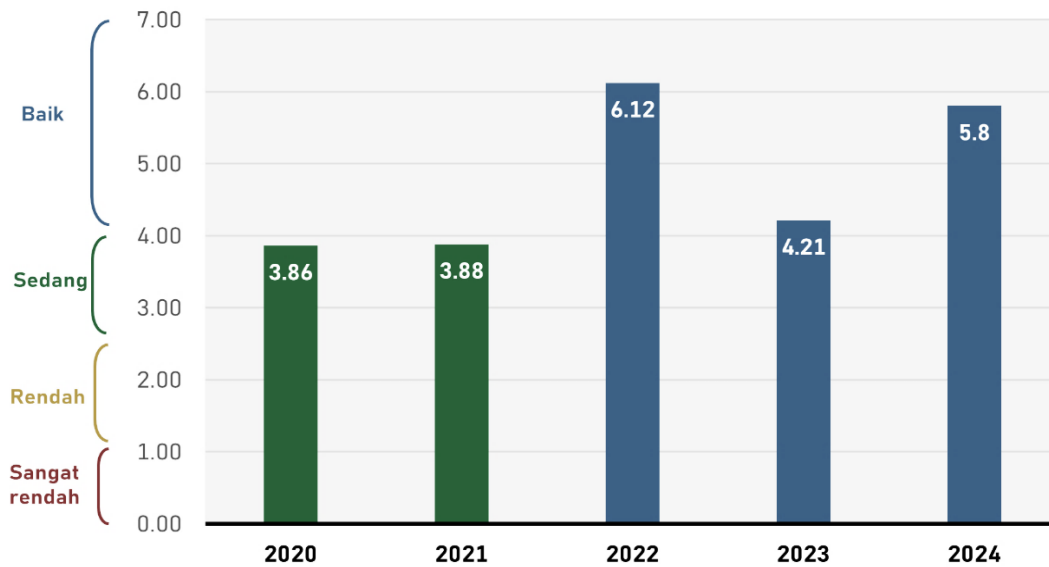


Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung, 2025

Capaian PDRB per kapita yang tinggi di Kabupaten Bangka Barat turut diperkuat oleh peningkatan rasio kewirausahaan daerah selama lima tahun terakhir. Rasio ini mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang berwirausaha, dan menjadi salah satu indikator penting kemajuan ekonomi berbasis kerakyatan. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio kewirausahaan Bangka Barat masih berada pada kategori sedang, masing-masing sebesar 3,86% dan 3,88%. Namun pada 2022, capaian ini melonjak tajam hingga 6,12% dan terus bertahan dalam kategori baik, yaitu 4,21% pada 2023 dan 5,80% pada 2024. Tren ini menunjukkan semakin kuatnya semangat kemandirian ekonomi masyarakat serta efektivitas dukungan program pemberdayaan usaha lokal yang dilakukan pemerintah daerah.

Kinerja ekonomi yang kuat tersebut juga turut tercermin dalam dinamika pasar tenaga kerja, yang terlihat dari tren partisipasi angkatan kerja di daerah ini. Selama periode 2020-2024, TPAK Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren positif yang mencerminkan pemulihan dan penguatan pasar tenaga kerja lokal. Setelah berada pada level 65,76% di 2020 dan sedikit naik menjadi 65,98% di 2021, lonjakan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 70,23%.

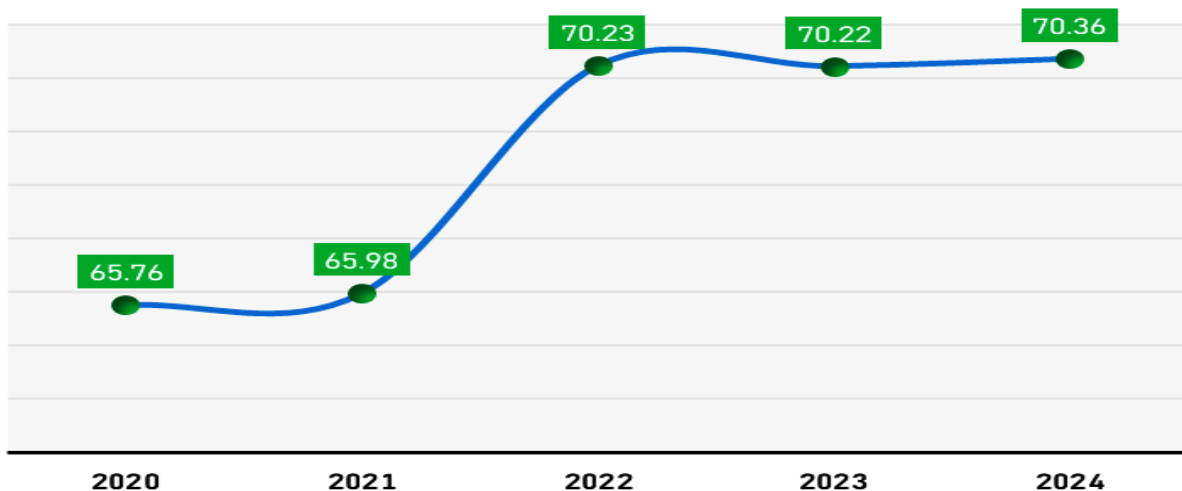
Gambar 2. 41
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kenaikan ini menandakan pulihnya optimisme ekonomi pasca-pandemi, diiringi oleh peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Stabilitas TPAK tetap terjaga pada 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 70,22% dan 70,36%, menegaskan kuatnya basis partisipasi tenaga kerja di Bangka Barat. Meskipun demikian, mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta inklusi partisipasi kerja tetap menjadi tantangan strategis ke depan dalam mendukung daya saing SDM daerah.

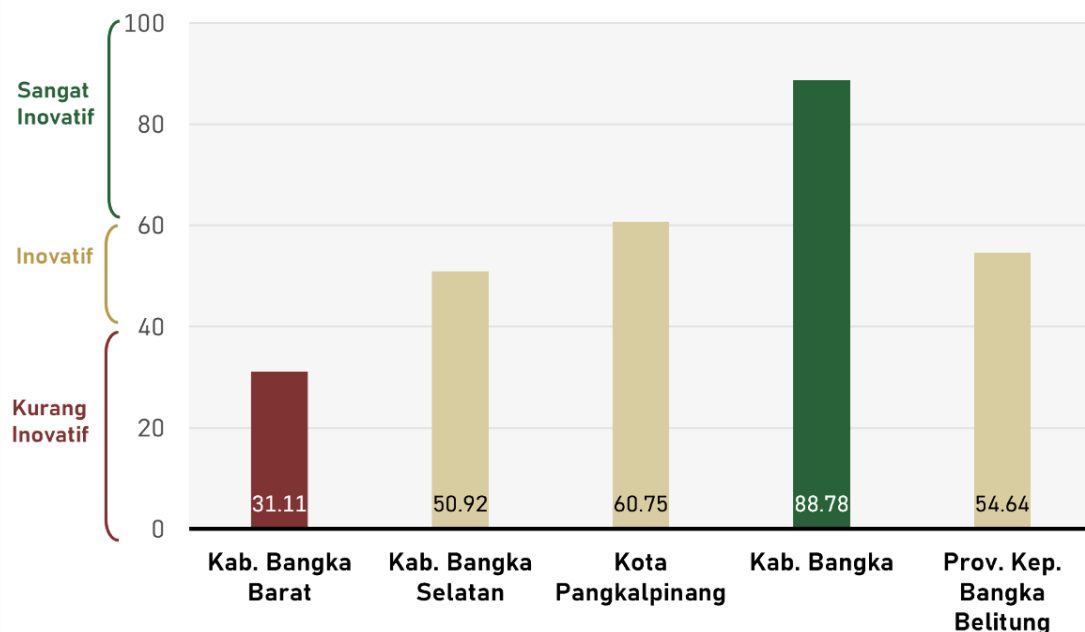
Gambar 2. 42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Sementara itu, Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 masih berada dalam kategori “Kurang Inovatif” dengan skor 31,11. Skor tersebut merupakan hasil penilaian dari inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi bentuk lainnya yang dilaporkan oleh pemerintah daerah pada tahun penilaian. Angka ini menempatkan Bangka Barat pada posisi terendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah daerah lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai perbandingan, Kabupaten Bangka Selatan meraih skor 50,92 (Inovatif), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh skor 54,64 (Inovatif), dan Kota Pangkalpinang sebesar 60,75 (Inovatif). Sementara itu, Kabupaten Bangka mencatatkan skor tertinggi dengan capaian sebesar 88,78 (Sangat Inovatif). Perbedaan capaian ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan dan dilaporkan.

Gambar 2. 43
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah dengan Kab/Kota sekitar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber: BSKDN Kemendagri, 2024

Rendahnya indeks inovasi ini menjadi sinyal penting bahwa peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perlu menjadi perhatian, terutama di tengah tuntutan percepatan reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini menjadi catatan tersendiri, karena inovasi merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan nilai tambah dari capaian positif pada indikator daya saing lainnya. Di sisi lain, indikator-indikator seperti TPAK dan



PDRB per kapita menunjukkan arah yang lebih positif. Oleh karena itu, ke depan, sinergi antarperangkat daerah dalam pengarusutamaan inovasi perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan dan menempatkan Bangka Barat sebagai daerah yang adaptif, kreatif, dan kompetitif secara berkelanjutan. Penguatan inovasi diharapkan dapat mengakselerasi dampak positif dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan partisipasi angkatan kerja di masa mendatang.

Selanjutnya terdapat indikator *Return on Asset* (ROA) yang merupakan indikator penting untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja keuangan BUMD dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menciptakan nilai ekonomi. Pada Di Kabupaten Bangka Barat, capaian ROA BUMD menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung membaik dalam empat tahun terakhir. etelah berada di angka 0,74% pada 2021, ROA meningkat tajam menjadi 2,93% pada 2022, lalu turun sedikit menjadi 2,14% pada 2023. Pada 2024, terjadi pemulihan signifikan dengan capaian tertinggi sebesar 3,03%, mencerminkan peningkatan efisiensi dan kinerja BUMD.

Tabel 2. 50
Return on Asset BUMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Penilaian	2021	2022	2023	2024
Return on Asset BUMD	0,74	2,93	2,14	3,03

Sumber: RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2045

Capaian ini mencerminkan perbaikan tata kelola dan peningkatan efektivitas pemanfaatan aset, sekaligus memberikan sinyal positif bagi keberlanjutan dan kontribusi BUMD terhadap ekonomi daerah. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong transparansi, inovasi bisnis, serta peningkatan profesionalisme manajemen BUMD agar kinerja ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi salah satu pendekatan penting dalam transformasi ekonomi Kabupaten Bangka Barat menuju pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Prinsip ini menekankan keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian daya dukung serta daya tampung



lingkungan hidup agar tetap terjaga bagi generasi mendatang. Kabupaten Bangka Barat telah menunjukkan upaya ke arah ini melalui kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang konsisten tumbuh dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan sektor ini berdasarkan ADHK tercatat positif, antara lain 3,53% pada 2020, meningkat menjadi 4,13% pada 2022 dan 4,63% pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 3,48% pada 2024. Secara kontribusi terhadap PDRB ADHB, sektor ini tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi stabil di atas 12%, bahkan mencapai 13,59% pada 2023 dan 13,53% pada 2024.

Tabel 2. 51
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK dan ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan ADHK (%)	Kontribusi ADHB (%)
2020	3.53	13.25
2021	0.01	12.46
2022	4.13	12.95
2023	4.63	13.59
2024	3.48	13.53

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Selaras dengan arah kebijakan tersebut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bangka Barat juga menunjukkan tren positif. Nilai IKLH meningkat dari 63,29 pada tahun 2020 menjadi 70,84 pada 2024, yang dihitung dari tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kualitas lingkungan secara menyeluruh, yang menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian ini turut diperkuat oleh pengendalian polusi, peningkatan tata kelola pengelolaan sampah, serta konservasi tutupan lahan.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029, pengembangan ekonomi biru diarahkan untuk mentransformasikan perekonomian melalui pemanfaatan laut yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem. Fokus kebijakan mencakup konservasi sumber daya laut, penguatan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan industri kelautan, penguatan logistik maritim, pariwisata bahari, serta riset kelautan. Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada koridor ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia Jalur I) yaitu koridor pelayaran internasional yang diakui UNCLOS (*United Nations Conference on the Law of the Sea*) dan diatur Indonesia untuk hak lintas ALKI. Hal ini memperkuat konektivitas perdagangan dan perikanan



dan menjadi peluang yang relevan bagi Kabupaten Bangka Barat sebagai simpul pendaratan dan distribusi hasil laut yang terhubung ke pasar regional, mengingat rute utama ALKI I menghubungkan Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, hingga ke Samudera Hindia melalui Selat Sunda. Posisi Bangka Barat dengan batas Selat Bangka dan Laut Natuna menjadikan koridor tersebut strategis bagi logistik, perikanan, dan perdagangan daerah.

Beriringan dengan itu, penguatan ekonomi biru di Kabupaten Bangka Barat perlu mengarusutamakan karbon biru melalui perlindungan dan restorasi mangrove serta lamun sebagai penyangga stok ikan, peredam abrasi, dan penyerap emisi yang dapat membuka akses pembiayaan berbasis kinerja (*result-based*) dan/ atau perdagangan karbon. Integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dengan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan mutu serta rantai dingin, dan riset kelautan akan memastikan manfaat ganda: nilai tambah ekonomi, pengurangan emisi, serta ketahanan pesisir. Pendekatan ini menautkan konektivitas maritim koridor ALKI I dengan penghidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan, sehingga akselerasi pertumbuhan tetap sejalan dengan pemulihan ekosistem dan target dekarbonisasi daerah.

Dengan kinerja positif, Kabupaten Bangka Barat memiliki fondasi kuat untuk memperluas model pembangunan yang berorientasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Upaya ini perlu diperkuat dengan inovasi teknologi ramah lingkungan, praktik agroekologi, pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Melalui pendekatan ini, transformasi ekonomi yang dikejar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga ketahanan ekosistem dan kesejahteraan jangka panjang.

Namun demikian, untuk memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru benar-benar berdampak terhadap ketahanan ekosistem, perlu ditinjau pula dari aspek emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan. Tercatat pada 2023 di Kabupaten Bangka Barat mengalami emisi netral hingga negatif sebesar -868,04 Gg CO₂eq, yang mengindikasikan bahwa penyerapan karbon melebihi total emisi yang dilepaskan. Capaian ini sangat positif dan menunjukkan potensi besar sektor kehutanan dan perikanan dalam mendukung agenda dekarbonisasi. Namun pada tahun 2024, emisi kembali tercatat positif sebesar 290,48 Gg CO₂eq, yang mengindikasikan adanya peningkatan tekanan dari aktivitas ekonomi atau penggunaan energi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan.

Kondisi emisi ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan mitigasi iklim dan penguatan tata kelola lingkungan. Capaian negatif emisi pada 2023



perlu dijadikan acuan untuk memperluas konservasi, memperbaiki tata guna lahan, serta mendorong adopsi teknologi hijau dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ekonomi hijau dan biru, pengendalian emisi GRK tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan global, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dan resiliensi ekonomi jangka panjang Kabupaten Bangka Barat.

Selain dilihat dari volume total emisi, efektivitas pengendalian lingkungan juga dapat ditinjau melalui indikator penurunan intensitas emisi GRK, yakni rasio emisi terhadap output ekonomi yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam satuan persen. Berdasarkan data dalam tabel berikut, Kabupaten Bangka Barat mencatat progres penurunan intensitas emisi yang mengindikasikan adanya efisiensi relatif dalam penggunaan energi dan produksi emisi seiring pertumbuhan ekonomi. Meskipun angka pasti belum tersedia secara menyeluruh untuk setiap tahun, keberadaan indikator ini penting sebagai alat ukur kinerja daerah dalam menyeimbangkan pembangunan dengan tanggung jawab ekologis. Ke depan, penurunan intensitas emisi GRK perlu dijadikan target lintas sektor, baik melalui perbaikan efisiensi energi, pengurangan limbah industri, maupun penguatan peran sektor kehutanan dan kelautan sebagai penyerap karbon yang andal.

Tabel 2. 52
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2024

Tahun	Emisi Gas Rumah Kaca (CO ₂ eq Gg)
2023	-868.04
2024	290.48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2025

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan daya saing daerah di era teknologi informasi. Salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan transformasi digital di daerah adalah Indeks Masyarakat Digital. Indeks ini mengukur tingkat kesiapan, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi digital oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, transaksi daring, hingga penggunaan layanan publik digital.

Tabel 2. 53
Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital	Poin	34,46	44,94	47,54

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), 2025



Di Kabupaten Bangka Barat, capaian indeks ini menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, nilai indeks tercatat sebesar 34,46 poin, kemudian naik menjadi 44,94 poin pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 47,54 poin pada tahun 2024. Kenaikan lebih dari 13 poin dalam dua tahun menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih berada di bawah kategori ideal secara nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan percepatan dan perluasan program transformasi digital secara menyeluruh, agar manfaatnya semakin merata dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Bangka Barat di era digital.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dalam konteks peningkatan daya saing daerah, integrasi ekonomi domestik dan global menjadi pilar penting bagi produktivitas perekonomian daerah yang berkelanjutan dan adaptif. Kabupaten Bangka Barat menunjukkan sejumlah kemajuan dalam aspek ini melalui pertumbuhan investasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), serta peningkatan kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB. Ketiga indikator ini mencerminkan semakin kuatnya keterhubungan perekonomian Bangka Barat dengan dinamika ekonomi nasional dan internasional.

Tabel 2. 54
Nilai dan Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PMDN (Rp Juta)	Pertumbuhan PMDN	Nilai PMA (USD Ribu)	Pertumbuhan PMA	Nilai Investasi Penanaman Modal (Rp Milyar)
2020	241.099,40	-38.52%	729,10	-87.84%	12.618,39
2021	904.882,40	275.3%	19.053,70	2513.32%	267.656,68
2022	1.350.655,30	49.3%	811,90	-95.74%	12.717,26
2023	1.923.194,10	42.4%	15.336,00	1788.90%	216.627,19
2024	1.568.616,40	-18.4%	2.920,90	-80.95%	42.461,22

Sumber: BKPM, 2024

Pertama, dari sisi investasi di Kabupaten Bangka Barat pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, baik pada jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2020, nilai PMDN tercatat sebesar Rp241,10 miliar, yang kemudian melonjak tajam menjadi Rp904,88 miliar pada 2021, mencerminkan pertumbuhan sebesar 275,3%. Tren kenaikan ini berlanjut hingga Rp1,35 triliun pada 2022 (+49,3%) dan Rp1,92 triliun pada 2023 (+42,4%), sebelum menurun

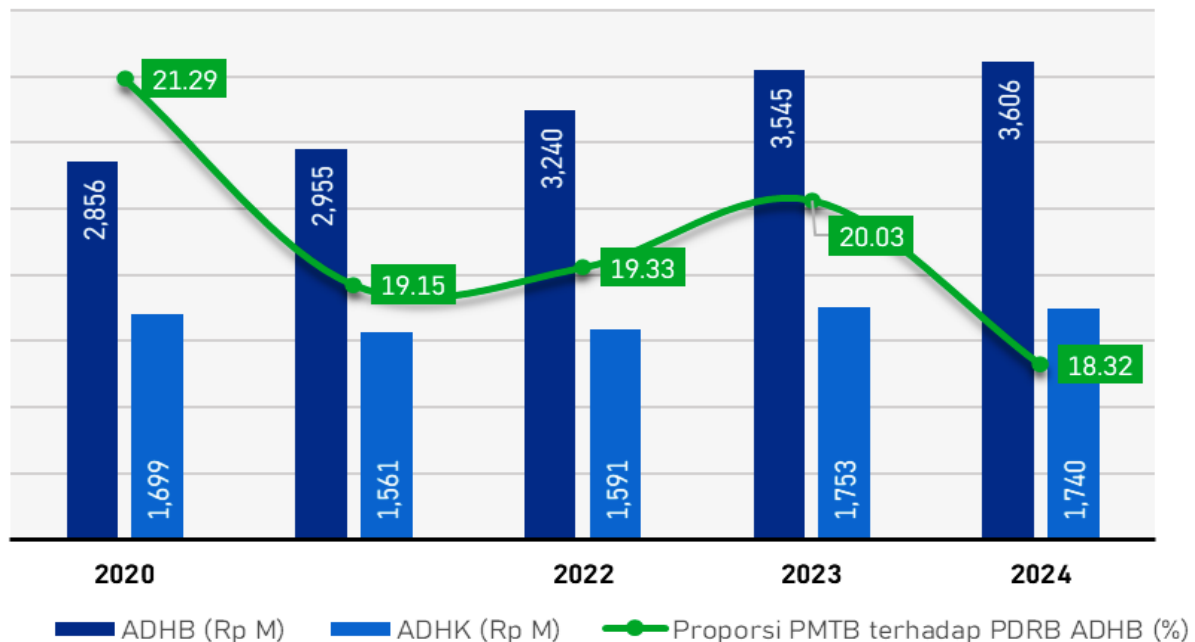
menjadi Rp1,57 triliun pada 2024 dengan kontraksi -18,4%. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya penyesuaian pasar atau realokasi portofolio investor domestik.

Sementara itu, nilai investasi PMA pada 2020 tercatat hanya USD 729,10 ribu, lalu melonjak menjadi USD 19.053,70 ribu pada 2021 (+2.513,32%), sebelum anjlok menjadi USD 811,90 ribu pada 2022 (-95,74%). Di tahun 2023, PMA kembali meningkat drastis menjadi USD 15.336,00 ribu (+1.788,90%), namun mengalami penurunan lagi pada 2024 menjadi USD 2.920,90 ribu (-80,95%). Fluktuasi tajam ini menunjukkan bahwa investasi asing di Kabupaten Bangka Barat masih sangat sensitif terhadap dinamika global maupun domestik.

Secara keseluruhan, investasi PMDN cenderung menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih stabil, meskipun sempat menurun pada tahun terakhir. Sebaliknya, investasi PMA bersifat lebih volatil, sehingga memerlukan strategi khusus untuk menciptakan iklim investasi yang lebih konsisten dan menarik bagi investor asing di masa mendatang.

Gambar 2. 44

Realisasi dan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



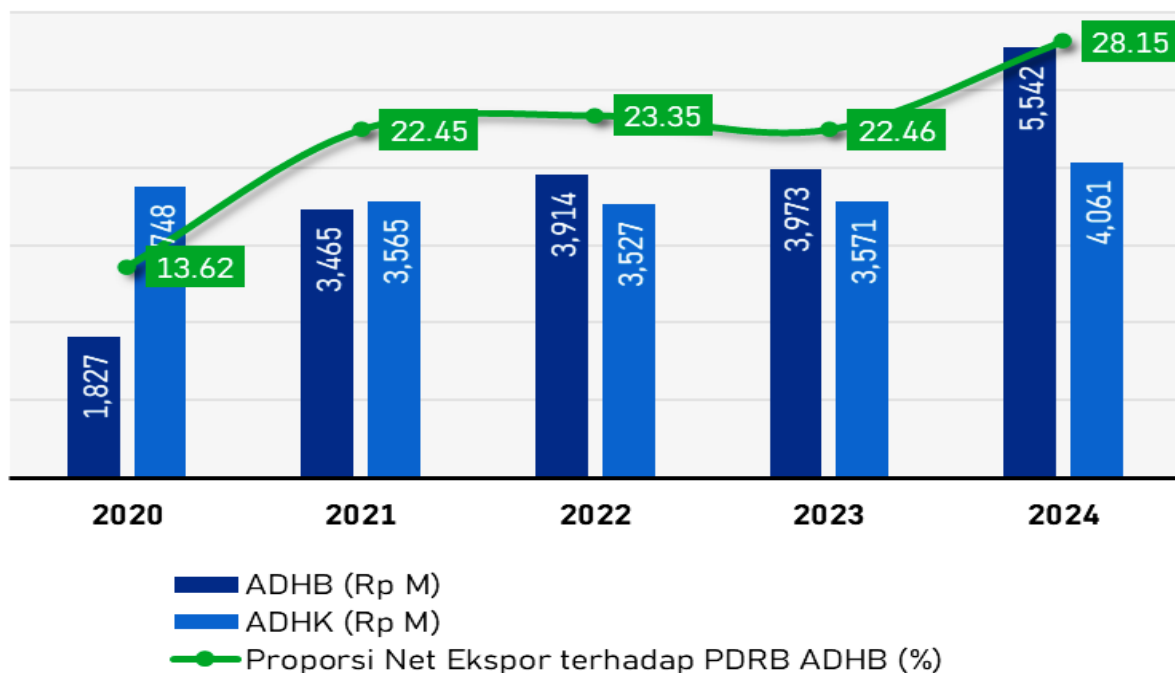
Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kedua, dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikator investasi riil dalam infrastruktur dan aset produktif, proporsi PMTB terhadap PDRB ADHB menunjukkan fluktuasi moderat namun

stabil. Pada tahun 2020, proporsi PMTB mencapai 21,29% dan sedikit menurun pada 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 19,15% dan 19,33%. Tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 20,03%, sebelum kembali turun ke 18,32% di 2024. Meskipun menurun, nilai PMTB secara nominal tetap meningkat. Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang guna mendorong kapasitas produksi daerah yang lebih tangguh.

Ketiga, proporsi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHB mengalami peningkatan yang sangat signifikan, menandakan semakin besarnya keterlibatan Bangka Barat dalam rantai pasok ekonomi luar daerah bahkan global. Pada 2020, proporsi net ekspor baru mencapai 13,62%, namun meningkat drastis menjadi 22,45% di 2021 dan 23,35% pada 2022. Meskipun sedikit menurun ke 22,46% di 2023, capaian ini kembali melonjak ke titik tertinggi sebesar 28,15% di 2024. Kinerja ini menandakan keunggulan komparatif dan potensi ekspor yang semakin kuat, terutama di sektor industri pengolahan dan tambang, yang menjadi basis struktur ekonomi daerah.

Gambar 2. 45
Realisasi dan Net Ekspor Barang Jasa Terhadap PDRB ADHB dan ADHK
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

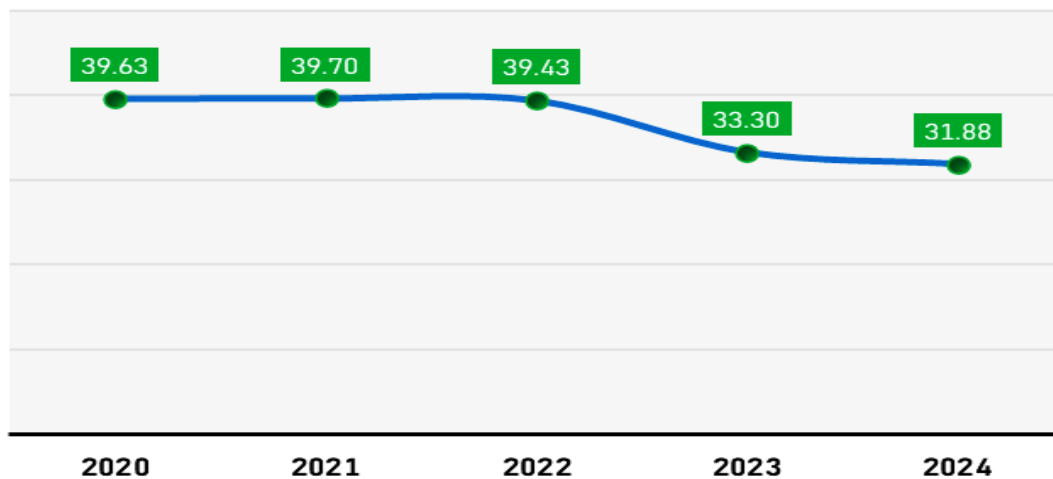
Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa Bangka Barat secara bertahap telah membangun fondasi integrasi ekonomi yang solid—baik ke dalam sistem domestik melalui investasi dan PMTB, maupun ke pasar global melalui peningkatan ekspor. Namun demikian, untuk mempertahankan dan

memperkuat peran ini, dibutuhkan strategi yang mencakup: fasilitasi kemudahan berusaha, peningkatan infrastruktur logistik dan digital, serta penguatan kapasitas SDM dan industrialisasi hilir. Dengan langkah-langkah tersebut, Bangka Barat berpotensi mengukuhkan dirinya sebagai simpul penting dalam jaringan ekonomi nasional dan internasional.

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bangka Barat memiliki peran strategis dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang saling mendukung. Wilayah perkotaan berkembang sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan, sementara wilayah perdesaan difokuskan pada penguatan sektor pertanian serta industri berbasis sumber daya lokal. Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan pemahaman terhadap berbagai faktor struktural yang memengaruhi aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Salah satu indikator penting yang merepresentasikan tantangan tersebut adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

Gambar 2. 46
Rata-Rata Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025

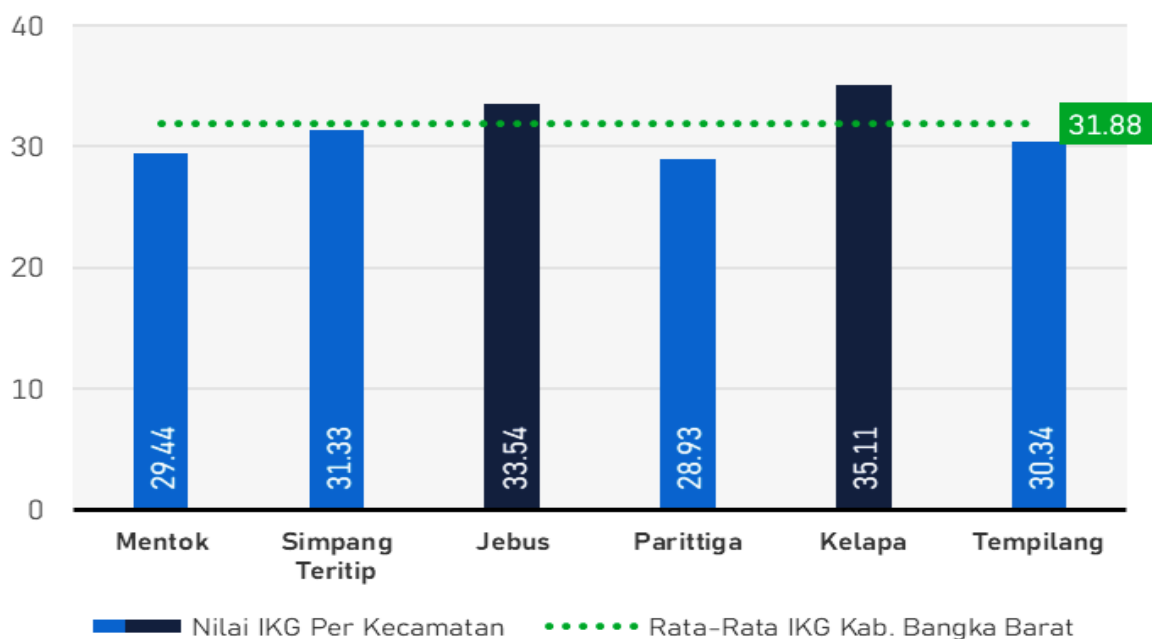
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indikator yang mengukur tingkat kesulitan suatu wilayah dalam menjangkau pelayanan dasar akibat faktor geografis, seperti akses jalan, kondisi topografi, dan ketersediaan moda transportasi. IKG menjadi penting untuk memahami konteks tantangan pembangunan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.

Rata-rata IKG Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai IKG tercatat sebesar 39,63, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 39,70 di tahun 2021. Nilai tersebut mulai menurun pada tahun 2022 menjadi 39,43, dan penurunan lebih tajam terjadi di tahun 2023 dengan capaian 33,30. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2024, di mana IKG menurun menjadi 31,88. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan akses geografis di sejumlah wilayah, yang dapat berkontribusi terhadap pemerataan pelayanan dasar dan peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan maupun pesisir.

Jika ditelusuri lebih lanjut pada level kecamatan, terdapat variasi nilai IKG yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda antar wilayah di Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Kelapa (35,11) dan Jebus (33,54) mencatat IKG tertinggi, mencerminkan tantangan geografis yang lebih besar dan keterbatasan akses layanan dasar di beberapa desa. Sementara itu, Simpang Teritip (31,33) dan Tempilang (30,34) berada di sekitar rata-rata IKG kabupaten, menunjukkan tingkat kesulitan sedang yang tetap membutuhkan penguatan konektivitas lokal. Terakhir, Mentok (29,44) dan Parittiga (28,93) memiliki IKG terendah, menandakan kondisi geografis yang lebih mendukung dan potensi sebagai pusat layanan wilayah sekitar.

Gambar 2. 47

Nilai Indeks Kesulitan Geografis Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024



Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025



Selain itu, sebagai salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi wilayah, kondisi infrastruktur jalan menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, sebanyak 78,76% jalan berada dalam kondisi baik. Meskipun sempat menurun pada 2021 dan 2022, perbaikan berlanjut pada 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 66,07% dan 69,61%. Kualitas jalan yang membaik sangat penting dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas sosial dan ekonomi.

Tabel 2. 55
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

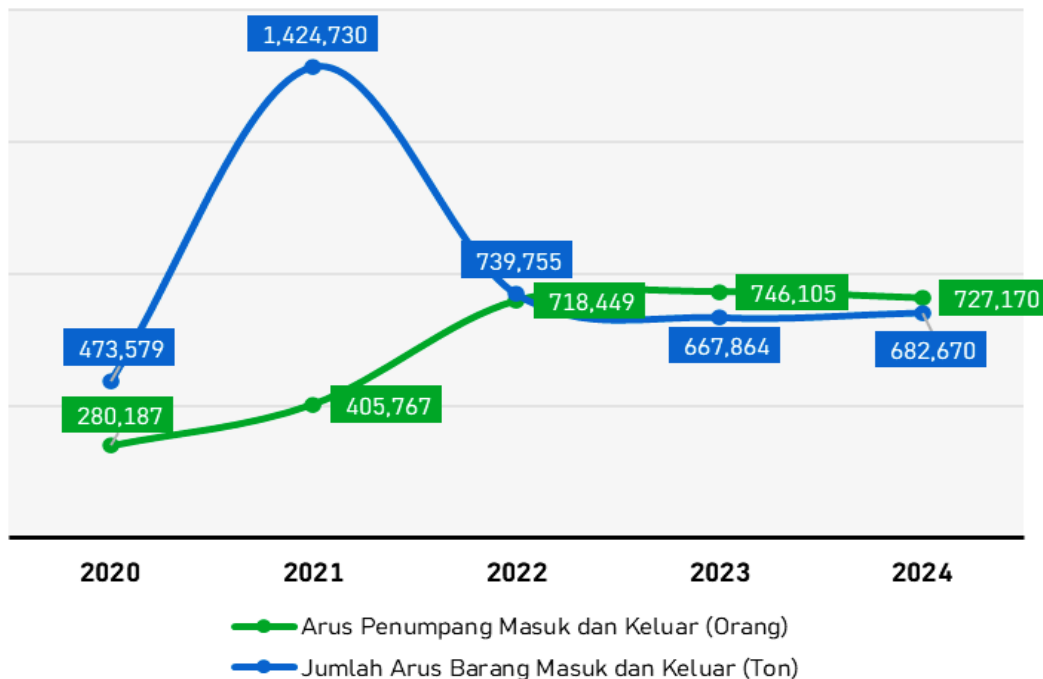
Kondisi Jalan	2020		2021		2022		2023		2024	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
Baik	552.06	78.76	532.99	76.04	517.38	63.93	534.71	66.07	563.35	69.61
Sedang	18.38	2.62	38.96	5.56	56.31	8.19	20.08	2.48	36.45	4.5
Rusak	130.49	18.62	125.53	17.91	195.39	30.23	10,334	30.17	9.12	1.13
Rusak Berat	0	0	3.44	0.49	24.14	3.74	244.18	30.17	200.39	24.76

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Sejalan dengan peningkatan infrastruktur, arus penumpang dan barang di Pelabuhan Tanjung Kalian menunjukkan tren yang cukup dinamis. Arus penumpang terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dan pulihnya aktivitas sosial ekonomi pasca-pandemi. Jumlah arus penumpang tercatat sebesar 280.187 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 405.767 orang pada 2021, lalu melonjak menjadi 718.449 orang pada 2022, dan mencapai 746.105 orang pada 2023, sebelum sedikit terkoreksi menjadi 727.170 orang pada 2024.

Sementara itu, arus barang sempat melonjak signifikan pada awal periode, dari 473.579 ton pada 2020 menjadi 1.424.730 ton pada 2021. Namun, angka ini mengalami penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir, yakni 739.755 ton pada 2022, 667.864 ton pada 2023, dan sedikit naik menjadi 682.670 ton pada 2024. Meskipun demikian, volume pergerakan logistik tetap berada pada level yang tinggi, menandakan pentingnya konektivitas pelabuhan sebagai tulang punggung perdagangan dan distribusi barang di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2. 48
Jumlah Arus Penumpang (Orang) dan Arus Barang (Ton) Masuk dan Keluar di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Sebagai pelengkap, indikator pengelolaan sanitasi di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan progres yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Persentase penduduk dengan akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 52,19% pada 2020 menjadi 60,77% pada 2024, mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang lebih merata. Di sisi lain, persentase rumah tangga yang tinggal di hunian dengan fasilitas sanitasi terus menunjukkan capaian tinggi, dari 94,61% pada 2020 menjadi 97,99% pada 2024. Peningkatan juga tampak pada penyediaan sarana prasarana sistem air limbah domestik yang layak, dari hanya 0,69% pada 2020 menjadi 4,42% pada 2024.

Meski demikian, ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST) stagnan di angka 14,29% selama lima tahun, yang menjadi catatan tersendiri bagi penguatan layanan pengelolaan limbah padat. Sementara itu, warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sempat mengalami penurunan signifikan pada 2022 (52,19%), namun kembali meningkat hingga 97,99% di tahun 2024, mengindikasikan proses pemulihan yang cepat dan responsif. Data rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sanitasi aman mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2024 mencapai 4,42%. Secara keseluruhan, capaian indikator sanitasi ini



mencerminkan komitmen daerah dalam membangun lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung produktivitas dan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2. 56
Capaian Indikator Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	Persen	52.19	60.38	60.38	60.38	60,77
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	94.61	96.15	97.68	97.68	97,99
3	Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	Persen	0.69	3.68	91.67	4.19	4,42
4	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan (TPA & TPST)	Persen	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
5	Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	94.61	96.22	52.19	100	97,99
6	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0,66	3,68	4,19	4,22	4,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2025

Di sisi lain, pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan kemajuan signifikan selama periode 2020-2024. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan meningkat dari 9,86% pada tahun 2020 menjadi 28,15% pada tahun 2024, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peningkatan paling menonjol juga terjadi pada cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, yang melonjak dari 10,61% menjadi 76,47% selama lima tahun. Pengurangan sampah melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) mengalami peningkatan dari 0,23% pada 2023 menjadi 4,87% pada 2024, mengindikasikan mulai tumbuhnya kesadaran dan implementasi pola pengelolaan sampah berkelanjutan di masyarakat.

Jumlah sampah yang dikelola pun menunjukkan dinamika, dengan kenaikan signifikan hingga 12.910 ton pada 2023 sebelum menurun menjadi 8.095 ton pada 2024, yang dapat mencerminkan efisiensi sistem pengumpulan dan pengolahan sampah. Secara keseluruhan, tren ini menandai arah kebijakan yang semakin berpihak pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.

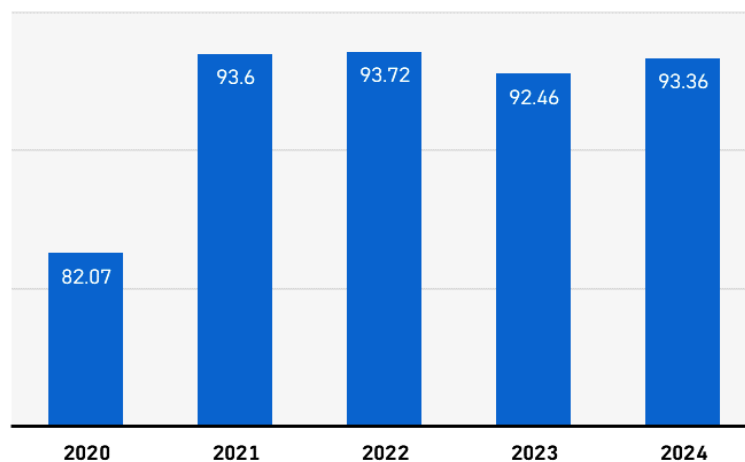
Tabel 2. 57
Penanganan Persampahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	N/A	N/A	N/A	0,29	1,7
2	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	0.28	0.27	0.24	0.23	4,87
3	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Persen	10.61	10.61	13.64	58.82	76,47
4	Jumlah sampah yang dikelola	Ton	5.103,9	5.534,04	6.184,26	12.910	8.095

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2025

Terakhir, di wilayah perdesaan, kondisi irigasi yang membaik berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pertanian. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 82,07% pada 2020 menjadi 93,36% pada 2024. Peningkatan ini tidak hanya mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan membuka potensi hilirisasi produk pertanian yang dapat mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Gambar 2. 49
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2025

Secara keseluruhan, keterpaduan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui peningkatan infrastruktur, konektivitas, layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan dan pertanian, menjadi fondasi

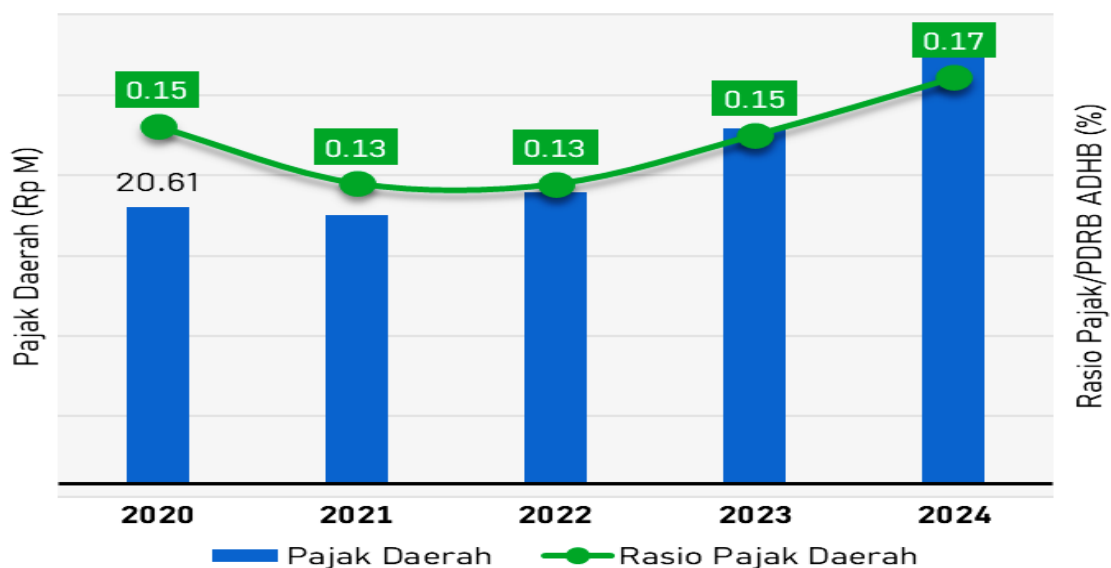
utama dalam mewujudkan Bangka Barat sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan yang menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing daerah. Di Kabupaten Bangka Barat, berbagai indikator telah mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam memastikan kestabilan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Sejak tahun 2020, realisasi pajak daerah Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren yang stabil meskipun terjadi fluktuasi dalam proporsi terhadap PDRB. Pada tahun 2020, pajak daerah tercatat sebesar Rp 20,61 miliar, dengan rasio pajak terhadap PDRB ADHB sebesar 0,15%. Angka ini meningkat menjadi 0,17% pada 2024, dengan pajak daerah mencapai Rp 31,3 miliar. Meskipun kontribusi pajak daerah terhadap PDRB relatif kecil, namun meningkatnya rasio pajak ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Bangka Barat dalam memperkuat basis pendapatan daerah dan mendukung kestabilan fiskal, yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Pajak yang lebih stabil dan meningkat juga menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk investasi dalam sektor-sektor prioritas daerah.

Gambar 2. 50
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

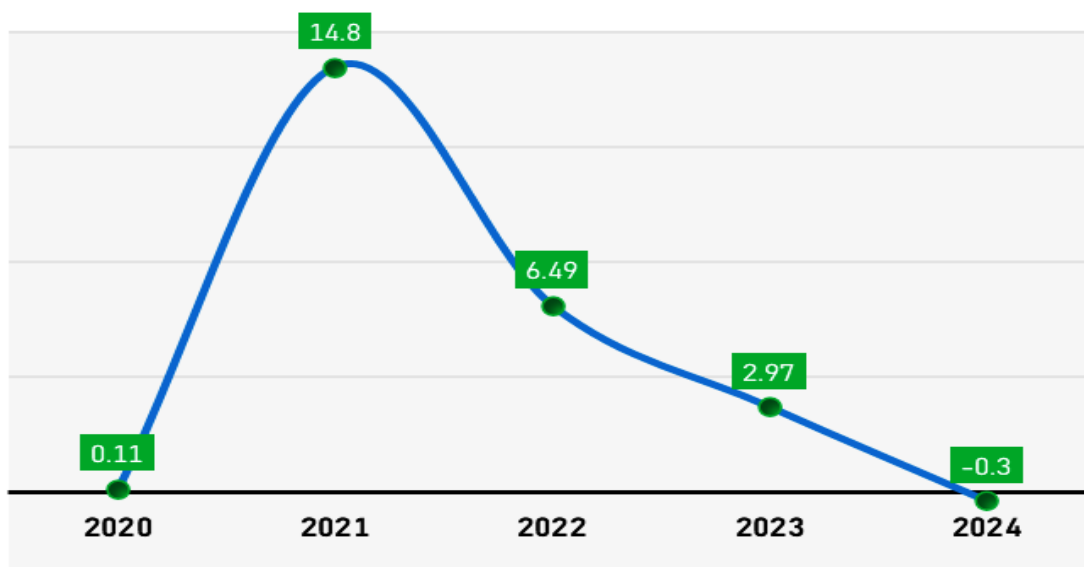


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025 (diolah)

Tingkat inflasi Kabupaten Bangka Barat menunjukkan dinamika yang cukup mencolok selama periode 2020–2024. Setelah mencatat inflasi rendah sebesar 0,11% pada tahun 2020, lonjakan tajam terjadi pada 2021 dengan capaian 14,8%, yang mencerminkan tekanan harga tinggi akibat pemulihan ekonomi pascapandemi dan gejolak harga komoditas. Tren inflasi kemudian mengalami penurunan signifikan: menjadi 6,49% pada 2022 dan 2,97% pada 2023, menandakan membaiknya stabilitas harga di tengah pemulihan ekonomi nasional dan lokal.

Pada tahun 2024, inflasi bahkan tercatat negatif sebesar -0,3%, yang mengindikasikan penurunan harga secara umum. Capaian ini dapat menjadi sinyal awal terhadap pelemahan permintaan masyarakat atau adanya koreksi harga yang tajam di sektor-sektor tertentu. Meskipun demikian, penggunaan pendekatan deflator PDRB sebagai metode estimasi hingga tahun 2023 tetap memberikan gambaran yang cukup akurat terhadap kecenderungan harga daerah, mengingat terbatasnya cakupan data IHK di provinsi ini.

Gambar 2. 51
Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020–2024



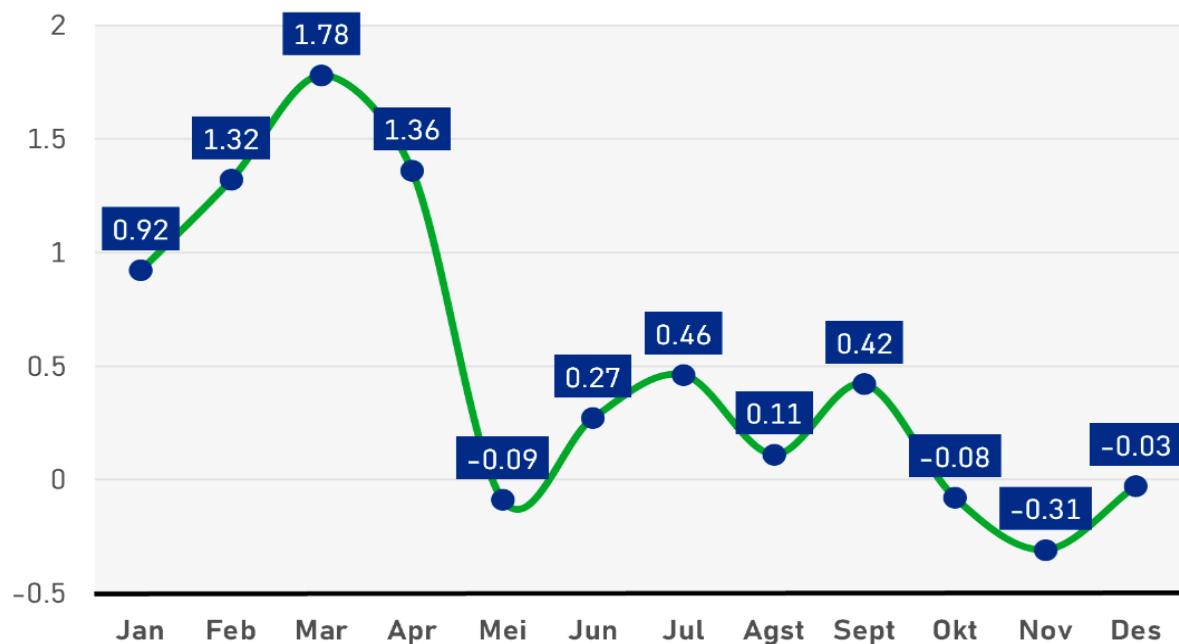
Sumber: Tabel Dinamis BPS Indonesia, 2025

Inflasi *month-to-month* (m-to-m) pada tahun 2024 menunjukkan gejolak harga yang cukup dinamis di sepanjang tahun. Tekanan inflasi tertinggi terjadi pada Maret (1,78%) dan April (1,36%), yang bertepatan dengan momen Ramadan dan menjelang Idulfitri—periode yang identik dengan peningkatan konsumsi. Setelah itu, terjadi deflasi pada Mei (-0,09%) dan kembali deflasi lebih dalam pada November (-0,31%), sebelum menurun ringan di Desember

(-0,03%). Sementara itu, bulan-bulan lain menunjukkan inflasi yang relatif rendah namun stabil. Pergerakan ini menunjukkan pentingnya penguatan stabilisasi harga musiman, khususnya dalam konteks pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan efisiensi rantai pasok.

Rasio pengeluaran antara makanan dan non-makanan memberikan gambaran penting mengenai pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat. Selama periode 2020-2024, pengeluaran untuk makanan secara konsisten lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non-makanan. Pada 2020, proporsi pengeluaran untuk makanan mencapai 53,4% dan pada 2024 meningkat menjadi 55,7%, sementara pengeluaran untuk non-makanan cenderung stabil.

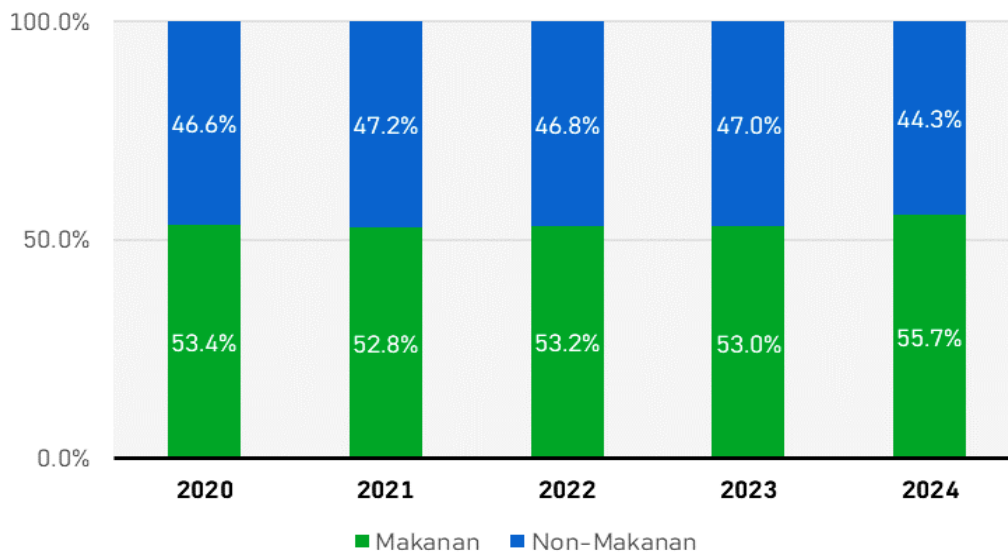
Gambar 2. 52
Inflasi Month-to-Month Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024



Sumber: Tabel Dinamis BPS Indonesia, 2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan masih menjadi prioritas utama dalam pengeluaran rumah tangga. Stabilitas pola konsumsi tersebut berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, hal ini turut menciptakan permintaan yang berkelanjutan di sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan.

Gambar 2. 53
Rasio Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kombinasi dari kebijakan pro-stabilitas fiskal melalui peningkatan pajak daerah, kontrol inflasi yang efektif, dan pengelolaan konsumsi rumah tangga yang stabil memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat. Keseimbangan fiskal yang tercapai memungkinkan daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor kunci, sementara inflasi yang terkontrol mendukung daya beli dan stabilitas ekonomi. Selain itu, rasio pengeluaran yang stabil mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga kestabilan ekonomi makro, Kabupaten Bangka Barat dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, dan menjadikan Bangka Barat sebagai tempat yang lebih menarik untuk investasi dan pengembangan ekonomi di masa depan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pembangunan daerah yang berkelanjutan mensyaratkan adanya fondasi regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta adaptif terhadap dinamika perubahan. Regulasi yang berintegritas merepresentasikan sistem kebijakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keadilan. Sementara tata kelola yang adaptif



mencerminkan kapasitas institusi pemerintah dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi secara cepat dan tepat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan kerangka pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya atau program pembangunan yang dirancang, melainkan oleh kualitas regulasi dan sistem pengelolaan yang fleksibel namun terkendali. Dengan demikian, tata kelola adaptif memungkinkan sektor-sektor strategis untuk merespons tantangan maupun peluang lokal secara kontekstual.

Tabel 2. 58
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Penilaian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	45,94	49,60	53,48	67,72	77,16
Kategori	C	C	CC	B	BB

Sumber: Kabupaten Bangka Barat dalam Angka Tahun 2024

Sebagai bentuk konkret implementasi tata kelola yang baik, pengukuran kinerja dilakukan melalui sejumlah indikator. Salah satu indikator utama adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang digunakan untuk menilai kemajuan reformasi birokrasi secara sistematis dan berkelanjutan. IRB mencerminkan aspek seperti manajemen kinerja, akuntabilitas, efisiensi pelayanan, dan pencegahan korupsi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan data capaian IRB pada tabel dibawah ini menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari kategori C pada 2020 menjadi BB pada 2024. Hal ini menandakan adanya transformasi birokrasi yang konsisten dan progresif.

Tabel 2. 59
Capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024

Penilaian	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	Poin	69,83	64,41	65,33

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025

Selanjutnya terkait integritas yaitu Indeks Integritas Nasional (IIN) yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pencegahan korupsi, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan sistem pengawasan internal. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan daerah



memiliki tata kelola yang bersih, sistematis, serta mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Bangka Barat, capaian Indeks Integritas Nasional dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan masih berada pada kategori sedang. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 69,83 poin, kemudian menurun cukup tajam menjadi 64,41 poin pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip integritas, yang bisa terkait dengan lemahnya pengawasan internal, kendala dalam implementasi reformasi birokrasi, atau dinamika kelembagaan lainnya. Pada tahun 2024, terdapat sedikit perbaikan dengan nilai indeks meningkat menjadi 65,33 poin. Meskipun kenaikan ini belum signifikan, hal tersebut menandakan adanya upaya pemulihan, baik melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pelayanan, maupun perbaikan mekanisme pelaporan dan pengaduan publik. Namun, capaian ini masih menunjukkan perlunya intervensi yang lebih strategis dan konsisten, agar standar integritas di lingkungan pemerintahan daerah dapat terus meningkat.

Selanjutnya, terkait digitalisasi tata kelola diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip efisiensi, integrasi, dan keamanan informasi untuk mendukung pelayanan publik berbasis teknologi. Peningkatan SPBE dari kategori “Cukup” pada 2021 menjadi “Baik” pada 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah berhasil menjadikan sistem digital sebagai fondasi reformasi pelayanan, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal integrasi antarsektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Tabel 2. 60
Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Penilaian	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,27	2,30	2,61	3,16
Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik

Sumber: Kementerian PAN RB, 2025

Di sisi lain terdapat juga indikator reformasi hukum yang diukur melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH). IRH digunakan mengukur efektivitas dan kemajuan pelaksanaan reformasi hukum di tingkat daerah. Indeks ini mencerminkan komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam membenahi kerangka regulasi, meningkatkan kualitas peraturan perundang-



undangan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Pencapaian Kabupaten Bangka Barat yang melompat dari kategori “CC” pada 2023 ke “AA” pada 2024 mencerminkan adanya akselerasi dalam pembenahan sistem hukum, penguatan JDIH, serta penerapan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (evidence-based). Kategori “AA” juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat telah berhasil membangun tata kelola hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substansial dalam menjamin kepastian, keterbukaan, dan keadilan hukum bagi masyarakat. Capaian ini perlu terus dipertahankan dan diperluas cakupannya, agar reformasi hukum tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi yang baik, tetapi juga mampu mendorong penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 61
Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024

Penilaian	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	56,08	54,57	98,38
Kategori	CC	CC	AA

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Selain capaian pada aspek reformasi hukum, gambaran umum tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas sosial juga dapat dilihat melalui Indeks Harmoni Indonesia, yang menilai tingkat kerukunan dan kualitas hubungan antarwarga di suatu daerah. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan dan kualitas interaksi antarindividu maupun antarkelompok di masyarakat, termasuk yang berbeda suku, agama, ras, dan latar belakang sosial. Pengukuran dilakukan berdasarkan dimensi toleransi, kerja sama, solidaritas, serta keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi dalam pembangunan.

Tabel 2. 62
Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

Penilaian	2025	2026
Indeks Harmoni Indonesia	5,5	5,5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, nilai Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Bangka Barat diproyeksikan relatif stabil pada angka



5,5 selama periode 2025-2029. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menargetkan pemeliharaan kondisi kerukunan yang sudah mapan pada awal periode, sambil mempersiapkan penguatan pada tahun-tahun berikutnya. Stabilitas nilai indeks di awal periode dapat dimaknai sebagai strategi mempertahankan capaian, sekaligus memberikan ruang bagi penguatan kegiatan seperti dialog lintas agama, revitalisasi forum kerukunan, dan kolaborasi lintas komunitas. Keberhasilan mencapai target ini memerlukan peran terpadu antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan kohesi sosial tetap terjaga di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi hubungan antarwarga.

Indikator lain yang tak kalah penting adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). IPP menilai efektivitas sistem pelayanan publik, sedangkan SKM mengukur persepsi langsung masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah mengenai capaian IPP menunjukkan menunjukkan tren perbaikan konsisten sejak tahun 2021, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara struktural, termasuk dalam hal prosedur, kepatuhan terhadap standar, serta pengalaman pengguna layanan. Sementara itu SKM menunjukkan tren stabil dan meningkat selama periode 2020-2024, menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menilai positif layanan yang mereka terima dari perangkat pemerintah daerah.

Tabel 2. 63

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik (IPP)*	N/A	2,33	3,08	3,20 (CC)	3,7 (B-)
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,28	80,98	83,06	84,80	85,81

Sumber: *Kementerian PAN RB; LPPD Kabupaten Bangka Barat, 2025

Pelaksanaan SKM ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan. Survei ini dilaksanakan pada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri atas 1 (satu) Badan, 7 (tujuh) Dinas, 6 (enam) Kecamatan, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah, dan 8 (delapan) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelibatan berbagai jenis unit layanan dalam pelaksanaan SKM tersebut memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan lintas sektor. Meskipun secara sistemik IPP masih berada



dalam tahap penguatan, tingginya nilai SKM menunjukkan bahwa dimensi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat telah berjalan baik.

Indikator lainnya yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat serta pegawai pemerintah terhadap risiko dan potensi korupsi dalam pelayanan publik dan pengelolaan organisasi sektor publik. SPI berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai tingkat integritas institusi pemerintah daerah dan menjadi dasar bagi perumusan strategi pencegahan korupsi yang lebih tepat sasaran. Data SPI pada tabel dibawah menunjukkan penurunan yang menandakan masih adanya persepsi risiko korupsi serta tantangan dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi informasi publik, dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat. Meskipun terjadi sedikit pemulihan pada 2024, tren ini perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa prinsip integritas tetap menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan.

Tabel 2. 64
Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Penilaian	2021*	2022	2023	2024
Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,08	69,83	64,27	65,33

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024; *Laporan Hasil SPI KPK Tahun 2021

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum di Kabupaten Bangka Barat diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berlandaskan pada hak asasi manusia. Data capaian penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menunjukkan konsistensi yang sangat baik, dengan tingkat penegakan mencapai 100% secara berturut-turut dari tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dan pemulihan dalam pelaksanaan penegakan hukum di tingkat daerah. Selain itu tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penegakan Perda, Perkada, dan penanganan gangguan ketertiban masyarakat menunjukkan upaya formalisasi dan sistematisasi proses penegakan hukum.

Dari aspek pemajuan hak asasi manusia, persentase capaian Aksi HAM menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 82,74%, namun menurun tajam menjadi 60,97% pada 2022. Tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi implementasi rencana aksi HAM, baik dari segi koordinasi lintas sektor maupun pemenuhan indikator



aksi. Kendati demikian, capaian kembali meningkat menjadi 72,14% pada 2023 dan naik sedikit menjadi 72,78% pada 2024. Perbaikan ini menandakan adanya pemulihan kinerja dalam pelaporan, monitoring, dan pelaksanaan aksi nyata HAM di tingkat daerah. Meskipun belum kembali ke tingkat capaian awal, tren ini mengarah pada penguatan kembali komitmen terhadap perlindungan hak asasi warga negara, khususnya kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Tabel 2. 65
Capaian Indikator Kondisi Pembangunan Hukum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100
Persentase Capaian Aksi HAM	%	N/A	82,74	60,97	72,14	72,78
Jumlah Kriminal	Kasus	232	182	169	222	232

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Sementara itu, dalam aspek keamanan nasional yang tangguh, data menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminal sempat menurun dari 232 kasus pada 2020 menjadi 169 kasus pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 232 kasus pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap sistem deteksi dini, pencegahan kejahatan, serta penguatan peran aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Upaya membangun keamanan yang berkelanjutan perlu disertai dengan kebijakan berbasis data, peningkatan partisipasi komunitas, serta integrasi program keamanan dengan pembangunan sosial ekonomi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, meskipun capaian pembangunan hukum dan HAM menunjukkan arah yang positif, konsistensi dan penguatan pelaksanaan aksi di lapangan masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara nyata di Kabupaten Bangka Barat.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan tidak hanya mengacu pada kapasitas negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional atau menjaga stabilitas geopolitik, tetapi juga bertumpu pada kekuatan daerah dalam menopang ketahanan nasional secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, daya saing daerah menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan kemampuan Indonesia membangun basis pertahanan non-militer yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika global.



Daerah yang memiliki daya saing tinggi tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, menarik investasi, dan memperluas pasar, tetapi juga dapat memperkuat posisi strategis Indonesia melalui jejaring kerja sama lintas batas yang saling menguntungkan.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu mengoptimalkan keunggulan lokalnya dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan kelembagaan. IDSD mencerminkan kapasitas internal daerah dalam membangun fondasi pembangunan yang kuat, sekaligus kontribusinya terhadap posisi nasional dalam konteks regional dan global. Berdasarkan data capaian Kabupaten Bangka Barat pada periode 2022 hingga 2024, terdapat tren peningkatan skor IDSD yang cukup signifikan, dari 2,68 pada tahun 2022 menjadi 3,54 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan penguatan pada berbagai aspek fundamental, seperti infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas makroekonomi, serta dinamika pasar tenaga kerja dan ukuran pasar.

Tabel 2. 66

Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024

Komponen Indeks Daya Saing Daerah			2022	2023	2024
Lingkungan Pendukung	Pilar 1	Institusi	4,15	4,24	4,62
	Pilar 2	Infrastruktur	1,66	2,38	3,36
	Pilar 3	Adopsi TIK	3,50	4,60	4,49
	Pilar 4	Stabilitas ekonomi makro	2,31	2,96	3,61
SDM	Pilar 5	Kesehatan	3,92	3,94	3,79
	Pilar 6	Keterampilan	2,98	3,40	3,70
	Pilar 7	Pasar produk	2,37	2,89	2,42
Pasar	Pilar 8	Pasar tenaga kerja	2,85	3,51	4,27
	Pilar 9	Sistem keuangan	2,60	1,45	1,79
	Pilar 10	Ukuran pasar	0,44	3,95	4,14
Ekosistem Inovasi	Pilar 11	Dinamisme bisnis	5,00	2,06	4,83
	Pilar 12	Kapabilitas inovasi	0,36	0,97	1,42
Skor IDSD			2,68	3,03	3,54

Sumber: BRIN, 2025

Namun demikian, capaian positif ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang masih membayangi, terutama terkait rendahnya kapabilitas inovasi daerah. Meskipun terjadi peningkatan dari skor 0,36 pada tahun 2022 menjadi 1,42 pada tahun 2024, angka tersebut masih tergolong rendah dibandingkan pilar lainnya. Hal ini mencerminkan belum optimalnya kapasitas riset dan inovasi di Kabupaten Bangka Barat. Masalah utamanya terletak pada terbatasnya sinergi antara lembaga penelitian, dunia usaha, dan institusi pendidikan tinggi di tingkat lokal. Selain itu, rendahnya investasi pada riset terapan dan minimnya dukungan terhadap hilirisasi hasil penelitian



menyebabkan ekosistem inovasi berjalan secara sporadis dan tidak terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Ekosistem riset yang lemah juga disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan inovasi yang solid di tingkat daerah. Belum adanya platform yang mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri lokal mengakibatkan rendahnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung transformasi ekonomi. Ketergantungan terhadap program dari pemerintah pusat tanpa penguatan kelembagaan riset daerah memperbesar risiko stagnasi inovasi. Akibatnya, daya saing daerah cenderung bertumpu pada keunggulan dasar seperti sumber daya alam atau infrastruktur fisik, tanpa diimbangi oleh keunggulan berbasis pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan.

Capaian IDSD yang meningkat tetap memiliki arti strategis dalam konteks diplomasi kawasan. Daerah dengan daya saing tinggi lebih siap menjalin kemitraan ekonomi subnasional, memperkuat keterlibatan dalam konektivitas regional, seperti kerja sama intra-ASEAN antardaerah dan berpartisipasi dalam rantai nilai global. Dalam konteks ini, daya saing daerah bukan semata alat ukur teknokratis, tetapi juga strategi kebangsaan dalam membangun ketangguhan wilayah sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer nasional. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas inovasi dan ekosistem riset harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Tanpa inovasi, daya saing daerah tidak akan memiliki ketahanan jangka panjang dan akan rentan terhadap tekanan eksternal. Dengan membangun struktur inovasi yang kokoh dan inklusif, daerah seperti Kabupaten Bangka Barat dapat memainkan peran strategis dalam mendukung posisi tawar Indonesia di kawasan, baik secara ekonomi, sosial, maupun geopolitik.

4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

A. Pendidikan

Pendidikan adalah pilar utama yang mendorong pembangunan daerah karena berperan langsung dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan yang baik menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang tersedia, sektor pendidikan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan arah yang progresif dalam hal perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD memberikan



kontribusi signifikan terhadap rendahnya angka putus sekolah di tingkat dasar serta meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) secara bertahap, yang mencapai 11,79 tahun pada tahun 2024. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan dasar yang relatif merata. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat pada Urusan Pendidikan diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2. 67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	- APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,07	62,00	85,75	90,21	101,69
	- APK SD/MI/Paket A	%	103,94	99,11	100,04	100,32	105,19
	- APK SMP/MTs/Paket B	%	91,43	84,98	70,96	81,36	84,06
2	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- APM SD/MI/Paket A	%	94,37	89,96	90,67	96,46	99,39
	- APM SMP/MTs/Paket B	%	82,67	67,06	67,29	69,41	73,52
3	Angka Putus Sekolah						
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,17	0,25	0,39	0,30	0,2
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	1,43	1,42	1,16	0,91	0,81
4	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,53	11,70	11,72	11,73	11,79
5	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,22	7,44	7,46	7,47	7,48
6	Capaian Literasi						
	- Literasi SD/MI/Paket A	%	-	-	70,64	73,93	74,32
	- Literasi SMP/MTs/Paket B	%	-	-	72,22	72,25	78,34
7	Capaian Numerasi						
	- Numerasi SD/MI/Paket A	%	-	-	49,71	57,82	66,98
	- Numerasi SMP/MTs/Paket B	%	-	-	46,31	67,06	74,95
8	Presentase Capaian Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	%	-	-	57,26	59,77	76,33
9	Presentase Capaian Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	%	-	-	6,51	31,58	70,97

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2025

Namun demikian, tantangan yang lebih kompleks muncul pada saat transisi ke jenjang pendidikan menengah pertama. APM dan APK pada jenjang SMP tercatat lebih rendah dibanding jenjang SD, dengan angka putus sekolah yang cenderung lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara agregat, yang hanya mengalami kenaikan marginal dari 7,22 tahun (2020) menjadi 7,48 tahun (2024).



Rendahnya RLS ini turut mencerminkan masih terbatasnya proporsi penduduk yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Keterbatasan akses dan kesinambungan pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi juga berkorelasi dengan capaian kompetensi dasar peserta didik. Meskipun demikian, data tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan. Tingkat literasi siswa SMP mencapai 88,99 persen, sementara capaian numerasi pada jenjang SD dan SMP masing-masing meningkat menjadi 82,58 persen dan 67,06 persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan, seperti penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan pengembangan kapasitas pendidik, mulai menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat secara konsisten memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai bagian dari strategi pembangunan pendidikan, melalui pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, serta kerja sama kelembagaan—termasuk kolaborasi dengan salah satu universitas dari Jakarta dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, pelatihan literasi bagi guru turut diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan pedagogik dalam mendukung proses pembelajaran berbasis kompetensi. Ke depan, penguatan akses pendidikan menengah dan tinggi, baik dari segi ketersediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan, menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas SDM dan mempercepat transformasi sosial-ekonomi di Bangka Barat.

B. Kesehatan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 7 dan 12 menyatakan bahwa sektor kesehatan diakui sebagai urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyediaan akses layanan kesehatan yang memadai merupakan fondasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Keterkaitan antar indikator kesehatan di Kabupaten Bangka Barat menggambarkan hubungan yang saling mempengaruhi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, termasuk pada masa persalinan dan pasca-persalinan. Hal ini sejalan dengan tren Angka Kematian Ibu (AKI) yang juga sempat meningkat tajam hingga mencapai 273,89 per 100.000 kelahiran hidup



pada 2023, sebelum menurun menjadi 136,70 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan, namun angka tersebut masih jauh dari ideal dan menuntut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal.

Indikator status gizi balita juga memperlihatkan perkembangan positif. Prevalensi gizi kurang menurun signifikan dari 12,26% pada tahun 2020 menjadi 2,12% pada 2024, disertai dengan penurunan gizi buruk menjadi hanya 0,06%. Capaian ini turut mendorong tren penurunan stunting, yang menurun dari 23,5% (2021) menjadi 19,9% pada 2024. Peningkatan status gizi ini memperlihatkan efektivitas berbagai program intervensi gizi yang dilakukan secara lintas sektor, terutama dalam periode emas 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Tabel 2. 68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	4,00	5,70	7,89	11,56	13,36
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	3,40	8,94	8,50	15,52	15,75
3	Angka Kematian Balita (AKBa)	Per 1.000 KH	8,50	9,20	10,21	16,74	16,78
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	56,71	208,71	212,44	273,89	136,70
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	Orang	2	7	7	7	4
6	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,24	0,2	0,18	0,06
7	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	12,26	10,9	10,44	2,43	2,12
8	Prevalensi Stunting	%	-	23,5	20,5	20,6	19,9
9	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	62,45	56,96	62,18	59,60	42,53
10	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	86,73	82,69	81,82	81,82	79,83
11	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	79,42	98,76	99,19	98,34	97,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, 2025

Sementara itu, pada indikator penanganan Tuberkulosis (TB), terlihat adanya tantangan besar. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB (*treatment coverage*) terus menurun dari 62,45% pada 2020 menjadi hanya 42,53% pada 2024. Penurunan cakupan ini mengindikasikan bahwa masih banyak kasus TB yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani secara sistematis. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan penularan dan kesakitan di masyarakat. Di sisi lain, angka keberhasilan pengobatan TB (*treatment success rate*) juga mengalami penurunan dari 86,73% (2020) menjadi 79,83%



(2024), berada di bawah standar WHO yang menetapkan angka minimal 85%. Kondisi ini menandakan bahwa upaya pelacakan kasus, kepatuhan pengobatan, serta monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar pengendalian TB dapat dilakukan lebih optimal.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan capaian yang sangat baik. Sejak tahun 2021, persentase kepesertaan JKN di Kabupaten Bangka Barat telah mendekati cakupan semesta (universal health coverage), dengan angka tertinggi sebesar 99,19% pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 97,96% pada 2024. Tingginya cakupan JKN ini merupakan modal penting dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Namun, cakupan yang tinggi harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan oleh seluruh peserta, termasuk dalam hal ketersediaan fasilitas, ketersambungan rujukan, dan kualitas SDM kesehatan.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator seperti AKI dan TB masih menunjukkan tantangan besar, kemajuan pada aspek gizi balita, penurunan stunting, dan cakupan JKN yang luas menunjukkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif telah mulai menunjukkan hasil. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu memperkuat intervensi kesehatan berbasis masyarakat dan meningkatkan kualitas sistem layanan agar tren positif ini dapat dipertahankan dan diperluas ke seluruh kelompok masyarakat secara merata.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sektor pekerjaan umum dan tata ruang memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah, khususnya dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik, sistem penyediaan air bersih yang terjangkau, serta tata ruang yang terencana dengan baik merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data yang tercatat mengenai sektor pekerjaan umum dan tata ruang di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Kondisi jalan yang baik mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang tercatat pada beberapa tahun terakhir, meskipun ada penurunan pada tahun tertentu. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam perbaikan infrastruktur jalan, namun masih terdapat jalan rusak yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Tentunya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan perlu



diperkuat agar mobilitas masyarakat semakin lancar. Tren pada indikator persentase kondisi jalan menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas jalan yang baik, walaupun terjadi penurunan pada beberapa tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan yang berfungsi sebagai infrastruktur penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan fokus pada pemeliharaan dan perbaikan jalan, diharapkan kondisi jalan yang baik dapat terus ditingkatkan. Gambaran umum kondisi daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja berikut:

Tabel 2. 69

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan						
	- Baik	Km	552,06	532,99	521,152	534,712	563,35
	- Sedang	Km	18,38	38,96	64,497	20,075	36,45
	- Rusak	Km	130,49	125,53	33,856	10,344	9,12
	- Rusak Berat	Km	-	3,44	191,800	244,14	200,39
2	Persentase Kondisi Jalan menurut Kondisi Jalan						
	- Baik	%	78,76	76,04	64,40	66,07	69,61
	- Sedang	%	2,62	5,56	7,72	2,48	4,50
	- Rusak	%	18,62	17,91	4,18	1,28	1,13
	- Rusak Berat	%	-	0,49	23,70	30,17	24,76
3	Luas Irigasi Sekunder	Ha	1.293	1.001	1.001	1.001	1.001
	Persentase Luas Irigasi Sekunder (Ha)	%	50,87	39,38	39,38	39,38	39,38
4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum						
	- Air kemasan bermerk	%	1,73	-	1,38	-	2,24
	- Air isi ulang	%	42,91	-	40,16	-	49,61
	- Ledeng	%	1,28	-	3,17	11,89	1,52
	- Sumur bor/pompa	%	14,12	-	5,69	6,74	3,07
	- Sumur terlindung	%	31,87	-	41,2	74,11	35,80
	- Sumur tak terlindung	%	7,54	-	5,03	-	3,91
	- Mata air terlindung	%	-	-	1,3	2,57	0,49
	- Mata air tak terlindung	%	-	-	0,47	-	3,36
5	Penduduk dengan Akses Air Minum Layak	%	91,78	92,79	92,19	92,96	93,93
6	Penduduk dengan Sanitasi Layak	%	94,61	54,99	52,19	60,38	97,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2025

Terkait dengan penyediaan air minum sebagian besar rumah tangga masih bergantung pada sumber air non-berkelanjutan seperti air isi ulang, tetapi saat ini sudah terdapat peningkatan dalam akses terhadap air minum yang layak. Peningkatan tersebut menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki akses air bersih bagi masyarakat, meskipun tantangan dalam



penyediaan sumber air yang lebih berkelanjutan tetap ada. Dengan perbaikan di sektor infrastruktur jalan dan penyediaan akses air bersih yang lebih merata, diharapkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dapat meningkat secara signifikan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Bangka Barat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat. Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian, serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman menjadi elemen utama dalam mewujudkan daerah yang layak huni. Upaya ini tercermin dalam kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024, yang berfokus pada pencegahan dan perbaikan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menekankan pentingnya penyediaan rumah layak huni sebagai kebutuhan dasar manusia.

Tabel 2. 70
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,26	91,76	93,07	94,94	95,4
2	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	N/A	N/A	79,34	79,82
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	15,43	23,20	27,23	28,67	28,45

Sumber: Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan data dalam tabel, persentase rumah layak huni di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren yang positif. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan rumah yang memenuhi standar kelayakan sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun persentase rumah layak huni sudah relatif tinggi, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas perumahan, program pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran air di kawasan permukiman juga berkontribusi



dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan permukiman dan infrastruktur memiliki dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, yang tidak hanya bergantung pada kondisi fisik bangunan tetapi juga pada kualitas lingkungan sekitar.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada pengawasan keamanan, pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, serta perlindungan terhadap masyarakat dari potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Beberapa indikator utama yang mencerminkan kinerja sektor ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 71
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Per 10.000	24,69	25,10	24,31	18,56	21,53
2	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Per 10.000	6,16	6,94	7,44	7,28	6,79
3	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan	Per 66 wilayah adm.	2,94	2,86	2,77	1,33	2,77
4	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Aktif	Ormas		23	45	51	59

Sumber: Satpol PP dan PB Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan tabel mengenai urusan ini menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan. Indikator Linmas berfluktuasi dalam jumlah personel yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Meskipun ada peningkatan pada beberapa tahun terakhir, angka ini cenderung menurun yang mengindikasikan berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di tingkat lokal. Linmas memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendukung pengawasan dan penegakan aturan di tingkat desa dan kelurahan. Penurunan jumlah Linmas menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk melibatkan masyarakat kembali dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sementara itu mengenai indikator Rasio Polisi Pamong Praja menunjukkan sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun relatif stabil, keberadaan Polisi Pamong Praja tetap krusial dalam



pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Polisi Pamong Praja membantu memperkuat ketertiban umum dan menjaga suasana kondusif dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi gangguan sosial. Di sisi lain, Rasio Pos Siskamling mengalami penurunan signifikan yang mencerminkan berkurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan keamanan lingkungan. Pos Siskamling berfungsi sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban di sekitar mereka. Penurunan angka ini menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kembali peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan bersama dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif warga.

F. Sosial

Sektor Urusan Sosial di Kabupaten Bangka Barat memainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan, perlindungan bagi kelompok rentan, serta pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data yang tersedia, indikator urusan sosial menunjukkan hubungan yang erat antara kebijakan sosial dengan dampaknya terhadap masyarakat.

Tabel 2. 72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	7.906	4.280	1.846	1.875	672
2	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Orang	39.099	66.444	66.789	56.244	55.795
3	Persentase Penduduk Miskin*	%	2,70	2,75	2,46	2,71	2,59
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan*	Angka	0,23	0,25	0,27	0,42	0,50
5	Indeks Keparahan Kemiskinan*	Angka	0,04	0,04	0,06	0,09	0,16

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2024; *Bangka Barat dalam Angka 2022-2026

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, seperti PPKS dan DTKS bertujuan untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran, dengan fokus utama pada masyarakat yang membutuhkan, termasuk keluarga miskin, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Indikator PPKS



mencatat penurunan jumlah penerima bantuan, yang mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan sosial dari pemerintah daerah menunjukkan hasil positif, dibanding dengan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial kini mulai mencapai kemandirian. Disisi lain terkait DTKS mengalami peningkatan jumlah penerima manfaat, yang menunjukkan sistem pendataan yang lebih baik dan akurat telah memungkinkan pemerintah untuk menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan, sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Meskipun ada penurunan relatif dalam jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan yang masih ada menunjukkan bahwa tantangan dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh tetap besar. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penurunan, tetapi tetap memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dari program pemberdayaan yang lebih efektif dan inklusif sangat diperlukan untuk mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan secara lebih signifikan, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan sosial yang ada.

G. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pengurangan angka pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat berfokus pada upaya meningkatkan akses angkatan kerja terhadap pasar kerja, mengurangi pengangguran, dan memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan perlindungan melalui kebijakan yang tepat.

Tabel 2. 73
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,12	3,83	4,86	4,77	4,88
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,76	65,98	70,23	70,22	70,36
3	Upah Minimum Kabupaten	Rp	3.230.023	3.230.023	3.264.884	3.498.479	3.640.000

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan tabel tercatat indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Meskipun ada penurunan namun tantangan dalam penciptaan



lapangan kerja yang berkelanjutan masih tetap ada, yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih inovatif dalam mendukung sektor-sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti industri kreatif dan digital. Pada sisi lain, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terus meningkat menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pasar kerja, yang dapat diatribusikan pada program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Upah Minimum Kabupaten yang mengalami kenaikan bertahap juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Untuk memastikan bahwa upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi standar kehidupan yang layak, diperlukan pengawasan yang ketat dan penyesuaian upah yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan inflasi, guna meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bangka Barat berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan data pada tabel dibawah terdapat penurunan pada beberapa indikator, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren yang relatif stabil, mencerminkan pencapaian yang cukup baik dalam mengurangi kesenjangan gender, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Selain itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang meningkat secara stabil menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pasar kerja.

Tabel 2. 74

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,09	90,07	90,27	90,41	90,42
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,421	0,488	0,421	0,459	0,373
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,48	61,77	64,62	64,15	65,33
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan*	%	47,14	47,80	48,94	51,59	52,07
5	Jumlah Pernikahan Usia Anak Umur 0-18 Tahun*	Kasus	223	155	N/A	33	31
6	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*	Kasus	24	18	19	21	40

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025; DP3ACSKB, 2025*; DP3AP2KB, 2025*.

Di sisi lain, jumlah pernikahan usia anak (0–18 tahun) menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 223 kasus menjadi 31 kasus di Tahun 2024. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta efektivitas program advokasi dan edukasi perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat.

Sementara itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan penurunan dari 24 kasus di Tahun 2020 menjadi 8 kasus di tahun 2022, meskipun sempat meningkat kembali menjadi 40 kasus di Tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak, serta mengindikasikan perlunya penguatan sistem pelaporan, perlindungan hukum, dan pendampingan korban secara berkelanjutan.

I. Pangan

Urusan pelayanan di sektor pangan merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan di sektor ini mencakup upaya menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan berbasis sumber daya lokal. Fokus utama meliputi peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan, distribusi yang merata, serta edukasi konsumsi pangan bergizi. Hal ini bertujuan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2. 75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi	Kkal/Kap/Hr	2.779	2.332,30	2.454,30	1.943	1.902
2	Ketersediaan Protein untuk Dikonsumsi	Gram/Kap/Hr	76	71,1	74,3	62,3	66
3	Kemandirian Pangan – Energi	Kkal/Kap/ Hr	1.129	1.186	895	763,35	583,30
4	Kemandirian Pangan – Protein	Gram/Kap/Hr	57,10	58,00	51,50	54,70	52,60
5	Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,90	84,29	84,34	86,56	88,90
6	Luas Panen Padi	Ha	1.989,12	2.577,68	762,48	657,26	1.947,95
7	Produksi Padi	Ton	4.357,52	7.234,07	2.152,70	1.956,85	4.219,82
8	Produktivitas Padi	Ku/ hektar	21,91	28,10	28,23	29,77	21,66

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat, 2025



Berdasarkan data indikator sektor pangan di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Ketersediaan energi dan protein untuk konsumsi mengalami tren penurunan yang menandakan menurunnya kualitas dan kecukupan asupan gizi masyarakat. Kondisi ini juga diiringi oleh penurunan tingkat kemandirian pangan, baik dari sisi energi maupun protein, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat semakin bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Akan tetapi mengenai PPH menunjukkan perbaikan dari segi keragaman dan keseimbangan konsumsi yang mengindikasikan sinyal positif dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. Namun mengenai perbaikan belum sepenuhnya ditopang oleh ketersediaan pangan lokal, mengingat produksi dan produktivitas padi justru menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan penurunan. Luas panen memang mengalami peningkatan di tahun terakhir, namun tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas yang memadai sehingga total produksi belum menunjukkan pemulihan yang stabil. Keterkaitan antar indikator menunjukkan bahwa penurunan hasil pertanian berdampak langsung pada penurunan ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat. Di sisi lain, perbaikan pola konsumsi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh peningkatan produksi lokal. Oleh karena itu penguatan sektor pangan di Bangka Barat memerlukan strategi yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas petani, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan program diversifikasi pangan lokal untuk menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

J. Pertanian

Urusan pertanahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara bersama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kebijakan nasional pertanahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas, seperti fasilitasi pendaftaran tanah, penanganan konflik agraria, penertiban aset daerah, serta penyediaan data spasial yang mendukung perencanaan pembangunan. Sertifikasi tanah menjadi bagian penting dari tertib administrasi pertanahan, perlindungan hukum atas hak kepemilikan, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan untuk investasi, infrastruktur, maupun kepentingan sosial. Berdasarkan data, terlihat adanya peningkatan yang konsisten pada luas dan jumlah bidang tanah bersertifikat dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Pendaftaran Tanah



Sistematis Lengkap (PTSL), serta menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.

Tabel 2. 76
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Bidang Tanah Bersertifikat	m ²	488.268.625	523.834.816	541.720.224	557.579.994	564.777.089
2	Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat	Bidang	47.837	56.726	61.454	65.057	66.901

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2025

K. Lingkungan Hidup

Pelayanan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Tabel 2. 77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor (0-100)	63,29	69,21	69,39	64,76	70,84
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor (0-100)	70	89,71	89,2	49,39	91,02
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor (0-100)	91,52	65,79	66,67	53,3	67,04
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Skor (0-100)	37,08	37,16	37,41	38,82	40,06
5	Produksi Sampah	Ton	29.058,50	29.058,60	30.765,80	30.889	31.307
6	Sampah yang ditangani/diangkut	Ton	5.338,86	5.535,04	6.184,26	6.430	8.813

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan tabel kinerja sektor lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan beberapa capaian positif. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan secara keseluruhan mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi pada Tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan pada tiga aspek utama yang menjadi penyusun IKLH, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tutupan lahan. Kualitas udara menunjukkan tren positif walaupun sempat mengalami penurunan pada 2023, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan aktivitas pembangunan atau faktor cuaca ekstrem. Sementara mengenai Indeks Kualitas Air (IKA) masih menjadi tantangan utama, ditandai dengan penurunan cukup tajam pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran air belum sepenuhnya konsisten dan masih



memerlukan perhatian khusus, terutama pada pengelolaan limbah domestik dan aktivitas pertambangan atau pertanian yang berpotensi mencemari sumber air. Di sisi lain, terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) menunjukkan perbaikan secara bertahap, mengindikasikan adanya langkah pelestarian kawasan hijau dan peningkatan perlindungan terhadap lahan dari alih fungsi yang berlebihan.

Pada aspek pengelolaan sampah data menunjukkan produksi sampah relatif stabil setiap tahunnya, namun jumlah sampah yang berhasil ditangani dan diangkut terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas layanan publik di sektor persampahan, baik dari sisi armada, cakupan pelayanan, maupun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Perbaikan dalam pengelolaan sampah turut mendukung peningkatan kualitas air dan tanah, yang secara tidak langsung memperkuat capaian IKLH. Keterkaitan antar indikator-indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan pendekatan holistik dan lintas sektor, atau tidak dapat dilakukan secara parsial.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan bertujuan untuk menjamin legalitas identitas dan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan setiap penduduk, serta berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat pada urusan ini diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 78
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Memiliki KTP	%	98,56	99,25	96,26	97,48	99,3
2	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	%	49,93	50,96	53,05	54,45	55,83
3	Pasangan Memiliki Akta Nikah	%	47,35	51,32	56,06	58,38	62,6

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya kemajuan positif pada tiga indikator utama, diantaranya yaitu hampir seluruh penduduk usia wajib KTP telah terdata secara sah dan memiliki identitas resmi yang menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik dan hak sipil. Sementara itu kepemilikan akta kelahiran meskipun belum optimal, tren ini mengindikasikan



bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan pencatatan kelahiran terutama bagi anak-anak, karena akta kelahiran menjadi dasar legalitas identitas anak, syarat pendidikan, dan perlindungan hukum. Serta terkait persentase pasangan yang memiliki akta nikah juga mengalami tren peningkatan konsisten yang mencerminkan kesadaran masyarakat meningkat dalam hal legalisasi pernikahan, serta peran aktif dinas kependudukan dalam menjangkau pasangan yang belum tercatat secara resmi. Akta nikah juga menjadi dasar hukum bagi status keluarga dan pencatatan anak yang sah. Rendahnya kepemilikan akta nikah dapat berdampak pada pencatatan anak sebagai bagian dari keluarga, dan pada akhirnya menyulitkan proses adminduk anak seperti akta kelahiran.

Keberhasilan administrasi kependudukan tidak hanya bergantung pada satu jenis dokumen, melainkan pada integrasi dan kesinambungan antar dokumen yang saling mendukung. Sehingga diperlukan strategi pelayanan Adminduk yang inklusif dan proaktif, seperti jemput bola ke wilayah terpencil, penyederhanaan prosedur, serta edukasi publik tentang pentingnya pencatatan sipil. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Adminduk, yang mendorong peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan di daerah.

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pelayanan di sektor pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, namun sangat penting dalam memperkuat kapasitas desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari urusan ini adalah membangun kemandirian masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi warga, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pembangunan yang berbasis potensi lokal. Pelayanan ini juga mencakup pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Posyandu sebagai pilar partisipatif pembangunan desa.

Berdasarkan data kinerja Kabupaten Bangka Barat pada periode 2020-2024 terlihat perkembangan yang sangat positif dalam capaian Indeks Desa Membangun (IDM). Desa dengan status “mandiri” dan “maju” meningkat secara signifikan, sebaliknya desa yang masih berstatus “berkembang” mengalami penurunan drastis, menandakan adanya proses transformasi pembangunan



desa yang berjalan cukup efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di tingkat desa telah memberikan hasil nyata dalam peningkatan kapasitas dan kemandirian desa.

Tabel 2. 79

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin					
	- Mandiri	%	3,3	3,3	13,3	28,3	48,33
	- Maju	%	23,3	31,7	55	66,7	51,67
	- Berkembang	%	73,3	65	31,7	5	0
2	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu Aktif	%	4,55	5,13	15,38	39,53	93,55

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2024; *LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Data juga menunjukkan lonjakan luar biasa dalam persentase pengentasan desa tertinggal, yang menggambarkan keberhasilan signifikan dalam mengentaskan desa tertinggal melalui intervensi dan kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya persentase peningkatan status desa mandiri turut mengalami kenaikan signifikan menjadi hampir mencapai 94% pada Tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan, serta kemajuan dalam kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Capaian tersebut merupakan indikasi bahwa pendekatan pemberdayaan yang mengutamakan penguatan kelembagaan desa, partisipasi aktif warga, dan pemanfaatan potensi lokal telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif lembaga masyarakat seperti PKK dan Posyandu yang berkontribusi dalam aspek sosial dan layanan dasar desa, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan yang sehat, sejahtera, dan mandiri.

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pelayanan di sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, dan menyesuaikan laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan serta kapasitas pembangunan daerah. Pelayanan keluarga berencana mencakup penyuluhan, penyediaan alat dan pelayanan kontrasepsi, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menyukseskan program KB.

Berdasarkan tabel, ketiga indikator yang tercantum memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Cakupan KB aktif dihitung dari proporsi peserta



aktif dibandingkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Setiap perubahan pada jumlah peserta KB atau jumlah PUS secara langsung berdampak pada persentase cakupan. Jika jumlah PUS meningkat namun partisipasi KB stagnan atau menurun, maka cakupan KB juga akan menurun. Oleh karena itu, peningkatan cakupan tidak hanya memerlukan penambahan peserta KB, tetapi juga pengelolaan PUS secara berkelanjutan melalui edukasi dan pemerataan akses layanan.

Tabel 2. 80
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Peserta KB Aktif	%	79,18	80,60	74,48	73,80	79,82
2	Peserta KB Aktif	Orang	30.215	31.331	25.086	26.536	29.507
3	Pasangan Usia Subur (PUS)	Orang	38.162	38.872	33.683	35.976	61,03

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa program KB di Kabupaten Bangka Barat telah mencapai capaian yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan strategi agar tidak mengalami penurunan. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana layanan KB, meningkatkan kualitas penyuluhan, serta memperluas jangkauan program hingga wilayah pelosok. Dengan demikian, pengendalian pertumbuhan penduduk dapat tetap terjaga, dan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Bangka Barat dapat terus ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan..

0. Perhubungan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi, baik untuk mobilitas manusia maupun barang. Pelayanan di sektor perhubungan mencakup pengelolaan sarana dan prasarana transportasi darat maupun laut, pengaturan lalu lintas, serta pemeliharaan keselamatan jalan demi mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat pada urusan perhubungan diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:



Tabel 2. 81
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Arus Penumpang Masuk dan Keluar Pelabuhan Tanjung Kalian	Orang	280.187	405.767	405.767	403.190	727.170
2	Arus Barang Masuk dan Keluar (Bongkar Muat) Pelabuhan Tanjung Kalian	Ton	225.609	726.643	399.010	348.467	682.670
3	Jumlah Rambu - rambu Lalu Lintas (Unit)	Unit	778	778	778	529	752
4	Jumlah <i>Traffic Light</i>	Lokasi/unit	5/29	5/29	5/29	4/25	5/29
5	Panjang Pagar Pengaman Jalan	Meter	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
6	Jumlah Deliniator	Unit	542	542	542	542	542
7	Panjang Marka Jalan	Meter	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
8	Jumlah <i>Warning Light</i>	Meter	24	24	24	24	21
9	Jumlah <i>Traffic Cone</i>	Unit	156	156	156	156	32
10	Panjang Median Jalan	Meter	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83

Sumber: Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat, 2024

Data kinerja sektor perhubungan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas transportasi laut khususnya melalui Pelabuhan Tanjung Kalian. Peningkatan mobilitas mencerminkan tingginya peran pelabuhan sebagai simpul utama pergerakan logistik dan orang di daerah. Namun peningkatan aktivitas ini belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan infrastruktur keselamatan dan pengaturan lalu lintas darat. Beberapa indikator menunjukkan stagnasi bahkan penurunan, seperti jumlah rambu lalu lintas yang menurun drastis pada Tahun 2023, serta berkurangnya jumlah traffic light dari 29 menjadi 25 lokasi. Indikator lain seperti panjang marka jalan, pagar pengaman, delineator, warning light, dan traffic cone tidak menunjukkan perkembangan berarti selama periode pemantauan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan volume pergerakan dengan dukungan prasarana keselamatan dan pengaturan lalu lintas yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta menurunkan efisiensi transportasi.

Berdasarkan indikator diatas menunjukkan bahwa keberhasilan sektor perhubungan tidak hanya diukur dari volume penumpang dan barang, tetapi juga dari seberapa baik infrastruktur keselamatan dan pengaturan lalu lintas dikembangkan. Semakin tinggi arus lalu lintas maka akan semakin besar pula kebutuhan terhadap perangkat pendukung keselamatan seperti rambu, marka, dan penerangan jalan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangka



Barat perlu menyusun kebijakan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD) untuk memastikan pembangunan transportasi yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan secara menyeluruh.

P. Komunikasi dan Informatika

Urusan pelayanan di sektor komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, namun sangat strategis dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kinerja sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan ini mencerminkan membaiknya infrastruktur jaringan, meningkatnya daya beli masyarakat terhadap layanan data, serta bertambahnya kebutuhan akses digital untuk aktivitas sehari-hari seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Meningkatnya penggunaan telepon seluler dan akses internet juga membentuk fondasi yang kuat bagi keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mencakup perbaikan tata kelola digital pemerintah daerah mulai dari perencanaan, penggunaan aplikasi layanan, integrasi sistem, hingga keamanan data.

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital dan mengakses internet mempermudah pemanfaatan layanan pemerintah secara daring. Sebaliknya, peningkatan kualitas layanan digital melalui SPBE akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam layanan publik berbasis elektronik. Hal ini memperkuat ekosistem digital yang saling terhubung antara pemerintah dan warga. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat pada urusan ini dapat dilihat dari indikator kinerja berikut.

Tabel 2. 82
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel	%	75,33	76,6	74,34	82,51	N/A
2	Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet	%	43,06	51,43	57,77	63,16	N/A
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	N/A	2,27	2,30	2,61	3,16

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025



Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang meskipun tidak langsung menyangkut layanan dasar, namun sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan peluang kerja. Koperasi dan UKM berperan sebagai pilar penting dalam struktur perekonomian, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam upaya pemberdayaan, termasuk memberikan kemudahan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan koperasi dan pelaku usaha mikro.

Tabel 2. 83

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif	%	85,95	86,4	86,61	86,92	85,71
2	Jumlah Koperasi	Unit	121	125	127	130	133
3	Peningkatan Usaha Mikro	%	5,6	42,8	0,75	2,11	5,65
4	Jumlah Usaha Mikro	Unit	25.077	35.810	36.077	36.840	38.923
5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,80	1,30	0,86	0,72	0,89
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	99,76	99,77	99,75	99,77	99,78

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kinerja sektor koperasi dan usaha kecil di Kabupaten Bangka Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang cenderung stabil, meskipun terdapat beberapa dinamika yang patut menjadi perhatian. Aktivitas koperasi secara umum tetap terjaga dengan baik dan terus bertambah yang menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih menjalankan fungsi usahanya secara aktif. Akan tetapi terkait capaian dalam peningkatan usaha mikro justru menunjukkan lonjakan penurunan, walaupun jumlahnya terus mengalami pertumbuhan namun hanya sebagian kecil yang mampu berkembang secara signifikan dan naik kelas dalam skala usaha. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih menjadikan usaha mikro sebagai pilihan utama dalam berwirausaha, baik sebagai sumber utama penghidupan maupun sebagai strategi adaptif terhadap kondisi ekonomi.

Bertambahnya jumlah koperasi dan usaha mikro belum otomatis meningkatkan keberhasilan usaha secara menyeluruh. Sehingga perlu lebih menekankan pada peningkatan kapasitas dan kualitas usaha, bukan sekadar kuantitasnya. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat ekosistem koperasi dan usaha mikro melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi, seperti penguatan kelembagaan, pemberian pelatihan dan



pendampingan yang berkesinambungan, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan pasar.

R. Penanaman Modal

Pelayanan di bidang penanaman modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses perizinan, menyediakan informasi peluang usaha, serta memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para investor. Pelayanan ini mencakup pengelolaan investasi domestik (PMDN) maupun asing (PMA) di berbagai sektor, mulai dari sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, sektor sekunder seperti industri pengolahan, hingga sektor tersier seperti jasa dan perdagangan.

Tabel 2. 84
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan Nilai Investasi	Rp Juta	931.467,60	179.237,80	787.862,00	-537.734,70	4.947.137,20
2	Sektor Primer PMDN	Rp Juta	246.762,60	40.677,90	848.853,80	755.592,70	195.518,20
3	Sektor Sekunder PMDN	Rp Juta	-	1.095.189,30	435.530,80	1.267.924,20	568.038,10
4	Sektor Tersier PMDN	Rp Juta	4.836,60	47.199,60	7.792,00	126.649,70	848.875,60
5	Sektor Primer PMA	USD Ribu	17.136,20	2.786,10	59.153,70	51.053,30	13.035,40
6	Sektor Sekunder PMA	USD Ribu	-	75.012,90	30.350,50	85.670,70	37.869,20
7	Sektor Tersier PMA	USD Ribu	335,8	3.232,80	8.557,50	56.592,00	74.147,90

Sumber: BKPM, 2025

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan meskipun fluktuatif. Nilai investasi mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2024, mencapai Rp4.947,14 miliar, setelah sempat mengalami kontraksi besar pada 2023 sebesar -Rp537,73 miliar. Fluktuasi ini menandakan bahwa investasi masih sangat dipengaruhi oleh dinamika proyek-proyek besar yang bersifat jangka pendek maupun keberlanjutan dukungan kebijakan daerah.

Secara sektoral, investasi dalam negeri (PMDN) memberikan kontribusi terbesar, terutama pada sektor industri pengolahan dan jasa. Sektor sekunder PMDN menunjukkan pertumbuhan pesat—dari Rp1.095,18 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.267,92 miliar pada 2023—meskipun mengalami koreksi ke Rp568,04 miliar pada 2024. Tren ini mencerminkan daya tarik investasi terhadap sektor yang bernilai tambah tinggi, sekaligus perlunya stabilisasi iklim usaha untuk menjaga konsistensi investasi. Sementara itu sektor tersier PMDN juga menunjukkan tren positif, naik dari Rp47,20 miliar pada 2021



menjadi Rp848,88 miliar pada 2024, sejalan dengan perkembangan ekonomi berbasis jasa yang inklusif.

Namun demikian, investasi di sektor primer PMDN mengalami ketidakstabilan. Setelah menyentuh Rp755,59 miliar pada 2023, nilainya turun drastis menjadi Rp195,52 miliar pada 2024. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mendorong perbaikan daya saing dan pengelolaan potensi sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

Investasi asing (PMA) juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terutama di sektor tersier. Capaian sektor tersier PMA naik drastis dari USD 2.332,80 ribu pada 2021 menjadi USD 74.147,90 ribu di tahun 2024, memperlihatkan ketertarikan investor asing terhadap layanan jasa dan aktivitas perdagangan. Sektor sekunder PMA pun terus mencatat pertumbuhan, dengan nilai USD 37.869,20 ribu pada 2024, menandakan adanya minat pada industri pengolahan dan manufaktur. Meski kontribusi total PMA belum sebesar PMDN, tren pertumbuhannya menjadi indikator penting atas meningkatnya daya tarik global terhadap iklim usaha di Bangka Barat.

Salah satu daya tarik utama Kabupaten Bangka Barat bagi investor asing adalah potensi sumber daya alamnya, terutama cadangan timah yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Potensi timah yang bernilai tinggi menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian daerah dan memiliki daya tarik tersendiri bagi investor luar negeri, baik dalam bentuk eksplorasi maupun kegiatan hilirisasi mineral.

Selain itu, kabupaten ini juga memiliki potensi sektor lain yang mendukung masuknya investasi asing, seperti sektor pariwisata pesisir dan kelautan, serta jasa perdagangan dan logistik yang semakin berkembang seiring peningkatan konektivitas daerah. Kehadiran PMA di sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat mulai diperhitungkan sebagai wilayah yang potensial dalam peta investasi nasional dan regional.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan momentum pertumbuhan ini dengan memperkuat promosi investasi, memperbaiki kepastian hukum, serta mendorong sinergi antara PMDN dan PMA untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika investasi di sektor industri dan jasa mengalami peningkatan, maka dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan penguatan sektor usaha mikro yang mendukung rantai nilai lokal.



S. Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan di sektor kepemudaan dan olahraga merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan mengembangkan potensi generasi muda sebagai sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan fasilitas, program pembinaan, dan pengembangan kapasitas pemuda, serta meningkatkan prestasi olahraga sebagai wujud nyata penguatan kualitas hidup, kesehatan, dan integrasi sosial. Dukungan ini mencakup pembinaan organisasi kepemudaan, pengembangan ekonomi mandiri bagi pemuda, dan peningkatan prestasi olahraga melalui pelatihan, kompetisi, dan fasilitas yang memadai.

Tabel 2. 85
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,0022	0,44	5,82	50,42	48,93
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,20	0,002	0,75	10,78	10,87

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Berdasarkan data kinerja Kabupaten Bangka Barat pada periode 2020 hingga 2024, terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam berbagai indikator kepemudaan dan olahraga. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri meningkat dari angka yang sangat rendah pada Tahun 2020 menjadi hampir 49% pada Tahun 2024, menandakan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan pemuda dalam aktivitas kewirausahaan yang berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Demikian pula partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan olahraga meningkat secara stabil dari angka yang hampir tidak signifikan pada awal periode menjadi lebih dari 10% pada Tahun 2024, menunjukkan penguatan jejaring sosial dan peran serta dalam pengembangan sumber daya komunitas. Tingginya tingkat keterlibatan pemuda dapat menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya bakat dan pengembangan kapasitas yang esensial dalam olahraga. Sebaliknya, prestasi olahraga yang baik dapat menjadi motivasi bagi peningkatan partisipasi dan kebanggaan komunitas pemuda.

T. Statistik

Urusan pelayanan di sektor statistik memegang peranan penting dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan



berbasis data. Statistik yang tersedia harus dapat diolah dan dimanfaatkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada informasi yang valid dan terpercaya.

Tabel 2. 86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Berdasarkan data tabel dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah maupun dalam melakukan evaluasi pembangunan selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh OPD di Bangka Barat secara konsisten memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga mencerminkan integrasi yang baik antara kedua fungsi tersebut. Keterpaduan tersebut menggambarkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya penggunaan data statistik dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran. Dengan pemanfaatan data yang optimal, maka kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan di Bangka Barat semakin terjamin, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berdampak positif bagi kemajuan daerah.

U. Persandian

Urusan pelayanan di sektor persandian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Tugas utamanya adalah memastikan seluruh informasi yang dikelola terlindungi dari ancaman kebocoran maupun penyalahgunaan data. Tingkat keamanan informasi menjadi indikator kunci untuk menilai keberhasilan pengamanan tersebut. Berdasarkan data, tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2020-2022 berada pada angka 100%, yang menunjukkan kondisi optimal dalam perlindungan data.



Tabel 2. 87
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	73,00	75,97

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai menjadi 73%, sebelum kembali meningkat sedikit pada tahun 2024 menjadi 75,97%. Perubahan ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang tepat, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas pengawasan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam menjaga keamanan informasi secara berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

V. Kebudayaan

Pelayanan di sektor kebudayaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang ditujukan untuk menjaga kelestarian warisan budaya serta memperkuat identitas dan karakter daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, termasuk penetapan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Tabel 2. 88
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cagar Budaya yang telah Ditetapkan	Cagar Budaya	24	24	24	28	33
2	Terlestarikannya cagar Budaya	%	75,00	79,17	83,33	86,00	84,85

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024

Berdasarkan data kinerja Kabupaten Bangka Barat pada periode 2020-2024, jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan menunjukkan pertumbuhan yang bertahap dan positif. Pada tahun 2020, terdapat 24 cagar budaya yang telah ditetapkan, dan jumlah ini tidak mengalami penambahan pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi penambahan empat cagar budaya baru, sehingga total menjadi 28, dan meningkat lagi menjadi 33 cagar budaya pada tahun 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun penetapan tidak berlangsung secara konsisten setiap tahun, dalam dua tahun terakhir terdapat penguatan upaya pelestarian melalui penambahan status



resmi cagar budaya baru. Keterlambatan penetapan pada tahun-tahun sebelumnya kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli pelestarian, atau proses identifikasi dan verifikasi objek budaya yang belum optimal. Sementara itu, indikator terlestarikannya cagar budaya menunjukkan tren positif secara umum, meningkat dari 75% pada tahun 2020 menjadi 86% pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 84,85% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya pelestarian yang cukup efektif, baik melalui pemeliharaan fisik, pengawasan rutin, maupun dukungan regulasi dan partisipasi masyarakat. Penurunan tipis pada tahun terakhir menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memastikan keberlanjutan pelestarian yang adaptif terhadap tantangan baru, seperti risiko kerusakan lingkungan, pembangunan fisik, maupun degradasi nilai budaya.

Lebih lanjut, arah kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat tidak hanya terbatas pada aspek penetapan dan pelestarian cagar budaya, tetapi juga mencakup pengelolaan secara lebih luas atas Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Berdasarkan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029, tercatat sebanyak 978 objek OPK yang tersebar dalam 10 kategori kebudayaan, serta terdapat 124 cagar budaya yang telah teridentifikasi. Data ini menjadi landasan penting dalam perencanaan kebijakan kebudayaan daerah karena mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya lokal yang perlu dilindungi dan dimajukan secara sistematis.

Tabel 2. 89
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

No	Data Objek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya	Jumlah
A	Objek Pemajuan Kebudayaan	978
1	Manuskrip	51
2	Tradisi Lisan	122
3	Adat Istiadat	23
4	Ritus	25
5	Pengetahuan Tradisional	386
6	Teknologi tradisional	104
7	Seni	172
8	Bahasa	18
9	Permainan Rakyat	76
10	Olahraga Tradisional	1
B	Cagar Budaya	124
TOTAL		1.102

Sumber : PPKD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pengelolaan OPK dan Cagar Budaya dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan



Pembinaan. Tahapan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya, memperkaya serta mengembangkan ekspresi budaya agar tetap relevan di tengah perubahan zaman, meningkatkan kontribusi budaya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional, serta menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya secara lintas generasi. Dalam konteks Bangka Barat, implementasi tahapan ini menuntut sinergi lintas sektor, ketersediaan sumber daya pendukung, serta penguatan ekosistem kelembagaan kebudayaan agar program-program yang dirancang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberi dampak nyata bagi penguatan identitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya.

W. Perpustakaan

Pelayanan di sektor perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan literasi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Keberadaan perpustakaan menjadi bagian strategis dalam menyediakan akses informasi yang setara dan memperkuat budaya baca masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan jaringan perpustakaan, meningkatkan jumlah dan kualitas koleksi, serta memperluas jangkauan layanan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat pada urusan ini diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 90
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan	Orang	280	200	234	250	250
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	9.322	1.217	4.075	5.141	4.316
3	Jumlah Koleksi Buku	Buku	23.512	23.609	26.615	29.723	29.767
4	Jumlah Judul Buku	Judul	9.690	9.714	13.125	14.009	14.049
5	Rasio Koleksi Buku	Rasio	2,43	2,43	2,03	2,15	2,12

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kinerja sektor perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perkembangan yang cukup positif. Jumlah perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, diikuti oleh bertambahnya koleksi buku dan judul yang tersedia. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses



layanan literasi sekaligus menyediakan bahan bacaan yang lebih beragam dan relevan bagi masyarakat. Pertumbuhan koleksi juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan, yang sebelumnya sempat menurun signifikan pada tahun 2021 akibat pembatasan mobilitas selama masa pandemi, namun telah mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Rasio koleksi buku juga telah kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2023. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai proporsionalitas antara jumlah koleksi dan tingkat pemanfaatan oleh pengguna. Berdasarkan capaian kinerja dari indikator urusan perpustakaan mengisyaratkan bahwa peningkatan kuantitas infrastruktur harus disertai dengan peningkatan kualitas konten dan layanan agar mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.

X. Kearsipan

Pelayanan di sektor kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan arsip yang baik bukan sekadar upaya administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam mendokumentasikan proses pemerintahan, menjaga akuntabilitas publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan pengelolaan arsip secara baku, sesuai dengan prinsip dan standar nasional kearsipan yang mencakup penciptaan, penggunaan, penyimpanan, penyusutan, hingga pelestarian arsip.

Tabel 2. 91
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku	%	82,98	82,36	81	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, 2024

Kinerja sektor kearsipan di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Persentase perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai 100 persen pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh perangkat daerah telah memenuhi standar dalam pengelolaan arsip, baik dari sisi sistem, prosedur, maupun pelaksanaannya. Meskipun pada awal periode terjadi sedikit fluktuasi



dalam angka capaian, tren yang stabil dan peningkatan signifikan menunjukkan adanya kesadaran dan upaya serius dalam membenahi manajemen arsip di lingkungan pemerintahan daerah.

Indikator pengelolaan arsip menjadi cerminan penting dari kapasitas kelembagaan dan kedisiplinan administrasi di daerah. Ketika seluruh perangkat daerah telah mampu mengelola arsip secara tertib, maka hal ini akan berdampak langsung pada efisiensi birokrasi, perlindungan terhadap aset informasi, serta kemudahan dalam pelayanan publik. Selain itu pengelolaan arsip yang baik juga menjadi fondasi bagi implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

Y. Perikanan

Pelayanan di sektor perikanan merupakan bagian penting dari urusan pemerintahan daerah yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam perairan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola potensi perikanan secara berkelanjutan melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, serta fasilitasi pemasaran dan permodalan. Di Kabupaten Bangka Barat, yang secara geografis memiliki kekayaan laut dan perairan darat yang melimpah, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung struktur ekonomi daerah.

Tabel 2. 92
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Tangkap	Ton	19.341,90	28.204,33	33.016,58	39.185,07	41.355,35
2	Budidaya Air Tawar	Ton	105,81	95,09	113,94	139,15	184,23
3	Budidaya Air Laut	Ton	823,31	1.206,18	1.115,34	640,56	1.051,714
4	Perikanan Tangkap	Rp Miliar	632,9	961,5	1.502,98	2.140,66	1.258,35
5	Budidaya Air Tawar	Rp Miliar	2,75	2,49	3,14	3,75	5,23
6	Budidaya Air Laut	Rp Miliar	30,53	66,41	57,73	29,74	74,99

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat, 2025

Berdasarkan data kinerja tahun 2020-2024, produksi perikanan tangkap di Bangka Barat menunjukkan peningkatan yang konsisten disertai dengan lonjakan signifikan pada nilai ekonominya. Capaian tersebut mencerminkan pemanfaatan potensi laut yang semakin optimal dan menunjukkan kontribusi nyata subsektor ini terhadap pendapatan masyarakat nelayan maupun



daerah. Sementara itu subsektor budidaya air tawar juga mengalami peningkatan produksi dan nilai ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun, menandakan adanya penguatan kapasitas teknis pembudidaya dan efektivitas program pembinaan serta dukungan pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budidaya air tawar semakin diminati, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses langsung ke laut.

Di sisi lain mengenai budidaya air laut mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mengalami peningkatan tinggi pada Tahun 2021 dari sisi volume maupun nilai produksi, subsektor ini mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2023, sebelum kembali naik pada 2024. Fluktuasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, penyakit ikan, atau kendala teknis semata, tetapi juga mencerminkan masalah mendasar pada ketersediaan dan kualitas air serta keterbatasan lahan budidaya yang sesuai. Banyak lokasi budidaya menghadapi tantangan pencemaran perairan, salinitas yang tidak stabil, serta keterbatasan zona yang layak untuk pemasangan keramba atau sarana budidaya laut lainnya. Selain itu, konversi lahan pesisir dan tidak optimalnya pemetaan ruang laut turut menghambat pengembangan budidaya air laut secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem pengelolaan kualitas air laut, pemetaan zona budidaya yang lebih presisi, serta penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap kondisi lokal. Pemerintah daerah juga perlu mendorong kerja sama antara pembudidaya, pemerintah desa, dan sektor swasta dalam mengembangkan kawasan budidaya laut terpadu yang berbasis mitigasi risiko lingkungan. Dengan pendekatan ini, potensi perairan laut Bangka Barat tetap dapat dioptimalkan untuk pengembangan komoditas unggulan seperti kakap, kerapu, dan rumput laut secara produktif dan berkelanjutan.

Z. Pariwisata

Sektor pariwisata memegang peranan strategis dalam pembangunan daerah karena berkontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengembangkan destinasi wisata melalui penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas amenities dan aksesibilitas, serta optimalisasi strategi promosi guna menarik kunjungan wisatawan secara berkelanjutan. Penguatan ekosistem pariwisata diharapkan dapat mendorong



pertumbuhan sektor-sektor penunjang lainnya, seperti perhotelan, transportasi, kuliner, serta ekonomi kreatif, yang secara kumulatif berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. 93
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	67.660	87.562	319.611	294.067	337.448
2	Jumlah Hotel dan Penginapan						
	- Hotel Melati	Unit	4	4	4	4	4
	- Penginapan	Unit	11	9	11	13	13
	- Bungalow	Unit	1	1	1	1	1
	- Homestay	Unit	16	16	24	39	39
	- Guest House	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Tamu Wisatawan (Menginap)	Orang	9.547	10.844	28.216	23.014	22.653
4	PAD Sektor Pariwisata	Rp	2.607.616.874	2.715.251.535	3.627.183.300	3.591.673.737	3.061.824.417
5	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB)	%	1,40	1,32	1,36	1,48	1,41
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,29	0,50	3,15	5,95	3,95

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2025

Analisis terhadap kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang progresif. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang signifikan dari 67.660 orang pada tahun 2020 menjadi 337.448 orang pada tahun 2024. Tren ini menandakan adanya pemulihan pasca pandemi serta respons positif terhadap berbagai kebijakan penguatan promosi dan pengembangan destinasi wisata lokal. Namun demikian, pertumbuhan kunjungan wisatawan belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan amenities akomodasi yang memadai. Saat ini, Kabupaten Bangka Barat belum memiliki hotel berbintang, dan fasilitas penginapan yang tersedia masih didominasi oleh homestay, bungalow, guest house, serta hotel melati. Jumlah homestay mengalami peningkatan dari 16 unit pada tahun 2020 menjadi 39 unit pada tahun 2024, sementara jumlah hotel melati stagnan di angka 4 unit dalam lima tahun



terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyediaan fasilitas akomodasi yang berkualitas tinggi, yang dapat membatasi lama tinggal dan belanja wisatawan serta menurunkan daya saing destinasi di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.

Di sisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022 dan 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata telah memberikan dampak ekonomi yang cukup berarti bagi daerah, meskipun masih terdapat ruang yang luas untuk penguatan kualitas dan nilai tambah dari layanan pariwisata yang ditawarkan. Dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, strategi pembangunan sektor pariwisata ke depan perlu diarahkan pada integrasi antarwilayah destinasi, pengembangan amenities berkualitas termasuk mendorong investasi hotel berbintang, serta penciptaan ekosistem pariwisata yang ramah terhadap pelaku usaha lokal dan komunitas. Dengan langkah yang terarah dan inklusif, sektor pariwisata berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

AA. Pertanian

Pelayanan di sektor pertanian merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, mendampingi petani melalui penyuluhan dan pelatihan teknis, serta memfasilitasi akses terhadap permodalan, pasar, dan perlindungan usaha tani. Salah satu subsektor pertanian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah hortikultura, yang mencakup tanaman sayur, buah-buahan, bunga, dan tanaman obat, serta dikenal memiliki nilai tambah dan daya saing ekonomi yang tinggi. Kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan kontribusi yang stabil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tren peningkatan secara bertahap. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung struktur ekonomi daerah.



Tabel 2. 94
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	13,25	12,46	12,95	13,59	13,53
2	Luas Areal Hortikultura	Ha	1.285,67	1.286,44	1.478,15	1.539,83	1.618,04
3	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	3.662,25	10.504,55	5.864,75	5.505,67	5.192,32
4	Nilai Produksi Hortikultura	Rp	38.256.728.500	99.237.578.750	58.356.427.325	60.366.299.750	54.192.623.500

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Jika ditinjau dari subsektor hortikultura, terdapat perkembangan positif dalam hal perluasan areal tanam yang meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jumlah produksi hortikultura menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dengan lonjakan pada 2021 dan penurunan pada tahun-tahun setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspansi lahan belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan produktivitas yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor iklim, gangguan hama, atau keterbatasan sarana produksi. Nilai produksi hortikultura juga mengalami dinamika yang mencerminkan sensitivitas terhadap volume produksi maupun fluktuasi harga pasar. Peningkatan nilai produksi yang sempat terjadi tidak selalu berbanding lurus dengan luasan lahan atau jumlah hasil panen, yang menunjukkan perlunya optimalisasi kualitas hasil dan efisiensi usaha tani. Hubungan antar indikator dalam tabel menunjukkan bahwa keberhasilan subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh luasan areal, tetapi juga oleh produktivitas lahan, efisiensi biaya produksi, dan aksesibilitas terhadap pasar yang menguntungkan.

BB. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelayanan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) berperan penting dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan akses energi terutama listrik bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam memperluas cakupan layanan kelistrikan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan adaptif terhadap isu lingkungan. Berdasarkan data kinerja Kabupaten Bangka Barat tahun 2020-2024, jumlah pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.



Tabel 2. 95
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan Perusahaan Listrik Negara	Pelanggan	65.726	68.744	71.568	74.493	77.852

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026

Kenaikan jumlah pelanggan setiap tahun mencerminkan perluasan jangkauan layanan serta peningkatan infrastruktur energi yang mendukung aktivitas rumah tangga, sektor usaha, dan layanan publik. Dinamika ini juga menjadi indikator peningkatan taraf hidup dan produktivitas masyarakat. Sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor energi di Kabupaten Bangka Barat telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan aksesibilitas energi secara merata dan berkelanjutan.

CC. Perindustrian

Pelayanan di sektor perindustrian merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung, pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses bahan baku, pembiayaan, dan pasar bagi pelaku IKM.

Tabel 2. 96
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah IKM	Unit	2.899	3.064	3.235	3.401	3.574
2	Pertumbuhan IKM	%	5,27	5,69	5,58	5,13	5,09

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026

Berdasarkan data kinerja Kabupaten Bangka Barat tahun 2020-2024, jumlah IKM mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Namun tingkat pertumbuhannya cenderung menurun sejak Tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa ekspansi kuantitatif tidak sepenuhnya diiringi oleh percepatan pertumbuhan usaha. Fenomena ini dapat mencerminkan adanya hambatan struktural, seperti keterbatasan akses pasar, stagnasi inovasi, atau belum optimalnya dukungan kebijakan. Indikator jumlah dan pertumbuhan IKM menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas perlu diimbangi dengan



penguatan kualitas dan produktivitas usaha. Oleh karena itu strategi pengembangan industri ke depan harus difokuskan pada peningkatan efisiensi produksi, inovasi produk, dan daya saing pelaku IKM.

DD. Perdagangan

Pelayanan di sektor perdagangan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan yang efisien, berdaya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tugas utama pemerintah meliputi penyediaan infrastruktur distribusi, pengawasan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah, termasuk upaya perluasan akses ke pasar luar.

Tabel 2. 97
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHB)	Rp Miliar	1.826,94	3.464,68	3.911,76	3.944,12	5.541,90

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026

Data kinerja Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa nilai net ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun mengindikasikan tumbuhnya aktivitas perdagangan luar daerah yang dapat dikaitkan dengan peningkatan produksi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Tren ini juga mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi dan logistik serta meningkatnya keterhubungan ekonomi lokal dengan pasar nasional maupun internasional. Peningkatan ekspor bersih juga menunjukkan bahwa daya saing dan produktivitas daerah mengalami penguatan, yang selanjutnya memperbesar kontribusi perdagangan terhadap struktur perekonomian daerah.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Pemerintah Daerah,



baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, wajib menerapkan dan memenuhi pelayanan dasar ini sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sebagai bagian dari kewajiban penerapan SPM, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan penerapan dan pemenuhan pelayanan dasar setiap tahun kepada pemerintah pusat. Laporan ini merupakan materi dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional pemenuhan pelayanan dasar. Selain itu, laporan SPM menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian insentif dan disinsentif kepada daerah, serta instrumen penilaian kinerja perangkat daerah dan pengembangan kapasitas pelaksanaan pelayanan.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, anggaran pemerintah daerah kini diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini akan mempengaruhi indeks penghitungan besaran transfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah. Kebijakan ini menjadi penekanan penting agar penerapan SPM tidak dianggap sepele, dan memerlukan komitmen dari seluruh stakeholder di Kabupaten Bangka Barat untuk fokus dalam pelaksanaan SPM.

Penerapan SPM sendiri mencakup enam bidang urusan wajib pemerintah daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 18. Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan keenam urusan ini sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keenam bidang tersebut adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan Rakyat;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; serta
- f. Sosial.

Di Kabupaten Bangka Barat, penerapan SPM telah dimulai sejak tahun 2017 berdasarkan regulasi lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kala itu dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Seiring berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, koordinasi pelaksanaan SPM kemudian dialihkan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Pelaksanaan SPM di Bangka Barat juga melibatkan berbagai instansi lintas sektor, seperti Badan



Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, enam OPD teknis bidang SPM, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.

Hingga tahun 2024, Kabupaten Bangka Barat terus berupaya mengoptimalkan penerapan SPM melalui berbagai langkah nyata. Upaya yang telah dilakukan meliputi pembentukan Tim Koordinasi Penerapan SPM setiap tahun, penyusunan laporan SPM daerah, penyusunan roadmap atau rencana aksi penerapan SPM, pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara berkala, koordinasi lintas sektor dengan tim sekretariat SPM pusat dan provinsi, serta berbagai upaya pendukung lainnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, penerapan SPM dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dengan tahapan dan komitmen tersebut, Kabupaten Bangka Barat diharapkan mampu memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal bagi seluruh warganya secara berkelanjutan. Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang memuat data dan informasi mengenai progres pelaksanaan SPM di enam bidang urusan wajib tersebut.

Secara umum, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022-2024 menunjukkan tren positif. Bidang Pendidikan dan Sosial berhasil mempertahankan capaian penuh 100% selama tiga tahun berturut-turut, menandakan konsistensi dan komitmen tinggi dalam pemenuhan layanan dasar di kedua bidang tersebut. Bidang Kesehatan juga menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan rata-rata capaian tahunan di atas 90%, meskipun beberapa sub-urusan masih mengalami fluktuasi, seperti pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Sementara itu, Bidang Pekerjaan Umum mengalami peningkatan yang signifikan dari capaian awal 63,37% pada 2022 menjadi 100% pada 2023 dan 2024, khususnya pada sub-urusan penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik.

Di sisi lain, Bidang Perumahan Rakyat masih menghadapi tantangan, terlihat dari capaian rata-rata yang stagnan di angka 50% selama tiga tahun



terakhir. Hal ini disebabkan oleh belum tercapainya target pada sub-urusan fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan progres luar biasa, dari capaian rata-rata 58,38% di 2022 menjadi 100% di tahun-tahun berikutnya, yang mencerminkan komitmen untuk memastikan keselamatan dan ketertiban publik. Secara keseluruhan, data capaian ini mencerminkan keseriusan dan dedikasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan bahwa seluruh warga memperoleh layanan dasar yang layak dan merata sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal.



Tabel 2. 98
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2020		%	2021		%	2022		%	2023		%	2024		%	Program	Perangkat Daerah
			TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN			
A	URUSAN PENDIDIKAN				67,67%			65,95%			100,00%			100,00%			100,00%		
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	36731	31822	86,64%	37527	35475	94,53%	7723	7723	100,00%	4065	4065	100,00%	3500	3500	100,00%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4788	1.019	21,28%	6604	363	5,50%	365	365	100,00%	1142	1142	100,00%	59	59	100,00%		
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7640	7265	95,09%	7728	7560	97,83%	5888	5888	100,00%	4838	4838	100,00%	1131	1131	100,00%		
B	URUSAN KESEHATAN				90,63%			91,88%			91,02%			98,60%			95,85%		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3833	3651	95,25%	3725	3459	92,86%	3641	3439	94,45%	3250	3250	100,00%	2949	2660	90,20%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3628	3505	96,61%	3524	3348	95,01%	3463	3304	95,41%	3291	3291	100,00%	2949	2919	98,98%		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3543	3521	99,38%	3493	3344	95,73%	3425	3255	95,04%	3254	3254	100,00%	2917	2891	99,11%		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	12182	11371	93,34%	11708	10931	93,36%	11541	11031	95,58%	10873	10873	100,00%	10861	10382	95,59%		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	36722	35918	97,81%	37506	36890	98,36%	37541	36546	97,35%	37536	36522	97,30%	37091	36866	99,39%		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	127449	89508	70,23%	133183	111404	83,65%	133754	101787	76,10%	2409	2409	100,00%	142891	122811	85,95%		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	16152	12651	78,32%	16395	13756	83,90%	17125	14894	86,97%	19208	16511	85,96%	20159	17347	86,05%		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	46182	39249	84,99%	48104	42316	87,97%	48523	43555	89,76%	5508	5508	100,00%	52437	49749	94,87%		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	777	777	100,00%	3934	3934	100,00%	4098	4098	100,00%	1278	1278	100,00%	4288	4288	100,00%		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	493	493	100,00%	492	492	100,00%	487	487	100,00%	230	230	100,00%	530	530	100,00%		



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2020		%	2021		%	2022		%	2023		%	2024		%	Program	Perangkat Daerah
			TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	1921	1377	71,68%	1921	1377	71,68%	1749	1077	61,58%	790	790	100,00%	3182	3182	100,00%		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	4386	4386	100,00%	4386	4386	100,00%	4862	4862	100,00%	539	539	100,00%	3701	3701	100,00%		
C	URUSAN PEKERJAAN UMUM				93,20%			73,74%			63,37%			100,00%			100,00%		
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air MinumSehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	199823	183401	91,78%	199784	184768	92,48%	24505	22942	93,62%	2540	2540	100,00%	200	200	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	199823	189052	94,61%	199784	109856	54,99%	24505	8115	33,12%	116	116	100,00%	224	224	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
D	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				50,00%			50,00%			50,00%			100,00%			50,00%		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	2	2	100,00%	2	2	100,00%	67	67	100,00%	15	15	100,00%	10	10	100,00%	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perhubungan , Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah DaerahKabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	839	839	100,00%	0	0	0,00%		
E	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				62,76%			62,46%			58,38%			100,00%			100,00%		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala DaerahKabupaten	12	12	100,00%	567	567	100,00%	72	72	100,00%	215	215	100,00%	250	250	100,00%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	2765	218	7,88%	2765	150	5,42%	2080	115	5,53%	12481	12481	100,00%	3693	3693	100,00%		
3	Pelayanan Pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	2765	164	5,93%	2765	190	6,87%	2080	179	8,61%	2266	2266	100,00%	306	306	100,00%		



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2020		%	2021		%	2022		%	2023		%	2024		%	Program	Perangkat Daerah
			TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN			
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana																	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	536	536	100,00%	7042	7042	100,00%	2972	2972	100,00%	128	128	100,00%	287	287	100,00%		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	13	13	100,00%	24	24	100,00%	18	14	77,78%	38	38	100,00%	304	304	100,00%		
F	URUSAN SOSIAL				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	332	332	100,00%	816	816	100,00%	389	389	100,00%	7	7	100,00%	79	79	100,00%		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar Panti	269	269	100,00%	11164	11164	100,00%	751	751	100,00%	1	1	100,00%	78	78	100,00%		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	469	469	100,00%	5968	5968	100,00%	965	965	100,00%	9	9	100,00%	111	111	100,00%		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8	8	100,00%	4	4	100,00%	1	1	100,00%	2	2	100,00%	3	3	100,00%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
5	Pertindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Pertindungan dan Jaminan Sosial pada Saatdan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	431	431	100,00%	3317	3317	100,00%	502	502	100,00%	568	568	100,00%	468	468	100,00%		

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lintas wilayah. Dalam konteks Kabupaten Bangka Barat, kerjasama daerah dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Sub bab ini menguraikan bentuk, ruang lingkup, serta capaian kerja sama yang telah dilakukan Kabupaten Bangka Barat, baik secara horizontal dengan kabupaten/ kota lain maupun secara vertikal dengan pemerintah provinsi, kementerian/ lembaga, serta pihak swasta dan mitra pembangunan lainnya.

Gambar 2. 54
Jumlah Kerjasama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2025



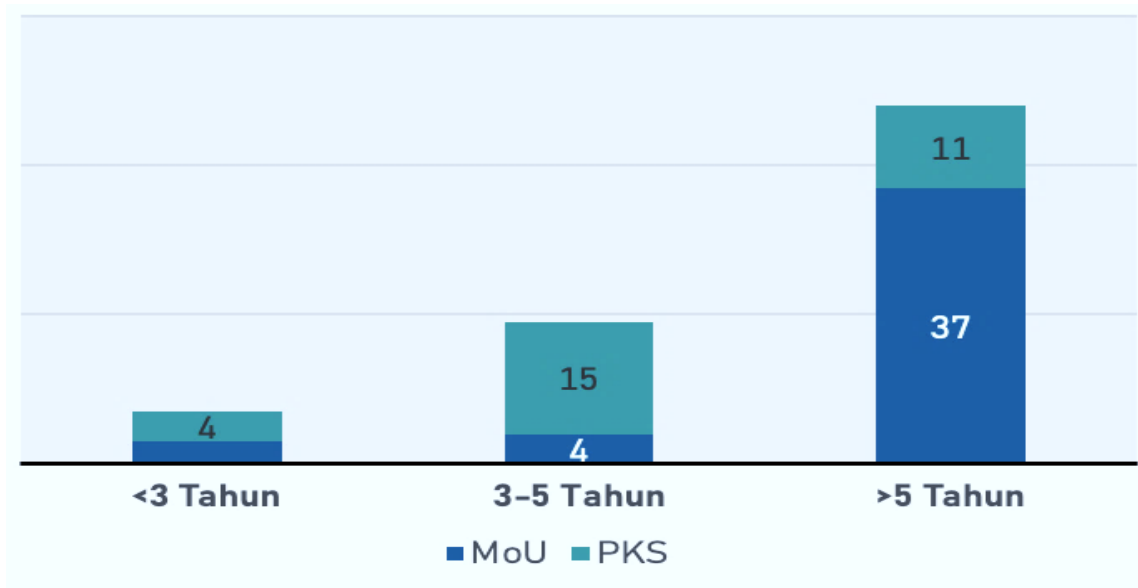
Sumber: Database Kerjasama Kabupaten Bangka Barat, 2025

Kerjasama dibedakan berdasarkan jenis dokumen, yaitu Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pada awal periode, khususnya tahun 2020, mayoritas kerjasama yang dilakukan masih berbentuk MoU. Hal ini mencerminkan bahwa pada tahap awal, pendekatan yang diambil oleh pemerintah daerah lebih bersifat peninjauan dan membangun komitmen awal dengan mitra.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan pola yang signifikan. Jumlah PKS yang ditandatangani mengalami peningkatan dan untuk pertama kalinya melebihi jumlah MoU. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak MoU sebelumnya telah ditindaklanjuti ke tahap implementasi formal melalui PKS. Dengan demikian, tahun 2024 menandai pergeseran penting dari fase perencanaan menuju fase pelaksanaan kerjasama, yang menunjukkan

kematangan dalam pengelolaan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para mitra kerja. Perubahan komposisi jumlah MoU dan PKS ini dapat menjadi indikator positif dalam tata kelola kerja sama daerah. Dominasi MoU di tahun-tahun awal memberikan landasan strategis, sedangkan peningkatan PKS menunjukkan keberlanjutan dan keseriusan pelaksanaan program bersama.

Gambar 2. 55
Jangka Waktu Kerjasama Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Database Kerjasama Kabupaten Bangka Barat, 2025

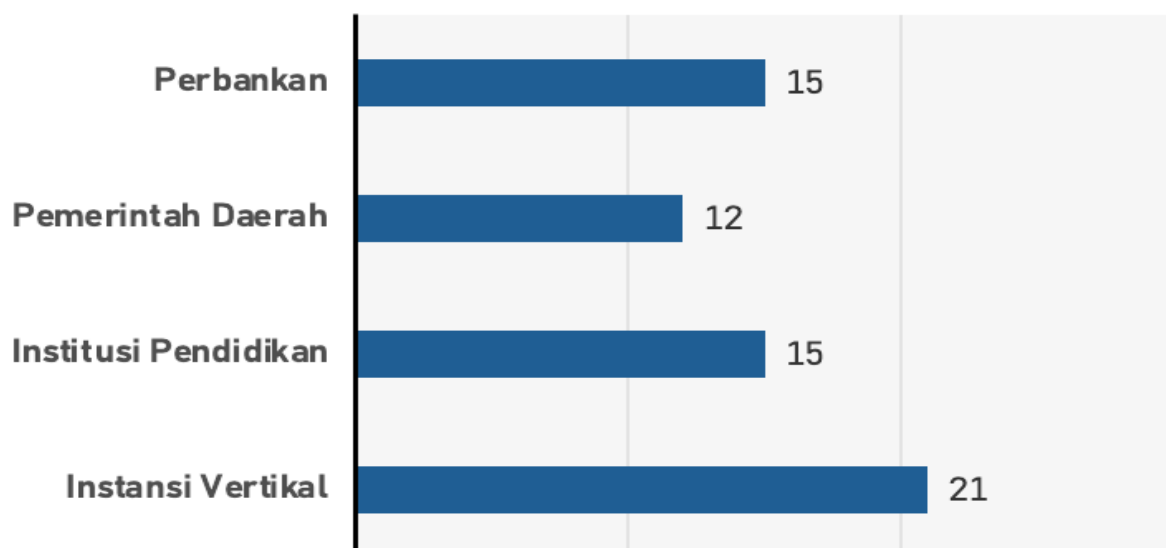
Jangka waktu kerja sama dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: kurang dari 3 tahun, antara 3 hingga 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Pengelompokan ini bertujuan untuk menilai kecenderungan durasi kerja sama yang dipilih oleh pemerintah daerah dan mitra kerja, serta korelasinya dengan bentuk dokumen yang digunakan. Berdasarkan data yang tersedia, kategori jangka waktu 3-5 tahun didominasi oleh PKS sebanyak 15. Hal ini menunjukkan bahwa PKS cenderung digunakan untuk kerja sama yang bersifat teknis-operasional dengan jangka waktu menengah, yang memungkinkan pelaksanaan program atau kegiatan secara terukur dan dievaluasi dalam waktu tertentu. Karakteristik ini sesuai dengan sifat PKS sebagai instrumen implementatif dari MoU yang telah disepakati sebelumnya.

Sementara itu, kerja sama dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun didominasi oleh dokumen MoU, dengan total sebanyak 37 perjanjian. Ini mencerminkan bahwa MoU lebih banyak digunakan dalam konteks komitmen strategis jangka panjang, seperti kerja sama pendidikan, pengembangan kelembagaan, atau kemitraan lintas sektor. Durasi panjang ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan kegiatan turunan di masa mendatang.

Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan yang konsisten antara jenis dokumen dan durasi kerja sama, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi kerja sama daerah ke depan.

Pada kategori pihak kerja sama menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menjalin hubungan kelembagaan dengan beragam mitra, baik dari sektor publik maupun swasta. Jumlah kerja sama tertinggi tercatat bersama instansi vertikal, yaitu sebanyak 21 kerja sama. Ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah. Kerja sama tersebut mencakup program strategis seperti penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta pemanfaatan produk keuangan bagi ASN dan non-ASN melalui PT Pegadaian.

Gambar 2. 56
Kategori Pihak Kerjasama Kabupaten Bangka Barat



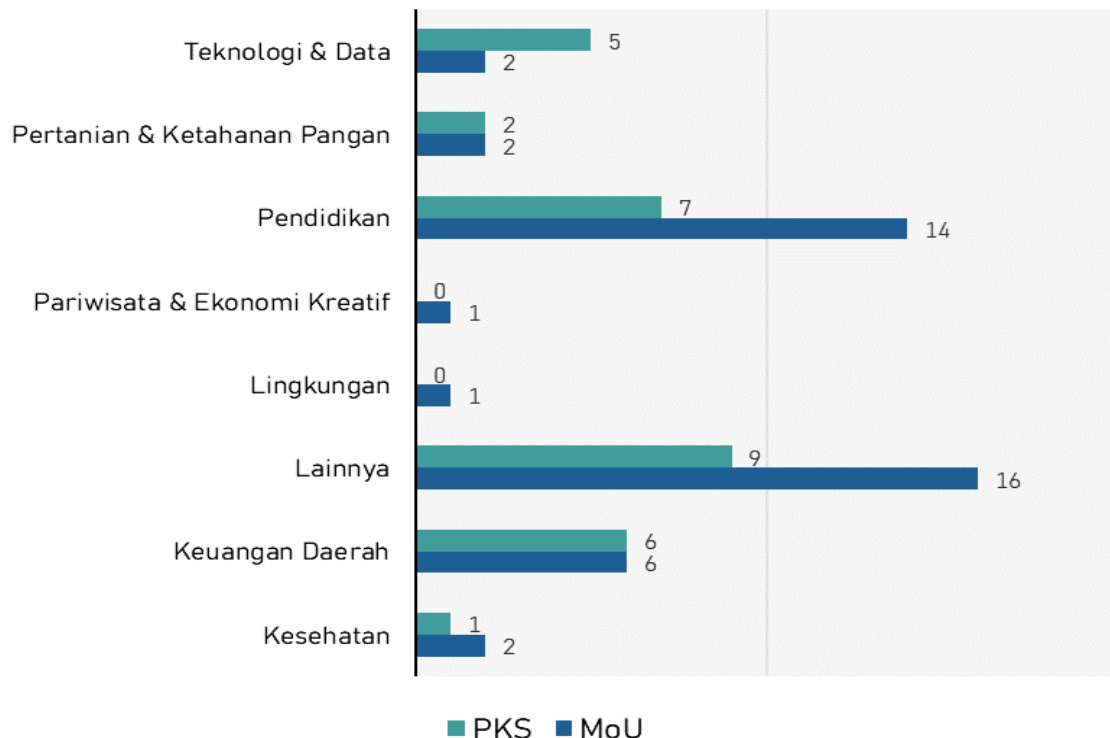
Sumber: Database Kerjasama Kab. Bangka Barat, 2025

Selain itu, institusi pendidikan dan perbankan masing-masing berkontribusi sebanyak 15 kerja sama. Kemitraan dengan institusi pendidikan mencakup kegiatan penelitian, pelatihan, dan program magang kerja yang mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah. Sementara itu, kerja sama dengan sektor perbankan difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah, seperti pengelolaan kas, transaksi non-tunai, serta penempatan dan pengelolaan dana BLUD Rumah Sakit Daerah Umum Sejiran Setason. Keterlibatan sektor keuangan ini mencerminkan orientasi pemerintah daerah terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kategori kerja sama lainnya melibatkan pemerintah daerah lain sebanyak 12 kerja sama, yang menunjukkan upaya memperkuat koordinasi antarwilayah serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik lintas sektor. Bentuk kerja sama meliputi bidang pelayanan teknis oleh SKPD, pengawasan metrologi legal, hingga sinergi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Keberagaman mitra ini menunjukkan pendekatan kolaboratif yang inklusif dan strategis dalam memperluas kapasitas pemerintah daerah melalui kerja sama yang bersifat fungsional dan saling menguntungkan.

Keberagaman kategori pihak yang terlibat dalam kerja sama juga mencerminkan pendekatan multisektor yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pembangunan daerah. Kolaborasi dengan institusi pendidikan mendukung penciptaan ekosistem pengetahuan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia, sementara kemitraan dengan sektor keuangan memperkuat tata kelola fiskal dan transparansi pelayanan. Di sisi lain, keterlibatan instansi vertikal dan pemerintah daerah lain menunjukkan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah serta pentingnya integrasi antarwilayah.

Gambar 2. 57
Kategori Tema Kerjasama Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Database Kerjasama Kab. Bangka Barat, 2025



Data menunjukkan bahwa kategori “Pendidikan” menjadi bidang yang paling banyak dijadikan fokus kerja sama oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dengan total 21 perjanjian, terdiri dari 14 MoU dan 7 PKS. Hal ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, baik dalam bentuk penelitian, pelatihan, maupun program magang. Selain itu, kategori “Keuangan Daerah” juga menunjukkan keseimbangan yang signifikan antara dokumen MoU dan PKS, masing-masing sebanyak 6 kerja sama. Ini mengindikasikan bahwa kerja sama di bidang pengelolaan keuangan tidak hanya sebatas komitmen awal, tetapi juga ditindaklanjuti ke dalam implementasi teknis.

Kategori “Lainnya”, yang mencakup kerja sama lintas sektor di luar klasifikasi utama, juga memiliki jumlah yang besar yaitu 25 perjanjian (16 MoU dan 9 PKS). Ini menunjukkan fleksibilitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menjalin kerja sama di berbagai bidang yang mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, kategori “Teknologi & Data” menunjukkan pola yang menarik, di mana jumlah PKS (5) lebih tinggi dibandingkan MoU (2). Hal ini mengisyaratkan bahwa kerja sama di bidang teknologi lebih sering langsung ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi operasional, seperti digitalisasi layanan dan pengelolaan data daerah.

Di sisi lain, beberapa kategori seperti “Lingkungan” dan “Pariwisata & Ekonomi Kreatif” masih menunjukkan jumlah kerja sama yang sangat terbatas, dengan hanya satu MoU dan tidak ada PKS. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kerja sama di bidang-bidang tersebut belum dimaksimalkan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk memperluas kemitraan di sektor-sektor tersebut, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengembangan ekonomi lokal. Perluasan cakupan kerja sama yang lebih merata antar sektor akan mendukung tujuan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Tabel 2. 99
Database Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSTITUSI PENDIDIKAN									
1	Tahun 2020								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/20.A/4.1.3.1/2020 NOMOR: 1225/MOU/SCBB/IX/2020 HARI, TANGGAL 25-09-2020	Addendum Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	PIHAK KESATU : NAMA : MARKUS, S.H. JABATAN : BUPATI BANGKA BARAT PIHAK KEDUA : NAMA : DR.dr. H. HENDRA KUSUMAJAYA, M.Epid JABATAN : KETUA STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG	DINAS KESEHATAN	5 Tahun (*25-09-2020) S.D (*25-09-2025)	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 440/2643/1.2.1.1/2019 NOMOR : 1473/PKS/SCDBB/IX/2019 HARI, TANGGAL SENIN, 23-09-2019	Perumusan Capaian Pembelajaran, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pemagangan dan Penyerapan lulusan Program Studi DIII kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Stikes Citra Delima Bangka Belitung	PIHAK KESATU : NAMA : DR.dr. H. HENDRA KUSUMAJAYA, M.Epid JABATAN : KETUA STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG PIHAK KEDUA : NAMA: drg. H. ACHMAD SYAIFUDIN JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	5 Tahun (23-09-2019) S.D (23-09-2024)
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA POLITEKNIK KEMENKES PANGKALPINANG DAN PEMERINTAH BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/20.B/4.1.3.1/2020 NOMOR : HK.03.01/I/5508/2020 HARI, TANGGAL 25-09-2020	Addendum Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	PIHAK KESATU : NAMA : drg. HARINDRA, MKM JABATAN : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang PIHAK KEDUA : NAMA : MARKUS, S.H. JABATAN : Bupati Bangka Barat	DINAS KESEHATAN	5 Tahun (*25-09-2020) S.D (*25-09-2025)	POLITEKNIK KEMENKES PANGKALPINANG DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 440/598/1.2.1.1/2020 NOMOR : HK.03.01/I/0266/2020 HARI, TANGGAL JUMAT, 10-01-2020	Penyelenggaraan Praktek Klinik dan Lapangan	PIHAK KESATU : NAMA : drg. HARINDRA, MKM JABATAN : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang PIHAK KEDUA : NAMA : drg. H. ACHMAD SYAIFUDIN JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat	5 Tahun (10-01-2020) S.D (10-01-2025)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
II	Tahun 2021								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/01/4.1.3.1/2021 NOMOR : 003/MoU/II.3AU/F/2021 HARI, TANGGAL SENIN, 18-01-2021	Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Pengabdian Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : Markus, S.H. Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Fadillah Sabri Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka	BAPPEDA	5 Tahun (18-01-2021) S.D (18-01-2026)	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITAN PENGEMBAGNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT No : 050/01/SPK/4.3.1.1/2021 No : 004/SPK/II.AU/I/2021	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	PIHAK KESATU : H.M. EFFENDI, SE., MM JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : Maulina Hendrik, M.Pd JABATAN : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung	5 Tahun (18-01-2021) S.D (18-01-2026)
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG NOMOR : 415.4/13/SETDAII/2021 NOMOR : 394/UN6.RKT/MoU/2021 HARI, TANGGAL JUMAT, 16-07-2021	Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Rina Indiatuti Jabatan : Rektor Universitas Padjadjaran	BAPPEDA	5 Tahun (16-07-2021) S.D (16-07-2026)				
3	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA NOMOR : 415.4/14/SETDAII/2021 NOMOR : 4894/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021 HARI, TANGGAL KAMIS, 22-07-2021	Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Panut Mulyono Jabatan : Rektor Universitas Gadjah Mada	BAPPEDA	5 Tahun (22-07-2021) S.D (22-07-2026)				
4	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIBA PANGKALPINANG NOMOR : 415.4/23/SETDAII/2021 NOMOR : 851/II-03/IE/IX/2021 HARI, TANGGAL SENIN, 27-09-2021	Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Wargianto Jabatan : Ketua STIE Pertiba Pangkalpinang		5 Tahun (27-09-2021) S.D (31-12-2026)				
5	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	Pendidikan, penelitian, dan	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAPPEDA	5 Tahun (27-09-2021) S.D(31-12-2026)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian Potensi Gas Metana TPA Air Belo	PIHAK KESATU : H.M. EFFENDI, SE., MM	6 Bulan



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	NOMOR : 415.4/22/SETDAII/2021 NOMOR : 470/UN50/A/KS/2021 HARI, TANGGAL SENIN, 27-09-2021	Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kedua : Nama : Ibrahim Jabatan : Rektor Universitas Bangka Belitung			KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DAN Nomor 070/002/PKS/BP4D/2021 Nomor : 368/UN50/L/2021		JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : DR. FOURNITA AGUSTINA, S.P., M.Si JABATAN : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UBB	(02-06-2021) S.D (01-12-2021)
						DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA BARAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UBB No : 532/483.a/DKP/2021 No : 966/UN50/L/KS/2021	Kajian Rencana Strategis Pengembangan dan Optimalisasi Kinerja Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : YOPIE MARDIANA, ST JABATAN : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : DR. FOURNITA AGUSTINA, S.P., M.Si JABATAN : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UBB	
6	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR PANGKALPINANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 016/MOU/ISB-AL/IX/2021 NOMOR : 415.4/24/SETDAII/2021 HARI, TANGGAL SENIN, 27-09-2021	Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : Husni Teja Sukmana Jabatan : Rektor Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	DISKOMINFO	5 Tahun (27-09-2021) S.D (31-12-2026)	ISBA ATMA LUHUR PANGKALPINANG DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA BARAT No: 065/MOA/ISB-AL/V/2023 No:415.4/30/DISKOMINFO/PKS/2026	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknologi dan Informatika	PIHAK KESATU : HARRIZKI ARIE PRADANA JABATAN : Wakil Rektor ISBA Atma Luhur Pangkalpinang PIHAK KEDUA : ARWENDY JABATAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat	3 Tahun 05-05-2023 26-09-2026
7	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 415.4/26/SETDAII/2021	Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua :	BAGIAN EKBANG	5 Tahun (27-09-2021) S.D (31-12-2026)				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	NOMOR : 66/NKB/R/UI/2021 HARI, TANGGAL SENIN, 27-09-2021		Nama : Ari Kuncoro Jabatan : Rektor Universitas Indonesia						
III	Tahun 2022								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG DAN PEMERINTAH BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/01/SETDAII/2022 NOMOR : 0235/R.E.41/UNIV.PGRI/2022 HARI, TANGGAL SENIN, 17-01-2022	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : H.Bukman Lian Jabatan : Rektor Universitas Pgri Palembang Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	DIKPORA	5 Tahun (17-01-2022) S.D (31-12-2027)				
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA NOMOR : 415.4/07/SETDAII/2022 NOMOR : 017/NASIONAL/MOU/BCC/VII/2022 HARI, TANGGAL JUM'AT, 08-07-2022	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Harjanto Prabowo Jabatan : Rektor Universitas Bina Nusantara	BAPPEDA	5 Tahun (08-07-2022) S.D (31-12-2027)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA No : 070/001/PKS/B[4D/2022 No : 140/VR.RTT/VII/2022	Penelitian dan Pengembangan BUMD di Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : H.M. EFFENDI, SE., MM JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : PROF. TIRTA NUGRAHA MURSITAMA., S.Sos., MM., Ph.D JABATAN : Vice Rector Research and Technology Transfer	6 bulan (08-07-2022) S.D. (07-01- 2023)
3	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK DAN PEMERINTAH KABBANGKA BARAT NOMOR : B-1060/In.40/HM.01/07/2022 NOMOR : 415.4/08/SETDAII/2022 HARI, TANGGAL KAMIS, 14-07-2022	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : Irawan Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAG. KESRA	4 Tahun (14-07-2022) S.D (31-12-2026)				
4	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PAHLAWAN 12 SUNGAILIAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 04/MOU/STISIPOL12/VIII/2022 NOMOR : 415.4/10/SETDAII/2022 HARI, TANGGAL KAMIS, 08-08-2022	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : Darol Arkum Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAG TAPEM	5 Tahun (08-08-2022) S.D (31-12-2027)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PAHLAWAN 12 SUNGAILIAT Nomor 415.4/19/SETDAII/PKS/2022 Nomor 105/PKS/STISIPOLP12/X/22	Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Bagi ASN di Lingkungan	PIHAK KESATU : ANTONI PASARIBU JABATAN : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat	3 Tahun (04-11-2022) S.D. (31-12- 2025)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
							Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KEDUA: KGS M. SOBRI JABATAN : Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12	
IV	Tahun 2024								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 2477/UN31/HK.08.00/2024 NOMOR : 415.4/03/SETDAII/2024 HARI, TANGGAL SELASA, 23-07-2024	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak Kesatu : Nama : Ojat Darajat Jabatan : Rektor UT Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAGIAN TAPEM	5 TAHUN 23-07-2024 S.D. 31-12-2029				
PEMERINTAH DAERAH									
I	Tahun 2020								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DAN PEMKAB. BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/711/SETDA.I/2020 NOMOR : 415.4/22/4.1.3.1/2020 HARI, TANGGAL SENIN, 07-12-2020	Kerjasama Pembangunan Daerah	Pihak Kesatu : Nama : Mulkan Jabatan : Bupati Bangka Pihak Kedua : Nama : Markus, S.H. Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAG TAPEM	5 Tahun (07-12-2020) S.D (07-12-2025)				
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PEMKAB. BANGKA TENGAH NOMOR : 134.4/67/SETDA.PEM/2020 NOMOR : 415.4/25/4.1.3.1/2020 HARI, TANGGAL RABU, 23-12-2020	Kerjasama Pembangunan Daerah	Pihak Kesatu : Nama : Markus, S.H. Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Yuliyanto Satin Jabatan : Bupati Bangka Tengah	BAG TAPEM	5 Tahun (23-12-2020) S.D (23-12-2025)				
II	Tahun 2021								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 07/KB/PEM/SETDA/X/2021 NOMOR : 415.4/27/SETDAII/2021 HARI, TANGGAL JUMAT, 22-10-2021	Kerjasama Pembangunan Daerah	Pihak Kesatu : Nama : H. Maulan Akilil Jabatan : Walikota Pangkalpinang Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAG TAPEM	5 Tahun (22-10-2021) S.D (31-12-2025)				
III	Tahun 2022								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DAN PEMERINTAH BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/42/MOU/1/2022 NOMOR : 415.4/03/SETDAII/2022	Kerja Sama Pembangunan Daerah	Pihak Kesatu : Nama : H.Askolani Jasi Jabatan : Bupati Banyuasin Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman	BAG TAPEM	5 Tahun (11-04-2022) S.D (31-12-2027)	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN No : 415.4/01/SETDAII/PAKS/2022 No : 415.4/345/2022	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	PIHAK KESATU JABATAN PIHAK KEDUA JABATAN	5 Tahun (11-04-2022) s.d. (31-12-2027)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	HARI, TANGGAL SENIN, 11-04-2022		Jabatan : Bupati Bangka Barat						
						DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN No : 415.4/02/SETDAII/PKS/2022 No : 415.4.42/47 /PKS/Diskoperindag/2022	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	PIHAK KESATU JABATAN PIHAK KEDUA JABATAN	5 Tahun (11-04-2022) s.d. (31-12-2027)
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN No : 415.4/03/SETDAII/PKS/2022 No : 415.4.42/49/PKS/Diskan/2022	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan	PIHAK KESATU JABATAN PIHAK KEDUA JABATAN	5 Tahun (11-04-2022) s.d. (31-12-2027)
						DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN Nomor 415.4/04/SETDAII/PKS/2022 Nomor : 415.4.42/51/PKS /DISPERKIMHUB/2022	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perhubungan	PIHAK KESATU JABATAN PIHAK KEDUA JABATAN	5 Tahun (11-04-2022) s.d. (31-12-2027)
						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN Nomor 415.4.42/05/SETDAII/PKS/2022 Nomor 415.4.42/50/PKS/Disporapar/2022	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pariwisata	PIHAK KESATU JABATAN PIHAK KEDUA JABATAN	5 Tahun (11-04-2022) s.d. (31-12-2027)
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 415.4/21/SETDAII/2022 NOMOR : 134.1/MOU.41/PEM/2022 HARI, TANGGAL SENIN, 26-12-2022	Kerjasama Pembangunan Daerah	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : H. Herman Suherman Jabatan : Bupati Cianjur	BPKAD	5 Tahun (26-12-2022) S.D (31-12-2027)				
						DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG No415.4/09/SETDAII/PKS/2022 No119/07/PKS/KOPDAG/VII/2022	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan metrologi Legal	PIHAK KESATU : AIDI JABATAN : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat PIHAK KEDUA : DONAL TAMPUBOLON JABATAN : Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang	2 Tahun (31-05-2022) s.d (31-12-2025)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
III	Tahun 2024								
						PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT No : 973/05/BAKUDA/2024 No : 415.4/15/SETDA II/PKS/2024	Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	PIHAK KESATU : FERY AFRIYANTO JABATAN : Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PIHAK KEDUA : MUHAMMAD SOLEH JABATAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat	5 Tahun (11-11-2024) s.d. (10-11-2029)
IV	Tahun 2025								
	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 100.3.7/2/Bappeda/2025 NOMOR : 415.4/01/SETDAII/2025 HARI, TANGGAL SENIN, 02-06-2025	Kerjasama Pembangunan Daerah	Pihak Kesatu : Nama : Hidayat Arsani Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Pihak Kedua : Nama : Markus Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAG TAPEM	5 Tahun (02-06-2025) S.D (31-12-2030)				
PERBANKAN									
I	Tahun 2023								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG MENTOK DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 415.4/12/SETDA/II/2023 NOMOR : 602/MTK/5/B/2023 HARI, TANGGAL RABU, 06-12-2023	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : M. Said Nasrullah Jabatan : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Cabang Mentok	BAG TAPEM	5 Tahun (06-12-2023) S.D. (31-12-2028)				
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK AREA PANGKALPINANG NOMOR : 415.4/13/SETDA/II/2023 NOMOR : JRB R02 AR PPG/2951/2023	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Iwan Setiawan Jabatan : Pemimpin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pangkalpinang	BAGIAN TAPEM	5 Tahun (06-12-2023) S.D. (31-12-2028)				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	HARI, TANGGAL RABU, 06-12-2023								
3	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PANGKALPINANG NOMOR : 415.4/14/SETDA/II/2023 NOMOR : PKP/5/2036 HARI, TANGGAL RABU, 06-12-2023	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : R. Wahyu Bintoro Jabatan : Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang	BAGIAN TAPEM	5 Tahun (06-12-2023) S.D. (31-12-2028)				
4	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANGKALPINANG NOMOR : 415.4/15/SETDA/II/2023 NOMOR : B.5537/OPS/KC-IV/04/2023 HARI, TANGGAL RABU, 06-12-2023	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Faishal Rahman Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang	BAGIAN TAPEM	5 Tahun (06-12-2023) S.D. (31-12-2028)				
Tahun 2024									
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BPD SUMSEL DAN BABEL CABANG MENTOK Nomor 415.4/01/SETDAII/PKS/ 2024 Nomor :050/MTK/5/B/2024	Pengelolaan Kas Daerah dan Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	PIHAK KESATU : ABIMANYU JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : DEDY ZULKARNAIN JABATAN : Pimpinan Cabang PT BPD Sumsel Babel Cabang Mentok	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)
						BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BPD SUMSEL DAN BABEL CABANG MENTOK No : 415.4/02/SETDAII/PKS/2024 No : 049/MTK/5/B/2024	Penerimaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah secara Non Tunai di Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : MIWANI JABATAN : Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : DEDY ZULKARNAIN JABATAN :	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
								Pimpinan Cabang PT BPD Sumtel Babel Cabang Mentok	
						UPT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA ABRAT DAN PT BSB SUMSEL BANGKA BELITUNG CABANG MENTOK Nomor 415.4/12/SETDAII/PKS/2024 Nomor : 344/MTK/5/B/2024	Penempatan dan Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Rumah Sakit Daerah Umum Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : RATNOSOPPI JABATAN : Direktur UPT RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : DEDDY ZULKARNAIN JABATAN : Pimpinan Cabang PT BPD Sumtel Babel Cabang Mentok Tahun	4 Tahun (27-08-2024) s.d (31-12-2028)
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU MENTOK No : 415.4/03/SETDAII/PKS/ 2024 NoRB.R02.Br.MNT/PKS/008/2024	Pengelolaan Kas Daerah dan Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	PIHAK KESATU : ABIMANYU JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : MUHAMMAD TEGUH T.C.H JABATAN : Pimpinan Kantor Cabang Mentok PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)
						BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK MANDIRI (PERSERO)TBK KCP MENTOK Nomor 415.4/04/SETDAII/PKS/ 2024 Nomor : JRB.R02.Br.MNT/ PKS/009/202	Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : MIWANI JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : MUHAMMAD TEGUH T.C.H JABATAN : Pimpinan Kantor Cabang Mentok PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU MENTOK Nomor 415.4/09/SETDAII/PKS/2024 Nomor JRB.R012.Br.MNT/60/2024	Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Menggunakan Sistem Pembayaran Non Tunai di Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : SYAFRIADI CHANDRA JABATAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : MUHAMMAD TEGUH T.C.H JABATAN : Pimpinan Kantor Cabang Mentok PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4 Tahun (05-03-2024) s.d. (31-12-2028)
						UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU MENTOK Nomor 415.4/13/SETDAII/PKS/2024 Nomor JRB.R02.Br.MNT/PKS/004/202	Pelayanan Transaksi dan Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : RATNOSOPPI JABATAN : Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : ARISTA JABATAN : Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mentok	4 Tahun (27-08-2024) s.d. (31-12-2028)
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PANGKALPINANG No 415.4/05/SETDAII/PKS/ No : 2024 PKP/05/023	Pengelolaan Kas Daerah dan Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	PIHAK KESATU : ABIMANYU JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : R. WAHYU BINTORO JABATAN : Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)
						BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANGKALPINANG	Penerimaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah	PIHAK KESATU : MIWANI JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2024)



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
						Nomor 415.4/06/SETDAII/PKS/ 2024 Nomor : PKP/05/024	secara Non Tunai di	Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : R. WAHYU BINTORO JABATAN : Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang	
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KCP MENTOK Nomor 415.4/07/SETDAII/PKS/ 2024 Nomor : B.11/KCP-IV/OPS/02/2024	Pengelolaan Kas Daerah dan Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	PIHAK PERTAMA ABIMANYU JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : KUSHENDRA JABATAN : Pimpinan Kantor Cabang Mentok PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)
						BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIB USI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KCP MENTOK Nomor :415.4/08/SETDAII/PKS/ 2024 Nomor : B.10/KCP-IV/OPS/02/2024	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : MIWANI JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : KUSHENDRA JABATAN : Pimpinan Kantor Cabang Mentok PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb	4 Tahun (15-02-2024) s.d. (31-12-2028)
INSTANSI VERTIKAL									
I	Tahun 2021								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN LPP TVRI BANGKA BELITUNG NOMOR : 415.4/28/SETDAII/2021 NOMOR : 07/II.29/MoU/TVRI/2021 HARI, TANGGAL JUMAT, 29-10-2021	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan di Kabupaten Bangka Barat melalui Media Elektronik	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Sriwidayat Jabatan : Kepala LPP TVRI Bangka Belitung	DISPARBUD	5 Tahun (29-10-2021) S.D (31-12-2026)				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS PANGKALPINANG NOMOR : 415.4/29/SETDAII/2021 NOMOR : 1902/PGP/PENJUALAN-JASKUG/2021 HARI, TANGGAL SENIN, 15-11-2021	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Azmat Nuzul Pasa Jabatan : Kepala Kantor Pos Pangkalpinang	BP2RD	5 Tahun (15-11-2021) S.D (31-12-2026)	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS PANGKALPINANG Nomor : 415.4/17/SETDAII/PKS/2021 Nomor : 1959/PGP/PENJUALAN-JASKUG/2021	Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bangka Barat	PIHAK PERTAMA HELWANDA JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : AZMAT NUZUL PASA JABATAN : Kepala Kantor Pos Pangkalpinang	4 Tahun (15-11-2021) s.d. (31-12-2024)
II Tahun 2022									
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT.PEGADAIAN KANTOR AREA PALEMBANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 1144/00709.00/2022 NOMOR : 415.4/09/SETDAII/2022 HARI, TANGGAL KAMIS, 14-07-2022	Layanan Pembiayaan, Investasi dan Aneka Jasa Produk PT.Pegadaian di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : Tun Imanuddin Jabatan : Vice President Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAG TAPEM	3 Tahun (14-07-2022) S.D (31-12-2025)	PT PEGADAIAN KANTOR AREA PALEMBANG DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT No : 1144/00709.00/2022 Nomor : 415.4/11/SETDAII/PKS/2022	Pemanfaatan Produk PT. Pegadaian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	PIHAK PERTAMA TUN IMANUDDIN JABATAN : Vice President Kantor Area Palembang pada Kantor Wilayah III PT Pegadaian PIHAK KEDUA : ANTONI PASARIBU JABATAN : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah Kabupaten Bangka Barat	3 Tahun (14-7-2022) s.d. (31-12-2025)
2	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAMPUNG NOMOR : 415.4/04/SETDAII/2022 NOMOR : 352/SM.110/1.20.2/04/2022 HARI, TANGGAL SELASA, 12-04-2022	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Abdul Roni Angkat Jabatan : Kepala Balai Penelitian Pertanian Lampung	DISTANGAN	4 Tahun (12-04-2022) S.D (31-12-2026)				
3	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PENGADILAN AGAMA MUNTOK NOMOR : 415.4/11/SETDAII/2022 NOMOR : W28-A4/790/HM.01.1/VIII/2022 HARI, TANGGAL SENIN, 08-08-2022	Penguatan Peran Dan Fungsi Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan dan Anak	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Muhammad Syarif Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muntok	BAG TAPEM	5 Tahun (08-08-2022) S.D (31-12-2027)				
III Tahun 2023									
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA	Sinergitas Penyediaan dan Pemanfaatan	Pihak Kesatu : Nama : Muhammad Isra	BAGIAN TAPEM	5 Tahun				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	PT PLN (PERSERO) UNIT WILAYAH BANGKA BELITUNG UP3 BANGKA DAN PEMERINTAH KAB BANGKA BARAT NOMOR : 0006.MoU/AGA.04.01/F25010000/2023 NOMOR : 415.4/09/SETDA/II/2023 HARI, TANGGAL JUM'AT, 29-09-2023	Energi Ketenagalistrikan Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian di Kabupaten Bangka Barat	Jabatan : Manajer PT PLN (Persero) Unit Wilayah Bangka Belitung UP3 Bangka Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat		(29-09-2023) S.D. (31-12-2028)				
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR CABANG BANGKA NOMOR : 415.4/16/SETDA/II/2023 NOMOR : MoU-016/II/06A02/12/2023 HARI, TANGGAL JUM'AT, 15-12-2023	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan pangan lainnya di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Akhmad Fahmi Yasin Jabatan : Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bangka	DISTANGAN	5 Tahun (15-12-2023) S.D. (31-12-2028)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PERUSAHAAN UMUM BULOG KANTOR CABANG BANGKA 415.4/07/SETDA/II/2023 PKS-017/06A01/12/2023	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat	PIHAK KESATU : AZMAL AZ JABATAN : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat PIHAK KEDUA : AKHMAD FAHMI YASIN JABATAN : Kepala PERUM BULOG Kantor Cabang Bangka	5 Tahun (15-12-2023) s.d. (31-12-2023)
3	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 415.4/1/SETDAII/2023 NOMOR : W7. HH.05.05- 1150 HARI, TANGGAL RABU, 15-02-2023	Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Harun Sulianto Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	BAGIAN HUKUM	2 Tahun (15-02-2023) S.D (31-12-2025)				
4	NOTA KESEPAKATAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 80/ORI-MOU/VI/2023 NOMOR : 415.4/04/SETDAII/2023 HARI, TANGGAL SENIN, 21-06-2023	Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : Mokhammad Najih Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAGIAN TAPEM	5 Tahun (21-06-2023) S.D. (21-06-2028)				
5	NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : B.604/BKIPM/KS.310/VII/2023	Sinergi dan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : Mokhammad Najih Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	3 Tahun (06-07-2023) S.D. (06-07-2026)				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	NOMOR : 415.4/06/SETDA/II/2023 HARI, TANGGAL SENIN, 26-06-2023								
6	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR : 415.4/11/SETDA/II/2023 NOMOR : KS.01.01.10A.10A4.12.23.01 HARI, TANGGAL SELASA, 05-12-2023	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Agus Riyanto Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan	BAGIAN TAPEM	5 Tahun (05-12-2023) S.D. (31-12-2028)				
7	NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PANGKALPINANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : PER/48/122023 NOMOR : 415.4/17/SETDA/II/2023 HARI, TANGGAL SENIN, 18-12-2023	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : Abdul Shoheh Jabatan : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pangkalpinang Pihak Kedua : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAGIAN TAPEM	5 Tahun (18-12-2023) S.D. (31-12-2028)				
IV Tahun 2024									
1	NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PANGKALBALAM NOMOR : 415.4/02/SETDAII/2025 NOMOR : KS.01/11/7/2/b2.2/GM/ PBM-24 HARI, TANGGAL KAMIS, 11-07-2024	Pemanfaatan Dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Mentok Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Achmad Yoga Suryadarma Jabatan : GM Regional 2 Pangkalbalam	DKP	1 Tahun 11-07-2024 S.D. 11-07-2025				
2	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PANGKAL PINANG NOMOR : 415.4/09/SETDAII/2024 NOMOR : 283/KTR/III-02/1224 HARI, TANGGAL SELASA, 17-12-2024	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	Pihak Kesatu : Nama : Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Aswalmi Gusmita Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Kacab. Pangkalpinang	DINKES	5 TAHUN 01-01-2025 S.D. 31-12-2029				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
3						FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor : 33/FKPT-BABEL/VIII/2024 Nomor : 415.4/14/SETDAIL/PKS/2024	Penguatan Program Bangka Barat Bersih dari Narkotika, Terorisme dan Organisasi Terlarang	PIHAK PERTAMA SRI WAHYUNI AR JABATAN : Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme PIHAK KEDUA : SUKIRMAN JABATAN : Bupati Bangka Barat	5 Tahun (28-8-2024) s.d. (28-8-2025)
4	NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : NK-004/WPB.10/2024 NOMOR : 415.4/01/SETDAIL/2024 HARI, TANGGAL SELASA, 02-04-2024	Forum Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Pihak Kesatu Nama : Edih Mulyadi Jabatan : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kep. Bangka Belitung Pihak Kedua Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	BAGIAN TAPEM	5 TAHUN 02-04-2024 S.D. 02-04-2029				
5	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN PT MAHESA GADING NOMOR : 100.3.7/17/MOU.PEMKAB- PT.MG/HD/RSUD.01/2024 NOMOR : 003/MOU-PEMDA/VII/2024 HARI, TANGGAL KAMIS, 04-07-2024	Pelayanan Unit Dialisis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason	Pihak Kesatu Nama : Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua Nama : Andreas Kuntjoro Mukri Jabatan : Direktur PT Mahesa Gading	BAGIAN TAPEM	10 tahun (04-07-2024) s.d. (31-12-2034)				
6	NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 01/KNL.0402/2024 NOMOR : 415.4/07/SETDA/2024 HARI, TANGGAL SENIN, 11-11-2024	Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengurusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu Nama : Muh. Gunawan Sani Jabatan : Kepala KPKNL Pangkalpinang Pihak Kedua Nama : Hendriwan Jabatan : Pjs. Bupati Bangka Barat	BPKAD	5 TAHUN 11-11-2024 S.D. 31-12-2029				
7	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PANGKALPIANING NOMOR : 415.4/09/SETDAIL/2024 NOMOR : 283/KTR/III-02/1224 HARI, TANGAL SELASA, 17-12-2024	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	Pihak Kesatu Nama : Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua Nama : Aswalmi Gusmita Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang		4 Tahun (01 Januari 2025) s.d. (31 -12-2029)				
8	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT DAN KEPOLISIAN RESOR	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat	SATPOLPP	1 TAHUN 1-01-2025 S.D.				



NO	URAIAN	TENTANG	PARA PIHAK	SKPD PENANGGUNG JAWAB	JANGKA WAKTU	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/ RENCANA KERJA (RK)			JANGKA WAKTU
						NO PERJANJIAN	TENTANG	OPD PELAKSANA	
	BANGKA BARAT DAN PENGADILAN NEGERI MENTOK NOMOR : 415.4/10/SETDAII/2024 NOMOR : B-67/Gs/MOU/12/2024 NOMOR : B/599/HUK.8.1.1/2024 NOMOR : 1756/KPN.W7-W5/HK1.3.1/XII/2024 HARI, TANGGAL SELASA, 24-12-2024	Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kedua : Nama : Bayu Sugiri Jabatan : Kajari Bangka Barat Pihak Ketiga : Nama : Ade Zamrah Jabatan : Kapolres Bangka Barat Pihak Keempat : Jabatan : Ketua PN Mentok		31-12-2026				
Pihak Ketiga									
I	Tahun 2022								
1	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DAN PT.RUMAHAWAN KARYA INDONESIA NOMOR : 415.4/06/SETDAII/2022 NOMOR : 002/SPK/PEM/BABAR/RKI/III/2022 HARI, TANGGAL JUM'AT, 22-04-2022	Pemanfaatan Platform travtrip Untuk Sektor Pariwisata dan Usaha kecil menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangka Barat	Pihak Kesatu : Nama : H. Sukirman Jabatan : Bupati Bangka Barat Pihak Kedua : Nama : Ahmad Alghozi Ramadhan Jabatan : Chief Executive Officer PT.Rumahawan Karya Indonesia	DISPARBUD	3 Tahun (22-04-2022) S.D (31-12-2025)				

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2025



2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD Provinsi di Kabupaten/ Kota

Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi strategis sebagai bagian dari jalur Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 5 yang menghubungkan Jambi – Palembang – Pangkal Pinang – Tanjung Pandan. Dalam rangka memperkuat peran ini, sejumlah usulan rencana pembangunan infrastruktur diajukan untuk mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan pengembangan kawasan strategis. Peningkatan konektivitas diwujudkan melalui pelebaran dan pemeliharaan ruas jalan nasional, seperti ruas Jalan Dalam Kota Kelapa, Kelapa-Ibul, serta Ibul-Tanjung Kalian. Proyek ini diarahkan untuk memperlancar arus transportasi orang dan barang antarkawasan strategis. Selanjutnya, pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Ular (KIPT) menjadi prioritas utama. Ini mencakup pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta peningkatan jalan dalam kawasan industri. Infrastruktur tersebut akan mendukung operasional KIPT serta meningkatkan efisiensi kawasan industri.

Dari sisi layanan dasar, sejumlah pembangunan dan perluasan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di berbagai titik seperti Tempilang, Terabek, Puput, Simpang Teritip, dan KIPT menjadi bagian dari strategi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk air minum. Selain itu, pembangunan TPST di Jebus, Simpang Teritip, dan Tempilang, serta optimalisasi TPST Kelapa, diarahkan untuk meningkatkan layanan sanitasi dan mendukung penurunan angka stunting. Di sektor permukiman dan pengentasan kemiskinan, terdapat program pemugaran kawasan kumuh seperti di Benteng Kota dan Puput, pembangunan dan peningkatan rumah tidak layak huni (melalui BSPS), serta pembangunan rumah susun untuk pondok pesantren. Ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas permukiman dan pendidikan.

Dukungan terhadap sektor pariwisata juga tercermin dalam pembangunan kawasan Kota Pusaka Mentok, yang menjadi bagian dari Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional. Pengembangan kluster Eropa dan kluster China diharapkan memperkuat daya tarik wisata heritage berbasis sejarah dan budaya. Secara keseluruhan, usulan infrastruktur Kabupaten Bangka Barat periode 2025-2029 dirancang untuk mendorong pertumbuhan wilayah secara inklusif, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.



Tabel 2. 100
Daftar Dukungan Infrastruktur Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

POTENSI	DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS	KETERANGAN
Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu jalur Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 5 yakni Jambi – Palembang – Pangkalpinang – Tanjung Pandan	Pelebaran Ruas Jalan Nasional Dalam Kota Kelapa Volume $\pm$ 7Km	Mendukung kelancaran arus transportasi Orang dan Barang
	Pelebaran Ruas Jalan Kelapa – Ibul	
	Pelebaran Ruas Jalan Ibul – Tanjung Kalian	
	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Nasional Ruas Jalan dalam kota Kelapa – Kelapa – Ibul – Tanjung Kalian	
	Peningkatan Jalan Air Limau Tanjung Ular	Mendukung KIPT Tanjung Ular
	Pembangunan IPAL KIPT Tanjung Ular	
	Pembangunan TPST KIPT Tanjung Ular	
	Peningkatan jalan di dalam KIPT Tanjung Ular	
	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Kawasan Industri Tanjung Ular di kab. Bangka Barat	
	Pembangunan TPST Jebus, Simpang Teritip dan Tempilang	• Mendukung capaian SPM Sanitasi
	Optimalisasi TPST Kelapa	• Menurunkan Angka Stunting
	Perluasan Jaringan SPAM IKK Tempilang 400 SR	• Mendukung capaian SPM Air Minum
	Pembangunan SPAM di KIPT Tanjung Ular	• Menurunkan Angka Stunting
	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Terabek	
	Perluasan SPAM Jaringan IKK Puput	
	Pembangunan SPAM IKK Simpang Teritip	
	Optimalisasi Embung Air Baku Kolong Terabek di Kabupaten Bangka Barat	
	Rehabilitasi Embung Air Baku <i>Kolong Babi</i> Argo/Tirto di Kab. Bangka Barat	
	Rehabilitasi Embung Sumber Air Baku Kolong Menjelang di Kab. Bangka Barat	
	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat	
	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat	
	Pembangunan Bendungan Menumbing di Kabupaten Bangka Barat	
	Pembangunan Penyediaan Air Baku Tempilang di Kec. Bangka Barat	
	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Desa Sinar Surya di Kabupaten Bangka Barat	
	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Kecamatan Paritiga di Kabupaten Bangka Barat	
	Pemugaran Kawasan Kumuh Benteng Kota	Mengurangi Kawasan kumuh perkotaan
	Pemugaran Kawasan Kumuh Puput	
	Pembangunan dan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (BSPS)	Mengurangi angka kemiskinan
	Pembangunan Rumah Susun (Untuk PONPES)	Meningkatkan kualitas pendidikan
	Pembangunan dan Rehab SD/SMP	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Buyan Kelumbi	Penguatan Ketahanan Pangan
	Peningkatan Janngan Irigasi Tebing Bulin	



POTENSI	DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS	KETERANGAN
	Peningkatan Jaringan Irigasi Simpang Yul	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Pebuar	
	Pembangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Bangka Barat	Mengurangi Risiko Bencana Daerah
	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Tanjung Niur di Kabupaten Bangka Barat	
Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (Kota Pusaka Mentok) Khususnya wisata Heritage (sejarah)	Pembangunan Kawasan Kota Pusaka Kluster Eropa	• Mendukung daya Tarik wisata Sejarah
	Pembangunan Kota Pusaka Kluster China	• Pengembangan Kawasan perkotaan

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025

Dalam rangka memperkuat capaian pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merencanakan penguatan program prioritas melalui dukungan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan ini diarahkan untuk mempercepat implementasi tiga agenda strategis, yaitu Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pertama, Program Makan Bergizi Gratis akan diperkuat melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung seperti dapur umum sekolah, fasilitas penyimpanan bahan pangan, serta sistem distribusi makanan yang higienis dan efisien. Pendanaan dari APBN difokuskan pada penyediaan sarana fisik dan pengadaan peralatan berbasis standar gizi, sementara dukungan dari APBD Provinsi diarahkan pada peningkatan kapasitas penyedia layanan, termasuk pelatihan tenaga pengelola makanan bergizi di sekolah maupun komunitas. Penguatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pertanian lokal sebagai pemasok bahan pangan.

Kedua, Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi kerakyatan akan didukung melalui pembangunan dan revitalisasi gedung koperasi, gudang penyimpanan, fasilitas logistik, serta infrastruktur digital untuk layanan keanggotaan dan pemasaran produk. Sesuai amanat pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, ke depan akan di Kabupaten Bangka Barat akan dikembangkan sebanyak 66 koperasi di tingkat kelurahan/desa sebagai simpul distribusi dan produksi yang berjejaring. Pembiayaan dari APBN difokuskan pada pembangunan fisik dan penyediaan perangkat teknologi informasi, sedangkan APBD Provinsi akan berkontribusi pada program pendampingan usaha, pelatihan manajemen koperasi, serta



pengembangan jaringan kemitraan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pusat penggerak ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketiga, Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan memperoleh dukungan melalui skema pembiayaan terpadu antara APBN dan APBD Provinsi. Dana APBN akan difokuskan pada pembangunan fisik rumah layak huni dan penyediaan prasarana dasar seperti jaringan air bersih, sanitasi, dan listrik. Sementara itu, APBD Provinsi akan mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, serta ruang terbuka publik yang layak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat turut memberikan dukungan agar masyarakat MBR dapat mengakses hunian melalui fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 89 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan hunian yang aman dan nyaman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat dalam memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Perusahaan daerah saat ini yang menjalankan tanggung jawab tersebut yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumdam Tirta Sejian Setason, Kabupaten Bangka Barat. Perusahaan ini mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup warga. Evaluasi kinerja Perumdam Tirta Sejian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perbaikan layanan air minum serta mendorong penguatan BUMD secara menyeluruh.

1. Perumdam Tirta Sejian Setason, Kabupaten Bangka Barat

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Sejian Setason merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011. Pendirian Perumdam ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan daerah untuk mengelola pelayanan air minum secara mandiri setelah pemekaran wilayah dari Kabupaten Bangka Induk. Sejak pengelolaan resmi dialihkan dari PDAM Tirta Bangka, Perumdam Tirta Sejian terus berupaya sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas dalam penyediaan



air bersih bagi masyarakat Bangka Barat. Saat ini, Perumdam memiliki kantor pusat di Mentok serta unit pelayanan di beberapa kecamatan strategis, seperti Parittiga, Tempilang, dan Simpang Teritip.

Perumdam Tirta Sejiran memiliki visi dan misi untuk mewujudkan pelayanan air minum yang berkualitas, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis skema investasi daerah, baik melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun kerja sama antar-lembaga. Perusahaan telah melakukan laporan kinerja setiap tahunnya untuk menjaga kredibilitasnya kepada masyarakat. Berikut rincian indikaor kinerja keuangan perusahaan:

Tabel 2. 101
Kinerja Keuangan Perumdam Tirta Sejiran Setason

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1.	<i>Return on Equity (ROE)</i>	-1.63%	0.49%	3.05%	2,24%
2.	Rasio Operasional	1.02	1.01	0.99	1.00
3.	Rasio Kas	7,767.77%	13,681.40%	586.82%	473.62%
4.	Billing Effectiveness Ratio	95%	97.09	99.59%	96.26%
5.	Solavabilitas	1,853.75%	2,025.06%		2,362.62%
6.	<i>Return on Productive Assets (ROPA)</i>	-2.32%	0.47%	3.13%	3.17%
7.	<i>Net Profit Margin (NPM)</i>	-2.64%	0.50%	3.29%	3.04%
8.	Current Ratio	295.13	233.64	9.63	8.93
9.	Debt-to-Equity Ratio (DER)	0.06	0.05	0	0
10.	Debt-to-Asset Ratio (DAR)	17.98	20.25	24.62	23.63
11.	Operating Ratio	1.03	1.01	0.99	1.00

Sumber: LHP Perumdam Tirta Sejiran Setason (2020-2023)

Selama periode 2020 hingga 2023, Perumdam Tirta Sejiran Setason menunjukkan tren perbaikan kinerja keuangan yang konsisten terutama dalam aspek profitabilitas dan efisiensi operasional. Indikator *Return on Equity (ROE)* meningkat tajam dari -1,63% pada 2020 menjadi 3,05% di 2022 sebelum sedikit menurun menjadi 2,24% di 2023, mencerminkan penguatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. *Return on Productive Assets (ROPA)* juga meningkat dari -2,32% pada 2020 menjadi 3,17% di 2023. Selaras dengan itu, *Net Profit Margin (NPM)* mengalami lonjakan dari -2,64% menjadi 3,29% pada 2022, dan tetap stabil di atas 3% di tahun 2023. Hal ini menandakan peningkatan efisiensi pendapatan operasional dalam menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, *Billing Effectiveness Ratio* mencapai angka optimal 99,59% pada 2022, menunjukkan efektivitas sistem penagihan, meskipun sedikit menurun pada 2023 menjadi 96,26%.

Dari perspektif likuiditas, indikator *Current Ratio* dan *Cash Ratio* mencerminkan kondisi yang perlu diwaspadai. Current Ratio menurun drastis



dari 295,13 di 2020 menjadi 8,93 pada 2023—meskipun secara normatif masih tergolong sehat, tren penurunannya menunjukkan pengetatan ruang gerak kas jangka pendek. Penurunan serupa juga terlihat pada *Cash Ratio*, dari 13.681,40% pada 2021 ke 586,82% pada 2022, dan 473,62% di 2023. Meski masih sangat tinggi, penurunan ini mengindikasikan penyesuaian dalam pengelolaan kas terhadap kewajiban lancar. Adapun *Operating Ratio* tetap stabil dalam rentang efisiensi yang baik (1,03 ke 1,00), memperlihatkan kontrol biaya yang relatif efektif terhadap pendapatan operasional.

Dalam aspek struktur permodalan dan solvabilitas, Perumdam TSS menunjukkan posisi yang sangat kuat. *Debt-to-Equity Ratio* (DER) tetap pada angka 0 sepanjang 2022 dan 2023, menandakan ketergantungan yang nyaris nol terhadap pendanaan hutang jangka panjang. Hal ini diperkuat dengan *Debt-to-Asset Ratio* (DAR) yang tetap rendah, sekitar 24,62% pada 2022 dan menurun tipis ke 23,63% di 2023. Meskipun data solvabilitas 2022 belum tersedia, angka pada 2020 (1.853,75%) dan 2023 (2.362,62%) menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Secara keseluruhan, Perumdam Tirta Sejian Setason berhasil mencatatkan performa keuangan yang membaik, dengan penguatan kinerja profitabilitas dan struktur modal yang sehat, meski perlu terus mencermati tren penurunan pada indikator likuiditas jangka pendek.

2. Rencana Penambahan BUMD Baru

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tengah mempersiapkan pendirian dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru sebagai bagian dari strategi penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dua BUMD tersebut dirancang untuk beroperasi di sektor yang memiliki nilai strategis tinggi, yaitu: (1) BUMD yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan penunjang aktivitas pelabuhan, dan (2) BUMD di bidang ketahanan pangan.

Kehadiran BUMD penunjang pelabuhan diharapkan dapat mengisi celah kebutuhan logistik, layanan kapal, penyediaan air bersih, BBM, dan jasa teknis lain yang selama ini belum tergarap optimal, terutama di pelabuhan-pelabuhan dengan arus logistik yang terus meningkat di wilayah barat Pulau Bangka. Sementara itu, BUMD ketahanan pangan difokuskan pada penguatan rantai pasok komoditas utama (seperti beras, ikan, hortikultura, dan produk olahan lokal) sekaligus sebagai instrumen stabilisasi harga dan distribusi bahan pangan pokok.

Selain berorientasi pada pencapaian profitabilitas sebagai entitas bisnis, kedua BUMD ini juga ditugaskan menjalankan fungsi sosial dan pelayanan publik. Dalam hal ini, keberadaan BUMD diharapkan mampu



menjadi mitra strategis bagi sektor swasta dan memberikan nilai tambah langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, penyediaan layanan publik yang terjangkau, maupun peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.

Lebih jauh, pendirian BUMD baru ini juga merupakan langkah konkret dalam mendiversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kapasitas fiskal, serta memperkuat posisi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mengelola sumber daya lokal secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Proses pendirian akan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dengan memperhatikan kelayakan usaha, potensi pasar, dukungan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor.

a) BUMD Penunjang Aktivitas Pelabuhan

Kabupaten Bangka Barat memiliki peran strategis dalam sistem transportasi laut, terutama melalui keberadaan Pelabuhan Tanjung Ular di Mentoj. Pelabuhan ini merupakan simpul konektivitas utama antara Pulau Bangka dan wilayah Sumatera bagian selatan, khususnya melalui rute penyeberangan ke Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. Pelabuhan ini tidak hanya melayani penumpang dan kendaraan, tetapi juga menjadi titik penting dalam distribusi logistik dan mobilitas barang, termasuk hasil tambang, pertanian, dan kebutuhan pokok masyarakat.

Peningkatan pelayanan di pelabuhan Tanjung Ular sangat penting dimana terdapat berbagai aktivitas utama yang perlu diperhatikan seperti bongkar muat, sistem transportasi yang mendukung ke pelabuhan dan kapasitas dermaga. Terdapat beberapa dampak positif utama yang didapatkan dalam pengembangan ini, yaitu pengembangan usaha SPBU, aktivitas ekonomi di sekitar pelabuhan seperti UKM yang akan mendukung operasi pelabuhan, usaha Pergudangan, dan Usaha Penyediaan Air. Dalam rangka mendukung pengembangan layanan logistik dan energi di Pelabuhan Tanjung Ular, dilakukan kajian kelayakan terhadap empat lini bisnis strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total kebutuhan investasi awal untuk seluruh lini bisnis mencapai Rp16.204.372.190. Nilai tersebut mencerminkan total pembiayaan yang diperlukan untuk membangun infrastruktur, sistem operasional, dan fasilitas pendukung utama. Adapun rincian investasi awal tersebut terdiri atas:

- Pengisian BBM (Bunkering) sebesar Rp3.556.492.690, diarahkan untuk melayani kebutuhan bahan bakar kapal laut, baik kapal logistik maupun penumpang.



- Pengisian BBM (SPBU) sebesar Rp6.268.961.500, ditujukan untuk kendaraan darat yang beroperasi di sekitar kawasan pelabuhan dan hinterland-nya.
- Penyediaan Air Bersih sebesar Rp1.262.848.800, difokuskan untuk kebutuhan layanan dasar kapal dan operasional pelabuhan.
- Penyimpanan sebesar Rp5.116.069.200, meliputi fasilitas gudang atau tangki penyimpanan untuk mendukung rantai pasok bahan bakar dan air bersih.

Keempat lini bisnis ini merupakan bagian dari skenario integratif dalam meningkatkan nilai tambah Pelabuhan Tanjung Ular sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di Bangka Barat. Investasi pada sektor-sektor ini dinilai layak karena mendukung peningkatan layanan pelabuhan, mempercepat arus barang dan energi, serta membuka peluang kerja dan investasi lanjutan.

b) BUMD Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana memperkuat sistem ketahanan pangan daerah melalui rencana pendirian BUMD yang secara khusus bergerak di bidang ketahanan pangan. Inisiatif ini merupakan respons atas berbagai tantangan struktural yang selama ini dihadapi dalam rantai distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok, terutama dalam menjamin pasokan yang stabil, harga yang terjangkau, serta aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi urgensi pembentukan BUMD ini. Ketergantungan tersebut menjadikan Bangka Barat rentan terhadap fluktuasi harga, keterlambatan distribusi, serta gejolak pasokan akibat gangguan cuaca, logistik, maupun dinamika pasar nasional. Selain itu, lemahnya kelembagaan pelaku usaha pangan lokal dan belum optimalnya peran intermediasi pasar dari sisi pemerintah daerah turut memperbesar risiko kerentanan pangan masyarakat, terutama pada masa-masa kritis seperti musim paceklik atau hari besar keagamaan.

Melalui pendirian BUMD Ketahanan Pangan, pemerintah daerah berupaya menghadirkan entitas bisnis yang mampu menjalankan fungsi strategis sebagai penyedia cadangan pangan daerah, distributor bahan pangan pokok, sekaligus mitra pembinaan bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. BUMD ini dirancang tidak hanya untuk mengejar profitabilitas semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Dengan model bisnis yang terukur dan berbasis kebutuhan lokal, BUMD diharapkan dapat menjalankan peran stabilisasi



harga, penyediaan logistik pangan, serta integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir.

Lebih lanjut, kehadiran BUMD Ketahanan Pangan juga diharapkan mampu membuka peluang kerja baru, mendorong inovasi dalam sistem distribusi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui sinergi dengan BUMDes dan koperasi lokal. Pendirian BUMD ini akan dilandasi oleh kajian kelayakan usaha, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BUMD (termasuk PP No. 54 Tahun 2017), serta mekanisme pengawasan yang akuntabel dan transparan. Pendirian BUMD Ketahanan Pangan bukan semata menjadi langkah taktis dalam menjawab dinamika pasar, tetapi juga menjadi bagian integral dari visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan kemandirian pangan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Penjabaran kondisi fiskal dan kapasitas keuangan daerah akan menyajikan analisa komparatif atas sejumlah indikator kunci keuangan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fokus utama diberikan pada posisi Kabupaten Bangka Barat, yang ditelaah dalam konteks luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kapasitas pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta belanja operasional pemerintah daerah.

Berdasarkan data tahun 2024, total penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 1,53 juta jiwa dengan rata-rata kepadatan wilayah sebesar 2.384 km² per kabupaten/kota. Dalam hal ini, Kabupaten Bangka Barat menempati urutan keempat dalam jumlah penduduk (215.820 jiwa), namun memiliki wilayah yang cukup luas yakni 2.851 km², menjadikannya salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Jumlah penduduk suatu daerah secara langsung memengaruhi kapasitas dan beban keuangan daerah; semakin besar populasi, semakin tinggi pula kebutuhan pembiayaan layanan publik, namun sekaligus membuka potensi peningkatan penerimaan daerah, terutama melalui Pajak Daerah, Retribusi, dan aktivitas ekonomi lokal yang berorientasi pada konsumsi dan usaha.

Dari sisi PDRB ADHB, Kabupaten Bangka Barat menunjukkan performa yang cukup menonjol dengan nilai sebesar Rp19.684 miliar, berada sedikit di bawah Kabupaten Bangka (Rp20.004 miliar) dan di atas Kota Pangkalpinang (Rp18.940 miliar). Tingkat ekonomi Bangka Barat ini bahkan tergolong relatif



tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini menjadi catatan penting mengingat pendekatan tax-based—yakni pendekatan fiskal yang menjadikan aktivitas ekonomi sebagai dasar estimasi pendapatan pemerintah—menjadi dasar utama dalam perencanaan pendapatan daerah.

Pada indikator pendapatan daerah, Bangka Barat tercatat sebesar Rp890 miliar, yang masih berada di bawah rata-rata provinsi (Rp1.041 miliar) dan cukup jauh dibandingkan Kabupaten Belitung (Rp1.409 miliar) maupun Kabupaten Bangka (Rp1.294 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas fiskal, Bangka Barat berada di level sedang ke bawah, meskipun potensi ekonomi riilnya cukup menjanjikan. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bangka Barat memiliki nilai yang sangat rendah, yaitu hanya Rp70 miliar, jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp178 miliar. Posisi ini menjadikan Bangka Barat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan masih bergantung pada transfer pusat dan dana perimbangan. Sebagai pembanding, Kabupaten Belitung dengan jumlah penduduk lebih sedikit mampu menghasilkan PAD sebesar Rp548 miliar—lebih dari tujuh kali lipat PAD Bangka Barat—menandakan perlunya transformasi struktur ekonomi dan intensifikasi potensi lokal yang lebih agresif.

Tabel 2. 102
Profil Indikator Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Luas (km2)	PDRB 2024* ADHB	Pendapatan (Rp.M)	PAD (Rp.M)	Operasi (Rp.M)
Pangkalpinang	230,440	105	19	926	170	797
Belitung Timur	132,840	2,588	11	852	112	709
Bangka Selatan	208,490	3,598	12	1,037	71	713
Bangka Tengah	210,480	2,260	12	876	111	740
Bangka Barat	215,820	2,851	20	890	70	745
Belitung	191,400	2,271	14	1,409	548	1,102
Bangka	342,000	3,017	20	1,294	165	1,089
Total	1,531,470	16,690	108	7,284	1,247	5,895
Rata-rata	218,781	2,384	15	1,041	178	842

Sumber: BPS, 2024

Dari sisi belanja operasional, Kabupaten Bangka Barat mengalokasikan Rp745 miliar untuk operasional daerah, yang berada sedikit di bawah rata-rata provinsi (Rp842 miliar). Hal ini cukup proporsional bila dikaitkan dengan jumlah pendapatan total, meskipun struktur belanja tersebut perlu dilihat lebih lanjut apakah lebih berat ke belanja pegawai atau pelayanan publik produktif. Meskipun struktur keuangan Kabupaten Bangka Barat masih



menghadapi tantangan dari sisi PAD dan kapasitas fiskal, namun kondisi perekonomian daerah yang relatif kuat menunjukkan adanya peluang besar untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah. Pendekatan tax-based menekankan pentingnya akselerasi kebijakan fiskal yang mampu menangkap nilai tambah ekonomi secara optimal, melalui intensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan retribusi, serta reformasi tata kelola investasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, Bangka Barat dapat bergerak menuju struktur fiskal yang lebih mandiri dan tangguh secara berkelanjutan.

Dalam rangka memahami kapasitas keuangan dan kemampuan fiskal daerah, analisis indikator keuangan antar kabupaten/kota menjadi penting untuk menilai posisi relatif serta ruang fiskal yang tersedia bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Bangka Barat, sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan profil keuangan yang cukup moderat, namun tetap memiliki ruang penguatan kapasitas fiskal ke depan. Berdasarkan indikator Pendapatan per Populasi, Bangka Barat mencatat angka Rp4.124.734 per jiwa, sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp4.756.280. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah dalam menyediakan belanja layanan publik per penduduk masih terbatas dibandingkan beberapa daerah lain, seperti Belitung Timur (Rp6,41 juta/jiwa) dan Belitung (Rp7,36 juta/jiwa). Meskipun demikian, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bangka (Rp3,78 juta/jiwa), menandakan posisi Bangka Barat yang tidak terlalu tertinggal secara relatif.

Dari sisi Pendapatan terhadap PDRB, Bangka Barat mencatat rasio sebesar 4,5%, termasuk yang terendah di provinsi ini. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi yang cukup besar (karena PDRB ADHB Bangka Barat tergolong tinggi) belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan tax-based melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah serta pemanfaatan peluang dana transfer berbasis kinerja.

Dari aspek Pendapatan terhadap Luas Wilayah, Bangka Barat menghasilkan sekitar Rp0,31 miliar/km², yang berada di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp0,44 miliar/km². Luas wilayah yang relatif besar (2.851 km²) tanpa diimbangi kapasitas fiskal tinggi menjadikan tantangan tersendiri dalam hal pemerataan layanan dan efisiensi pengelolaan anggaran berbasis kewilayahan.

Dari sisi struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, kontribusi PAD Kabupaten Bangka Barat hanya mencapai 7,9%, masih berada di bawah rerata provinsi sebesar 17,1%. Ini menunjukkan tingkat kemandirian



fiskal daerah yang masih rendah, dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat. Sebagai perbandingan, Kabupaten Belitung sudah mencapai tingkat kemandirian yang jauh lebih tinggi (38,9%).

Tabel 2. 103
Kapasitas Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Kab/Kota	Pendapatan/ Populasi (Rp/Jiwa)	Pendapatan/ PDRB (%)	Pendapatan /Luas (Rp.M/Km ²)	PAD/ APBD (%)	Operasi/ Pendapatan (%)
Pangkalpinang	4,017,966	4.9	8.86	18.4	86.1
Belitung Timur	6,416,742	7.8	0.33	13.1	83.1
Bangka Selatan	4,972,613	8.6	0.29	6.8	68.7
Bangka Tengah	4,163,341	7.4	0.39	12.6	84.4
Bangka Barat	4,124,734	4.5	0.31	7.9	83.7
Belitung	7,361,546	10	0.62	38.9	78.2
Bangka	3,782,339	6.5	0.43	12.8	84.2
Total	4,756,280	6.8	0.44	17.1	80.9

Sumber: BPS, 2025

Indikator rasio Belanja Operasi terhadap Pendapatan menunjukkan angka yang cukup efisien di Bangka Barat, yakni 83,7%, masih lebih baik dibandingkan Bangka Selatan (68,7%) dan cukup mendekati rata-rata provinsi (80,9%). Hal ini menggambarkan komitmen daerah dalam menjaga keseimbangan belanja rutin dengan kapasitas pendapatan. Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi menengah dalam peta kapasitas fiskal daerah di Bangka Belitung, dengan potensi penguatan terutama pada aspek kemandirian PAD dan optimalisasi belanja pembangunan berbasis kewilayahan. Kombinasi antara ekonomi daerah yang cukup besar (PDRB tinggi) dan rasio fiskal yang masih rendah menjadi peluang strategis untuk peningkatan kapasitas fiskal melalui inovasi kebijakan pajak, perluasan basis pajak, dan penguatan pengelolaan potensi sumber daya lokal.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024

A. Pendapatan

Berdasarkan data realisasi pendapatan APBD Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pertumbuhan pendapatan yang konsisten meskipun mengalami fluktuasi di beberapa pos pendapatan. Jumlah pendapatan daerah meningkat dari Rp827,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp931,35 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama periode lima tahun ini adalah sekitar 2,8% per tahun, yang menunjukkan tren positif meskipun tidak terlalu signifikan.



Tabel 2. 104
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	64.304.326.355	59.693.509.556	88.534.302.223	71.795.673.410	86.390.002.144
	B. Pendapatan Transfer	717.844.231.479	790.652.328.838	868.259.629.159	886.513.895.807	840.905.403.685
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	45.171.000.000	29.519.434.000	9.116.562.372	10.767.131.119	4.054.330.174
	Jumlah Pendapatan	827.319.557.834	879.865.272.394	965.910.493.754	969.076.700.336	931.349.736.003

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2025

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Bangka Barat, yang secara konsisten mendominasi pendapatan daerah. Pada tahun 2020, kontribusi pendapatan transfer mencapai 86% dari total pendapatan dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 90% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kenaikan pendapatan transfer yang stabil ini menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan pendapatan daerah.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp64,30 miliar, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi Rp59,69 miliar. Namun, PAD kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp88,53 miliar, meskipun sempat turun di tahun 2023 dan kemudian naik kembali pada 2024 menjadi Rp86,39 miliar. Fluktuasi PAD ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti potensi pendapatan daerah yang belum optimal, tantangan ekonomi, dan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Sementara itu, pos "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" mengalami tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, pos ini mencapai Rp45,17 miliar, namun terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp4,05 miliar pada tahun 2024. Penurunan drastis ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali potensi sumber pendapatan lain yang sah serta meningkatkan inovasi dalam menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor yang mungkin belum optimal dikelola. Secara keseluruhan, meskipun pendapatan total mengalami pertumbuhan positif, ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer menunjukkan perlunya strategi peningkatan PAD dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.



B. Belanja

Data realisasi belanja APBD Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan secara rata-rata sebesar 11,2% setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2024. Jumlah belanja pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp916,16 miliar, kemudian turun menjadi Rp876,77 miliar pada 2021. Belanja kembali meningkat pada 2022 menjadi Rp873,10 miliar dan melonjak signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp1,02 triliun. Namun, di tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi Rp974,24 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup besar dalam pengelolaan belanja daerah.

Komponen belanja terbesar secara konsisten berasal dari belanja operasi. Pada tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp771,66 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp746,44 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa belanja yang bersifat rutin dan berkelanjutan, seperti belanja pegawai, barang, dan jasa, masih menjadi prioritas utama dalam penggunaan APBD Kabupaten Bangka Barat. Sebaliknya, belanja modal yang mendukung pembangunan fisik mengalami fluktuasi signifikan, dengan puncak tertinggi pada 2023 sebesar Rp162,93 miliar.

Tabel 2. 105
Realisasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	771.662.555.935	642.749.615.980	679.707.773.238	739.131.258.848	746.441.168.657
	B. Belanja Modal	141.863.938.997	119.623.646.585	79.178.814.360	162.934.017.468	107.059.382.140
	C. Belanja Tak Terduga	8.694.222	-	-	-	-
	D. Belanja Transfer	2.632.212.275	114.402.645.627	114.215.469.015	117.647.054.237	120.749.209.720
	Jumlah Belanja	916.167.401.429	876.775.908.192	873.102.056.614	1.019.712.330.553	974.249.760.517
2	Surplus/Defisit	-88.847.843.594	3.089.364.202	92.808.437.140	-50.635.630.217	-42.900.024.514

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2025

Belanja tak terduga hanya tercatat pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp8,69 juta. Sementara belanja transfer mengalami tren peningkatan signifikan dari Rp2,63 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp120,74 miliar pada 2024. Hal ini menandakan bahwa belanja transfer, yang biasanya ditujukan untuk bantuan keuangan ke desa atau antar daerah, menjadi salah satu prioritas belanja daerah yang terus berkembang. Meskipun demikian, peningkatan belanja transfer ini tidak sepenuhnya mampu mengimbangi defisit yang terjadi pada beberapa tahun terakhir.



Defisit APBD Kabupaten Bangka Barat terlihat cukup mencolok pada beberapa tahun, terutama pada 2020 sebesar Rp88,84 miliar, kemudian di 2023 sebesar Rp50,63 miliar, dan 2024 sebesar Rp42,9 miliar. Defisit ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, yang dapat menimbulkan risiko fiskal ke depannya. Surplus tertinggi justru terjadi pada 2022 sebesar Rp92,80 miliar, menunjukkan adanya pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan yang optimal di tahun tersebut. Secara keseluruhan, meskipun belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata yang baik, pengelolaan belanja yang lebih efisien dan berkelanjutan perlu terus diupayakan untuk meminimalisir defisit yang berulang.

C. Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi yang cukup mencolok dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sangat tinggi, yaitu sebesar Rp103,17 triliun. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi hanya Rp11,26 triliun. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya kebutuhan pembiayaan atau kemampuan daerah dalam menarik sumber pembiayaan tambahan. Setelahnya, angka penerimaan meningkat kembali di tahun 2022 dan melonjak signifikan di tahun 2023 mencapai Rp107,20 triliun, mendekati angka tahun 2020. Namun, pada 2024, nilai penerimaan pembiayaan kembali menurun menjadi Rp56,59 triliun.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan hanya tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp3 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya (2021–2024), tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun setelah 2020, pemerintah daerah cenderung tidak mengalokasikan dana untuk pembiayaan keluar seperti penyertaan modal atau pelunasan pinjaman. Konsekuensinya, nilai pembiayaan netto identik dengan angka penerimaan pembiayaan selama 2021 hingga 2024.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp11,32 triliun dan meningkat menjadi Rp14,35 triliun pada tahun 2021. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2022, dengan SILPA mencapai Rp107,19 triliun—angka tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Namun, tren ini tidak bertahan lama, karena SILPA kemudian menurun secara bertahap menjadi Rp56,56 triliun di tahun 2023 dan turun lebih lanjut ke Rp13,69 triliun di tahun 2024. Fluktuasi



ini menunjukkan bahwa efisiensi dan penyerapan anggaran daerah mengalami dinamika yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 106
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	103.171.046.156,95	11.257.324.179,93	14.383.364.630,61	107.198.601.770,71	56.592.472.013,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	0	0	0	0
2	Pembiayaan Netto	100.171.046.156,95	11.257.324.179,93	14.383.364.630,61	107.198.601.770,71	56.592.472.013,00
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	11.323.202.562,47	14.346.688.381,59	107.191.801.770,71	56.562.971.553,70	13.692.447.499,13

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2025

Data pembiayaan APBD Kabupaten Bangka Barat menunjukkan adanya ketergantungan terhadap penerimaan pembiayaan dalam menjaga keseimbangan anggaran, terutama saat terjadi defisit. Namun, konsistensi dalam pengelolaan pengeluaran pembiayaan yang hanya muncul di satu tahun serta fluktuasi SILPA mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja dapat menjadi strategi penting untuk menekan kebutuhan pembiayaan tambahan di masa mendatang.

D. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, dengan menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Fungsi utama neraca adalah memberikan informasi mengenai kekayaan daerah, kewajiban yang harus ditanggung, serta sisa kekayaan bersih yang dimiliki. Dengan demikian, neraca menjadi instrumen penting dalam menilai kondisi fiskal, kemandirian, dan kapasitas keuangan daerah.

Berdasarkan data realisasi neraca Kabupaten Bangka Barat tahun 2020-2024, nilai aset daerah secara umum menunjukkan fluktuasi. Aset lancar mengalami penurunan signifikan dari Rp91,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp62,43 miliar pada tahun 2024, meskipun sempat melonjak tajam hingga Rp154,08 miliar pada tahun 2022. Pola ini mengindikasikan adanya dinamika pengelolaan kas, piutang, maupun persediaan yang belum stabil.

Pada sisi lain, investasi jangka panjang relatif stabil di kisaran Rp48-49 miliar, menunjukkan konsistensi alokasi pada instrumen investasi daerah.



Komponen aset tetap justru mendominasi neraca, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp1,20 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,33 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya akumulasi belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Sementara itu, aset lainnya menunjukkan perkembangan fluktuatif, dengan lonjakan tinggi pada 2023 mencapai Rp244,68 miliar sebelum menurun kembali menjadi Rp192,95 miliar di 2024.

Dari sisi kewajiban, terlihat adanya variasi yang cukup tajam. Kewajiban jangka pendek sempat menurun drastis pada 2021 menjadi Rp3,94 miliar, lalu kembali meningkat signifikan hingga mencapai Rp53,08 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi ini menggambarkan dinamika pengelolaan utang jangka pendek yang perlu dikendalikan agar tidak menekan likuiditas daerah. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang selama periode pengamatan, sehingga risiko fiskal jangka panjang relatif minim.

Komponen ekuitas sebagai selisih antara aset dan kewajiban menunjukkan tren peningkatan pada awal periode, dari Rp1,37 triliun tahun 2020 menjadi Rp1,69 triliun tahun 2022, sebelum menurun kembali menjadi Rp1,58 triliun pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan kekayaan bersih daerah yang sempat menguat namun mengalami koreksi pada dua tahun terakhir akibat penurunan aset lancar dan kenaikan kewajiban jangka pendek.

Tabel 2. 107
Neraca Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET	1.398.887.601.302	1.413.207.001.855	1.711.069.165.246	1.691.343.000.978	1.638.386.118.119
	A. Aset Lancar	91.473.311.184	76.168.332.840	154.086.032.544	105.461.699.885	62.439.262.757
	B. Investasi Jangka Panjang	49.018.168.432	48.987.735.262	49.190.523.996	49.354.849.309	49.396.543.161
	C. Aset Tetap	1.204.684.420.310	1.198.142.481.117	1.314.783.304.917	1.291.842.478.383	1.333.594.915.682
	D. Aset Lainnya	53.711.701.376	89.908.452.636	193.009.303.790	244.683.973.401	192.955.396.520
2	KEWAJIBAN	22.664.898.051	3.944.829.411	11.804.953.533	22.112.824.937	53.080.679.894
	A. Kewajiban Jangka Pendek	22.664.898.051	3.944.829.411	11.804.953.533	22.112.824.937	53.080.679.894
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
3	EKUITAS	1.376.222.703.255	1.409.262.172.443	1.699.264.211.713	1.669.230.176.041	1.585.372.974.093
	A. Ekuitas	1.376.222.703.255	1.409.262.172.443	1.699.264.211.713	1.669.230.176.041	1.585.372.974.093

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2025

Neraca Kabupaten Bangka Barat tahun 2020-2024 menunjukkan kekuatan utama pada aset tetap yang terus bertumbuh, sekaligus menyoroti tantangan berupa fluktuasi aset lancar dan meningkatnya kewajiban jangka pendek. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan aset lancar yang lebih efisien serta pengendalian kewajiban agar ekuitas daerah dapat terus terjaga secara berkelanjutan



2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029

Dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk periode 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menerapkan pendekatan multidimensi yang memadukan aspek teknokratis, politis, dan partisipatif secara terpadu. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan anggaran jangka menengah yang realistis, responsif terhadap dinamika eksternal, serta selaras dengan visi pembangunan daerah.

1. Pendekatan Teknoratis

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan model statistik dan regresi berbasis data historis. Proyeksi keuangan dilakukan dengan menganalisis tren masa lalu, hubungan antar variabel ekonomi, serta asumsi kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Meskipun model ini mampu memberikan estimasi yang sistematis, terdapat beberapa tantangan:

- Proyeksi kerap mencerminkan path dependency atau ketergantungan pada pola masa lalu.
- Seringkali tidak mampu menangkap perubahan cepat yang bertentangan dengan teori atau kondisi kebijakan baru.
- Mengasumsikan masa depan serupa dengan masa lalu, sehingga cenderung mengabaikan potensi inovasi atau reformasi besar.

2. Pendekatan Politis

Aspek politis menjadi pendorong utama dalam penetapan arah dan kebijakan anggaran. Proyeksi keuangan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, janji politik, serta strategi besar pembangunan jangka menengah. Ini mencakup pergeseran kebijakan fiskal untuk mendanai program unggulan, prioritas pembangunan, dan belanja sosial. Pendekatan ini penting agar APBD tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga alat mewujudkan mandat demokratis kepala daerah.

3. Pendekatan Partisipatif

Proyeksi keuangan juga memperhatikan kondisi lapangan dan aspirasi masyarakat. Informasi dari musrenbang, pokok pikiran DPRD, serta usulan perangkat daerah digunakan untuk merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat. Pola pembiayaan disusun berdasarkan masalah yang belum tertangani atau program strategis yang belum direalisasikan. Hal ini memperkuat akuntabilitas dan menjamin APBD mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Gambar 2. 58
Pendekatan Proyeksi Keuangan Kabupaten Bangka Barat



Sumber: diolah Penyusun, 2025

Proyeksi keuangan lima tahun ke depan membutuhkan sinkronisasi yang erat antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan perencanaan anggaran makro. Penyelarasan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang bersifat mikro, sehingga rencana strategis jangka menengah dapat diimplementasikan secara operasional melalui penganggaran tahunan yang lebih terukur.

Proyeksi keuangan juga diarahkan untuk menyediakan informasi kuantitatif yang akurat terkait target pendapatan daerah—baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, maupun pendapatan lainnya—serta estimasi kebutuhan belanja, termasuk belanja prioritas dan belanja rutin. Secara khusus, Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi peningkatan pendapatan di masa depan, terutama dari dua sumber strategis: pertama, penambahan dana dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kini dialokasikan langsung ke kabupaten/kota seiring dengan pergeseran tarif bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota; dan kedua, peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor mineral, terutama timah, sebagai akibat dari penyesuaian tarif yang lebih menguntungkan daerah penghasil. Kombinasi kedua faktor ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Bangka Barat dalam jangka menengah.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, dinamika regulasi nasional, maupun kondisi sosial-politik lokal, pendekatan yang digunakan dalam proyeksi keuangan dirancang agar tetap fleksibel. Dengan demikian, proyeksi dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan signifikan yang berpengaruh terhadap struktur dan kinerja APBD.



Akurasi hasil proyeksi sangat bergantung pada penguatan kualitas data fiskal, efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sistem peringatan dini (*early warning system*) fiskal. Oleh karena itu, proyeksi keuangan tidak semata menjadi instrumen prediktif, tetapi juga memperkuat legitimasi perencanaan pembangunan yang inklusif, terarah, dan strategis bagi Kabupaten Bangka Barat.

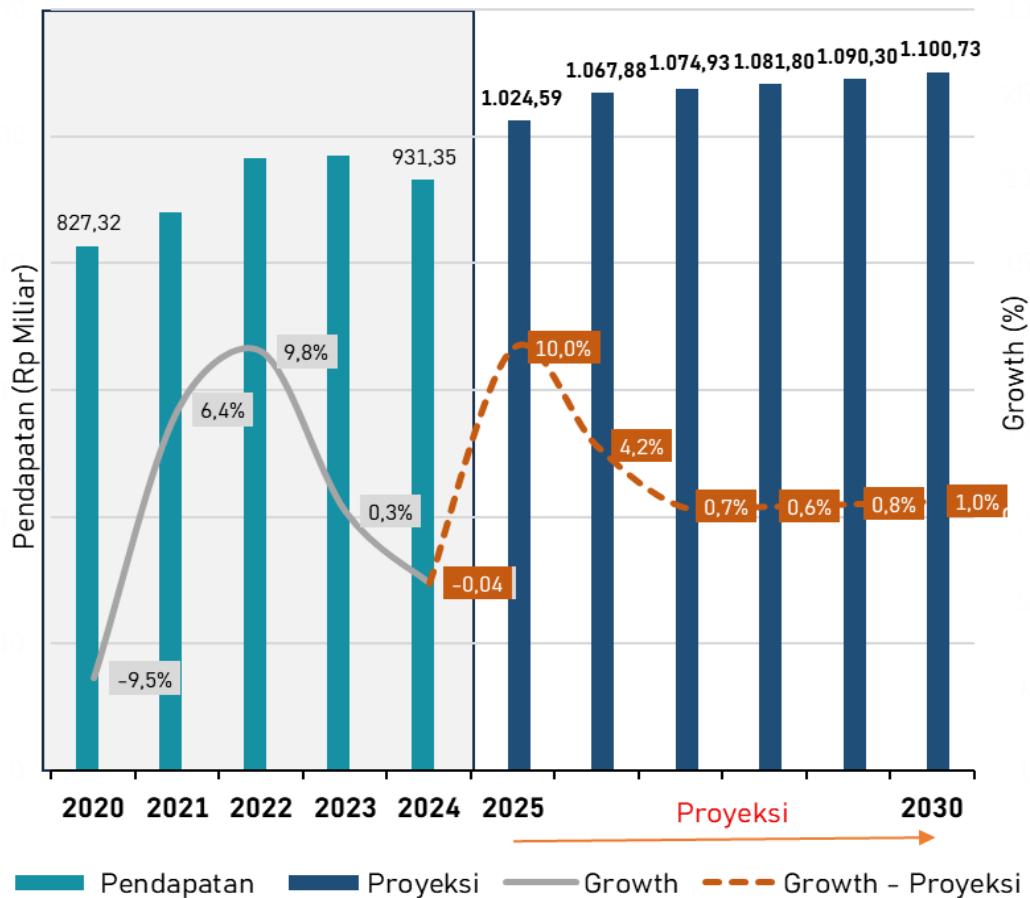
Proyeksi Pendapatan Daerah

Grafik di bawah menggambarkan tren realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2020 hingga 2030. Pada periode realisasi (2020–2024), terjadi dinamika yang cukup fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan mengalami kontraksi sebesar –9,5% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, yang kemudian diikuti oleh pemulihan bertahap pada 2021 (+6,4%) dan mencapai puncak pertumbuhan pada 2022 (+9,8%). Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan melambat secara signifikan, bahkan mengalami sedikit kontraksi sebesar –0,04% pada tahun 2024.

Memasuki periode proyeksi, Kabupaten Bangka Barat diperkirakan akan mengalami lonjakan pendapatan yang signifikan pada tahun 2025, dengan pertumbuhan mencapai 10,0%. Lonjakan ini sangat berkorelasi dengan masuknya sumber pendapatan baru, yakni:

1. Dana Opsen PKB dan BBNKB: Tahun 2025 menandai awal implementasi skema opsen (opsi pembagian dana bagi hasil kendaraan bermotor) yang memperbesar porsi penerimaan kabupaten/kota akibat pergeseran tarif bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota.
2. Royalti Tambang Timah: Kabupaten Bangka Barat juga mulai memperoleh pendapatan dari bagi hasil royalti tambang timah secara signifikan pada tahun 2025, seiring penyesuaian tarif baru serta mekanisme alokasi dana hasil mineral yang lebih adil bagi daerah penghasil.

Gambar 2. 59
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat 2025-2030



Sumber: data diolah dan dianalisis Tim Penyusun, 2025

Setelah puncak peningkatan pada tahun 2025, tren proyeksi pendapatan menunjukkan kecenderungan stabilisasi. Pertumbuhan diperkirakan akan termoderasi menjadi +4,2% pada tahun 2026, dan selanjutnya bergerak stabil dengan pertumbuhan tahunan moderat antara +0,6% hingga +1,0% hingga tahun 2030. Pola ini menunjukkan bahwa Bangka Barat akan memasuki fase stabilisasi fiskal setelah mengakomodasi sumber pendapatan baru, dengan tetap mempertahankan kenaikan bertahap sebagai akibat dari penguatan sistem perpajakan dan penerimaan daerah lainnya.

Setelah membahas total proyeksi pendapatan periode 2025-2030, uraian selanjutnya akan menampilkan rincian komponen pembentuk pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.107.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten sepanjang periode proyeksi, yakni dari Rp113,26 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp152,27 miliar pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui



optimalisasi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset. Rata-rata pertumbuhan PAD berada pada kisaran 6–7 persen per tahun, yang menunjukkan potensi kemandirian fiskal mulai berkembang meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan masih terbatas.

Di sisi lain, pendapatan transfer tetap menjadi sumber dominan dengan kontribusi lebih dari 85 persen setiap tahun. Nilainya relatif stabil sejak tahun 2026 hingga 2030 di kisaran Rp947,6 miliar. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat maupun transfer antar-pemerintah, sehingga ruang fiskal daerah masih cukup terbatas. Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung berfluktuasi dengan nilai yang relatif kecil, yakni dari Rp3,05 miliar pada tahun 2025 dan menurun hingga hanya Rp854 juta pada tahun 2030. Kontribusinya yang kurang dari 0,3 persen terhadap total pendapatan membuat pos ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja fiskal daerah.

Kinerja pendapatan daerah Bangka Barat masih dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat, meskipun terdapat perkembangan positif dari sisi PAD. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong kemandirian fiskal dengan memperluas basis penerimaan lokal dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan lain di luar transfer.

Tabel 2. 108
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi Tahun		
		2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
	A. Pendapatan Asli Daerah	113.263.378.994	117.963.548.862	125.216.538.305
	B. Pendapatan Transfer	812.889.764.092	947.607.764.842	947.607.764.842
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.054.330.174	2.304.330.174	2.104.330.174
	Jumlah Pendapatan	929.207.473.260	1.067.875.643.878	1.074.928.633.321
No	Uraian	Proyeksi Tahun		
		2028	2029	2030
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN			
	A. Pendapatan Asli Daerah	132.341.973.812	141.335.031.123	152.271.446.778
	B. Pendapatan Transfer	947.607.764.842	947.607.764.842	947.607.764.842
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.854.330.174	1.354.330.174	854.330.174
	Jumlah Pendapatan	1.081.804.068.828	1.090.297.126.139	1.100.733.541.794

Sumber: data diolah dan dianalisis Tim Penyusun, 2025

Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Bangka Barat dalam rentang waktu 2020–2030 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kinerja pendapatan daerah. Pola yang ditampilkan dalam grafik menggambarkan pendekatan fiskal yang berhati-hati, di mana besaran belanja cenderung mengikuti



kapasitas pendapatan aktual maupun proyeksi. Pada periode realisasi (2020-2024), belanja daerah mengalami fluktuasi. Setelah berada pada angka Rp916,17 miliar di tahun 2020, terjadi penurunan pada 2021 (-4,3%) dan 2022 (-0,4%) sebagai cerminan penyesuaian kebijakan akibat pandemi dan fokus pada efisiensi. Namun, tahun 2023 mencatat lonjakan belanja sebesar 16,8%, yang mengindikasikan pelaksanaan agenda strategis atau realisasi belanja yang tertunda, sebelum akhirnya terkoreksi kembali sebesar -4,5% pada tahun 2024.

Lonjakan Belanja Akibat Sumber Dana Baru (2025)

Memasuki periode proyeksi, tahun 2025 diperkirakan akan menjadi puncak belanja daerah dengan nilai mencapai Rp1,11 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 14,4%. Lonjakan ini merupakan dampak langsung dari peningkatan kapasitas fiskal yang didorong oleh masuknya sumber pendapatan baru, yaitu Dana Opsen PKB dan BBNKB serta royalti tambang timah. Peningkatan belanja ini akan diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan prioritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

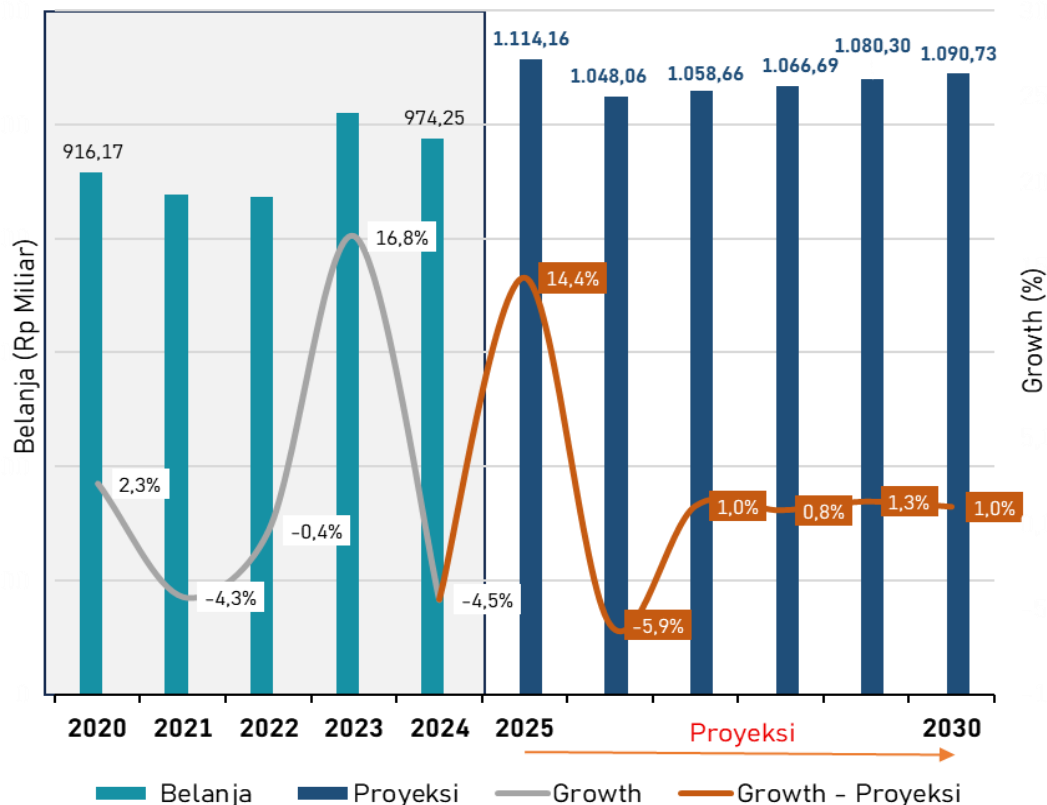
Koreksi dan Stabilitas Belanja (2026-2030)

Setelah lonjakan pada tahun 2025, proyeksi belanja akan mengalami moderasi atau penyesuaian fiskal pada tahun 2026, dengan kontraksi sebesar -5,9%. Pada tahun-tahun berikutnya (2027-2030), tren pertumbuhan belanja akan kembali positif dan bergerak stabil, dengan laju moderat berkisar antara 0,8% hingga 1,3% per tahun. Pola ini menandakan adanya konsolidasi fiskal yang sehat dan perencanaan belanja yang relatif stabil setelah penyesuaian terhadap struktur pendapatan baru. Kenaikan ini mempertimbangkan berbagai kebutuhan rutin pemerintahan daerah serta kegiatan sektoral yang disesuaikan dengan prioritas RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Beberapa pos belanja bersifat dinamis, seperti:

1. Belanja hibah, yang dapat mengalami lonjakan pada saat pelaksanaan Pemilu atau event olahraga besar;
2. Belanja operasional kantor dan layanan publik, yang menyesuaikan kebutuhan aktual setiap tahun;
3. Pengeluaran kegiatan prioritas sektoral, seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan, yang akan terus didorong untuk mendukung capaian target RPJMD.

Gambar 2. 60
Proyeksi Belanja Kabupaten Bangka Barat 2025-2030



Sumber: data diolah dan dianalisis Tim Penyusun, 2025

Setelah penjabaran penjelasan mengenai total proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka Barat periode 2025–2030, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada rincian tiap komponen belanja sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.109. Komponen belanja operasi menjadi pos terbesar dengan kontribusi rata-rata lebih dari 70 persen terhadap total belanja. Nilainya terus meningkat dari Rp701,25 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp805,00 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan dominasi belanja rutin, terutama untuk kebutuhan pegawai, barang dan jasa, serta operasional pelayanan dasar pemerintah daerah.

Sementara itu, belanja modal juga mengalami peningkatan dari Rp111,57 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp139,55 miliar pada tahun 2030. Meski porsi relatif lebih kecil dibanding belanja operasi, tren yang meningkat ini menandakan adanya alokasi konsisten untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.

Komponen belanja transfer juga menunjukkan tren kenaikan dari Rp124,07 miliar di tahun 2025 menjadi Rp140,17 miliar di tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan desa dan transfer ke entitas lain di bawah



kewenangan daerah. Sementara itu, belanja tak terduga cenderung konstan di angka Rp6 miliar per tahun sebagai cadangan untuk kebutuhan darurat.

Tabel 2. 109
Proyeksi Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi (Tahun)		
		2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BELANJA			
	A. Belanja Operasi	701.250.663.284	760.886.039.609	768.484.804.059
	B. Belanja Modal	111.577.392.447	143.277.204.828	145.821.602.087
	C. Belanja Tak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	D. Belanja Transfer	124.071.865.028	137.893.057.952	138.353.265.675
	Jumlah Belanja	942.899.920.759	1.048.056.302.388	1.058.659.671.821
2	Surplus/Defisit	-13.692.447.499	19.819.341.490	16.268.961.501
No	Uraian	Proyeksi (Tahun)		
		2028	2029	2030
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	BELANJA			
	A. Belanja Operasi	774.724.102.012	791.523.106.749	805.004.471.405
	B. Belanja Modal	147.177.971.104	143.383.763.901	139.555.509.892
	C. Belanja Tak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	D. Belanja Transfer	138.785.899.511	139.390.255.490	140.173.560.497
	Jumlah Belanja	1.066.687.972.628	1.080.297.126.140	1.090.733.541.794
2	Surplus/Defisit	15.116.096.200	10.000.000.000	10.000.000.000

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun, 2025

Dari sisi keseimbangan fiskal, pada tahun 2025 terdapat kondisi defisit sebesar Rp13,69 miliar akibat belanja yang lebih besar dari pendapatan. Namun mulai tahun 2026, posisi APBD berbalik menunjukkan surplus, berkisar antara Rp10 miliar hingga Rp19,81 miliar per tahun. Surplus ini menandakan adanya ruang fiskal yang lebih baik untuk penguatan pembiayaan pembangunan, meskipun nominalnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan total belanja.

Struktur belanja Kabupaten Bangka Barat dalam periode 2025-2030 masih didominasi oleh belanja operasi, dengan pertumbuhan moderat pada belanja modal dan belanja transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang untuk pembangunan infrastruktur tersedia, prioritas utama tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan dan pelayanan dasar. Dengan adanya pergeseran dari defisit menjadi surplus mulai tahun 2026, daerah memiliki peluang untuk mengarahkan pembiayaan diantaranya untuk penyertaan modal BUMD untuk kepentingan investasi jangka panjang.

Belanja Prioritas

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat membagi belanja daerah ke dalam tiga kelompok prioritas utama, yaitu Prioritas I (pelayanan dasar dan belanja rutin), Prioritas II (pemenuhan visi misi kepala daerah), dan Prioritas



III (dukungan operasional dan sosial lainnya). Komposisi dan tren dari masing-masing prioritas menunjukkan arah kebijakan pembangunan daerah yang bersifat kesinambungan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta agenda pemerintahan.

1. Prioritas I: Pelayanan Dasar dan Transfer Fiskal

Belanja Prioritas I merupakan komponen terbesar dari keseluruhan belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi sekitar 65,5–66,8% per tahun terhadap total belanja prioritas. Nilainya diproyeksikan sebesar Rp714,6 miliar pada 2025, kemudian sedikit berfluktuasi dan mencapai Rp699,3 miliar pada 2030. Komponen utama terdiri dari:

- Belanja Pegawai, yang diperkirakan mengalami kenaikan bertahap untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penggajian, tunjangan, serta rekrutmen ASN baru.
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terus menjadi fokus, mengindikasikan prioritas peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan secara konsisten untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa.
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang berpotensi naik seiring dengan optimalisasi pendapatan daerah.

2. Prioritas II: Pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah

Belanja Prioritas II diproyeksikan berada pada kisaran Rp215,4 miliar di 2025 dan mencapai Rp203,7 miliar di 2030, dengan kontribusi terhadap total belanja prioritas antara 18,7–20,5%. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan dan ketersediaan ruang fiskal pada tahun-tahun tertentu. Alokasi ini mendukung implementasi agenda kepala daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD, termasuk:

- Pengembangan kawasan unggulan dan perbaikan infrastruktur konektivitas,
- Peningkatan kualitas layanan dasar berbasis digitalisasi,
- Pelaksanaan program strategis lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

3. Prioritas III: Dukungan Operasional dan Responsivitas Sosial

Belanja Prioritas III diperkirakan sebesar Rp154,1 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi Rp187,7 miliar pada 2030, dengan kontribusi 13,8–17,2% terhadap total belanja prioritas. Kenaikan ini merefleksikan komitmen



pemerintah dalam menyediakan dukungan operasional dan menjawab kebutuhan sosial masyarakat, yang meliputi:

- Belanja rutin perangkat daerah, sejalan dengan peningkatan aktivitas pelayanan publik dan biaya operasional tahunan.
- Belanja hibah, yang mengalami kenaikan hingga puncaknya pada 2029 seiring penyelenggaraan agenda strategis termasuk pemilu dan kegiatan lintas sektoral.
- Belanja bantuan sosial, meningkat secara bertahap menandakan perhatian terhadap kelompok rentan dan penguatan jaring pengaman sosial.
- Dana tak terduga, yang tetap dipertahankan sebagai buffer fiskal untuk merespons kejadian tak terprediksi seperti bencana atau gejolak ekonomi.

Total belanja prioritas daerah diproyeksikan mencapai Rp1,114 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp1,090 triliun pada 2030, dengan tren yang relatif stabil di tengah penyesuaian kebutuhan fiskal dan dinamika sosial-politik daerah. Alokasi belanja yang tetap didominasi Prioritas I menunjukkan fokus pada pelayanan dasar, namun peningkatan proporsional pada Prioritas II dan III mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan mendasar dan kebijakan strategis pemerintahan.

Tabel 2. 110
Proyeksi Prioritas Belanja 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027
1	PRIORITAS I	744.618.776.984	689.780.848.623	692.236.700.788
	Kontribusi terhadap total belanja prioritas	66,8%	65,8%	65,4%
	Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	144.350.099.536	136.247.319.310	137.625.757.337
	Belanja Pegawai	477.726.045.421	418.556.783.361	419.173.989.777
	Belanja Dana Desa	56.336.310.000	54.949.231.000	54.949.231.000
	Belanja Alokasi Dana Desa	59.865.742.300	73.337.542.375	73.337.542.375
	Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah	6.340.579.728	6.689.972.577	7.150.180.300
2	PRIORITAS II	215.440.400.012	205.111.260.478	215.651.934.364
	Kontribusi terhadap total belanja prioritas	19,3%	19,6%	20,4%
	Pemenuhan Visi Misi Bupati	215.440.400.012	205.111.260.478	215.651.934.364
3	PRIORITAS III	154.105.464.845	153.164.193.287	150.771.036.668
	Kontribusi terhadap total belanja prioritas	13,8%	14,6%	14,2%
	Belanja Rutin Seluruh Perangkat Daerah	120.524.000.000	114.939.412.094	116.056.661.135
	Belanja Hibah	20.150.469.845	25.549.431.965	20.193.472.716
	Belanja Bantuan Sosial	7.430.995.000	6.675.349.228	8.520.902.817
	Dana Tak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	Total	1.114.164.641.841	1.048.056.302.388	1.058.659.671.821
No	Uraian	2028	2029	2030
1	PRIORITAS I	693.992.646.821	696.501.327.676	699.278.855.556
	Kontribusi terhadap total belanja prioritas	65,1%	64,5%	64,1%



No	Uraian	2025	2026	2027
	Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	138.669.436.442	140.438.626.398	141.795.360.433
	Belanja Pegawai	419.453.622.868	419.588.757.787	420.226.246.625
	Belanja Dana Desa	54.949.231.000	54.949.231.000	54.949.231.000
	Belanja Alokasi Dana Desa	73.337.542.375	73.337.542.375	73.337.542.375
	Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah	7.582.814.136	8.187.170.115	8.970.475.122
2	PRIORITAS II	218.721.629.276	216.059.425.228	203.710.749.110
	Kontribusi terhadap total belanja prioritas	20,5%	20,0%	18,7%
	Pemenuhan Visi Misi Bupati	218.721.629.276	216.059.425.228	203.710.749.110
3	PRIORITAS III	153.973.696.531	167.736.373.236	187.743.937.129
	Kontribusi terhadap total belanja prioritas	14,4%	15,5%	17,2%
	Belanja Rutin Seluruh Perangkat Daerah	118.813.761.409	111.996.849.774	112.244.819.327
	Belanja Hibah	20.293.478.716	40.677.513.467	60.241.554.218
	Belanja Bantuan Sosial	8.866.456.406	9.062.009.995	9.257.563.584
	Dana Tak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	Total	1.066.687.972.628	1.080.297.126.139	1.090.733.541.794

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun, 2025

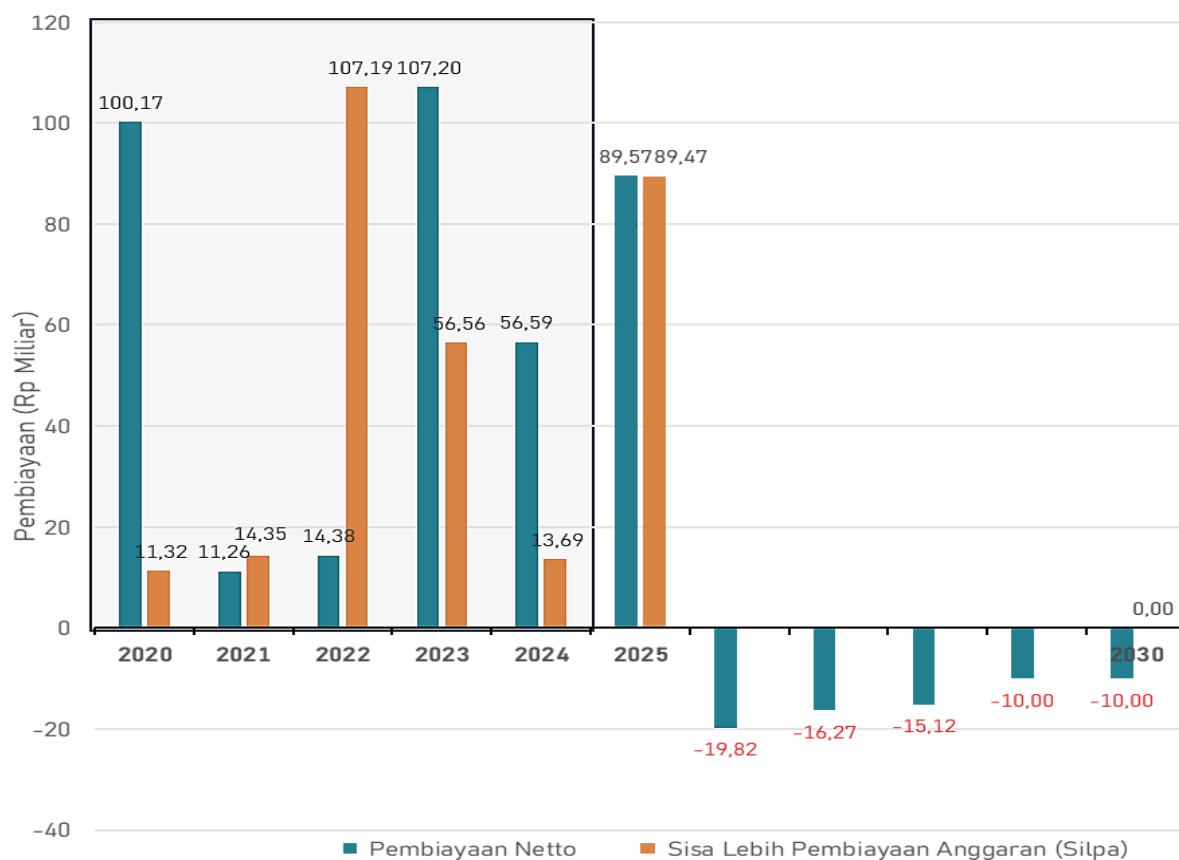
Pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Barat selama periode realisasi 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Pembiayaan netto tercatat tinggi pada tahun 2020 sebesar Rp100,17 miliar, kemudian menurun drastis pada 2021 dan 2022, sebelum kembali melonjak signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp107,20 miliar. Pada periode yang sama, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga mencatat angka yang signifikan, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp107,19 miliar, yang mencerminkan adanya ruang fiskal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Memasuki periode proyeksi, tahun 2025 diperkirakan masih akan mencatatkan pembiayaan netto dan SILPA yang sangat tinggi, masing-masing sebesar Rp89,57 miliar dan Rp89,47 miliar. Angka ini menandakan adanya surplus anggaran yang signifikan dari tahun sebelumnya yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan strategis, khususnya dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas ekonomi lokal, terutama melalui pengembangan sektor pelayanan dasar dan sektor-sektor ekonomi produktif.

Arah kebijakan fiskal menunjukkan perubahan signifikan mulai tahun 2026 hingga 2030. Pembiayaan netto mulai tercatat negatif, diawali dengan Rp-19,82 miliar pada tahun 2026 dan stabil di angka Rp-10,00 miliar pada 2029 dan 2030. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak merencanakan penambahan pembiayaan baru, melainkan akan mengandalkan pendapatan murni untuk membiayai belanja. Sejalan dengan itu, posisi SILPA ditargetkan menjadi nol rupiah mulai tahun 2026, yang menandakan penguatan disiplin anggaran serta penerapan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang lebih presisi. Strategi ini mencerminkan

kehati-hatian fiskal sekaligus dorongan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tanpa menyisakan dana mengendap. Meskipun pembiayaan strategis melalui penyertaan modal masih dimungkinkan dengan memanfaatkan SILPA tahun 2025, kecenderungan ke depan menunjukkan bahwa kapasitas untuk menambah penyertaan modal ke BUMD akan lebih terbatas. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada peningkatan pendapatan asli daerah atau efisiensi belanja strategis di masa mendatang.

Gambar 2. 61
Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Barat



Sumber: data diolah dan hasil analisis Tim Penyusun, 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjamin keberlanjutan program prioritas dan proyek strategis, pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD difokuskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi seluruh sumber pembiayaan yang tersedia. Pemerintah Daerah menyadari bahwa keterbatasan kapasitas fiskal merupakan tantangan utama dalam pembiayaan pembangunan, sehingga dibutuhkan strategi pembiayaan yang lebih adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, selain mengandalkan sumber-sumber pembiayaan konvensional



melalui Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer, Pemerintah Daerah merencanakan pemanfaatan alternatif pembiayaan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Beberapa skema pembiayaan alternatif yang direncanakan antara lain:

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang diharapkan dapat mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur serta pelayanan publik strategis, seperti pengembangan rumah sakit umum, pengelolaan air bersih, sanitasi, dan sektor lainnya.
2. Pinjaman daerah, termasuk pinjaman luar negeri melalui skema Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), yang akan diajukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, kelayakan teknis, serta urgensi pembangunan pada sektor-sektor prioritas.
3. Pemanfaatan dana bergulir, hibah, dan kemitraan dengan lembaga keuangan atau donor internasional, yang diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan inovasi daerah.
4. Skema kemitraan pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership/ PPP*) non-KPBU, khususnya untuk sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan digitalisasi layanan publik, dengan pendekatan berbasis *co-investment* dan *resource sharing*.

Dengan strategi pembiayaan yang lebih terbuka dan inovatif ini, Pemerintah Daerah berharap dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan, tanpa semata-mata bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Seluruh pemanfaatan skema pembiayaan tersebut akan tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Neraca

Berdasarkan proyeksi neraca Kabupaten Bangka Barat tahun 2025–2030, total aset menunjukkan tren meningkat, didominasi oleh aset tetap yang terus naik dari Rp1,36 triliun pada 2025 menjadi Rp1,44 triliun pada 2029 dan Rp1,44 triliun lebih pada 2030. Hal ini mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur dan penguatan sarana prasarana pelayanan publik.

Aset lancar berada pada kisaran Rp41,68 miliar di 2025 dan meningkat bertahap hingga Rp52,31 miliar pada 2028, sebelum sedikit menurun menjadi Rp50,57 miliar pada 2030. Kenaikan moderat ini menggambarkan perbaikan likuiditas meskipun belum signifikan. Dibandingkan dengan Tahun 2024,



proyeksi aset lancar mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh asumsi nihilnya dana SILPA, sehingga tingkat serapan anggaran diperkirakan berada pada level optimal dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 111
Proyeksi Neraca Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Tahun)		
		2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ASET	1.653.198.235.353	1.716.636.029.587	1.759.641.966.663
	A. Aset Lancar	41.681.257.748	49.747.381.821	51.430.516.912
	B. Invesatasi Jangka Panjang	49.526.723.083	69.458.450.924	85.839.798.774
	C. Aset Tetap	1.369.034.858.002	1.404.474.800.322	1.429.416.254.457
	D. Aset Lainnya	192.955.396.520	192.955.396.520	192.955.396.520
2	KEWAJIBAN	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	A. Kewajiban Jangka Pendek	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
3	EKUITAS	1.648.198.235.353	1.711.636.029.586	1.754.641.966.664
	A. Ekuitas	1.648.198.235.353	1.711.636.029.586	1.754.641.966.664
No	Uraian	Proyeksi (Tahun)		
		2028	2029	2030
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ASET	1.789.050.836.779	1.801.342.342.121	1.812.818.839.581
	A. Aset Lancar	52.315.097.183	51.686.932.290	50.577.503.315
	B. Invesatasi Jangka Panjang	101.068.281.325	111.180.667.675	121.293.054.026
	C. Aset Tetap	1.442.712.061.751	1.445.519.345.636	1.447.992.885.720
	D. Aset Lainnya	192.955.396.520	192.955.396.520	192.955.396.520
2	KEWAJIBAN	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	A. Kewajiban Jangka Pendek	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
3	EKUITAS	1.784.050.836.779	1.796.342.342.120	1.807.818.839.580
	A. Ekuitas	1.784.050.836.779	1.796.342.342.120	1.807.818.839.580

Sumber: hasil analisis Bapperida Kab. Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

Sementara itu, investasi jangka panjang memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dan cukup pesat, dari Rp49,52 miliar pada 2025 menjadi Rp121,29 miliar pada 2030. Pertumbuhan ini menandakan adanya strategi diversifikasi keuangan daerah melalui penyertaan modal pada BUMD yang terus terakumulasi. Adapun aset lainnya diproyeksikan tetap konstan di Rp192,95 miliar sepanjang periode, mencerminkan stabilitas dalam pengelolaan aset non-rutin.

Dari sisi kewajiban, hanya terdapat kewajiban jangka pendek sebesar Rp5 miliar setiap tahun, sementara tidak terdapat proyeksi kewajiban jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa risiko fiskal jangka panjang relatif sangat rendah, dan kewajiban tahunan masih berada dalam batas terkendali.

Komponen ekuitas sebagai selisih antara aset dan kewajiban menunjukkan tren meningkat dari Rp1,64 triliun pada 2025 menjadi Rp1,80 triliun pada 2030. Kenaikan ini menandakan pertumbuhan kekayaan bersih



daerah yang berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan aset tetap dan investasi jangka panjang.

Proyeksi neraca Kabupaten Bangka Barat 2025-2030 menggambarkan kondisi keuangan yang kuat, ditandai dengan pertumbuhan aset tetap, meningkatnya investasi jangka panjang, serta ekuitas yang terus bertambah. Tantangan ke depan terletak pada upaya memperbesar aset lancar untuk memperkuat likuiditas, di samping mempertahankan pengelolaan kewajiban agar tetap terkendali sehingga stabilitas fiskal dapat terjaga.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan dipahami sebagai kesenjangan antara kondisi aktual pembangunan dengan target yang telah ditetapkan, atau ketidaksesuaian antara visi pembangunan jangka panjang dengan situasi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, identifikasi dan perumusan masalah pembangunan harus mampu menggambarkan secara komprehensif persoalan utama yang dihadapi, termasuk akar penyebabnya.

Kabupaten Bangka Barat sendiri mengategorikan permasalahan pembangunannya ke dalam lima aspek utama, yaitu: (1) aspek geografi; (2) aspek kesejahteraan ekonomi; (3) aspek daya saing daerah; dan (4) aspek pelayanan umum. Kelima aspek ini bersifat saling terkait dan harus dianalisis secara terpadu. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan profil umum wilayah serta evaluasi atas capaian kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, yang mencerminkan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi.

A. Aspek Geografis

Permasalahan yang berkaitan dengan aspek geografi di Kabupaten Bangka Barat mencakup tiga isu utama, yaitu tingginya potensi risiko bencana, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) secara optimal. Adapun uraian dari masing-masing permasalahan pada aspek ini disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2. 112
Permasalahan Daerah Aspek Geografis

Aspek	Permasalahan	Penjelasan
Geografi	Kesenjangan antar wilayah	a) Masih terdapat kesenjangan geografis antar kecamatan yang memengaruhi akses terhadap pelayanan dasar, terutama di Kecamatan Kelapa (35,11) dan Jebus (33,54) yang mencatat nilai IKG tertinggi di tahun 2024. Nilai ini mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar dalam hal keterjangkauan infrastruktur dasar, terutama di desa-desa terpencil dengan keterbatasan moda transportasi dan kondisi jalan; b) Kecamatan Simpang Teritip (31,33) dan Tempilang (30,34) memiliki nilai IKG mendekati rata-rata kabupaten (31,88), menunjukkan tingkat kesulitan geografis sedang yang tetap memerlukan perhatian. Meskipun tidak tergolong ekstrem, wilayah ini masih menghadapi hambatan dalam konektivitas lokal dan pemerataan distribusi layanan publik, terutama dalam konteks pembangunan antar desa; dan c) Kecamatan Mentok (29,44) dan Parittiga (28,93) memiliki IKG terendah di kabupaten, mencerminkan kondisi geografis yang relatif lebih baik dan aksesibilitas yang lebih tinggi. Namun, perbedaan mencolok dengan kecamatan lain menciptakan ketimpangan spasial, sehingga dibutuhkan strategi pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan agar kecamatan yang lebih tertinggal tidak semakin terisolasi dari pusat pertumbuhan.
	Masih tingginya risiko dan variasi bencana	a) Meskipun nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren penurunan dari 180,40 pada tahun 2022 menjadi 145,28 di tahun 2024, wilayah ini masih tergolong rentan terhadap berbagai jenis bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan gelombang abrasi yang diklasifikasikan dalam kelas risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan IRB belum sepenuhnya mencerminkan pengurangan eksposur maupun kerentanan di lapangan. b) Variasi jenis bencana yang cukup luas, mulai dari banjir, kekeringan, kebakaran lahan, hingga tanah longsor, menciptakan tantangan dalam perencanaan kebencanaan yang terintegrasi dan berbasis wilayah. Misalnya, luas lahan terdampak cuaca ekstrem mencapai 266.345 ha, sementara risiko banjir mencakup lebih dari 96.000 ha. Kondisi ini menuntut kebijakan mitigasi yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berbasis data spasial, agar pengelolaan



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		risiko dapat lebih efektif dan menjangkau wilayah dengan risiko tinggi.
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim	a) Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup khususnya pada kualitas air, dan kualitas tutupan lahan, serta rendahnya ketaatan kegiatan/usaha; b) Belum meratanya pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan yang disebabkan karena kurangnya capaian pelayanan persampahan di perkotaan; c) Belum maksimalnya pengelolaan Tahura yang disebabkan dari Regulasi Pengelolaan Pariwisata di kawasan Tahura Gunung Menumbing belum diatur; masih rendahnya jumlah perizin/kerjasama pengelolaan Tahura dengan stakeholder; serta belum optimalnya monitoring dan pengamanan di kawasan Tahura; d) Masih rendahnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang disebabkan karena belum adanya rencana aksi daerah terkait perubahan iklim; belum ada koordinasi dan sinkronisasi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan stakeholder terkait; belum ada peta SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan); kurangnya kesadaran masyarakat tentang program kampung iklim; serta sistem perizinan terkait izin lingkungan belum sinkron. e) Perubahan drastis emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari -868,04 Gg CO ₂ eq pada tahun 2023 menjadi 290,48 Gg CO ₂ eq pada 2024 menandakan terjadinya degradasi fungsi lingkungan sebagai penyerap karbon alami (net sink) dan pergeseran menjadi sumber emisi (net source). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan lingkungan, khususnya dalam menjaga tutupan hutan, tata guna lahan yang ramah lingkungan, serta pengendalian emisi dari sektor energi, industri, dan limbah. Ketidakseimbangan ini juga menjadi indikator lemahnya strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan perlunya penguatan regulasi serta intervensi kebijakan yang lebih berkelanjutan di sektor-sektor penghasil emisi.	
	f) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati yang tercermin dari: perubahan tutupan/ penggunaan lahan menekan habitat alami melalui ekspansi sawit yang sangat tajam (±18,55 ribu ha menjadi ±42,34 ribu ha dalam empat tahun terakhir (2020–2024) disertai penyusutan karet dan lada, yang mendorong pergeseran menuju monokultur serta berpotensi memfragmentasi lanskap dan koridor ekologis; dominasi pengembangan geosite dibanding potensi hayati dengan destinasi	



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		wisata didominasi situs geologi ($\pm 85\%$) sementara lokasi hayati yang teridentifikasi terbatas dan terkonsentrasi seperti Hutan Rambat Menduyung dan Hutan Nyatoh di Simpang Teritip yang mengindikasikan perlunya penguatan perlindungan kawasan bernilai biodiversitas; terdapat sinyal tekanan hidrologis dari struktur penutup lahan (permukiman/ lahan terbangun dan pertambangan berkoefisien limpasan tinggi 0,7; perkebunan 0,2; koefisien limpasan tertimbang wilayah 0,28) yang berpotensi meningkatkan aliran permukaan dan menurunkan fungsi jasa ekosistem (retensi air, penyangga DAS) bila tidak diimbangi restorasi tutupan alami; serta tekanan pada ekosistem pesisir dan perairan karena produksi budidaya laut yang berfluktuasi tajam dan terdampak aktivitas pertambangan laut, yang memengaruhi kualitas habitat akuatik dan stok hayati pesisir.

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat sedikitnya tujuh isu utama yang menjadi permasalahan pokok di Kabupaten Bangka Barat. Isu-isu tersebut meliputi: belum maksimalnya upaya peningkatan ekonomi daerah, belum tercapainya penghidupan yang layak dan berkelanjutan, belum terwujudnya ketahanan sosial serta kontribusi budaya dalam pembangunan, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, belum efektifnya pembangunan ketahanan keluarga, serta belum berkembangnya daya saing di bidang kepemudaan dan olahraga. Uraian lebih lanjut mengenai masing-masing permasalahan tersebut disampaikan berikut ini.

Tabel 2. 113
Permasalahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek	Permasalahan	Penjelasan
Kesejahteraan Ekonomi	Belum optimalnya penghidupan yang layak dan berkelanjutan	a)) Kantong kemiskinan masih ada di tengah kenaikan pendapatan rata-rata. PDRB per kapita Bangka Barat terus meningkat hingga 2024, menandakan perbaikan kesejahteraan rata-rata; namun sebagian penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan walau persentasenya menurun dan lebih rendah dibanding provinsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan akses pada sumber ekonomi produktif



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		serta layanan dasar agar pertumbuhan yang tinggi benar-benar inklusif;
		b) Daya tahan rumah tangga terhadap guncangan harga belum merata, perlu penguatan perlindungan sosial. Dinamika inflasi yang sempat melonjak kemudian menurun hingga negatif pada 2024 mengindikasikan kerentanan sebagian kelompok terhadap perubahan harga dan permintaan. Efektivitas jaminan/perlindungan sosial perlu ditingkatkan untuk menjaga konsumsi dasar dan stabilitas penghidupan ketika terjadi gejolak harga.;
		c) Penyerapan kerja belum optimal di tengah perbaikan kinerja ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 berada di bawah beberapa kabupaten/kota sekitar, tetapi masih sedikit di atas capaian provinsi, menandakan kebutuhan peningkatan kualitas dan kecocokan keterampilan dengan struktur ekonomi daerah. Penguatan link and match dan peluang kerja produktif diperlukan agar pertumbuhan tersalurkan menjadi penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.
Kesejahteraan Sosial Budaya	Belum optimalnya ketahanan sosial dan kontribusi budaya terhadap pembangunan	a) Ketahanan sosial masyarakat belum terbentuk secara kuat dan merata, ditunjukkan oleh masih tingginya ketergantungan terhadap bantuan eksternal dalam menghadapi tekanan ekonomi dan krisis, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dalam menyelenggarakan perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.
		b) Pengelolaan budaya secara terpadu masih belum berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh berbagai kelemahan dalam pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat dan kesenian, pengembangan sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, serta pengelolaan museum yang belum optimal.
	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	a) Pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana kesehatan, belum memadainya mutu serta ketersediaan tenaga medis, serta belum maksimalnya pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin yang masih menghadapi beban tertentu;



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		b) Angka kesakitan masih tergolong tinggi, ditandai dengan tingginya kematian ibu melahirkan dan prevalensi stunting yang dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan ibu sebelum dan selama kehamilan, lemahnya pemantauan tumbuh kembang anak, belum efektifnya deteksi dini stunting, serta kurangnya sinergi lintas sektor, di mana implementasi di lapangan masih terfokus pada sektor kesehatan meskipun telah ada pembagian peran hingga tingkat desa; c) Tingkat pemahaman masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat masih rendah, yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya pencapaian status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS).
	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	a) Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan masih belum maksimal; dan b) Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak (Tahun 2024 mencapai 40 kasus kekerasan perempuan dan anak). c) masih adanya perkawinan anak (perkawinan dini) dan tingginya angka perceraian.
	Belum optimalnya pembangunan keluarga	a) Pembangunan karakter pemuda masih belum optimal akibat belum terwujudnya sistem pengembangan kepemudaan yang terstruktur dan terintegrasi, serta adanya pengaruh negatif yang berdampak pada perilaku generasi muda; dan b) Capaian prestasi di bidang olahraga belum maksimal, yang disebabkan oleh terbatasnya dukungan terhadap kegiatan olahraga, termasuk minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

C. Aspek Daya Saing Daerah

Dalam aspek daya saing daerah, Kabupaten Bangka Barat menghadapi tiga permasalahan utama, yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia dan tingkat daya saing wilayah, belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya realisasi investasi di daerah. Uraian lebih



lanjut mengenai masing-masing permasalahan tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 114
Permasalahan Daerah Aspek Daya Saing Daerah

Aspek	Permasalahan	Penjelasan
Daya Saing Sumber Daya Manusia	Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah	a) Penyelenggaraan layanan pendidikan belum berjalan secara maksimal, ditandai oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, capaian literasi dan numerasi yang masih di bawah rata-rata provinsi, keterbatasan kualitas dan jumlah tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, serta belum terwujudnya lingkungan sekolah yang ramah anak; b) Pengembangan budaya literasi di kalangan masyarakat juga belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya minat baca serta belum maksimalnya layanan yang diberikan oleh perpustakaan.
	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	a) Fluktuasi TPT menunjukkan ketidakstabilan pasar tenaga kerja. TPT di Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah mencapai titik terendah 3,83% pada 2021, angka ini naik kembali menjadi 4,88% pada 2024, menandakan belum stabilnya penciptaan lapangan kerja; b) Pada 2024, TPT Bangka Barat tercatat 4,88%, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di angka 4,63%. Ini menunjukkan perlunya strategi penyerapan tenaga kerja yang lebih agresif di daerah; c) Meski belum ideal, TPT Bangka Barat masih lebih rendah dibanding Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang, mengindikasikan daya saing lokal yang cukup baik dalam menahan laju pengangguran. d) Butuh penguatan sektor penyerap tenaga kerja. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu diperkuat sebagai sumber lapangan kerja, disertai peningkatan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar untuk menurunkan TPT secara berkelanjutan.
Daya Saing Ekonomi	Belum optimalnya sektor ekonomi unggulan daerah	a) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah dan pelaku usaha kecil. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara capaian ekonomi makro dengan distribusi manfaat ekonomi secara mikro, yang mengindikasikan belum optimalnya



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. b) Sektor pertambangan dan penggalan, terutama timah, merupakan sektor padat modal yang didominasi oleh korporasi besar. Royalti dan PNPB dari sektor ini ditarik langsung oleh pemerintah pusat, sehingga kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bangka Barat sangat terbatas. c) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh praktik tradisional yang berorientasi pada komoditas mentah dengan tingkat adopsi teknologi yang rendah. Minimnya inovasi menyebabkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ini terbatas, sehingga belum mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. d) Sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bangka Barat masih kurang melibatkan pelaku UMKM dan masyarakat lokal secara sistematis dalam rantai nilai. Akibatnya, banyak potensi ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti hasil hutan bukan kayu, perikanan tangkap dan budidaya, serta agroindustri berbasis komunitas yang seharusnya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Daya Saing Iklim Investasi	Belum optimalnya investasi di daerah	a) Capaian realisasi investasi di daerah masih belum optimal, yang disebabkan oleh iklim investasi yang kurang kondusif, layanan perizinan yang belum efektif, serta minimnya kegiatan promosi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menarik investasi; b) Upaya menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan teratur belum sepenuhnya berhasil, ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas, munculnya konflik sosial yang berlatar belakang ideologis akibat kehadiran organisasi kemasyarakatan atau kelompok radikal, aliran menyimpang, dan gerakan anti-Pancasila, serta menurunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani konflik, yang turut berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi; selain itu, sinergi lintas sektor dalam koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Bangka Barat juga belum terbangun secara maksimal, ditunjukkan oleh lemahnya penegakan regulasi, masih banyaknya pelanggaran di fasilitas umum, daerah aliran sungai, dan wilayah pesisir, serta



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		keberadaan sejumlah Perda dan Perkada yang belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

D. Aspek Pelayanan Umum

Dalam aspek pelayanan umum, Kabupaten Bangka Barat menghadapi satu isu utama dalam pembangunan daerah, yaitu belum maksimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Permasalahan ini timbul akibat belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dan kurang efektifnya pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor penyebab permasalahan pokok tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 115
Permasalahan Daerah Aspek Pelayanan Umum

Aspek	Permasalahan	Penjelasan
Pelayanan Umum	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Belum Berjalan Secara Terpadu	a) Capaian nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 67,77 menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dan efisien. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar proses manajemen kinerja masih berorientasi pada pemenuhan dokumen, bukan pada hasil dan dampak b) Data dan laporan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal dalam evaluasi program dan pengambilan kebijakan. Ini menyebabkan sulitnya mengukur efisiensi belanja dan minimnya feedback loop dalam siklus manajemen kinerja. c) Banyak perangkat daerah belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya manajemen kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Sistem kinerja cenderung dianggap sebagai beban administratif ketimbang instrumen perbaikan layanan.
	Terbatasnya kapasitas keuangan daerah	a) Pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum optimal, ditunjukkan oleh tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, dengan kapasitas keuangan daerah yang masih berada dalam kategori sangat rendah. Selain itu, dinamika kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi arah kebijakan keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas layanan publik juga belum dimaksimalkan;



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		b) Kolaborasi antar daerah belum berjalan secara efektif, yang disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang pasar, terutama karena ruang lingkup usaha pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih sempit dan kurang berkembang.
Terbatasnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah	a) Sebagian aparatur sipil negara (ASN) masih memiliki literasi digital yang rendah, terutama dalam pemanfaatan aplikasi pemerintahan, pengelolaan data digital, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kurangnya pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas juga memperlambat adopsi sistem digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. b) Transformasi digital belum disertai dengan penguatan kapasitas analisis data. Sebagian besar kebijakan dan program masih disusun secara konvensional tanpa berbasis pada pemanfaatan big data atau analitik digital, sehingga potensi digitalisasi belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. c) Penggunaan teknologi digital masih berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi antar perangkat daerah. Banyak sistem informasi berjalan secara sektoral tanpa konektivitas data lintas instansi, sehingga menyulitkan koordinasi, memperlambat pengambilan keputusan, dan menghambat efisiensi pelayanan publik secara terpadu.	
Belum optimalnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah	a) Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 masih berada dalam kategori "Kurang Inovatif" dengan skor 31,11. Angka ini menempatkan Bangka Barat sebagai daerah dengan nilai IID terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jauh di bawah rerata provinsi sebesar 54,64 poin b) Masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki kompetensi memadai dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, metode kerja digital, maupun sistem inovatif berbasis data. Hal ini membatasi kemampuan instansi untuk bertransformasi secara digital dan menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perubahan zaman. c) Tidak adanya sistem penghargaan yang memadai bagi aparatur atau unit kerja yang melahirkan inovasi, serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk riset kebijakan dan pengembangan inovasi, menyebabkan motivasi untuk berinovasi menjadi rendah. Selain itu, kolaborasi	



Aspek	Permasalahan	Penjelasan
		dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari ekosistem inovasi masih belum terbangun secara optimal.
	d)	Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah sering kali bersifat insidental dan tidak terdokumentasi dengan baik. Belum tersedia sistem yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mereplikasi praktik-praktik inovatif agar dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan dipahami sebagai kesenjangan antara kondisi aktual pembangunan dengan target yang telah ditetapkan, atau ketidaksesuaian antara visi pembangunan jangka panjang dengan situasi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, identifikasi dan perumusan masalah pembangunan harus mampu menggambarkan secara komprehensif persoalan utama yang dihadapi, termasuk akar penyebabnya.

Kabupaten Bangka Baraat sendiri mengategorikan permasalahan pembangunannya ke dalam lima aspek utama, yaitu: (1) aspek geografi; (2) aspek kesejahteraan ekonomi; (3) aspek daya saing daerah; dan (4) aspek pelayanan umum. Kelima aspek ini bersifat saling terkait dan harus dianalisis secara terpadu. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan profil umum wilayah serta evaluasi atas capaian kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, yang mencerminkan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi.

Isu strategis merupakan hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan daerah. Isu ini memiliki karakteristik yang penting, mendasar, mendesak, serta berdampak jangka menengah hingga panjang, dan berperan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Proses perumusan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap kondisi aktual daerah serta permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Rumusan isu strategis diharapkan mampu mencerminkan dinamika lingkungan eksternal, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global, yang berpotensi memengaruhi daerah dalam jangka waktu menengah dan panjang. Isu-isu strategis inilah yang kemudian menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan



daerah, mencakup penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program-program pembangunan.

A. Isu Lingkungan Global

Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan isu strategis internasional merujuk pada tantangan yang melibatkan hubungan antarnegara dan memiliki dampak yang lebih luas di tingkat global. Isu-isu ini sering kali memerlukan kolaborasi dan koordinasi internasional untuk mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks Kabupaten Bangka Barat, isu strategis pembangunan daerah yang terkait dengan tantangan internasional meliputi berbagai aspek, yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

Peranan *Emerging Economies* dan Perdagangan Internasional. Negara-negara dengan ekonomi yang berkembang (*emerging economies*) semakin memainkan peran dominan dalam perdagangan internasional. Proses ini tidak hanya memperbesar porsi ekonomi mereka dalam perekonomian dunia, tetapi juga membawa tantangan dan peluang baru terkait distribusi sumber daya dan barang, serta perubahan struktur pasar global. Negara-negara ini menjadi pusat inovasi, sementara kebijakan perdagangan internasional terus beradaptasi untuk mengakomodasi peningkatan kontribusi mereka dalam pasar global.

Peran negara-negara *emerging economies* (ekonomi berkembang pesat) semakin strategis dalam lanskap global karena didorong oleh investasi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan reformasi struktural dan perbaikan iklim usaha. Langkah-langkah ini menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kompetitif, dan berkelanjutan. Negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Indonesia menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, ekspor, dan inovasi yang menjadikan mereka pusat pertumbuhan baru di dunia. Transformasi ini juga mendorong pergeseran keseimbangan ekonomi global, di mana kontribusi negara-negara berkembang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia semakin meningkat, sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas di tingkat regional maupun internasional.

Perdagangan internasional saat ini mengalami pergeseran signifikan, di mana poros utama aktivitas perdagangan dunia semakin bergeser ke negara-negara berkembang yang mencatat pertumbuhan sekitar 6% per tahun. Negara-negara di kawasan Asia menjadi pusat pertumbuhan tersebut, dengan prediksi bahwa perdagangan intra-Asia akan menyumbang sekitar 40% dari total perdagangan global pada tahun 2030. Peningkatan ini didorong oleh



integrasi ekonomi regional, perjanjian dagang multilateral, dan penguatan rantai pasok antarnegara berkembang. Selain itu, arus perdagangan tidak hanya melibatkan ekspor-impor tradisional, tetapi juga investasi antarnegara berkembang (*South-South trade*) yang terus menunjukkan tren positif. Dinamika ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang tidak lagi hanya menjadi pasar, melainkan juga aktor utama dalam mendorong arsitektur perdagangan global yang lebih multipolar, adaptif, dan inklusif.

Demografi Global dan Urbanisasi Dunia. Perubahan demografi global, termasuk penuaan populasi di negara maju dan pertumbuhan populasi muda di negara berkembang, mempengaruhi tren sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Tren demografi global saat ini menunjukkan bahwa lebih dari 58% penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) diproyeksikan mencapai lebih dari 2,1 miliar pada pertengahan abad ini, menggambarkan percepatan penuaan populasi, khususnya di negara maju. Di sisi lain, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sedang memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mendominasi struktur demografi. Namun, tanpa perencanaan yang tepat, keunggulan ini berisiko menjadi tantangan baru berupa meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tekanan terhadap layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi negara berkembang untuk memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, serta mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam strategi pembangunan jangka menengah dan panjang agar dinamika demografi global ini dapat menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sementara itu, urbanisasi dunia yang pesat meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kota-kota besar menjadi pusat ekonomi, tetapi juga menghadapi tantangan terkait kemiskinan perkotaan, ketimpangan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. Urbanisasi ini mendesak perencanaan yang lebih cermat terkait pemanfaatan lahan, energi, dan transportasi. Urbanisasi yang cepat ini berdampak pada meningkatnya konsentrasi penduduk di kota-kota besar, yang pada satu sisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, efisiensi layanan publik, dan inovasi teknologi. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga menghadirkan tantangan serius berupa kemacetan, meningkatnya permukiman kumuh, beban infrastruktur, degradasi lingkungan, serta kesenjangan sosial ekonomi antarwilayah. Kota-kota di negara berkembang, khususnya, dihadapkan pada kebutuhan untuk mengelola lonjakan populasi



urban secara lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan transportasi publik, sanitasi, air bersih, dan hunian yang layak.

Persaingan Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim. Krisis sumber daya alam, dipicu oleh degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya yang vital seperti air, energi, dan bahan baku, semakin memperburuk ketegangan antarnegara dan antarperusahaan. Persaingan terhadap sumber daya alam diprediksi akan semakin intensif seiring dengan meningkatnya peran ekonomi negara-negara di Asia dan pertumbuhan jumlah penduduk di Afrika. Peningkatan permintaan ini tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, bahkan meskipun teknologi telah mampu meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan akan menyebabkan kelangkaan, yang pada gilirannya mendorong lonjakan harga komoditas sumber daya seperti energi, mineral, dan air. Kondisi ini menuntut negara-negara untuk berinovasi dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam primer, antara lain melalui pendekatan ekonomi sirkular dengan mendorong praktik *reuse* dan *recycle*, serta pencarian sumber daya alternatif yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, perubahan iklim mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi secara global, merusak ekosistem, dan menambah beban pada sektor-sektor terkait seperti pertanian dan infrastruktur. Menghadapi tantangan ini memerlukan kerjasama internasional untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan. Perubahan iklim membawa dampak luas bagi seluruh aspek kehidupan. Kondisi ini telah memicu peristiwa iklim ekstrem, termasuk gelombang panas, curah hujan ekstrem, dan kebakaran hutan. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sejak rekaman suhu diambil (diperkirakan 1,6 °C di atas era pra-industri), dan kenaikan suhu laut telah menyebabkan gelombang panas laut seluas 40 juta km², mengikis ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. Dampaknya juga terlihat dalam gangguan rantai pasok global, misalnya infrastruktur transportasi mengalami kerusakan karena banjir dan suhu ekstrem—serta meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di kawasan pesisir, termasuk kota-kota besar berisiko tenggelam, sementara lebih dari satu miliar orang terdampak naiknya permukaan laut. Keanekaragaman hayati terus menurun, mengancam stabilitas pasokan pangan dan air bersih, termasuk ekosistem terumbu karang yang mengalami pemutihan masal. Untuk mengatasinya, seluruh pihak perlu mengambil langkah kolaboratif, seperti mengalihkan gaya hidup menuju keberlanjutan, serta memperkuat regulasi sektor industri, seperti pengaturan jenis emisi, beserta pemberian insentif dan disinsentif,



sehingga transformasi menuju praktik rendah karbon dan adaptasi iklim dapat terlaksana efektif

Teknologi dan Disrupsi Teknologi dalam Pembangunan. Teknologi, khususnya dalam bidang digitalisasi dan kecerdasan buatan, menawarkan potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi, memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan, serta memajukan industri. Namun, disrupsi teknologi juga menciptakan tantangan terkait ketimpangan akses, lapangan pekerjaan yang hilang karena otomatisasi, dan ketergantungan pada infrastruktur digital. Pengelolaan teknologi yang adil dan inklusif menjadi tantangan utama untuk memastikan bahwa teknologi dapat memajukan pembangunan tanpa menambah kesenjangan.

Perkembangan teknologi global saat ini menunjukkan arah yang semakin pesat dan transformatif, dengan dominasi pada sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bioteknologi dan rekayasa genetika, kesehatan dan pengobatan berbasis presisi, energi terbarukan, perangkat wearable, otomatisasi, robotika, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Data dari World Economic Forum (2024) menunjukkan bahwa AI dan otomatisasi telah diadopsi oleh lebih dari 75% perusahaan global, dengan potensi menggantikan sekitar 83 juta pekerjaan namun juga menciptakan 69 juta pekerjaan baru dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, kemajuan teknologi kesehatan seperti CRISPR untuk editing gen dan penggunaan big data dalam diagnosis penyakit telah merevolusi sektor medis. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Rockefeller Foundation dan Global Business Network (2010), tantangan utama bukan hanya pada inovasi teknologinya, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap teknologi tersebut agar dapat mendorong kesejahteraan, terutama dalam pendidikan, layanan kesehatan, energi bersih, dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, teknologi juga membawa risiko baru yang perlu diantisipasi, seperti potensi penyalahgunaan AI untuk kejahatan siber, penyebaran disinformasi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional melalui aktivitas terorisme digital dan perdagangan ilegal berbasis teknologi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi ke depan harus dibarengi dengan kebijakan tata kelola yang etis, inklusif, dan berbasis keamanan publik.

Pemerataan Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Salah satu isu utama dalam konteks pembangunan global adalah pemerataan akses terhadap layanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah mereka. Teknologi, baik dalam hal telemedicine maupun pembelajaran daring, dapat membantu



mengatasi kesenjangan ini, namun ketergantungan pada teknologi tersebut juga memperkenalkan tantangan dalam hal infrastruktur dan ketahanan terhadap krisis global.

Tidak hanya itu, banyak negara berkembang yang terjebak dalam jebakan pendapatan menengah, di mana mereka tidak dapat melompat ke pendapatan tinggi setelah mencapai level menengah. Untuk keluar dari jebakan ini, negara-negara ini harus meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi mereka. Pemerataan pelayanan dasar seperti pendidikan berkualitas, kesehatan yang terjangkau, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan dapat berperan penting dalam mendukung transisi menuju negara berpendapatan tinggi.

Pembangunan *Green Economy* dan *The Triple Planetary Crisis*.

Pembangunan green economy atau ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan, efisiensi sumber daya alam, dan mengurangi jejak karbon. Hal ini relevan dengan tantangan global yang dikenal sebagai triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, degradasi alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menghadapi krisis ini memerlukan kebijakan global yang holistik dan terintegrasi, serta kerjasama internasional yang mendalam untuk mengurangi dampak lingkungan dan memajukan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

B. Isu Nasional

RPJPN 2025-2045 disusun sebagai pijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang merupakan penjabaran dari visi abadi bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai megatren global, kondisi sumber daya nasional, dampak perubahan iklim, keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Dalam kerangka RPJPN, visi Indonesia Emas 2045 dirumuskan sebagai "Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", yang diterjemahkan ke dalam lima sasaran visi, delapan misi pembangunan, dan 17 arah pembangunan yang keberhasilannya diukur melalui 45 indikator utama.

Kelima sasaran utama tersebut meliputi: (1) meningkatnya pendapatan per kapita hingga mencapai kisaran US\$23.000-30.300 serta masuk dalam lima besar ekonomi dunia, dengan penguatan sektor manufaktur dan kemaritiman sebagai penggerak utama; (2) menurunnya tingkat kemiskinan hingga 0,5-0,8% dan ketimpangan pendapatan dengan Rasio Gini antara 0,290-0,320, serta meningkatnya kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5%; (3) menguatnya peran Indonesia dalam percaturan global yang



tercermin dari peringkat 15 besar dalam Global Power Index (GPI); (4) peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari Human Capital Index (HCI) sebesar 0,73 pada tahun 2045; serta (5) penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 93,5% dan tercapainya net zero emission pada tahun 2060.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirancang delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi utama (sosial, ekonomi, dan tata kelola), dua landasan transformasi (hukum dan ketahanan sosial-ekologis), serta tiga kerangka implementasi (pembangunan wilayah, sarana prasarana, dan pembiayaan). Misi-misi ini menjadi kerangka kerja operasional dalam seluruh tahapan pembangunan nasional jangka panjang yang terbagi ke dalam empat fase. Pada tahap awal (2025-2029), fokus pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi transformasi dengan target pertumbuhan ekonomi antara 5,6-6,1% per tahun. Prioritas pada transformasi sosial mencakup pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM agar menjadi lebih produktif. Di bidang transformasi ekonomi, diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas inovasi dan produktivitas tenaga kerja, serta penerapan ekonomi hijau dan transformasi digital di seluruh wilayah. Sementara itu, transformasi tata kelola ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, memperbaiki kinerja ASN, dan memperluas layanan publik berbasis digital.

Selanjutnya, penguatan supremasi hukum dan kepemimpinan difokuskan pada stabilitas politik, pengembangan budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan diplomasi yang proaktif. Pada aspek ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, budaya, dan peran keluarga sebagai modal sosial, serta mempercepat capaian pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Dalam pembangunan kewilayahan, dilakukan optimalisasi infrastruktur yang ada, pembangunan jaringan listrik antarwilayah (national grid), penguatan konektivitas maritim, pengembangan wilayah metropolitan, serta penyiapan enam klaster pengembangan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Terakhir, pembiayaan pembangunan difokuskan pada optimalisasi sumber pembiayaan non-pemerintah dan reformasi tata kelola fiskal guna menjamin keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya, serta pertambangan dan energi fosil. Secara nasional, wilayah ini menyumbang sekitar 50 hingga 70 persen pasokan komoditas perkebunan utama seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Beberapa provinsinya juga berperan sebagai pusat produksi pangan nasional karena tingginya



produktivitas sektor pertanian. Selain itu, Sumatera masih memiliki cadangan batu bara yang diperkirakan cukup untuk 70 tahun ke depan, dan mencatat bauran pembangkit energi terbarukan terbesar di Indonesia. Potensi energi bersih di wilayah ini sangat signifikan, dengan estimasi kapasitas surya sebesar 1.173,70 GW, panas bumi 9,48 GW, tenaga air 6,71 GW, dan angin 11,24 GW. Sumatera juga memiliki keunggulan geografis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan jalur perdagangan global, yang seharusnya menjadi peluang untuk mengembangkan sistem logistik yang menjangkau pasar internasional secara lebih luas. Namun demikian, pemanfaatan potensi ini belum maksimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Infrastruktur yang belum memadai masih menjadi persoalan umum di hampir seluruh provinsi, seperti di Sumatera Barat dan Riau, terutama terkait konektivitas yang menyebabkan tingginya biaya logistik dari lokasi produksi ke pusat pengolahan dan distribusi. Masalah kelembagaan dan regulasi menjadi kendala utama di Sumatera Utara, sedangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam sektor pendidikan, masih menjadi tantangan di Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu menghadapi persoalan di sektor makroekonomi dan fiskal, sementara masalah pembiayaan masih menjadi hambatan utama di Provinsi Bengkulu. Isu strategis lainnya di bidang ekonomi mencakup belum optimalnya kinerja kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, rendahnya nilai tambah dari komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan, serta minimnya wisatawan mancanegara akibat belum terintegrasinya aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan pendukung pariwisata (ansilari).

Rendahnya Produktivitas. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, produktivitas nasional Indonesia masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Berdasarkan laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata pertumbuhan produktivitas Indonesia dalam periode 2015–2022 hanya mencatat kenaikan 60 basis poin dibanding periode 2010–2015 yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen. Walau menunjukkan perbaikan, kinerja ini masih tertinggal jauh dibanding negara lain seperti Korea Selatan yang sempat mencatat skor tertinggi 1,78 pada masa transisi industrialisasi awal 1990-an, serta Tiongkok dengan angka 2,12 pada rentang 2005–2022.

Rendahnya produktivitas ini tidak terlepas dari kompleksitas berbagai faktor struktural, antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum



merata, masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pasar kerja akibat hambatan sosial dan kelembagaan, rendahnya kemampuan iptek dan inovasi, serta lemahnya sistem regulasi dan kepastian hukum yang mendukung iklim kerja. Selain itu, isu seperti kurangnya akses layanan penitipan anak (*daycare*) yang terjangkau dan fleksibilitas kerja yang rendah juga menghambat optimalisasi partisipasi tenaga kerja produktif, khususnya perempuan.

Akibat dari rendahnya produktivitas ini, laju pertumbuhan ekonomi nasional pun terdampak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat mencapai rata-rata 5,7 persen pada periode 2005–2010, menurun menjadi 4,7 persen pada 2010–2015. Meski sempat kembali meningkat menjadi 5,0 persen pada 2015–2019 dan 5,05 persen pada 2023, capaian tersebut masih stagnan dalam kisaran yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas telah menjadi faktor penahan utama bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, dengan PDB per pekerja hanya mencapai US\$28.600 pada 2022. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara ASEAN maupun negara maju seperti Amerika Serikat. Rendahnya produktivitas ini berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, yang tercermin dalam capaian skor PISA siswa Indonesia sebesar 369,3—turun dari tahun sebelumnya dan berada di bawah rata-rata negara OECD.

Tantangan utama dalam peningkatan kualitas SDM terletak pada rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Data Agustus 2024 menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja hanya berpendidikan dasar, sementara hanya sebagian kecil yang berpendidikan tinggi. Kondisi ini berkontribusi terhadap ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, di mana hanya sekitar 41% tenaga kerja yang bekerja sesuai bidang keahliannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta pelatihan vokasi guna mendukung transformasi ekonomi nasional.

Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat. Kelompok calon kelas menengah merupakan mayoritas populasi Indonesia dan terus bertambah jumlahnya dari 2019 hingga 2024. Namun, kondisi ini dibayangi oleh peningkatan jumlah penduduk miskin serta meningkatnya kerentanan calon kelas menengah untuk jatuh ke status miskin. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada Agustus



2024 mencapai lebih dari 46 ribu kasus dan diperkirakan masih terus bertambah.

Rendahnya daya beli masyarakat menjadi pemicu utama gelombang PHK. Hal ini tampak dari tren deflasi pada berbagai komponen harga yang diatur pemerintah, termasuk harga bergejolak. Menurunnya harga mencerminkan lemahnya permintaan terhadap produk industri, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pelaku usaha. Ketika industri tidak mampu menutup biaya operasional, banyak yang terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan gulung tikar, memperbesar risiko pergeseran struktur sosial ekonomi.

Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif. Berdasarkan proyeksi BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja di Indonesia diperkirakan mencapai 147,71 juta jiwa. Lonjakan ini menimbulkan tantangan serius, mengingat tingginya kebutuhan hidup penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan penyediaan jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta lapangan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu untuk memenuhi kebutuhan populasi produktif yang terus membesar.

Krisis Lingkungan. Krisis lingkungan global saat ini ditandai oleh tiga tantangan utama: perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan meningkatnya polusi lingkungan. Sekitar 50–75% populasi dunia diperkirakan terdampak langsung oleh perubahan iklim ekstrem pada tahun 2100. Di Indonesia, risiko bencana alam menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp22,8 triliun per tahun, disertai dengan jumlah korban jiwa yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, ancaman terhadap kelestarian spesies semakin nyata, dan polusi udara menjadi penyebab utama kematian dini, termasuk 4,2 juta kematian global setiap tahunnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara.

Kondisi lingkungan Indonesia turut diperburuk oleh pencemaran air dan manajemen limbah yang tidak optimal. Sekitar 70% sumber air rumah tangga terkontaminasi, dan pada 2020, 40,3% timbunan sampah berasal dari makanan. Diproyeksikan, timbunan sampah makanan mencapai 344 kg/kapita/tahun pada 2045. Di sisi lain, tekanan terhadap sumber daya alam juga meningkat pesat. Tingkat ekstraksi tambang Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi secara global, sementara praktik pertambangan ilegal masih marak, memperparah kerusakan lingkungan.

Krisis lingkungan ini menimbulkan tantangan besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Permintaan terhadap sumber daya seperti energi, air, dan pangan semakin tinggi, berisiko memicu konflik dan



persaingan antarwilayah. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan harus berfokus pada aktivitas ekonomi rendah emisi, efisiensi sumber daya, dan penerapan ekonomi sirkular. Sinkronisasi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Geopolitik dan Geoekonomi. Perubahan dinamika geopolitik global menimbulkan tantangan yang signifikan bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Persaingan antarnegara besar semakin tajam dan menciptakan ketegangan baru yang memengaruhi stabilitas kawasan dan arah kebijakan global. Konflik seperti perang Rusia-Ukraina turut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis energi dan pangan di masa depan. Di kawasan Indo-Pasifik, persaingan geopolitik semakin kompleks karena posisi strategis kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global, yang berdampak pada intensitas persaingan ekonomi dan pengaruh politik global.

Ketidakpastian geopolitik sering kali memicu gejolak geoekonomi, seperti volatilitas harga pangan dan energi, inflasi tinggi, serta lonjakan suku bunga global yang dilakukan serentak oleh bank sentral dunia. Kenaikan suku bunga ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, yang sangat terhubung melalui jalur keuangan dan perdagangan global. Proyeksi inflasi global dan perlambatan ekonomi menunjukkan pentingnya respons kebijakan ekonomi nasional yang adaptif terhadap dinamika global.

Tantangan lain muncul dari dampak tekanan geopolitik terhadap arus perdagangan global. Pada 2023, aktivitas perdagangan melambat akibat berbagai tekanan global, tercermin dari penurunan indeks Baltic Dry. Sementara itu, tekanan biaya produksi dan inflasi pangan akibat iklim dan input pertanian turut memperburuk kondisi. Di tengah situasi ini, Indonesia membutuhkan strategi diplomasi dan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga ketahanan nasional dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.

Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah. Peningkatan tata kelola dan pemberantasan korupsi menjadi prasyarat penting dalam percepatan pembangunan nasional, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan investasi. Namun, dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus menurun dan stagnan di angka 34 pada 2023, mencerminkan tantangan serius dalam reformasi birokrasi. Meskipun terjadi perbaikan pada Indeks Perilaku Anti Korupsi hingga 2022, capaian tersebut belum konsisten. Di sisi lain, pengelolaan data nasional menghadapi risiko siber yang meningkat, seperti peretasan dan pelanggaran privasi, akibat belum



optimalnya perlindungan terhadap data pemerintah dan layanan publik berskala besar.

C. Isu Regional

Penyusunan arah pembangunan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis regional yang relevan untuk Kabupaten Bangka Barat. Isu-isu ini menjadi acuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan kabupaten dengan prioritas di tingkat provinsi. Terdapat enam isu strategis regional utama yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, adalah Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. Degradasi lingkungan akibat pertambangan dan perluasan perkebunan monokultur melemahkan kualitas lahan, memecah habitat, dan merusak DAS, serta menimbulkan risiko hama/penyakit dan ketidakseimbangan ekosistem kepulauan. Penurunan keanekaragaman hayati yang terkait erat dengan kearifan lokal serta praktik pemanfaatan berkelanjutan mengganggu fungsi jasa ekosistem dan berdampak pada ekonomi, kesehatan, dan ketahanan pangan. Pengelolaan mangrove dan zona pesisir perlu diperkuat karena berperan melindungi pantai, menjadi area makan, asuhan, dan pemijahan biota, serta pengatur iklim mikro, namun saat ini tertekan oleh konversi lahan, aktivitas tambang, dan pembangunan pesisir yang tidak terkendali. Agenda pembangunan rendah karbon menjadi kunci untuk menekan emisi sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi terhadap perubahan iklim. Di sisi kebencanaan, karakter kepulauan memunculkan kelas risiko tinggi sehingga penanggulangan berbasis risiko, peningkatan kapasitas, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat harus diprioritaskan.

Kedua, yaitu Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia terkendala oleh capaian pendidikan yang belum merata ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih rendah serta penguasaan STEM yang tertinggal di tengah tuntutan ekonomi digital. Tantangan kesehatan dasar tampak dari kenaikan kematian bayi/balita dan kasus stunting, sehingga perbaikan gizi dan layanan kesehatan perlu dipacu agar potensi generasi muda berkembang optimal. Perlindungan sosial belum adaptif karena keterbatasan akses, infrastruktur pendukung, kualitas data, dan koordinasi lintas program; alokasi pendanaan pun masih rendah. Pembangunan kepemudaan perlu ditopang sinergi antar sektor untuk memperkuat literasi digital, kesiapan kerja, serta kesehatan fisik-mental.



Ketiga, adalah Pengentasan Kemiskinan. Walau kemiskinan ekstrem relatif kecil, terdapat kelompok rentan yang mudah jatuh miskin seiring kenaikan garis kemiskinan dan biaya hidup. Struktur ekonomi yang masih didominasi timah membatasi pilihan pekerjaan dan usaha, sehingga pengurangan kemiskinan menuntut perluasan kesempatan kerja produktif dan diversifikasi sumber penghidupan. Intervensi perlu menyasar ketahanan pendapatan rumah tangga, peningkatan keterampilan, dan akses layanan dasar.

Keempat, yaitu Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau ditopang dengan hilirisasi sektor primer. Arah pengembangan menekankan keseimbangan ekosistem darat-laut sambil meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata. Daya saing didorong lewat SDM kompeten, efisiensi rantai pasok/ nilai, serta penerapan teknologi yang relevan dan prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah. Hilirisasi komoditas primer dan tata kelola tambang khususnya timah harus transparan dan berkelanjutan guna meminimalkan dampak sosial-lingkungan serta mengurangi ketergantungan jangka panjang. Penguatan ekonomi lokal dilakukan melalui pengembangan klaster desa, UMKM, koperasi, dan ekosistem kolaboratif agar manfaat ekonomi lebih merata dan produk lokal naik kelas.

Kelima, adalah Penyediaan infrastruktur berkualitas untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketersebaran pulau menuntut peningkatan konektivitas, terutama pelabuhan dan sistem logistik terintegrasi agar biaya distribusi turun dan arus barang antar pulau lancar. Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan layak, air minum aman, sanitasi memadai, dan pengelolaan sampah perlu diratakan untuk mengangkat kualitas hidup. Infrastruktur hijau penting untuk pengelolaan pesisir, pengendalian banjir, konservasi SDA, serta penguatan ketahanan terhadap dampak tambang dan perubahan iklim; di saat bersamaan, percepatan infrastruktur digital diperlukan untuk layanan publik, akses informasi, dan transformasi ekonomi.

Isu strategis keenam yaitu Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas. Perbaikan kinerja birokrasi dimulai dari penguatan sistem merit, manajemen talenta yang terukur, serta budaya inovasi agar tidak terjebak rutinitas. Kolaborasi pemerintah-swasta-masyarakat sipil perlu diperdalam, ditopang forum data pembangunan yang terintegrasi agar perencanaan, monitoring, dan evaluasi bebas dari ego sektoral. Kesenjangan infrastruktur digital harus diatasi seiring peningkatan kapasitas digital aparatur, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, responsif, dan efisien.



Menimbang enam isu strategis di atas, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup beserta penanggulangan bencana; peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM; pengentasan kemiskinan; pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi hijau, ekonomi biru dan hilirisasi sektor primer; penyediaan infrastruktur berkualitas; serta transformasi tata kelola dan layanan publik, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan menuntut orkestrasi kebijakan yang padu, adaptif, dan berorientasi hasil. Penguatan perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, perbaikan kualitas pendidikan–kesehatan dan perlindungan sosial, diversifikasi sumber penghidupan yang berdaya saing, infrastruktur yang membuka konektivitas antarpulau, serta tata kelola yang transparan dan berbasis data menjadi fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif sekaligus tangguh terhadap guncangan. Seluruh agenda tersebut diikat oleh komitmen pembangunan rendah karbon dan pemulihan ekosistem pesisir–darat agar manfaat ekonomi berjalan seiring dengan ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh isu strategis ini sejalan dengan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur 2025–2029: *Babel Berdaya 2029* – “Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”.

D. Isu KLHS

Penentuan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 didasarkan dalam 14 isu strategis Pembangunan yang dibagi ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

Pilar Sosial

1. Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi.
2. Peningkatan kualitas pendidikan.
3. Pemerataan dan akses kesehatan.
4. Perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan.

Pilar Ekonomi

5. Infrastruktur wilayah.
6. Integrasi sektor ekonomi dan kawasan industri.
7. Penguatan ekonomi lokal.
8. Perluasan kesempatan kerja.

Pilar Lingkungan

9. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.
10. Pengelolaan sampah dan limbah.
11. Ketahanan bencana.
12. Sanitasi lingkungan dan air bersih.



Pilar Hukum Dan Tata Kelola

13. Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
14. Partisipasi dan kolaborasi.

E. Isu Strategis Daerah

Mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2045, terdapat delapan isu strategis utama yang menjadi pijakan arah pembangunan jangka panjang daerah. Isu-isu tersebut meliputi: (1) implementasi tata kelola pemerintahan cerdas (*smart governance*); (2) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang efektif; (3) pemerataan hasil pembangunan antarwilayah; (4) peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh; (5) peningkatan daya saing sumber daya manusia; (6) penguatan nilai dan ekspresi budaya lokal; (7) perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; serta (8) mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dengan memperhatikan visi pembangunan nasional dalam kerangka Indonesia Emas 2045, serta mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan daerah, maka Kabupaten Bangka Barat merumuskan visi pembangunan jangka panjangnya dalam tema “Bangka Barat Berdaya, Maju, Sejahtera, Tangguh, dan Berkelanjutan”, yang disingkat dalam akronim “BANGKA BARAT BERMARTABAT.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, dirumuskan lima misi utama pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2045, yaitu: (1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, adaptif, dan akuntabel; (2) membangun ekonomi daerah yang tangguh serta mendorong pembangunan berkelanjutan; (3) menciptakan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, sosial, dan spiritual; (4) melakukan transformasi sosial serta memperkuat ketahanan budaya lokal; dan (5) menciptakan lingkungan hidup yang lestari melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Pencapaian visi daerah akan dijalankan secara bertahap melalui empat periode pembangunan jangka panjang. Tahap pertama (2025–2029) difokuskan pada Penguatan Fondasi Transformasi Daerah. Tahap kedua (2030–2034) diarahkan pada Akselerasi Pembangunan yang Berkeadilan. Selanjutnya, tahap ketiga (2035–2039) menekankan pada Peningkatan Daya Saing Daerah. Sedangkan tahap keempat (2040–2045) merupakan fase Pemantapan Bangka Barat yang Berdaya, Maju, Sejahtera, Tangguh, dan Berkelanjutan. Setiap tahap dirancang untuk saling mendukung dalam mewujudkan visi jangka panjang secara bertahap, terukur, dan terintegrasi.



Isu strategis daerah merujuk pada kondisi yang berpotensi menjadi tantangan atau peluang di masa depan. Isu ini umumnya belum sepenuhnya muncul sebagai masalah saat ini, namun diprediksi dapat berdampak signifikan bagi pembangunan jika tidak ditangani secara tepat. Di sisi lain, isu strategis juga mencerminkan potensi yang belum tergarap optimal, yang apabila dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi kekuatan pendorong pembangunan daerah. Perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Bangka Barat dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah, penelaahan berbagai dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, serta hasil telaah isu global dan regional. Dari proses tersebut, dirumuskan lima isu strategis utama sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan

Perekonomian daerah ditopang oleh potensi sumber daya alam dan buatan yang menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah untuk menentukan sektor prioritas yang mendorong pertumbuhan. Sektor industri pengolahan di Bangka Barat menyumbang hampir 50% struktur PDRB, menjadikannya tulang punggung ekonomi, terlebih dengan keberadaan KIPT Tanjung Ular. Komoditas unggulan seperti hasil laut, lada, kelapa sawit, dan mineral terus dikembangkan agar memiliki nilai tambah melalui inovasi dan strategi pemasaran. Sektor lain seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM juga memiliki potensi besar yang perlu ditingkatkan melalui iklim investasi yang kondusif dan peningkatan daya serap tenaga kerja.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Kelompok Rentan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap kelompok rentan—seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak—menjadi krusial untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Tantangan yang dihadapi antara lain ketimpangan sosial ekonomi, ketergantungan tinggi pada bansos pusat, serta keterbatasan perlindungan sosial yang adaptif di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis komunitas, memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi, serta membangun sistem layanan dasar yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang akurat menjadi kunci dalam meningkatkan



efektivitas intervensi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan sejahtera.

3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

SDM merupakan pilar utama pembangunan. Dalam menghadapi dinamika global seperti perubahan demografi, teknologi, iklim, dan geopolitik, transformasi sosial menjadi strategi penting. Peningkatan kualitas hidup, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, dan pengarusutamaan gender menjadi prioritas. Tantangan saat ini meliputi belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan, tingginya angka stunting dan kematian ibu, serta kesenjangan akses layanan dasar. Pemerintah juga perlu merespons bonus demografi dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja, termasuk melalui promosi investasi yang membuka peluang bagi generasi produktif.

4. Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ini mencakup penyediaan akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase menjadi prioritas. Selain itu, penguatan jaringan energi dan telekomunikasi menjadi kunci dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Isu ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan 6, 7, dan 11.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kondisi lingkungan yang terdegradasi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan salahsatunya karena eksploitasi berlebih dan dampak perubahan iklim (kenaikan suhu serta cuaca ekstrem) yang meningkatkan risiko banjir, kebakaran hutan/lahan, kekeringan, longsor, abrasi, dan gelombang ekstrem. Dalam kaitan itu, keanekaragaman hayati memegang peran kunci sebagai penyangga jasa ekosistem (penyerap karbon, penahan banjir dan abrasi, penopang produktivitas pesisir-perairan), namun saat ini menghadapi tekanan berupa fragmentasi habitat dan menurunnya konektivitas koridor ekologis antar kawasan lindung-budidaya. Karena itu, kebijakan perlu menekankan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran sekaligus mengarusutamakan konservasi-restorasi biodiversitas melalui penataan ruang yang berketahanan iklim (RTRW/ RDTR dan KLHS), perizinan dan



pengawasan kegiatan, serta rehabilitasi tutupan dan perlindungan koridor ekologi. Upaya mitigasi dan adaptasi diperkuat melalui kolaborasi pemerintah–masyarakat–pemangku kepentingan, pengembangan pendanaan inovatif, serta sistem data dan pemantauan terpadu agar capaian baku mutu dan ketangguhan bencana bergerak selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan dan daya saing daerah.

6. Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Berbasis Digital

Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Digitalisasi birokrasi menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan publik, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, transisi digital juga membawa tantangan, seperti kesiapan SDM dan adaptasi kelembagaan. Oleh sebab itu, transformasi birokrasi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi secara inklusif, dan pembangunan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik yang responsif, cepat, dan terintegrasi.



Tabel 2. 116
Pemetaan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Kekayaan sumber daya lokal	- Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah - Belum optimalnya sektor ekonomi unggulan daerah - Belum optimalnya investasi di daerah - Rendahnya kualitas SDM dan daya saing daerah - Belum optimalnya serapan tenaga kerja	- Infrastruktur wilayah - Integrasi sektor ekonomi dan kawasan industri - Penguatan ekonomi lokal - Perluasan kesempatan kerja	- Peranan Emerging Economies dan perdagangan internasional - Teknologi dan disrupsi teknologi dalam pembangunan	- Rendahnya produktivitas - Geopolitik dan geoekonomi - Krisis lingkungan (ekonomi hijau)	- Investasi sektor biru dan hijau - Hilirisasi SDA - Aktivitas ekonomi berkelanjutan - Integrasi dan konektivitas ekonomi - Transformasi angkatan kerja	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan
Kekuatan komunitas lokal	- Ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah - Belum optimalnya ketahanan sosial - Masih tingginya kelompok rentan - Ketergantungan terhadap bantuan pusat - Masih terbatasnya perlindungan sosial adaptif	- Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi - Pemerataan dan akses kesehatan - Perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan	- Demografi global dan urbanisasi dunia - Pemerataan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	- Pergeseran struktur kelas masyarakat - Kebutuhan hidup tinggi usia produktif	- Kesejahteraan masyarakat melalui mitigasi persoalan krusial - Transformasi angkatan kerja - Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Kelompok Rentan
Bonus demografi produktif	- Rendahnya kualitas pendidikan - Keterbatasan kompetensi tenaga kerja - Minimnya pelatihan vokasional - Kesenjangan akses pendidikan - Belum optimalnya sinergi pendidikan-industri	- Peningkatan kualitas pendidikan - Perluasan kesempatan kerja	- Demografi global dan urbanisasi dunia - Teknologi dan disrupsi teknologi	- Rendahnya kualitas SDM - Kebutuhan hidup tinggi usia produktif	- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM - Transformasi angkatan kerja - Percepatan transformasi digital	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Letak strategis wilayah	- Kesenjangan antarwilayah - Terbatasnya infrastruktur dasar di daerah pesisir dan pedalaman - Akses layanan publik belum merata - Keterbatasan konektivitas antarwilayah	- Infrastruktur wilayah - Pemerataan pembangunan wilayah - Keadilan spasial dan pembangunan inklusif	- Pemerataan pelayanan dasar pada bidang kesehatan dan pendidikan - Persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim	- Geopolitik dan geoeкономи - Krisis lingkungan - Pergeseran struktur kelas masyarakat	- Peningkatan penyediaan dan pelayanan sistem perkotaan dan infrastruktur dasar - Peningkatan pembangunan dan kualitas layanan aksesibilitas dan konektivitas - Tata ruang sebagai acuan pembangunan berkelanjutan	Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
Potensi ekosistem pesisir	- Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim; - Tingginya risiko dan variasi bencana	- Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup - Pengelolaan sampah dan limbah - Ketahanan bencana - Sanitasi lingkungan dan air bersih	Pembangunan green economy dan triple planetary crisis	Krisis lingkungan	- Hilirisasi SDA; - Mendorong ekonomi berkelanjutan; - Mitigasi persoalan krusial	Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
Reformasi tata kelola digital	- Belum optimalnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah; - Terbatasnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah	- Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) - Partisipasi dan kolaborasi	Teknologi dan disrupsi teknologi dalam pembangunan	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	- Transformasi birokrasi; - Percepatan transformasi digital	Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Berbasis Digital

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 merupakan pijakan utama dalam arah kebijakan daerah selama lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah, yakni RPJMD 2025–2029. Adapun rumusan visi yang diusung yaitu:

**“BANGKA BARAT BERMARTABAT”
(Berkeadilan, Makmur, Tangguh, Bersahabat)**

Masing-masing kata dalam visi tersebut memiliki makna filosofis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Berkeadilan”

Berkeadilan mencerminkan semangat untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi. Keadilan sosial tidak hanya diwujudkan melalui distribusi kesejahteraan yang merata, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai solidaritas, partisipasi, dan keberagaman. Dalam konteks ini, pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa. Keadilan juga menyatu dengan pelestarian budaya sebagai identitas kolektif yang memperkuat jati diri masyarakat.

“Makmur”

Makmur mencerminkan kondisi masyarakat yang hidup dalam kecukupan, keseimbangan, dan kesinambungan. Kemakmuran yang dikehendaki bukan sekadar akumulasi pertumbuhan ekonomi, melainkan keberhasilan mewujudkan sistem ekonomi yang berdaya tahan, berbasis pada potensi lokal, dan dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemakmuran juga berpijak pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan, agar kesejahteraan hari ini tidak mengorbankan generasi yang akan datang.

“Tangguh”

Tangguh mencerminkan kekuatan karakter dan daya lenting masyarakat Bangka Barat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Ketangguhan



dibangun melalui manusia-manusia yang sehat, cerdas, adaptif, dan produktif. Melalui pendidikan yang merata dan layanan kesehatan yang berkualitas.

“Bersahabat”

Bersahabat menggambarkan suasana pemerintahan dan kehidupan sosial yang terbuka, harmonis, dan kolaboratif. Pemerintahan yang bersahabat adalah pemerintahan yang hadir sebagai pelayan masyarakat—ramah dalam pelayanan, transparan dalam pengelolaan, dan cepat dalam merespons kebutuhan publik. Semangat bersahabat juga terwujud dalam gaya kepemimpinan yang humanis dan menjalin kerja sama lintas sektor.

Adapun empat misi pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya

Misi ini difokuskan pada penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui proses transformasi sosial yang menumbuhkan nilai-nilai inklusivitas, solidaritas, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Transformasi ini diarahkan untuk membentuk masyarakat yang adaptif terhadap dinamika perubahan, memiliki kesadaran kolektif yang tinggi, dan mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan yang lebih merata serta pengurangan kesenjangan sosial di berbagai lapisan masyarakat.

Penguatan kapasitas individu dan keluarga menjadi elemen kunci dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, setara, dan menjunjung prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka ini, pembangunan dari desa menjadi prioritas utama, karena kemandirian masyarakat pedesaan dipandang sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Selain aspek sosial, pelestarian budaya juga diintegrasikan sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Budaya dilestarikan sebagai sumber nilai yang memperkuat identitas kolektif dan kohesi sosial, serta mendorong terjalinnya relasi sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan masyarakat yang kuat secara sosial dan berakar pada budaya yang lestari, Bangka Barat diyakini akan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan dengan lebih tangguh dan berdaya.

Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi struktural yang berbasis pada potensi lokal secara inklusif dan



berkelanjutan. Transformasi ini menitikberatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, pariwisata, koperasi, UMKM, dan industri lokal guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Di samping itu, penguatan konektivitas antarwilayah menjadi aspek penting dalam mendorong kelancaran arus perdagangan dan meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka-angka, tetapi juga diarahkan pada pembentukan ekosistem ekonomi yang sehat, kompetitif, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.

Prinsip keberlanjutan menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi, di mana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara bijak. Setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi akan tetap berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian alam dan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Barat di masa mendatang.

Misi 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Upaya dilakukan untuk memastikan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik dan masyarakat yang sehat, diharapkan akan tercipta individu-individu yang cerdas, produktif, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan menghadapi tantangan masa depan secara lebih mandiri dan percaya diri.

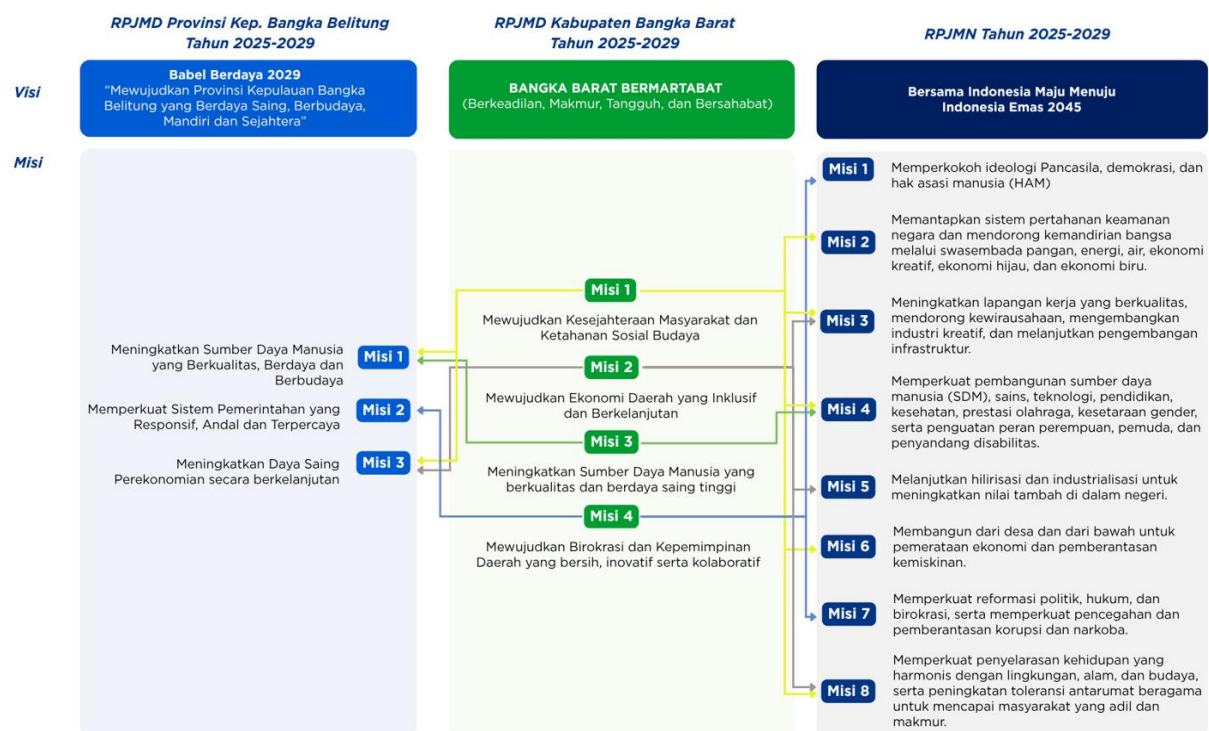
Misi 4: Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang Bersih, Inovatif, serta Kolaboratif

Misi ini diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan adaptif melalui reformasi birokrasi yang konsisten. Pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi dasar dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan berbasis teknologi. Peningkatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan yang terbuka, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Selain itu, kepemimpinan daerah dituntut untuk bersifat inovatif dan kolaboratif, menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya

memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan daya saing daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan prinsip keterpaduan dan keselarasan terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel Berdaya), guna memastikan arah pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan antarlevel pemerintahan. Visi dan misi daerah tidak hanya merupakan janji politik kepala daerah, tetapi juga menjadi kerangka kerja strategis yang perlu disinergikan secara vertikal agar tercapai efektivitas dalam implementasi program dan kebijakan publik.

Gambar 3. 1
Keterkaitan Misi RPJMD Bangka Barat
dengan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

Misi pertama dari Visi "Bangka Barat Bermartabat", yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial budaya, memiliki keterkaitan substansial dengan Misi 1 Provinsi Kepulauan Bangka Blitung yang menekankan pada penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya. Keduanya sama-sama menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, perlindungan sosial, serta pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, terdapat pula irisan kuat dengan Misi 3 provinsi yang



menekankan pentingnya daya saing SDM, menjadikan misi Bangka Barat sebagai simpul penguatan kesejahteraan yang berbasis pada kapasitas individu dan komunitas.

Adapun Misi 2 Bangka Barat, yang bertujuan mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, memiliki hubungan erat dengan Misi 3 provinsi yang menekankan daya saing perekonomian berkelanjutan. Keduanya mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta memperhatikan prinsip keadilan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya daerah.

Selanjutnya, Misi 3 Bangka Barat, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, secara langsung merefleksikan Misi 1 provinsi. Penekanannya pada peningkatan kapasitas pendidikan formal dan non-formal, serta kesehatan masyarakat menunjukkan keselarasan arah dalam menciptakan manusia Bangka Barat yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Sementara itu, Misi 4 Bangka Barat, yaitu mewujudkan birokrasi dan kepemimpinan daerah yang bersih, inovatif, serta kolaboratif, bersesuaian dengan Misi 2 provinsi yang berfokus pada sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Keduanya berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas aparatur, termasuk transformasi digital serta sinergi antar-lembaga dan masyarakat.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan dengan tingkat provinsi, tetapi juga secara vertikal terhadap arah kebijakan nasional. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung pencapaian agenda strategis nasional secara terintegrasi.

Misi pertama Bangka Barat, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial budaya, memiliki keterkaitan erat dengan Asta Cita ke-2 yang keduanya sama-sama memantapkan ketahanan pangan, Asta Cita ke-3 terkait serapan tenaga kerja, Asta Cita ke-4, yang mengedepankan pembangunan manusia secara utuh termasuk kesetaraan gender dan perlindungan sosial; Asta Cita ke-6, yang mendorong pembangunan dari desa dan pengentasan kemiskinan; dan Asta Cita ke-8, yang menyoroti kehidupan sosial yang harmonis, berbudaya dan toleran.



Sinergi ini memperkuat orientasi Bangka Barat dalam membangun masyarakat yang adil, berbudaya, dan inklusif melalui pendekatan sosial yang berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan.

Misi kedua, yakni mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah Asta Cita ke-3, yang menargetkan pengembangan ekonomi unggulan, UMKM, industri kreatif, pariwisata dan infrastruktur pendukung; serta Asta Cita ke-5, yang mendorong hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah dalam negeri. Keselarasan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Bangka Barat dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim serta dinamika ekonomi.

Misi ketiga Bangka Barat, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, memiliki keterhubungan kuat dengan Asta Cita ke-4, yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas strategis melalui penguatan akses dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, arah kebijakan Bangka Barat sejalan dengan visi nasional dalam membentuk generasi unggul, produktif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Sementara itu, Misi keempat Bangka Barat, yaitu mewujudkan birokrasi dan kepemimpinan daerah yang bersih, inovatif, dan kolaboratif, konsisten dengan Asta Cita ke-1, yang memuat prinsip-prinsip demokrasi dan tata nilai Pancasila, serta Misi 7, yang menekankan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Keselarasan ini mempertegas arah Bangka Barat dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap aspirasi publik, serta mendorong kolaborasi lintas aktor dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dengan demikian, keempat misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat telah dirumuskan secara sistematis agar tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga terintegrasi dengan arah pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Daerah dalam berkontribusi aktif terhadap pencapaian visi Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Guna mewujudkan visi "Bangka Barat Bermartabat", perencanaan pembangunan jangka menengah perlu dirancang secara sistematis melalui lima misi utama. Untuk mendukung hal tersebut, disusunlah kerangka strategis berupa tujuan dan sasaran pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengejar



target pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi jembatan antara visi-misi kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045.

Tujuan pembangunan merumuskan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam periode lima tahun ke depan (2025-2029), dengan memperhatikan urgensi penanganan isu-isu strategis yang dihadapi daerah. Perumusan tujuan ini tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan yang bersifat adaptif terhadap persoalan aktual, tetapi juga menegaskan keterpaduannya dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, sehingga pembangunan daerah tetap relevan dalam konteks regional. Sasaran pembangunan diturunkan secara langsung dari tujuan yang telah ditetapkan, dan dirancang agar lebih konkret dan terukur. Tujuan dan sasaran yang merupakan rangkaian kinerja menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun yang disusun dalam kalimat kondisi, bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome. Kemudian tujuan dan sasaran diturunkan sampai diperoleh program prioritas. Di samping menjadi manifestasi dari visi kepala daerah, tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD juga mengintegrasikan sasaran utama dari RPJPD, sehingga berfungsi secara efektif sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan jangka menengah dalam mendukung visi jangka panjang Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 3. 2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029



Sumber: hasil perumusan, olah data dan analisis oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025



Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

NO.	MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
							2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
BERKEADILAN													
1	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya	T1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,59	2,45 - 2,56	2,41 - 2,52	2,36 - 2,47	2,30 - 2,40	2,24 - 2,34	2,18 - 2,27
				2	Rasio Gini	Skala (0-1)	0,201	0,194-0,198	0,193 - 0,197	0,192-0,196	0,191 - 0,195	0,190 - 0,194	0,189 - 0,193
				3	Indeks Ketahanan Pangan	Skor (0-100)	60,25	60,95	61,91	63,49	65,14	66,92	68,86
		S1.1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55
				2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,36	70,41	70,47	70,84	71,22	71,60	71,98
		1.2	Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat	1	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	79,82	80,30	80,78	81,26	81,74	82,22	82,70
				2	SPM Pemerintah Daerah	Persen	99,16	100	100	100	100	100	100
		1.3	Meningkatnya kemandirian desa dan kelestarian budaya	1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	10,85	10,61	10,21	9,79	9,21	8,77	8,40
				2	Persentase Desa Mandiri	Persen	48,33	68,33	81,67	100	95,24	96,83	98,41
				3	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Persen	13,37	9,07	39,02	56,17	70,87	72,23	73,87
		1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga	1	Indeks Ketimpangan Gender	Skor (0-1)	0,373	0,361	0,349	0,337	0,324	0,312	0,300
				2	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor (0-1)	61,03	61,69	62,35	63,88	64,22	64,98	65,74
MAKMUR													
2	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkelanjutan	Terciptanya ekonomi daerah yang inklusif dan adaptif		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	3,77-5,62	3,63-5,61	3,49-5,60	3,35-5,59	3,21-5,58	3,08-5,56
				2	Tingkat Inflasi	Persen	-0,30	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26
		2.1	Meningkatnya sektor ekonomi unggulan	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	Persen	13,53	13,58	13,62	13,67	13,71	13,75	13,80
				2	Persentase Kewirausahaan Daerah	Persen	5,80	5,91	6,00	6,13	6,33	6,59	6,88
				3	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum	Persen	1,41	1,43	1,44	1,46	1,47	1,49	1,5
				4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	46,47	46,58	46,59	46,61	46,8	46,95	47,1
		2.2	Meningkatnya keterhubungan dan daya saing ekonomi antarwilayah	1	Net Ekspor	Miliar Rupiah	5.541,90	5.869,58	6.197,27	6.524,95	6.852,63	7.180,32	7.508,00
				2	Indeks Konektifitas	Skor	1,39	1,40	1,41	1,41	1,42	1,43	1,43
		2.3	Meningkatnya penguatan struktur dan kapasitas ekonomi daerah	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	18,32	18,55	18,79	19,03	19,28	19,52	19,83
				2	Nilai Investasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	1.651	1.425-1.921	1.682-2.031	1.721 - 2.232	1.962 - 2.413	2.332 - 2.624	2.466 - 2.902
		Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor (0-100)	70,84	74,22	74,39	74,56	74,73	74,90	75,07



NO.	MISI	TUJUAN & SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
							2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		3.1	Meningkatnya kualitas dan ketahanan lingkungan hidup	1	Emisi Gas Rumah Kaca	(CO2eq Gg)	290,48	275,04	249,6	229,17	208,73	193,29	182,85
				2	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	28,15*	1,98	2,22	4,92	9,22	15,33	21,87
		3.2	Terwujudnya ketahanan bencana daerah	1	Indeks Risiko Bencana	Skor	145,28	137,73	128,19	119,25	111,469	103,688	96,907
TANGGUH													
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1	Indeks Pembangunan Manusia	Skor (0–100)	71,36	71,71	72,01	72,31	72,61	72,90	73,18
		4.1	Meningkatnya jenjang dan cakupan pendidikan penduduk	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,51	7,63	7,78	7,99	8,16	8,33
				2	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	11,79	11,85	11,89	12,03	12,07	12,11	12,15
		4.2	Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,08	72,19	72,39	72,58	72,77	72,97	73,16
				2	Angka Prevalensi Stunting	Persen	19,9	19,7	19,4	19,1	18,8	18,5	18,2
BERSAHABAT													
4	Mewujudkan birokrasi dan kepemimpinan daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif	Terbangunnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor (0–100)	77,16	78,84	79,24	79,64	80,05	80,45	80,85
		5.1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor (0–100)	67,77	68,01	68,40	68,83	69,32	69,79	70,24
				2	Indeks Pelayanan Publik	Skor (1–5)	3,70	3,85	3,92	3,99	4,06	4,13	4,20
				3	Indeks Integritas Nasional	Skor (0–100)	65,33	66,02	67,05	67,84	68,92	69,81	70,65
				4	Indeks Inovasi Daerah	Skor (0–100)	31,11	40,01	43,01	48,01	51,65	56,63	66,42
		5.2	Meningkatnya kapasitas dan tata kelola keuangan daerah	1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2	Kapasitas fiskal	Skor	1,457	1,474	1,491	1,518	1,541	1,564	1,587
		5.3	Meningkatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	1	Indeks Pemerintahan Digital	Skor (0–5)	N/A	N/A	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3

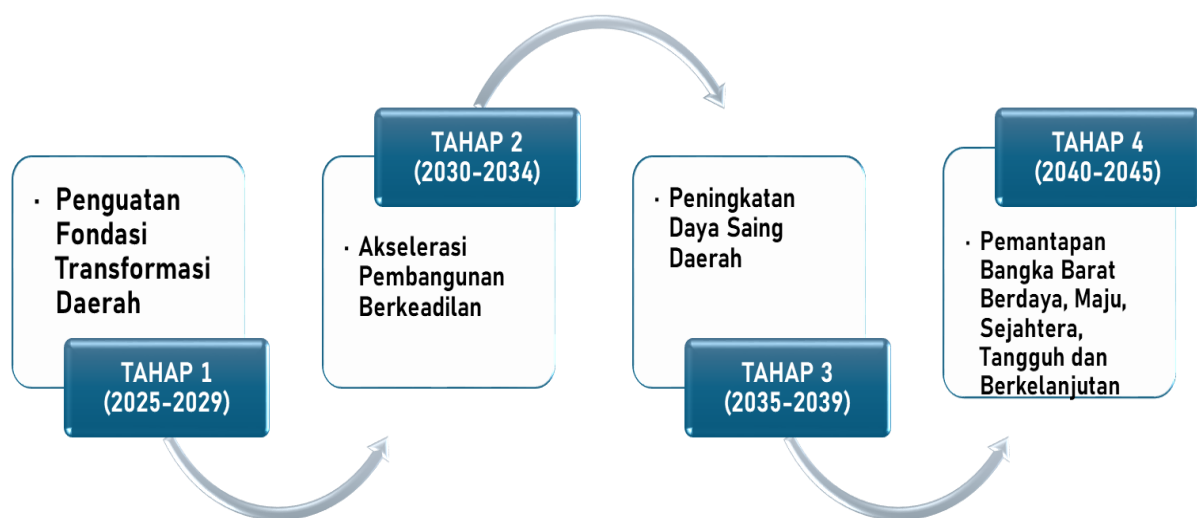
Sumber: hasil perumusan, olah data dan analisis oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025–2029

Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bangka Barat dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dari visi dan misi pembangunan daerah. Penyusunan strategi pembangunan difokuskan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal, pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan terencana, serta penetapan program-program prioritas yang responsif terhadap dinamika isu di tingkat lokal, regional, maupun global. Oleh karena itu, strategi pembangunan untuk periode 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat 2025–2045. Pentahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2045 sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 3
Pentahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2045



Sumber: diolah dari RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2025–2045

RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2045 menetapkan 13 arah pembangunan, yaitu: 1. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; 2. Produktivitas ekonomi; 3. Integrasi ekonomi domestik; 4. Perkotaan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 5. Stabilitas ekonomi daerah; 6. Perlindungan sosial yang adaptif; 7. Kesehatan masyarakat yang berkualitas; 8. Pendidikan berkualitas yang merata dan berdaya saing; 9. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; 10. Berkebudayaan maju; 11. Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; 12.

Resiliensi terhadap bencana daerah dan perubahan iklim; dan 13. Lingkungan hidup berkualitas.

Gambar 3. 4
Arah Kebijakan Pembangunan Periode 1 (Tahun 2025–2029)
RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2045

Penguatan Fondasi Transformasi Daerah	
Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	- Penataan regulasi dan pembangunan budaya hukum; - Penataan infrastruktur dasar dan standar SPBE - Penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan sistem manajemen SDM aparatur - Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dan keuangan publik
Mewujudkan Ekonomi yang Maju dan Pembangunan Berkeadilan	- Pembangunan kawasan industri - Pemetaan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif - Pemetaan dan perencanaan infrastruktur dan pengembangan aksesibilitas area wisata - Pengembangan kewirausahaan melalui kemudahan dan kesempatan berusaha - Penguatan produktivitas BUMD - Pembangunan SDM unggul dan produktif - Pemantapan arah pengembangan inovasi daerah serta menciptakan budaya kerja yang inovatif - Transformasi iklim investasi dan penanaman modal daerah - Pemerataan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan - Pembangunan akses layanan dasar pada wilayah perdesaan - Penataan tata kelola perpajakan daerah - Peningkatan produksi dan pengendalian ketersediaan barang - Menjaga stabilitas harga
Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	- Pemenuhan kebutuhan dasar: bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial - Pemerataan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan
Mewujudkan Transformasi dan Ketahanan Sosial-Budaya	- Pemenuhan sistem dan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan berkeadilan - Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat - Penyediaan sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berkualitas - Penyediaan akses pendidikan dini dan dasar yang setara dan inklusif, serta mendukung penguatan pendidikan menengah dan tinggi - Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga - Pemenuhan implementasi kebijakan terkait fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi perempuan, serta partisipasi kerja bagi perempuan dan laki-laki - Penguatan kelembagaan, regulasi, penetapan strategi kebudayaan dan pendampingan pemajuan kebudayaan
Mewujudkan Kabupaten yang Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan	- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pangan dan pertanian serta penguatan SDM pertanian - Pembangunan infrastruktur wilayah prioritas - Meletakkan fondasi serta menyusun strategi penurunan risiko bencana - Penyusunan Strategi dan Regulasi terkait perubahan iklim dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Penguatan kebijakan dan kelembagaan lingkungan hidup - Pengembangan pengolahan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy

Sumber: diolah dari RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2025–2045

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat pada periode pertama diarahkan untuk **Penguatan Fondasi Transformasi Daerah**. Arah kebijakan pembangunan pada tahap pertama (2025–2029) difokuskan pada:

1. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

Kebijakan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penataan regulasi dan pengembangan budaya hukum sebagai dasar keadilan sosial. Transformasi birokrasi dilakukan melalui penataan infrastruktur dasar dan penerapan Standar SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien. Penataan kelembagaan dan sistem manajemen SDM aparatur juga menjadi prioritas untuk menciptakan birokrasi yang proporsional, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah menekankan prinsip good and clean governance dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas



publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penguatan budaya kerja ASN yang dinamis, kolaboratif, dan berorientasi hasil guna menciptakan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Mewujudkan Ekonomi yang Maju dan Pembangunan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi difokuskan pada pengembangan kawasan industri strategis seperti Tanjung Ular dan Tanjung Kalian dengan dukungan infrastruktur dasar dan logistik. Pemerintah mendorong peningkatan daya tarik wisata melalui kolaborasi lintas sektor dan pemetaan aksesibilitas destinasi, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD dilaksanakan melalui kemudahan perizinan, insentif usaha, serta pembinaan kewirausahaan dan pelatihan vokasional. Transformasi iklim investasi juga menjadi perhatian melalui penataan tata kelola perpajakan daerah, penyediaan iklim usaha yang kondusif, serta pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Selain itu, pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan menumbuhkan budaya kerja yang inovatif melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

3. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Arah kebijakan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan melalui penguatan layanan kesejahteraan sosial dan subsidi bagi masyarakat miskin. Pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui penguatan infrastruktur, layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak dan produktif. Dukungan sosial juga diberikan melalui program berbasis komunitas untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Pemerintah berkomitmen mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dan inklusif dalam pembangunan.

4. Mewujudkan Transformasi dan Ketahanan Sosial-Budaya

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan sistem pelayanan kesehatan primer yang inklusif dan adil, melalui perbaikan fasilitas, aksesibilitas, dan standar pelayanan. Sistem pendidikan dikembangkan agar lebih inovatif, inklusif, dan berkualitas, dengan memperluas akses pendidikan

dini, dasar, hingga menengah dan tinggi. Ketahanan keluarga diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan peran perempuan, serta penciptaan kesempatan kerja yang setara. Kebijakan juga mendorong penghapusan diskriminasi gender dan menjamin partisipasi laki-laki dan perempuan secara adil dalam dunia kerja dan layanan publik. Di sisi budaya, dilakukan penguatan kelembagaan, strategi kebudayaan, dan pendampingan pemajuan kebudayaan untuk menjaga warisan budaya dan mendorong kreativitas masyarakat.

5. Mewujudkan Kabupaten yang Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan

Kebijakan lingkungan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pangan dan pertanian serta peningkatan kualitas SDM pertanian untuk mencapai kemandirian pangan. Pembangunan infrastruktur wilayah prioritas difokuskan pada penyediaan listrik, air baku, dan sistem perpipaan guna mengatasi kesenjangan pelayanan dasar. Penurunan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui penyusunan strategi mitigasi, kajian risiko, dan regulasi pengendalian emisi Gas Rumah Kaca. Penguatan kelembagaan dan regulasi lingkungan dilaksanakan untuk menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dan menghindari kerusakan lingkungan. Konsep circular economy diterapkan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mulai dari hulu hingga hilir, guna menciptakan sistem pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan.

Gambar 3. 5
Pentahapan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026-2030



Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

Dengan memperhatikan tema pembangunan dan arah kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 serta Visi Misi Kepala



Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029, tahapan pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026–2030 disusun seperti ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut ini.

Tabel 3. 2
Tahapan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 – 2030

Tahap I (2026)	“Penguatan fondasi transformasi daerah dalam pembangunan yang merata dan sejahtera”	Pembangunan tahun pertama difokuskan pada penguatan fondasi layanan dasar, ketahanan sosial, dan pembangunan desa sebagai basis pemerataan kesejahteraan. Upaya diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, akses kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ketahanan budaya, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas desa dan kawasan.
Tahap II (2027)	“Peningkatan transformasi struktural ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan”	Pembangunan tahun kedua menekankan transformasi struktural di sektor ekonomi daerah, sosial, dan birokrasi. Arah kebijakan diarahkan pada penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata), peningkatan kapasitas usaha mikro dan koperasi, reformasi birokrasi berbasis kompetensi, serta perluasan cakupan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Tahap III (2028)	“Penguatan capaian transformasi pembangunan yang terintegrasi”	Pembangunan tahun ketiga berfokus pada konsolidasi hasil transformasi secara terintegrasi lintas sektor, termasuk penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan ketahanan bencana. Digitalisasi tata kelola pemerintahan serta pengembangan ekosistem data dan arsip publik diperluas sebagai penopang pelayanan publik dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah.
Tahap IV (2029)	“Percepatan pembangunan menuju daerah yang Bermartabat (Berkeadilan, Makmur, Tangguh, dan Bersahabat)”	Tahun keempat menjadi fase percepatan berbagai agenda prioritas pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan investasi daerah, serta akselerasi pembangunan kawasan prioritas dan layanan publik digital menjadi penopang menuju capaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Tahap V (2030)	“Terwujudnya Kabupaten Bangka Barat yang Bermartabat (Berkeadilan, Makmur, Tangguh, dan Bersahabat)”	Tahun 2030 merupakan puncak dari keseluruhan arah pembangunan lima tahunan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terstandar, SDM yang berdaya saing, ketahanan sosial-budaya, penguatan ekonomi, dan lingkungan sebagai perwujudan Kabupaten Bangka Barat yang Bermartabat.

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

Operasionalisasi perumusan Visi–Misi, Tujuan–Sasaran diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Penyusunan dokumen ini mencakup rencana pembangunan untuk periode 2025–2029. Rincian arah kebijakan dan strategi tersebut disusun sebagai berikut.



Tabel 3. 3
Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
"BANGKA BARAT BERMARTABAT" (Berkeadilan, Makmur, Tangguh, Bersahabat)							
Misi 1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya							
T1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	S1.1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	1	Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja.	a	Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja formal lulusan pendidikan menengah dan tinggi melalui perluasan akses informasi pasar kerja, pemagangan terstruktur, dan kemitraan strategis antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.
						b	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Non Formal melalui pelatihan berbasis sektor prioritas serta sertifikasi keahlian untuk mendukung kesiapan memasuki pasar kerja.
						c	Memperluas penempatan tenaga kerja yang berkeadilan dan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja.
		S1.2	Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat	1	Peningkatan mutu, standar dan akses layanan dasar masyarakat serta perlindungan sosial.	a	Pembaruan database penerima manfaat secara berkala dalam menjamin validitas sasaran layanan dan efektivitas intervensi.
						b	Integrasi sistem data antar-instansi dan antar-program layanan
						c	Perluasan cakupan dan akses layanan pada kelompok rentan dan wilayah yang belum terjangkau
						d	Peningkatan mutu layanan dasar melalui optimalisasi infrastruktur, pemenuhan standar minimal sarana-prasarana dan SDM.



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
		S1.3	Meningkatnya kemandirian desa dan kelestarian budaya	1	Penguatan tata pemerintahan desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.		serta standardisasi prosedur layanan.
						e	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra strategis dalam mewujudkan sinergi yang lebih efektif.
						a	Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Kemandirian.
						b	Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan pemerintahan desa.
						c	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas aparatur, penataan wilayah yang terarah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta meningkatkan kolaborasi dengan APDESI.
						d	Mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pendampingan intensif dalam pengembangan usaha masyarakat di pedesaan.
				2	Peningkatan pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah.	a	Penguatan kelembagaan dan regulasi pelestarian kebudayaan
						b	Memastikan perlindungan atas kebudayaan daerah khususnya objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
						c	Melakukan pengembangan atas kebudayaan daerah dan memberikan bantuan kepada pelaku kebudayaan.
						d	Mendorong pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
		S1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga	1	Penguatan peran keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.		pelaksanaan pembangunan.
						e	Penguatan pembinaan kebudayaan khususnya dengan penerapan kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan.
						a	Meningkatkan ketahanan dan fungsi keluarga serta pemberdayaan kemandirian ekonomi keluarga.
						b	Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
						c	Penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
						d	Memastikan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus bagi anak rentan dan korban kekerasan.
Misi 2. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkelanjutan							
T2	Terciptanya ekonomi daerah yang inklusif dan adaptif.	S2.1	Meningkatnya sektor ekonomi unggulan.	1	Penguatan sektor ekonomi unggulan berbasis potensi lokal.	a	Meningkatkan produksi dan ketahanan sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan SDM Petani dan perlindungan terhadap bencana pertanian
						b	Meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku industri kecil.
						c	Mendorong Pembangunan Kawasan Industri
				2	Pengembangan kewirausahaan melalui kemudahan dan kesempatan berusaha.	a	Mendorong pertumbuhan pelaku usaha dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dan desain kemasan produk
						b	Mempermudah proses perizinan melalui sistem pelayanan terpadu
						c	Memperkuat kelembagaan koperasi sebagai wadah usaha bersama
						d	Memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
				3	Mendorong penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang menginap		bagi pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi inovasi dan produk lokal
						a	Mengembangkan jejaring integratif antara destinasi wisata desa dan destinasi wisata unggulan daerah
						b	Mengembangkan infrastruktur yang mendukung daya tarik destinasi wisata
						c	Penguatan kapasitas SDM pariwisata dalam pengembangan produk wisata dan pemasaran digital yang berorientasi pada peningkatan kunjungan
						d	Membangun sistem kalender event pariwisata yang partisipatif dan terintegrasi melalui kemitraan dengan pelaku pariwisata
	S2.2	Meningkatnya keterhubungan dan daya saing ekonomi antarwilayah	1	Meningkatkan konektivitas infrastruktur dan sistem logistik antarwilayah untuk memperlancar arus barang dan jasa sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor daerah	a	Memperbaiki kualitas jalan produksi dan distribusi di sentra usaha lokal	
					b	Merevitalisasi pasar rakyat dan terminal logistik	
					c	Menyediakan sarana distribusi yang terintegrasi antarkawasan,	
					d	Menyelenggarakan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah ke pasar nasional dan ekspor, termasuk fasilitasi pendaftaran merek dan perluasan akses perdagangan digital	
	S2.3	Meningkatnya penguatan struktur dan kapasitas ekonomi daerah	1	Transformasi iklim investasi dan penanaman modal daerah iklim usaha yang kondusif.	a	Menjamin kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan untuk investasi prioritas melalui percepatan penetapan RDTR, pengembangan kawasan strategis, dan penyelarasan pemanfaatan ruang lintas sektor	



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
						b	Menyederhanakan proses perizinan dan penguatan pelayanan investasi melalui digitalisasi layanan, pendampingan OSS-RBA, dan reformasi regulasi
						c	Memperkuat promosi dan fasilitasi investasi melalui penyusunan profil peluang investasi daerah, penyelenggaraan forum investasi, dan pemanfaatan potensi lokal.
						d	Mendorong peningkatan inklusi dan akses keuangan masyarakat melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur layanan keuangan formal serta penguatan literasi keuangan.
T3	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup	S3.1	Meningkatnya kualitas dan ketahanan lingkungan hidup	1	Penguatan tata kelola lingkungan untuk ekonomi sirkular dan dekarbonisasi pembangunan	a	Integrasi prinsip pembangunan rendah karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
						b	Penguatan kelembagaan dan instrumen pengendalian lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung.
						c	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir berbasis masyarakat dan kemitraan, dengan integrasi sistem ke dalam rantai ekonomi sirkular.
		S3.2	Terwujudnya ketahanan bencana daerah	1	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana secara terintegrasi	a	Penguatan sistem peringatan dini kebencanaan yang responsif dan adaptif
						b	Penguatan struktur kelembagaan dan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat, termasuk skema tanggap darurat berbasis komunitas/ Masyarakat



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
						c	Penguatan mitigasi risiko bencana melalui dukungan infrastruktur pengendalian risiko
Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi							
T4	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	S4.1	Meningkatnya jenjang dan cakupan pendidikan penduduk	1	Penyediaan sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berkualitas	a	Penyediaan akses pendidikan dini dan dasar yang setara dan inklusif, serta mendukung penguatan pendidikan menengah dan tinggi, termasuk dukungan beasiswa bagi kelompok rentan.
						b	Peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan melalui penguatan kurikulum, kompetensi pendidik, dan sistem penjaminan mutu
						c	Penguatan tata kelola dan kemitraan pendidikan dalam mendukung keberlanjutan layanan pendidikan
						d	Pengembangan pendidikan nonformal melalui pendekatan kesetaraan dan pemberdayaan komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk	S4.2	Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk	1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pendekatan preventif-promotif dan kuratif-rehabilitatif secara berkesinambungan.	a	Peningkatan Edukasi PHBS dan Pembinaan Perilaku Hidup Sehat Berbasis Komunitas
						b	Penguatan Posyandu dan Kader Kesehatan sebagai Garda Terdepan Pelayanan Dasar
						c	Intervensi Gizi Terpadu untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Gizi Balita
						d	Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular melalui Deteksi Dini dan Skrining Berkala
						e	Pemenuhan layanan kesehatan primer yang berkualitas, berkeadilan, dan terintegrasi dalam sistem rujukan



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
						f	Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Misi 4. Mewujudkan birokrasi dan kepemimpinan daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif							
T5	Terbangunnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	S5.1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1	Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta budaya kerja inovatif.	a	Penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan sistem manajemen SDM aparatur
						b	Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintahan daerah
						c	Transformasi pelayanan publik yang responsif dan inklusif
						d	Pengembangan budaya kerja inovatif dan kepemimpinan kolaboratif
						e	Penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan
		S5.2	Meningkatnya kapasitas dan tata kelola keuangan daerah	1	Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja yang efisien, transparan, dan akuntabel	a	Penataan tata kelola perpajakan dan Retribusi daerah
						b	Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						c	Optimalisasi Pembiayaan Daerah Alternatif yang akuntabel dan terukur
		S5.3	Meningkatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	1	Peningkatan sistem pemerintahan digital	a	Pengembangan layanan dan sistem pemerintahan digital yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses.
						b	Penguatan keamanan informasi serta tata kelola sistem elektronik yang interoperabel, efektif, dan berkelanjutan

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

3.2.2 Arah Pembangunan dan Strategi Pengembangan Wilayah

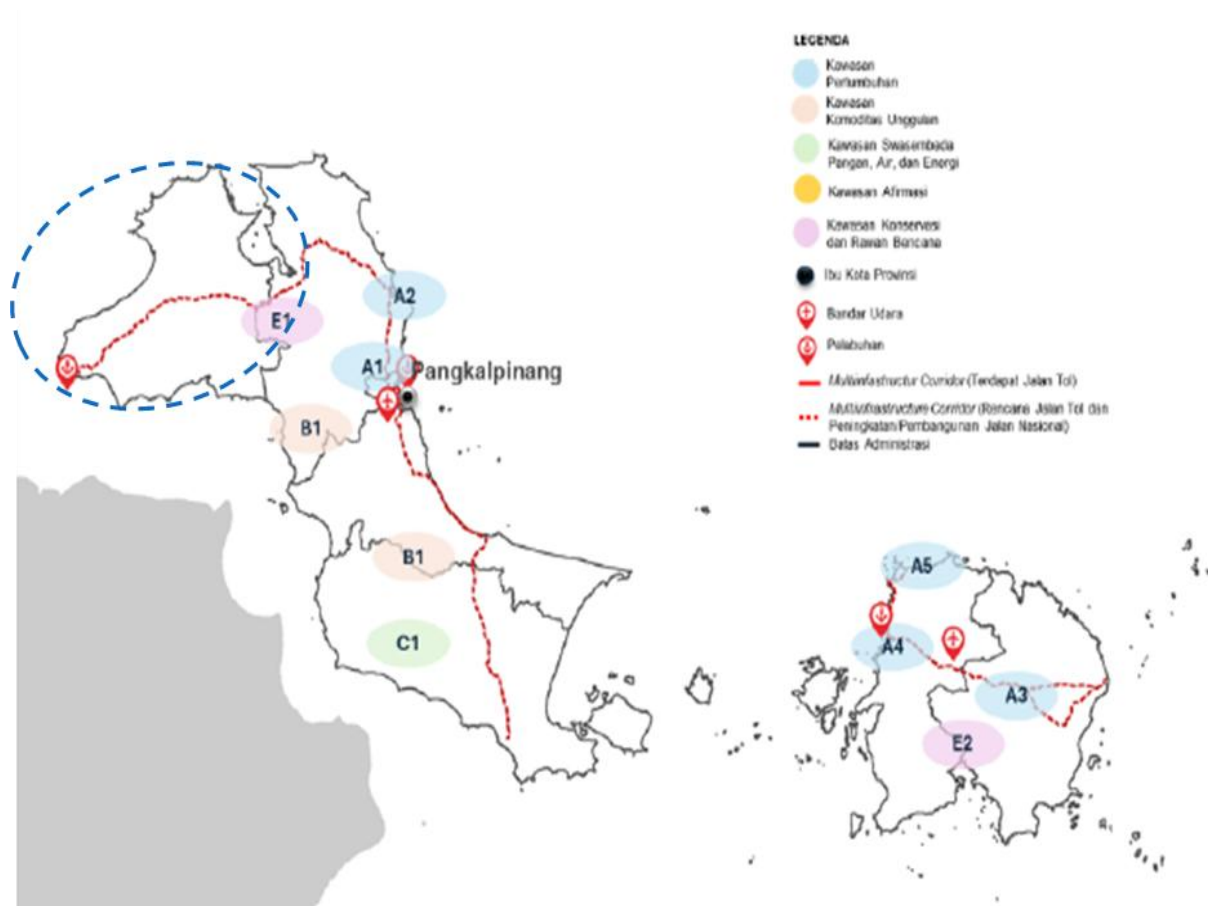
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV) pada bagian arah pembangunan kewilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat merupakan bagian dari Kawasan Komoditas Unggulan dan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana. Hal

ini karena Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah dengan wilayah potensi komoditas unggulan timah, bauksit, dan lada. Kabupaten Bangka Barat juga termasuk Kawasan Konservasi/Rawan Bencana dikarenakan Kecamatan Kelapa di Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Maras yang berada di Kabupaten Bangka.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi antara aspek pertahanan wilayah, ketahanan pangan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat/TNI Angkatan Darat merencanakan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat dengan luas lahan $\pm$ 100 hektar. Pembangunan ini diarahkan tidak hanya sebagai pusat kekuatan pertahanan wilayah, melainkan juga sebagai kawasan percontohan pembangunan terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian serta kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Gambar 3. 6

Arah Pembangunan Kewilayahan Kota/ Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV)

Arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Bangka Barat diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044. Fokus pengembangannya berada pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Di Kabupaten Bangka Barat, KSP tersebut mencakup kawasan dengan kepentingan utama pada pertumbuhan ekonomi, yaitu: a) Kawasan Industri Tanjung Ular dan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat; dan b) Sebagian Kawasan Pertanian Buleng di Kabupaten Bangka Barat.

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengembangan kawasan Kabupaten Bangka Barat juga didasarkan pada analisis sektor-sektor potensial dan komoditas yang bernilai tambah tinggi, yaitu industri logam dasar (timah dan pasir kuarsa) dan sektor perkebunan (lada dan sawit) yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan. Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat selaras dengan Tema pembangunan kewilayahan Kabupaten Bangka Barat dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu "Gerbang Barat Bangka Belitung yang mengedepankan industri, agrikultur, pengembangan budaya dan Geo Haritage" sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3. 7
Tema Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 - 2045

"Gerbang barat Bangka Belitung yang mengedepankan industri, agrikultur, pengembangan budaya dan geo heritage"



Sumber: RPJMD Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029, 2025



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun lokasi prioritas dan bentuk intervensi kebijakan kewilayahan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini. Salah satu fokus utama intervensi terletak pada peningkatan sektor *eco-tourism*, budaya, *heritage*, serta pusat pendidikan dan religi. Intervensi yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, hingga pengembangan produk berbasis keunikan lokal yang memenuhi standar nasional dan internasional. Pemerintah juga mendorong pelestarian warisan budaya serta promosi kesenian daerah melalui kewirausahaan budaya dan ekonomi kreatif. Selain itu, aspek sosial keagamaan pun disentuh melalui pemberian insentif bagi marbot masjid, fasilitasi pendidikan pesantren, serta dialog antaragama guna memperkuat kerukunan masyarakat.

Tabel 3. 4
Lokasi Prioritas dan Intervensi Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Wilayah Kabupaten Bangka Barat

No	Lokasi Prioritas	Intervensi Kebijakan Kewilayahan
1	Peningkatan <i>eco-tourism</i> , budaya dan <i>heritage</i> , serta pusat pendidikan dan religi • Bangka Barat	1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola destinasi pariwisata serta pengenalan pasar wisatawan sesuai potensi pariwisata lokal 2) Peningkatan kualitas SDM pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan peningkatan keragaman produk pariwisata di Destinasi Pariwisata 3) Pengembangan produk pariwisata berkualitas berbasis keunikan dan keunggulan lokal serta penerapan standar nasional dan atau internasional dalam pengelolaan pariwisata di Destinasi Pariwisata 4) Pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 5) Pembangunan karakter melalui budaya lokal dan jalinan kemitraan 6) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya lokal dan tradisi masyarakat 7) Mempromosikan kesenian daerah melalui kewirausahaan budaya dan mendukung produk-produk berbasis seni budaya 8) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, atraksi, dan layanan pariwisata sesuai standar nasional serta penguatan promosi pariwisata berbasis media sosial 9) Penciptaan ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya lokal 10) Penguatan sosial masyarakat dengan memberikan insentif marbot masjid



No	Lokasi Prioritas	Intervensi Kebijakan Kewilayahan
		11) Fasilitasi pendidikan pesantren 12) Menyelenggarakan forum dialog antar agama untuk memperkuat kerukunan dan toleransi di masyarakat
2	Pengembangan industri, agrikultur, dan agroindustri • Bangka Barat	1) Penguatan kerja sama antara industri dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengembangan industri daerah 2) Peningkatan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi) untuk mendukung aktivitas industri 3) Membangun sistem usaha pertanian terintegrasi 4) Menciptakan pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mendukung pengembangan dan penerapan hasil riset
4	Pengembangan agrikultur dan pertanian tanaman pangan • Bangka Barat	1) Pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan pemberian bantuan teknis untuk meningkatkan produksi pangan 2) Diversifikasi pangan lokal dalam rangka penguatan pangan

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029, 2025

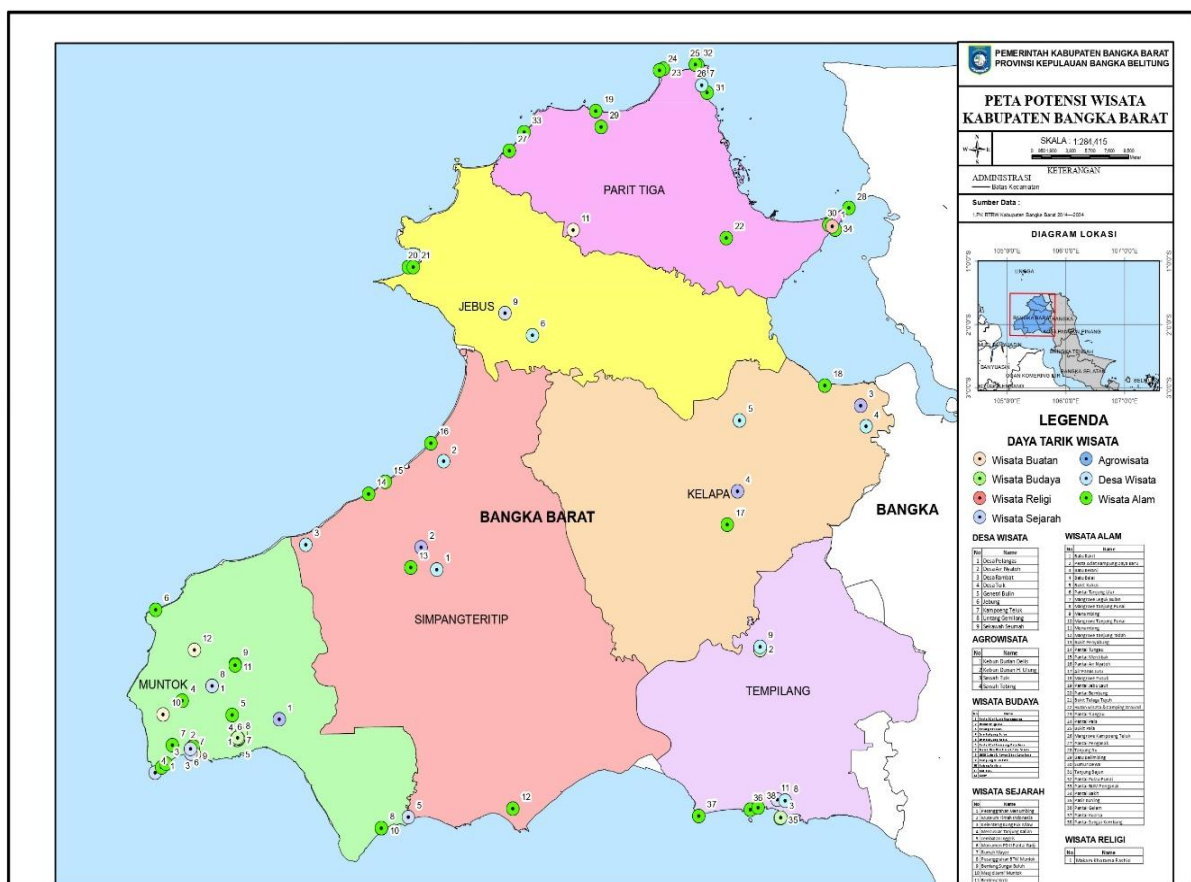
Selanjutnya, intervensi diarahkan pada pengembangan sektor industri, agrikultur, dan agroindustri. Pemerintah Provinsi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara industri, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat basis industri daerah. Dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih juga menjadi bagian penting untuk mendorong aktivitas industri yang lebih efisien. Dalam sektor pertanian, pemerintah mendorong sistem usaha pertanian terintegrasi yang dilengkapi dengan pusat inovasi dan inkubator bisnis. Di sisi lain, pengembangan pertanian tanaman pangan diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelatihan petani, bantuan teknis, serta diversifikasi pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya dan beragam, mencakup enam kategori utama daya tarik wisata, yaitu wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, agrowisata, serta desa wisata. Sebaran destinasi wisata ini mencakup seluruh kecamatan, menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal.

Berdasarkan peta dan inventarisasi destinasi wisata, Kecamatan Mentok merupakan pusat utama wisata sejarah, dengan keberadaan berbagai bangunan peninggalan kolonial, serta situs budaya dan keagamaan yang memiliki nilai historis tinggi. Selain itu, tradisi masyarakat Tionghoa dan Melayu yang masih dilestarikan menjadikan kawasan ini sebagai simpul

penting dalam pengembangan wisata budaya. Selanjutnya, Kecamatan Simpang Teritip dan Parittiga memiliki kekayaan budaya lokal yang tercermin dari beragam ritual adat dan tradisi masyarakat, seperti Sembahyang Rebut, Rebo Kasan, Sedekah Kampung, dan berbagai pesta adat lainnya. Kecamatan Kelapa menunjukkan potensi kuat pada sektor agrowisata, khususnya sawah dan kebun durian, yang dipadukan dengan kekayaan budaya seperti Api Likur dan Sedekah Kampung. Sementara itu, Kecamatan Tempilang dan Jebus lebih menonjol dalam aspek wisata alam, dengan pantai-pantai eksotis seperti, serta kawasan bukit dan mangrove yang memiliki daya tarik ekowisata.

Gambar 3. 8
Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka Barat

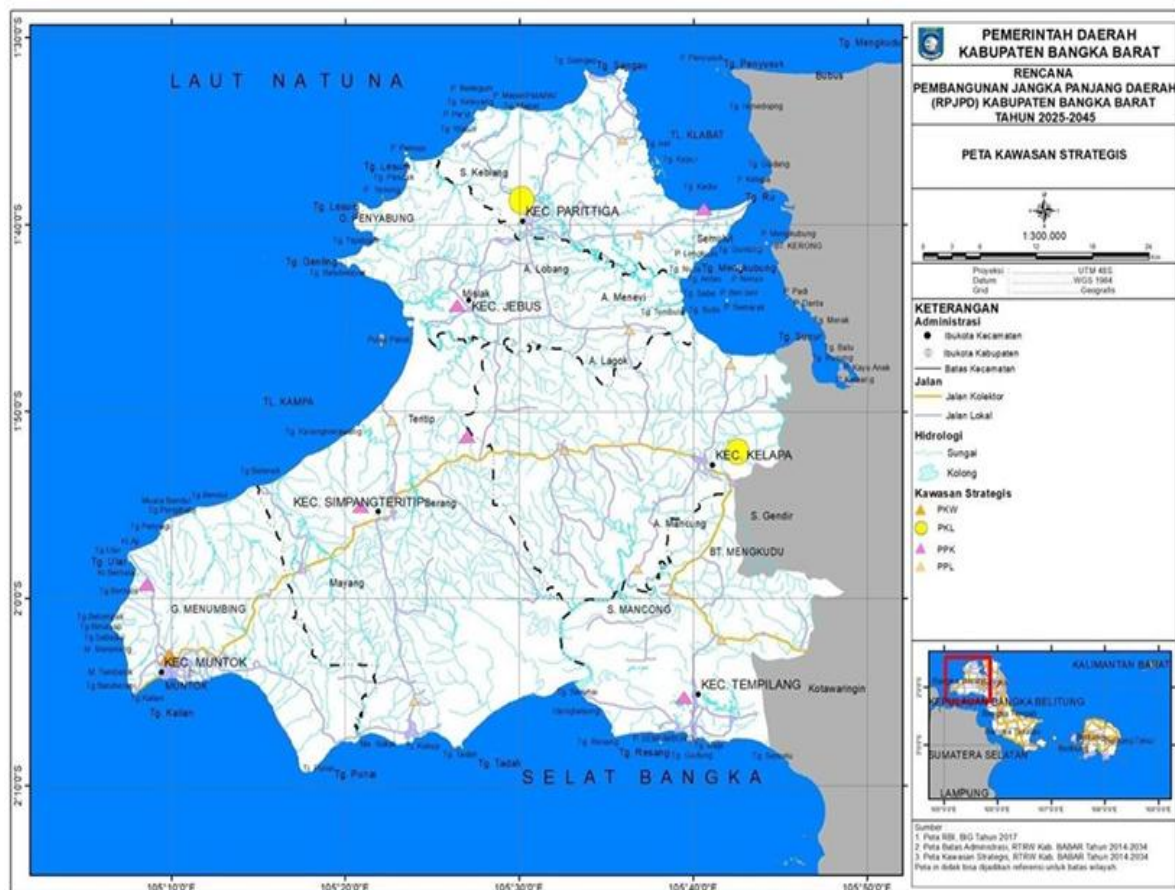


Sumber: Geospasial, 2025 (diolah); Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2024

Ketersediaan desa wisata di hampir seluruh kecamatan menunjukkan potensi pemberdayaan masyarakat yang besar. Desa-desanya seperti Pelangas, Tuik, Kampoeng Teluk, dan Lintang Gemilang telah mulai mengembangkan daya tarik berbasis kearifan lokal. Selain itu, kehadiran agrowisata seperti kebun durian dan wisata buatan seperti taman tematik, menunjukkan diversifikasi sektor pariwisata yang dapat memperkuat daya saing daerah.

Kabupaten Bangka Barat menetapkan sejumlah kawasan strategis dalam kerangka pembangunan jangka menengah sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pelestarian sosial budaya, serta penguatan daya dukung lingkungan. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan keberadaan wilayah budidaya perkebunan yang tersebar di Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi dominan pada sektor kelapa sawit, lada, dan perkebunan rakyat lainnya, yang mendukung perekonomian berbasis agribisnis dan menjadi andalan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.

Gambar 3. 9
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Selain itu, kawasan perkotaan Mentok yang terbagi atas Mentok Lama dan Mentok Baru menjadi simpul utama pusat kegiatan wilayah (PKW) dan memainkan peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan kebudayaan. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Mentok dikembangkan sebagai zona industri baru yang terintegrasi dengan fungsi logistik dan pelabuhan, mendukung konektivitas regional dan nasional. Tidak jauh dari sana, kawasan Tanjung Kalian memiliki



peran multifungsi yang mencakup pelabuhan penyeberangan, kawasan industri, serta destinasi wisata bahari, menjadikannya kawasan strategis dengan nilai ekonomi tinggi.

Untuk kepentingan sosial dan budaya, ditetapkan kawasan konservasi budaya Mentok Lama yang berada di jantung Kota Mentok. Kawasan ini memiliki nilai historis yang tinggi sebagai bekas pusat kolonial dan multikultural, serta mengandung potensi pengembangan wisata budaya dan pusat kajian ilmu pengetahuan. Pengembangan kawasan ini diarahkan pada pelestarian bangunan bersejarah, penguatan identitas lokal, dan integrasi dengan sistem pariwisata daerah.

Sementara itu, dalam aspek lingkungan hidup, kawasan strategis yang ditetapkan mencakup kawasan-kawasan kritis yang tersebar di Kecamatan Mentok, Jebus, Parittiga, dan Tempilang. Kawasan ini umumnya berada di sekitar kulong (danau bekas tambang) yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas ekosistem. Pengelolaan kawasan kritis ini menjadi penting dalam konteks pemulihan daya dukung lingkungan dan mitigasi risiko bencana ekologis, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan ekowisata dan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penetapan kawasan strategis di Kabupaten Bangka Barat mencerminkan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan berbasis potensi wilayah, di mana dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dikelola secara terpadu untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Sebagai bentuk konkret dari implementasi visi - misi, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan sejumlah program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Program-program ini diturunkan langsung dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Program ini dirumuskan sebagai respons terhadap tantangan dan potensi strategis daerah, serta sebagai komitmen untuk menghadirkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Melalui program prioritas inilah arah kebijakan daerah diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional dan terukur, sekaligus menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029. Keterkaitan setiap Program Priotas Pembangunan Daerah



dijelaskan sebagai berikut dan disusun secara sistematis pada tabel selanjutnya.

1. Program Cipta Kerja

Program Cipta Kerja merupakan program prioritas pembangunan daerah yang secara langsung mendukung pencapaian Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya, khususnya pada Tujuan 1, yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam kerangka ini, Program Cipta Kerja berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran, yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program ini diarahkan untuk mendukung Sasaran S1.1: Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, yang diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu, Program Cipta Kerja difokuskan pada upaya memperluas kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran, sekaligus mendorong partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian daerah. Secara operasional, program ini mendapatkan dukungan dari dua urusan pemerintahan terkait. Pertama, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang meliputi kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial. Kedua, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkontribusi melalui pengembangan infrastruktur padat karya dan proyek strategis yang menyerap tenaga kerja lokal. Sinergi antara kedua urusan ini memperkuat efektivitas Program Cipta Kerja dalam meningkatkan serapan tenaga kerja dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan yang layak.

2. Program Perlindungan untuk Semua

Program Perlindungan untuk Semua merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mendukung pencapaian Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya, khususnya pada Tujuan 1, yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Program ini berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga, melalui penyediaan layanan dasar yang menyeluruh, adil, dan merata, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan (rasio Gini), dan peningkatan ketahanan pangan.

Program ini secara khusus diarahkan untuk mendukung Sasaran S1.2: Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Dasar Masyarakat, yang diukur melalui indikator rumah tangga dengan akses hunian layak dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah. Melalui pendekatan lintas



sektor, program ini menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, bantuan sosial, serta layanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Dengan pendekatan holistik, Program Perlindungan untuk Semua menjadi fondasi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat jaring pengaman sosial, dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warga Bangka Barat.

3. Program Desaku Mandiri

Program Desaku Mandiri merupakan program prioritas yang dirancang untuk memperkuat pondasi sosial dan budaya masyarakat pedesaan, sejalan dengan pencapaian Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya, khususnya pada Tujuan 1, yakni Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Program ini menitikberatkan pada kemandirian desa sebagai basis pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berbasis potensi lokal. Secara khusus, Program Desaku Mandiri diarahkan untuk mendukung Sasaran S1.3: Meningkatnya kemandirian desa dan kelestarian budaya, yang diukur melalui indikator: prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (kkal) dan persentase desa mandiri. Melalui penguatan ketahanan pangan lokal, pemberdayaan kelembagaan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketangguhan sosial masyarakat desa dan penciptaan desa-desa yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

4. Program Budaya Berdaya

Program Budaya Berdaya merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya masyarakat Bangka Barat. Program ini mendukung secara langsung pencapaian Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya, khususnya pada Tujuan 1, yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks ini, pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal bukan hanya sebagai upaya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal. Program ini difokuskan untuk mencapai Sasaran S1.3: Meningkatnya kemandirian desa dan kelestarian budaya, dengan indikator utama berupa Persentase Pelestarian Kebudayaan. Artinya, program ini bertujuan mendorong penguatan jati diri masyarakat melalui pelestarian budaya tradisional,



revitalisasi nilai-nilai luhur, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Program ini juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membuka ruang partisipasi budaya, mendukung kegiatan seni, dan mendorong generasi muda agar mengenal serta mencintai warisan budaya daerahnya.

5. Program Perempuan Bangkit, Keluarga Sejahtera

Program Perempuan Bangkit, Keluarga Sejahtera merupakan program prioritas pembangunan daerah yang secara strategis mendukung pencapaian Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya, khususnya pada Tujuan 1, yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Program ini difokuskan pada peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan serta penguatan fondasi keluarga sebagai unit sosial dasar yang tangguh, inklusif, dan berdaya.

Program ini selaras dengan Sasaran S1.4: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pembangunan Keluarga, yang mencerminkan pentingnya perempuan sebagai aktor pembangunan dan keluarga sebagai pilar ketahanan sosial. Melalui program ini, pemerintah daerah mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguatan peran keluarga dalam mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda.

Capaian sasaran ini diperkuat oleh sejumlah program pendukung yang dijalankan secara terintegrasi melalui Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berperan sebagai motor penggerak utama dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Dengan pendekatan holistik yang menyentuh aspek perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan sistem pendukung perempuan dan anak, Program Perempuan Bangkit, Keluarga Sejahtera menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat Bangka Barat yang adil gender, inklusif, dan bermartabat.

6. Program Ekonomi Juara

Program Ekonomi Juara merupakan program prioritas pembangunan daerah yang menjadi motor utama dalam mewujudkan Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan 2: Terciptanya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Adaptif. Fokus utama program ini adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan yang berbasis pada potensi lokal, terutama di bidang pertanian, kelautan-perikanan, dan industri



pengolahan, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata. Program ini secara khusus diarahkan untuk mendukung Sasaran S2.1: Meningkatnya Sektor Ekonomi Unggulan, dengan indikator utama berupa rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian terhadap total PDRB daerah dan rasio PDRB industri pengolahan. Artinya, keberhasilan program ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi Bangka Barat, yang mencerminkan kemandirian pangan, keberlanjutan sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

7. Program Wirausaha Naik Kelas

Program Wirausaha Naik Kelas merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan wirausaha lokal yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Program ini secara langsung mendukung pencapaian Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya pada Tujuan 2: Terciptanya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Adaptif. Melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan, program ini bertujuan memperluas basis pelaku ekonomi produktif dan mendorong transformasi sektor informal menjadi formal (memiliki izin usaha). Program ini difokuskan untuk mencapai Sasaran S2.1: Meningkatnya Sektor Ekonomi Unggulan, dengan indikator utama berupa Rasio Kewirausahaan Daerah. Artinya, keberhasilan program ditandai dengan meningkatnya jumlah wirausaha aktif dan meningkatnya produktivitas dan skala usaha mikro.

8. Program Ayo Ke Bangka Barat

Program Ayo ke Bangka Barat merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Program ini mendukung langsung pencapaian Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 2: Terciptanya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Adaptif. Dengan pendekatan promosi destinasi, pengembangan daya tarik wisata, serta pelibatan masyarakat lokal, program ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi kearifan lokal dan budaya daerah. Program ini secara spesifik diarahkan untuk mencapai Sasaran S2.1: Meningkatnya Sektor Ekonomi Unggulan, dengan indikator Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makan dan Minum. Artinya, keberhasilan program diukur melalui peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan turunan ekonominya—terutama perhotelan, restoran, kuliner lokal, serta usaha jasa wisata—dalam struktur PDRB daerah. Melalui



peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan ekosistem pariwisata yang berdaya saing, program ini berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

9. Program Unggul Bersama Produk Daerah

Program Unggul Bersama Produk Daerah merupakan program prioritas yang mendukung penguatan konektivitas ekonomi dan daya saing produk lokal, sejalan dengan Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta secara langsung menunjang pencapaian Tujuan 2: Terciptanya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Adaptif. Program ini difokuskan untuk membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk unggulan Bangka Barat, baik di dalam maupun luar daerah, serta memperkuat jejaring distribusi dan infrastruktur pendukung perdagangan antarwilayah. Program ini diarahkan secara strategis untuk mendukung Sasaran S2.2: Meningkatnya Keterhubungan dan Daya Saing Ekonomi Antarwilayah, dengan indikator utama Net Ekspor, yang mencerminkan selisih antara nilai ekspor dan impor produk daerah. Tujuannya adalah menjadikan Bangka Barat sebagai daerah dengan kemampuan ekspor bersih yang meningkat melalui optimalisasi potensi sektor unggulan seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri rumah tangga berbasis lokal.

10. Program Infrastruktur Berkeadilan

Program Infrastruktur Berkeadilan merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur lintas wilayah, sebagai upaya strategis dalam mendukung Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Program ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 2: Terciptanya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Adaptif, melalui peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan keterhubungan antarwilayah sebagai prasyarat utama pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara spesifik, program ini diarahkan untuk mencapai Sasaran S2.2: Meningkatnya Keterhubungan dan Daya Saing Ekonomi Antarwilayah, yang diukur melalui indikator Indeks Konektivitas. Indeks ini mencerminkan kualitas dan sebaran infrastruktur penghubung antarwilayah seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan infrastruktur logistik, yang menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, mobilitas tenaga kerja, serta mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di wilayah yang sebelumnya tertinggal.



11. Program Mari Berinvestasi

Program Mari Berinvestasi merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk memperkuat struktur dan kapasitas ekonomi melalui peningkatan investasi yang berkualitas, produktif, dan berkelanjutan. Program ini berperan penting dalam mendukung Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendukung langsung pencapaian Tujuan 2: Terciptanya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Adaptif. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan proaktif, program ini mendorong masuknya modal baru ke berbagai sektor strategis daerah. Program ini secara khusus diarahkan untuk mencapai Sasaran S2.3: Meningkatnya Penguatan Struktur dan Kapasitas Ekonomi Daerah, yang diukur melalui indikator Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) dan Nilai Investasi Penanaman Modal. Indikator ini mencerminkan peningkatan investasi pada aset tetap seperti bangunan, mesin, infrastruktur, dan sarana produksi lainnya, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja.

12. Program Alam Lestari

Program Alam Lestari merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan ketahanan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Program ini berperan penting dalam mendukung Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Dengan menempatkan kelestarian alam sebagai pilar pembangunan, program ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengorbankan kualitas lingkungan. Fokus utama dari program ini adalah mencapai Sasaran S4.1: Meningkatnya Kualitas dan Ketahanan Lingkungan Hidup, yang diukur melalui indikator Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam satuan CO₂eq (Gg). Penurunan emisi GRK menjadi tolok ukur penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim, memperkuat sistem ekologis, dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

13. Program Bersih Bergerak

Program Bersih Bergerak merupakan program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, sejalan dengan Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Program ini juga secara langsung



mendukung Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, dengan fokus pada pengelolaan sampah sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas lingkungan di era urbanisasi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Program ini difokuskan untuk mencapai Sasaran S4.1: Meningkatnya Kualitas dan Ketahanan Lingkungan Hidup, melalui indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kapasitas pengelolaan sampah telah berjalan secara sistematis, mulai dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Semakin tinggi persentase sampah yang dikelola melalui fasilitas pengolahan resmi, semakin baik kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

14. Program Siaga Bencana

Program Siaga Bencana merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, baik alam maupun non-alam. Program ini mendukung secara langsung Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan memberikan perhatian serius terhadap aspek mitigasi risiko dan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam kerangka Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, program ini difokuskan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif. Program ini secara khusus diarahkan untuk mencapai Sasaran S4.2: Terwujudnya Ketahanan Bencana Daerah, yang diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini menggambarkan tingkat potensi kerugian akibat bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan. Semakin rendah nilai IRB, maka semakin tinggi kapasitas daerah dalam mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari kejadian bencana.

15. Program Ayo Sekolah

Program Ayo Sekolah merupakan program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan memperluas akses, meningkatkan jenjang pendidikan, serta memperkuat motivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan formal secara berkelanjutan. Program ini menjadi pengungkit utama dalam mendukung Misi 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, yang diukur melalui indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan secara spesifik mendukung Sasaran pertama pada tujuan ini, yaitu



meningkatnya jenjang dan cakupan pendidikan penduduk dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .

16. Program Perlindungan Sehat Prioritas

Program Perlindungan Sehat Prioritas merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menjadi instrumen utama dalam mendukung Misi 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi, serta secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan status kesehatan sebagai fondasi pengembangan potensi individu. Program ini secara khusus diarahkan untuk mencapai Sasaran peningkatan Usia Harapan Hidup dan penurunan Angka Prevalensi Stunting, yang merupakan indikator penting dalam mencerminkan kualitas hidup dan kondisi gizi masyarakat. Usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan yang baik, sedangkan rendahnya prevalensi stunting mencerminkan keberhasilan intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak secara berkelanjutan.

17. Program Birokrasi Andalan

Program Birokrasi Andalan merupakan program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Program ini menjadi ujung tombak dalam mendukung Misi 4: Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang Bersih, Inovatif, serta Kolaboratif, serta secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan 5: Terbangunnya Efektivitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Secara khusus, program ini diarahkan untuk mencapai Sasaran S5.1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diukur melalui Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Inovasi Daerah. Peningkatan kinerja birokrasi menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan pelayanan publik berjalan efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

18. Program Sinergi Bersama

Program Sinergi Bersama merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berperan strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam



mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, inklusif, dan berintegritas. Program ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mendukung Misi 4: Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang Bersih, Inovatif, serta Kolaboratif, serta berkontribusi langsung pada Tujuan 5: Terbangunnya Efektivitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif pada Sasaran S5.1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara spesifik mendukung indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indeks integritas Nasional. Melalui Program Sinergi Bersama, pemerintah daerah mendorong penguatan etika pemerintahan, nilai-nilai kebangsaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Program ini tidak hanya memperhatikan aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga memperkuat fondasi ideologis dan sosial sebagai pilar utama tata kelola yang kokoh dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

19. Program Fiskal Berdaulat

Program Fiskal Berdaulat merupakan program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Program ini secara langsung mendukung Misi 4: Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang Bersih, Inovatif, serta Kolaboratif, serta merupakan bagian integral dari pencapaian Tujuan 5: Terbangunnya Efektivitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif. Secara khusus, program ini diarahkan untuk memenuhi Sasaran S5.2: Meningkatnya Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan Daerah, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkelanjutan, dengan pengelolaan keuangan yang taat asas dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

20. Program Pemerintahan Cerdas Digital

Program Pemerintahan Cerdas Digital merupakan program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Program ini mendukung langsung Misi 4: Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang Bersih, Inovatif, serta Kolaboratif, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan 5: Terbangunnya Efektivitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif. Program ini secara khusus diarahkan untuk mencapai



Sasaran S5.3: Meningkatnya Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan tujuan utama membangun sistem pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan mampu memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



Tabel 3. 5
Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN
"BANGKA BARAT BERMARTABAT" (Berkeadilan, Makmur, Tangguh, Bersahabat)						
Misi 1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya	T1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		a	Tingkat Kemiskinan		
			b	Rasio Gini		
			c	Indeks Ketahanan Pangan		
		S1.1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	a	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Cipta Kerja	- o Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja - o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		S1.2 Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat	a	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Program Perlindungan Untuk Semua	- o Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan - o Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan - o Urusan Pemerintahan Bidang Sosial - o Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - o Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - o Unsur Kewilayahan - o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - o Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
			b	SPM Pemerintah Daerah		
		S1.3 Meningkatnya kemandirian desa dan kelestarian budaya	a	Prevalensi ketidkadcukupan konsumsi pangan (kkal)	Program Desaku Mandiri	- o Urusan Pemerintahan Bidang Pangan - o Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - o Unsur Kewilayahan
			b	Persentase Desa Mandiri		
			c	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Program Budaya Berdaya	- o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - o Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan - o Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan - o Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Misi 2. Mewujudkan Ekonomi Daerah	T2. Terciptanya ekonomi daerah		a	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
			b	Tingkat Inflasi		
			a	Rasio PDRB Sektor Pertanian	Program Ekonomi Juara	o Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN
yang Inklusif dan berkelanjutan	yang inklusif dan adaptif	S2.1 Meningkatnya sektor ekonomi unggulan				- o Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan - o Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian - o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b	Rasio PDRB Industri Pengolahan		- o Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah - o Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata - o Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
			c	Rasio Kewirausahaan Daerah	Program Wirausaha Naik Kelas	- o Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata - o Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
			d	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum	Program Ayo Ke Bangka Barat	- o Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan - o Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		S2.2 Meningkatnya keterhubungan dan daya saing ekonomi antarwilayah	a	Net Ekspor	Program Unggul Bersama Produk Daerah	- o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - o Urusan Pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			b	Indeks Konektivitas	Program Infrastruktur Berkeadilan	- o Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal - o Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan - o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.3 Meningkatnya penguatan struktur dan kapasitas ekonomi daerah	a	Persentase Pembentukan modal tetap bruto	Program Mari Berinvestasi	- o Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup - o Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
			b	Nilai investasi penanaman modal		o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	T3. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup		a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		S3.1 Meningkatnya kualitas dan ketahanan lingkungan hidup	a	Emisi GRKc(CO2eq Gg) - SP.5	Program Alam Lestari	- o Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup - o Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
			b	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Program Bersih Bergerak	o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S3.2 Terwujudnya ketahanan bencana daerah	a	Indeks Risiko Bencana (IRB)- SP.5	Program Siaga Bencana	- o Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan	T4. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		a	Indeks Pembangunan Manusia		
		S4.1 Meningkatnya jenjang dan cakupan	a	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Program Ayo Sekolah	- o Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan - o Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan - o Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
			b	Angka Harapan lama sekolah (HLS)- SP.4		



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN																											
berdaya saing tinggi		pendidikan penduduk																															
		S4.2 Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk	a	Usia Harapan Hidup	Program Perlindungan Sehat Prioritas	- o Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan - o Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - o Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga - o Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																											
			b	Angka Prevalensi Stunting			Misi 4. Mewujudkan birokrasi dan kepemimpinan daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif	T5. erbangunnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif		a	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			S5.1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Birokrasi Andalan	- o Unsur Pendukung Sekretariat Daerah - o Unsur Penunjang Perencanaan - o Unsur Penunjang Kepegawaian - o Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan - o Urusan Pemerintahan Bidang Statistik - o Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - o Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	b	Indeks Inovasi Daerah	c	Indeks Pelayanan Publik	Program Sinergi Bersama	- o Unsur Pendukung Sekretariat DPRD - o Unsur Kewilayahan - o Urusan Pemerintahan Umum - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - o Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	d	Indeks Integritas Nasional	S5.2 Meningkatnya kapasitas dan tata kelola keuangan daerah	a	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Fiskal Berdaulat	- o Unsur Penunjang Keuangan - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	b	Kapasitas fiskal
Misi 4. Mewujudkan birokrasi dan kepemimpinan daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif	T5. erbangunnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif		a	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)																													
		S5.1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Birokrasi Andalan	- o Unsur Pendukung Sekretariat Daerah - o Unsur Penunjang Perencanaan - o Unsur Penunjang Kepegawaian - o Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan - o Urusan Pemerintahan Bidang Statistik - o Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - o Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan																											
			b	Indeks Inovasi Daerah					c	Indeks Pelayanan Publik	Program Sinergi Bersama	- o Unsur Pendukung Sekretariat DPRD - o Unsur Kewilayahan - o Urusan Pemerintahan Umum - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - o Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	d		Indeks Integritas Nasional	S5.2 Meningkatnya kapasitas dan tata kelola keuangan daerah	a		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Fiskal Berdaulat	- o Unsur Penunjang Keuangan - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	b	Kapasitas fiskal	S5.3 Meningkatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	a	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pemerintahan Cerdas Digital	- o Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika - o Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - o Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
			c	Indeks Pelayanan Publik	Program Sinergi Bersama				- o Unsur Pendukung Sekretariat DPRD - o Unsur Kewilayahan - o Urusan Pemerintahan Umum - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - o Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
			d	Indeks Integritas Nasional						S5.2 Meningkatnya kapasitas dan tata kelola keuangan daerah	a	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Fiskal Berdaulat	- o Unsur Penunjang Keuangan - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	b	Kapasitas fiskal	S5.3 Meningkatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	a	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pemerintahan Cerdas Digital	- o Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika - o Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - o Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
		S5.2 Meningkatnya kapasitas dan tata kelola keuangan daerah	a	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Fiskal Berdaulat	- o Unsur Penunjang Keuangan - o Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																											
			b	Kapasitas fiskal					S5.3 Meningkatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	a	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pemerintahan Cerdas Digital	- o Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika - o Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - o Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																				
		S5.3 Meningkatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	a	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pemerintahan Cerdas Digital	- o Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika - o Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - o Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																											

Sumber: hasil perumusan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2025–2029 merupakan turunan langsung dari visi “Bangka Barat Bermartabat” dan lima misi pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Program-program prioritas ini disusun untuk menjawab tantangan strategis daerah, sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Secara operasional, pencapaian program prioritas tersebut didukung secara langsung oleh program perangkat daerah, yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Setiap program prioritas memiliki irisan langsung dengan program-program teknis pada perangkat daerah, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor. Hal ini menjamin terjadinya keterpaduan antara kebijakan makro daerah dengan implementasi teknis di lapangan.

Keterkaitan ini diwujudkan dalam bentuk sinergi antar-urusan pemerintahan, di mana perangkat daerah menjalankan program-program yang relevan, spesifik, dan terukur untuk menunjang keberhasilan program prioritas. Misalnya, Program Cipta Kerja didukung oleh berbagai program di bidang ketenagakerjaan dan jasa konstruksi, sementara Program Perlindungan Untuk Semua didukung oleh integrasi program pendidikan, kesehatan, sosial, permukiman, hingga kebencanaan. Hal serupa berlaku pada program-program prioritas lainnya, yang mencerminkan kesinambungan antara visi-misi kepala daerah dan mandat teknokratik perangkat daerah.

Korelasi yang kuat antara program prioritas dan perangkat daerah ini menjadi dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah memiliki arah yang sejalan dalam mencapai target pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik dapat diberikan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas. Dukungan program perangkat daerah terhadap masing-masing program prioritas pembangunan daerah ditunjukkan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6
Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Program Perangkat Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
1	Program Cipta Kerja	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		2	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		3	Program Hubungan Industrial	



Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
		4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Perlindungan Untuk Semua	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		3	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4	Program Kawasan Permukiman	
		5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	
		9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		10	Program Penanganan Bencana	
		11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		12	Program Penanggulangan Bencana	
		13	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		14	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unsur Kewilayahan
		15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		17	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
3	Program Desaku Mandiri	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		4	Program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
		8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan
		9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
4	Program Budaya Berdaya	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		3	Program Pembinaan Sejarah	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	



Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
		5	Program Pengelolaan Permuseuman	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		6	Program Pengembangan Kebudayaan	
		7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		8	Program Pengembangan Kurikulum	
5	Program Perempuan Bangkit, Keluarga Sejahtera	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Program Perlindungan Perempuan	
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
		5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		6	Program Perlindungan Khusus Anak	
6	Program Ekonomi Juara	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		6	Program Perizinan Usaha Pertanian	
		7	Program Penyuluhan Pertanian	
		8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
		14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
7	Program Wirausaha Naik Kelas	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
		3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
		4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
		5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
		7	Program Pengembangan UMKM	
		8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
		10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
8	Program Ayo Ke Bangka Barat	1	Program Pemasaran Pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		5	Program Pengelolaan Permuseuman	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
9	Program Unggul Bersama Produk Daerah	1	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
		5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
		7	Program Pengelolaan Pelayaran	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
10	Program Infrastruktur Berkeadilan	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Program Mari Berinvestasi	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
		3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
		4	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
		5	Program Penatagunaan Tanah	
		6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		7	Program Promosi Penanaman Modal	
		8	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
12	Program Alam Lestari	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		2	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	



Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
		4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		9	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
13	Program Bersih Bergerak	1	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Program Siaga Bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pemerintahan Bidang PUPR
15	Program Ayo Sekolah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	
		3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		4	Program Pembinaan Perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
16	Program Perlindungan Sehat Prioritas	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		8	Program Pengendalian Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	
		10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	



Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
17	Program Birokrasi Andalan	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
		2	Program Perekonomian dan Pembangunan	
		3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Perencanaan
		4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
		6	Program Riset dan Inovasi Daerah	
		7	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang Kepegawaian
		8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
		9	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
		10	Program Pengelolaan Arsip	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
		11	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
		12	Program Perizinan Penggunaan Arsip	
		13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		14	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
18	Program Sinergi Bersama	1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan
		3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Urusan Pemerintahan Umum
		5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		7	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
		9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		11	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12	Program Pencatatan Sipil	
		13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		14	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
19	Program Fiskal Berdaulat	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Keuangan
		2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	



Program Prioritas Pembangunan Daerah		Dukungan Program Perangkat Daerah		Urusan
		4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
20	Program Pemerintahan Cerdas Digital	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		3	Program Pengelolaan Arsip	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
		4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program-program strategis yang relevan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah terpilih.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029, program perangkat daerah berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan makro dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Melalui program-program inilah kebijakan lima tahunan diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Program ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, potensi daerah, dan prioritas nasional, sehingga menghasilkan sinergi pembangunan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan.

Posisi strategis program perangkat daerah menjadikannya fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Jika dirancang dan diimplementasikan secara efektif, program-program ini akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan program perangkat daerah tidak hanya menjadi indikator kinerja birokrasi, tetapi juga menjadi ukuran seberapa jauh manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Tabel berikut menyajikan daftar program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan. Setiap program dirinci sesuai dengan jenis urusan—baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun



urusan pilihan dan dilengkapi dengan nama perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.

Tabel 4. 1
Daftar Program Perangkat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Kurikulum
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Untulitas Umum (PSU)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Program Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program Perlindungan Perempuan
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program Perlindungan Khusus Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah
Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Program Penatagunaan Tanah
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program Pengelolaan Persampahan
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Urusan Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Pengelolaan Pelayaran
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pengembangan UMKM
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanam Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanam Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program Pembinaan Sejarah
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip
Program Perlindungan dan Penyelematan Arsip
Program Perizinan Penggunaan Arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program Pengembangan Ekspor
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Program Perencana dan Pembangunan Industri
Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	
Perencanaan	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Keuangan	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Kepegawaian	
Program Kepegawaian Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Penelitian dan Pengembangan	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Riset dan Inovasi Daerah	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
Unsur Kewilayahan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Urusan Pemerintahan Umum	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
Program Penunjang	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025

4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk memastikan bahwa setiap program perangkat daerah dapat diukur keberhasilannya secara objektif, disusunlah kerangka kinerja yang mencakup indikator program, target capaian, serta pagu indikatif pendanaan untuk periode 2025-2029. Kerangka ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program mampu memberikan dampak nyata (*outcome*) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel berikut ini menyajikan rincian indikator, target, dan pagu indikatif untuk setiap program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Informasi ini menjadi dasar bagi proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, serta memastikan bahwa alokasi anggaran yang disediakan selaras dengan prioritas dan target kinerja yang ingin dicapai.



Tabel 4. 2
Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						621.804.596.762		630.110.625.348		630.788.794.882		637.648.161.801		620.312.345.698	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						282.403.631.000		282.406.193.417		283.016.525.125		283.529.017.909		281.145.886.465	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						205.000.000.000		205.000.000.000		205.000.000.000		205.000.000.000		204.000.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,91	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	89,59	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						77.333.631.000		77.331.193.417		77.931.525.125		78.432.017.909		77.034.886.465	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen (%)	96,15	96,4	96,75		97,1		97,45		97,8		98,15		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen (%)	83,3	83,45	83,65		83,75		83,95		84,1		84,25		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen (%)	11,43	12,20	12,96		13,72		14,48		15,25		16,01		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						30.000.000		30.000.000		34.000.000		39.000.000		45.000.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga Pendidikan	Persentase tenaga pendidik sesuai standar	Persen (%)	71,25	71,25	71,25		71,5		71,58		71,71		71,83		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						40.000.000		45.000.000		51.000.000		58.000.000		66.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen (%)	45	65	75		85		95		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						206.687.646.888		206.991.784.741		207.552.171.354		208.078.782.734		205.026.559.413	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						135.910.306.224		135.910.306.224		135.910.306.224		135.910.306.224		132.666.380.413	
Meningkatnya Pemenuhan	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	75,49	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	76,55	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						65.055.301.000		65.490.462.137		65.925.623.274		66.360.784.411		66.795.945.548	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki jamkes	Persen (%)	97,23	98	98,03		98,06		98,08		98,1		98,13		
	Persentase FKTP pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen (%)	37,5	40	62,5		75		87,5		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						5.274.339.664		5.238.618.714		5.353.206.283		5.431.837.313		5.176.799.536	
Meningkatnya mutu dan distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen (%)	92	92,1	92,2		92,3		92,4		92,5		92,7		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						202.720.000		106.446.070		112.785.907		120.057.128		126.798.853	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memiliki izin	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang telah memenuhi ketentuan	Persen (%)	56,6	58	59		60		61		62		63		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						244.980.000		245.951.596		250.249.666		255.797.658		260.635.063	
Meningkatnya desa/kelurahan yang ber-PHBS	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	Persen (%)	38,1	38,5	39		39,5		40		40,5		41		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						88.220.636.199		88.885.663.878		92.291.869.097		92.988.696.664		86.498.294.077	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAA RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						6.200.000.000		6.200.000.000		6.200.000.000		6.200.000.000		6.000.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	58,73	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	74,37	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						2.447.500.000		2.081.262.863		4.287.287.543		4.293.312.223		2.048.657.527	
Meningkatnya perlindungan	Persentase luasan Kawasan Rawan Banjir yang ditangani	Persen (%)	0,51	0,75	0,98	1.700.000.000	1,22	1.500.000.000	1,45	3.000.000.000	1,69	3.100.000.000	1,92	1.500.000.000	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
masyarakat terhadap banjir	Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen (%)	62,43	66,67	70,9		75,14		79,37		83,61		87,84		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen (%)	47,3	47,3	47,3	747.500.000	47,8	581.262.863	48,4	1.287.287.543	49,1	1.193.312.223	49,9	548.657.527	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						6.506.000.000		7.469.418.330		7.791.860.277		7.914.302.224		4.134.046.757	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	Persen (%)	18,19	20,55	22,44		24,33		26,22		28,11		30		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						850.000.000		1.204.455.232		1.240.324.339		1.276.193.446		1.311.627.591	
Meningkatnya layanan ketersediaan sarana persampahan TPA/TPST/TPS3R	Persentase ketersediaan sarana persampahan TPA/TPST/TPS3R	Persen (%)	8,22	8,22	9,59		10,96		12,33		13,70		15,07		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.527.000.000		2.295.378.153		2.643.515.692		2.991.653.231		2.588.600.717	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi aman	Persen (%)	0,48	1,74	3,06		4,37		5,69		7		7,31		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						250.000.000		593.762.161		611.444.610		629.127.060		606.595.085	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen (%)	37,3	38	38,5		39,5		40		40,5		41		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						2.503.000.000		2.649.123.490		2.728.015.335		2.806.907.179		2.784.842.351	
Meningkatnya kualitas bangunan Gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	Persen (%)	87	88	89		90		91		92		93		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						2.027.510.000		1.097.136.471		1.126.831.551		1.156.526.632		1.205.861.618	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen (%)	6	13	13		20		27		34		34		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						62.285.126.199		62.440.827.194		63.003.068.049		63.255.931.253		62.798.766.937	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen (%)	74,11	74,11	74,11		74,91		76,71		78,51		80,31		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						120.000.000		121.523.178		125.142.182		128.761.185		132.336.304	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi bersertifikat	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi bersertifikat	Persen (%)	59,4	64	70		76		82		88		94		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						2.504.500.000		2.732.776.806		2.534.379.519		2.335.982.231		2.886.959.190	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	Persen (%)	28,57	28,57	42,86		57,14		71,43		85,71		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						19.779.055.000		19.980.443.646		20.348.480.532		20.619.600.685		19.274.755.384	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						6.300.000.000		6.300.000.000		6.300.000.000		6.300.000.000		6.100.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	93,75	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	86,58	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.203.395.000		1.215.000.000		1.265.000.000		1.290.000.000		1.215.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						1.631.860.000		1.649.269.516		1.683.330.675		1.725.495.646		1.763.053.566	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten yang ditangani	Persen (%)	6,12	57,89	64,01		70,13		76,25		82,37		88,49		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						5.050.000.000		5.250.000.000		5.350.000.000		5.450.000.000		4.350.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan perumahan	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	Persen (%)	10,77	8,56	9,36		10,33		11,51		13,01		14,96		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						5.593.800.000		5.566.174.130		5.750.149.857		5.854.105.039		5.846.701.818	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen (%)	9,3	6,41	6,85		7,35		7,94		8,62		9,43		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA						14.557.929.000		20.922.058.123		16.588.913.037		21.336.553.827		17.297.081.158	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.100.000.000		3.100.000.000		4.900.000.000		3.100.000.000		3.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,63	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.501.979.000		2.243.990.848		1.586.002.696		2.105.433.774		1.620.334.833	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen (%)	100	100	100	1.240.772.000	100	1.165.359.930	100	1.260.002.696	100	1.674.433.774	100	1.199.334.833	
	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen (%)	100	100	100		100		100		100				
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen (%)	100	100	100	240.207.000	100	1.058.630.918	100	291.000.000	100	361.000.000	100	371.000.000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	Persen (%)	100	100	100	21.000.000	100	20.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000	100	50.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						8.600.000.000		8.600.000.000		8.600.000.000		8.600.000.000		8.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	97,42	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	93,26	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						896.920.000		925.000.000		945.000.000		965.000.000		3.604.330.511	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	Persen (%)	100	100	100	128.450.000	100	245.000.000	100	265.000.000	100	270.000.000	100	1.184.330.511	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen (%)	100	100	100	768.470.000	100	680.000.000	100	680.000.000	100	695.000.000	100	2.420.000.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						459.030.000		6.053.067.275		557.910.341		6.566.120.053		572.415.814	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya layanan pencegahan dan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Layanan Pemadaman Penyelamatan dan evakuasi oleh instansi terkait	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evekuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						10.155.698.675		10.924.481.543		10.990.835.737		11.095.509.982		11.069.769.201	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						6.350.000.000		6.350.000.000		6.350.000.000		6.350.000.000		6.250.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	97,02	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	91,29	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						870.200.000		1.399.596.143		1.404.776.860		1.413.558.939		1.420.293.628	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif	Persen (%)	100	100	100				100		100		100		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2.309.988.675		2.384.046.887		2.440.667.762		2.528.842.597		2.590.448.957	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						300.200.000		309.085.566		311.391.107		315.299.338		318.296.434	
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA						325.310.000		481.752.947		484.000.008		487.809.108		490.730.182	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.057.417.050		105.648.369.421		107.633.761.703		109.701.957.686		111.381.943.040	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.517.250.000		5.241.165.459		5.301.507.339		5.823.089.200		5.410.340.031	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.500.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000		4.300.000.000	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	78,86	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	83,9	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						606.890.000		631.398.105		681.398.105		1.187.942.711		720.398.105	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						314.100.000		313.729.004		322.729.004		335.729.004		288.729.004	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen (%)	36	50	50		50		50		50		50		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						96.260.000		96.038.350		97.380.230		99.417.485		101.212.922	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan dialog sosial	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.665.360.000		5.724.177.501		5.756.563.207		5.779.650.646		5.706.621.978	DP3KB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		4.900.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	99,19	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	91,23	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						226.670.000		231.670.000		236.030.828		241.148.616		247.772.679	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran resfonsif gender (ARG)	Persen (%)	61,22	65	65		70		70		75		75		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						46.250.000		55.000.000		65.000.000		75.000.000		85.000.000	
Meningkatkan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						112.350.000		117.350.000		122.800.000		127.100.000		132.400.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Persen (%)	NA	70	70		75		75		80		80		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						16.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen (%)	NA	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						187.490.000		197.748.260		208.596.044		210.033.164		213.135.244	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59,12	59,12	59,12		59,15		59,50		59,75		60,00		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						76.600.000		102.409.241		104.136.335		106.368.866		108.314.055	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, Eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						18.501.500.000		18.590.500.536		18.605.557.336		18.622.433.988		18.430.173.733	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						18.000.000.000		18.000.000.000		18.000.000.000		18.000.000.000		17.800.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,93	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	88,94	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						319.500.000		363.497.085		375.334.286		389.143.541		394.297.866	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Skor	88,9	91	92		93		94		95		95		
	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	SKor	91,3	91,8	92,3		92,8		93,3		93,8		94,3		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						112.000.000		146.113.477		148.696.617		150.685.124		152.443.178	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen (%)	17	15	14		12		11		9		8		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						70.000.000		80.889.974		81.526.433		82.605.323		83.432.689	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen (%)	91,59	95	95			95		95		95			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						4.040.500.000		2.244.557.858		4.262.218.479		4.292.155.839		2.305.113.822	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAA RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						3.570.000.000		1.680.937.763		3.694.163.711		3.716.583.644		1.733.776.759	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen (%)	10	10	20			40		60		80		100	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						60.500.000		116.806.196		117.725.249		119.283.182		120.477.909	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase fasilitasi objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen (%)	NA	0	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						410.000.000		446.813.899		450.329.519		456.289.013		450.859.154	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase aset tanah bersertifikat	Persen (%)	35	50	60			70		80		90		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						15.657.677.000		17.411.303.192		17.249.424.875		17.667.750.891		16.862.634.306	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						6.150.000.000		6.150.000.000		6.150.000.000		6.150.000.000		6.000.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,66	100	100			100		100		100			
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	95,45	100	100			100		100		100			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						350.000.000		1.712.302.877		365.153.547		644.985.854		373.691.592	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen (%)	33,33	33,33	66,67			100,00		100,00		100,00		100,00	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang mengelola Limbah B3	Persen (%)	77	78	81		85		89		93		96		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP						80.000.000		82.815.995		84.184.353		86.808.773		88.287.620	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen (%)	88	88	89		89		90		90		91		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	Persen (%)	32	50	27		32		36		41		45		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						525.000.000		534.544.865		534.544.865		544.089.730		563.179.459	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	67,04	71,37	71,57		71,77		71,97		72,17		72,37		
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,02	82,88	83,08		83,28		83,48		83,68		83,88		
	Persentase sumber emisi GRK yang diinventarisasi	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						200.000.000		214.939.064		228.843.427		242.376.456		257.552.086	
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase RTH dalam kondisi baik	Persen (%)	4,8	4,8	4,8		4,8		4,8		4,8		4,8		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
keanekaragaman hayati															
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						60.000.000		67.253.636		74.546.755		81.043.635		88.424.676	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase desa/kelurahan yang diberikan penyuluhan lingkungan hidup	Persen (%)	NA	52,94	52,94			52,94		70,59		88,24		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						8.212.677.000		8.569.446.755		9.732.151.928		9.838.446.443		9.411.498.873	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Jumlah Sampah yang di kelola	Ton/ Tahun	7.878,51	7.878,51	7.878,61			7.878,71		7.878,81		7.878,91		7.879,01	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.164.757.500		6.178.324.493		6.185.820.525		6.194.746.815		5.962.291.494	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.650.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		5.500.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	99,98	100	100			100		100		100		100	
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	91,88	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						449.680.000		465.955.469		472.992.242		481.140.021		398.087.685	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Persen (%)	87,1	90,9	94,7			95,5		96		96,5		97	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL						31.027.500		31.908.197		32.159.257		32.584.840		32.911.206	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persen (%)	68,95	70,43	71,95			72		72,5		72,75		73	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Meningkatnya akurasi data kependudukan dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						30.050.000		26.460.827		26.669.026		27.021.954		27.292.603	
Meningkatnya pengguna profil data kependudukan dalam	Persentase ketersediaan profil kependudukan	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
mendukung perencanaan dan pengembangan daerah															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.017.535.000		1.225.315.305		982.989.277		995.997.793		1.105.973.598	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENATAAN DESA						13.300.000		18.866.718		19.015.165		19.266.805		19.459.779	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						249.100.000		431.775.032		183.205.273		185.629.744		287.488.991	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						705.135.000		724.516.504		730.217.142		739.880.565		747.291.128	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	Persen (%)	50	85	90		88		91		93		96		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						50.000.000		50.157.051		50.551.697		51.220.679		51.733.700	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	Persen (%)	35	38,33	43,33		53		63		73		83		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						778.221.000		839.728.619		857.001.754		879.635.971		899.222.389	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						100.650.000		92.307.081		93.033.372		94.264.541		95.208.684	
Terkendatinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,28	2,27	2,25		2,24		2,23		2,22		2,21		
	Angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun (ASFR)	Angka	38,6	36,4	34,2		32,30		30,40		28,70		28,50		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA						527.571.000		587.860.556		594.846.418		606.688.483		615.769.776	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Skor (0-100)	79,26	79,5	79,7		79,9		80,1		80,4		80,6		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Persen (%)	4,52	4	3,8		3,6		3,4		3,2		3,1		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAKHTERA (KS)						150.000.000		159.560.982		169.121.964		178.682.947		188.243.929	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga BKB yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	48,02	54,57	59,56		64,54		69,53		74,52		79,5		
	Persentase keluarga BKR yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	3,8	5,37	6,8		8,24		9,67		11,11		12,55		
	Persentase keluarga BKL yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	7,85	12,51	17,26		22		26,75		31,5		36,24		
	Persentase keluarga UPPKA yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	0,75	0,77	0,8		0,82		0,85		0,87		0,9		
	Persentase remaja yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	1,98	3	4,02		5,04		6,06		7,07		8,09		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10.320.000.000		10.360.156.410		10.360.156.410		10.360.156.410		8.431.501.912	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN						10.260.000.000		10.260.000.000		10.260.000.000		10.260.000.000		8.331.345.502	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang terpasang sesuai standar	Persen (%)	18,64	18,64	20,49		22,33		24,18		26,02		27,87		
	Konektivitas Darat	Persen (%)	25	25	37,5		37,5		50		50		62,5		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						60.000.000		100.156.410		100.156.410		100.156.410		100.156.410	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase pengembangan pelabuhan	Persen (%)	6,25	6,25	12,5		18,75		25		31,25		37,5		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.390.000.000		7.397.499.263		7.581.272.511		7.727.143.874		7.647.321.125	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						4.465.000.000		4.465.000.000		4.465.000.000		4.465.000.000		4.300.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	98,23	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	77,1	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.090.000.000		1.091.765.466		1.129.804.917		1.143.432.973		1.153.883.884	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase peningkatan konten informasi publik yang disebarluaskan	Persen (%)	14,29	10	10		10		10		10		10		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						1.835.000.000		1.840.733.797		1.986.467.594		2.118.710.901		2.193.437.241	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan Pemerintahan Digital	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.774.531.050		7.545.171.606		7.617.845.663		7.777.110.651		7.578.786.148	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.750.000.000		5.750.000.000		5.750.000.000		5.750.000.000		5.500.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	86,13	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	87,39	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Meningkatnya jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang di fasilitasi	Persen (%)	0	37,04	37,04		46,30		46,30		55,56		55,56		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						84.371.000		86.888.487		88.194.470		90.713.155		92.110.917	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen (%)	52,46	53,23	53,97		54,69		55,38		56,06		56,72		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						132.920.000		135.156.033		138.637.220		141.452.904		144.078.426	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP sehat	Persen (%)	21,88	25	25		25		25		25		25		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						37.155.000		35.356.304		35.634.494		36.106.068		36.467.702	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen (%)	53,51	13,66	27,17		40,54		53,76		66,84		79,79		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						81.050.000		87.174.495		89.466.991		91.962.815		94.343.047	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persen (%)	53,51	51,91	52,17		52,43		52,69		52,94		53,19		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						135.035.050		384.663.435		385.329.583		386.458.803		387.324.765	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang memiliki izin	Persen (%)	24,51	25,47	26,4		27,31		28,2		29,07		29,91		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						550.000.000		1.061.932.852		1.126.582.905		1.276.416.906		1.320.461.291	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Persen (%)	0,63	2,54	2,63		2,72		2,81		2,9		2,98		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.231.939.000		5.499.678.155		5.283.107.076		5.313.041.067		5.232.453.963	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						4.660.000.000		4.660.000.000		4.660.000.000		4.660.000.000		4.550.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	92,9	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	82,69	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						100.000.000		345.588.462		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen (%)	80	80	90		90		90		95		95		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						281.939.000		304.089.693		308.107.076		313.041.067		317.453.963	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen (%)	-24,47	2,02	2,5		3,04		3,49		4,02		4,98		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen (%)	99,68	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3.514.945.000		3.567.432.116		3.603.763.926		3.649.153.867		11.863.788.313	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen (%)	48,93	49,93	50,93		51,93		52,93		53,93		54,93		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen (%)	10,87	10,92	10,97		11,07		11,17		11,27		11,37		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						3.264.945.000		3.267.432.116		3.253.763.926		3.249.153.867		11.413.788.313	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Prestasi Olahraga	Jumlah medali	17	40	29		30		31		32		32		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase gugus depan pramuka aktif	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,65	2,65	2,69		2,71		2,73		2,75		2,77		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam jaringan Komunikasi Sandi yang aman	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						6.554.121.500		6.763.160.457		6.888.768.567		7.501.211.565		6.998.030.144	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						4.350.000.000		4.350.000.000		4.350.000.000		4.350.000.000		4.200.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	89,58	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	90,05	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.276.225.500		1.313.700.000		1.380.030.708		1.428.922.994		1.510.579.897	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Persen (%)	12,89	3,68	3,68		42,84		70,76		87,93		94,48		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						144.450.000		251.350.000		260.302.701		270.943.334		282.023.606	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Seni yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen (%)	6,45	2,33	27,91		54,07		85,47		89,53		91,86		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						94.920.000		110.781.389		125.426.908		139.748.984		154.292.088	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Jumlah Partisipan	307	303	305		305		305		305		305		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						456.794.000		493.997.254		531.200.509		568.403.763		605.607.018	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen (%)	10,89	4,54	4,54		5,44		6,17		6,90		7,44		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						231.732.000		243.331.814		241.807.741		743.192.490		245.527.535	
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah wisatawan	30.498	31.998	33.498		34.998		36.498		37.998		39.498		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6.215.430.000		6.332.123.451		6.356.939.758		6.365.104.109		6.181.365.084	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.800.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000		5.600.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	81,84	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	93,06	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						310.500.000		404.690.924		428.504.567		434.969.255		449.926.813	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung	6512	6.512	6.520		6.530		6.540		6.550		6.560		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						104.930.000		127.432.527		128.435.191		130.134.854		131.438.271	
Meningkatnya pelestarian koleksi	Jumlah Naskah Kuno yang Teridentifikasi	Jumlah Naskah Kuno	62	4	2	2	2		2		2		2		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
nasional dan naskah kuno															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						253.650.000		263.075.000		270.825.000		278.575.000		286.325.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						195.550.000		202.475.000		207.800.000		213.125.000		218.450.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						47.390.000		47.500.000		49.150.000		50.800.000		52.450.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						10.710.000		13.100.000		13.875.000		14.650.000		15.425.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						18.956.565.395		17.412.955.300		23.857.030.677		24.335.674.335		18.134.528.773	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.350.900.000		5.397.756.201		5.407.109.567		5.422.964.904		5.185.123.842	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						4.150.000.000		4.150.000.000		4.150.000.000		4.150.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	60,86	100	100			100		100		100		100	
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	85,91	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						678.000.000		685.409.933		690.541.349		699.239.856		605.910.456	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	41355,35	41768,9	42.270,13			42.777,37		43.333,48		43.896,81		44.335,78	
PROGRAM PENGFI OI AAN						197.100.000		203.339.999		204.865.401		207.451.182		209.434.133	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PERIKANAN BUDIDAYA															
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	1.235,94	1248,3	1.260,79		1.273,39		1.286,13		1.298,99		1.311,98		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						210.000.000		228.308.142		229.833.348		232.418.798		234.401.494	
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Persen (%)	NA	50	55		60		65		70		75		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						115.800.000		130.698.127		131.869.469		133.855.068		135.377.759	
Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil Olahan Perikanan	Ton/ Tahun	3.657,05	3.693,60	3.730,56		3.767,87		3.805,54		3.843,60		3.882,04		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.785.927.095		4.043.146.164		7.311.363.310		7.593.535.550		4.857.774.263	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						2.220.952.095		2.425.845.622		4.644.194.397		4.875.298.276		3.089.150.826	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola dengan baik	Jumlah	8	9	9		9		10		11		12		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						455.007.500		1.503.149.632		2.551.291.765		2.599.433.897		1.647.576.030	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan	337.448	275.000	300.000		310.000		330.000		350.000		360.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						26.467.500		29.925.047		30.071.530		30.319.841		30.510.263	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen (%)	38,93	45,64	52,35		59,06		65,77		75,84		85,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						83.500.000		84.225.863		85.805.618		88.483.536		90.537.144	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7.308.698.400		4.171.804.329		6.241.772.137		6.322.144.780		3.996.602.231	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						526.898.400		526.181.387		530.641.878		538.203.068		544.001.498	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen (%)	16,79	5	5		5		5		5		5		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen (%)	21,62	3	3		3		3		3		3		
	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen (%)	11,79	5	5		5		5		5		5		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						6.012.500.000		2.850.000.000		4.900.000.000		4.950.000.000		2.600.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan Kualitas dan fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	Persen (%)	2	5	5		5		5		5		5		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						306.500.000		322.480.555		325.198.444		329.805.667		333.338.796	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Peningkatan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen (%)	2	2	2		2		2		2		2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						210.000.000		217.784.008		219.613.114		222.713.719		225.091.471	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	Persen (%)	80	80	80		80		80		80		80		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						35.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						217.800.000		220.358.379		226.318.701		236.422.326		244.170.466	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	Persen (%)	Persen (%)	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						150.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						150.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	
Meningkatnya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya	Persentase Tahura dalam kondisi baik	Persen (%)	28,09	28,09	28,09		28,93		29,77		30,61		31,45		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.911.009.900		3.052.764.418		3.114.757.962		3.177.299.474		3.239.392.455	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						834.505.000		879.833.180		925.161.361		970.489.541		1.015.817.721	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen (%)	50	50	50		50		50		50		50		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1.425.165.000		1.524.513.295		1.524.513.295		1.524.513.295		1.524.513.295	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen (%)	2,76	3,5	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						431.572.000		436.580.286		441.702.553		446.300.109		451.058.957	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan ekspor bagi pelaku usaha	Persentase fasilitasi pengembangan ekspor bagi pelaku usaha	Persen (%)	50	0	100		100		100		100		100		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						169.767.900		161.837.657		163.380.753		165.996.529		168.002.482	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						45.000.000		45.000.000		55.000.000		65.000.000		75.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha lokal yang difasilitasi dalam pemasarannya	Persen (%)	0	0	0,42		0,63		0,84		1,05		1,26		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						450.030.000		597.484.188		1.607.027.701		1.619.729.627		630.635.982	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						333.580.000		453.802.578		1.462.099.879		1.472.689.291		481.975.628	
Meningkatnya realisasi pembangunan Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM	Sentra	2	3	4		5		6		7		8		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						52.000.000		75.414.193		76.117.222		77.308.961		78.222.866	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						64.450.000		68.267.417		68.810.600		69.731.375		70.437.488	
Meningkatnya pemanfaatan pemanfaatan informasi industri	Persentase IKM yang menyampaikan laporan secara tertib melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen (%)	50	50	50		55		55		60		60		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						91.942.901.661		93.629.636.458		93.682.663.192		94.430.726.386		92.850.650.710	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		23.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	87,42	100	100	24.727.896.000	100	24.827.891.000	100	24.819.291.000	100	24.810.277.600	100	22.800.794.000	
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	89,75	100	100		100		100		100		100		
Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang penataan organisasi	Jumlah kebijakan daerah terkait Bidang penataan organisasi yang ditetapkan	Kebijakan	3	3	3	272.104.000	3	172.109.000	3	180.709.000	3	189.722.400	3	199.206.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						5.597.817.550		5.691.413.791		5.728.128.448		5.790.365.203		5.838.092.540	SEKRETARIAT DAERAH
Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang ditetapkan	Kebijakan	1	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Kebijakan Penataan Pemerintahan yang ditetapkan	Kebijakan	7	3	3		3		3		3		3		
	Persentase produk hukum yg diundangkan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						296.850.000		608.706.590		240.516.812		413.585.404		245.938.607	SEKRETARIAT DAERAH
Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan	kebijakan	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditetapkan	kebijakan	5	2	2		2		2		2		2		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						32.000.000.000		32.000.000.000		32.000.000.000		32.000.000.000		32.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	75,03	100	100	9.593.178.752	100	9.593.178.752	100	9.593.178.752	100	9.593.178.752	100	9.593.178.752	
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	73,57	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya layanan kepada DPRD	Persentase layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Persen (%)	100	100	100	22.406.821.248	100	22.406.821.248	100	22.406.821.248	100	22.406.821.248	100	22.406.821.248	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						29.048.234.111		30.329.516.077		30.714.017.932		31.226.775.779		31.766.619.563	SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Integrasi Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						158.897.184.520		159.261.689.795		159.882.903.213		163.177.603.779		160.692.651.347	
PERENCANAAN						6.238.291.300		6.301.832.616		6.314.836.256		6.477.313.793		6.839.808.834	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.100.000.000		5.100.000.000		5.100.000.000		5.100.000.000		4.900.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	98,41	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	88,28	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						320.818.300		378.567.612		385.779.248		542.464.781		1.099.167.817	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	Persen (%)	99,12	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						817.473.000		823.265.004		829.057.008		834.849.012		840.641.017	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen (%)	100	100	100	300.275.000	100	302.402.504	100	304.532.008	100	306.660.012	100	308.800.017	
Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase keselarasan antar	Persen (%)	97,37	100	100	218.327.000	100	219.873.900	100	221.420.000	100	222.967.000	100	224.520.000	



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pembangunan bidang perekonomian dan SDA	dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen (%)	100	100	100	298.871.000	100	300.988.600	100	303.105.000	100	305.222.000	100	307.321.000	
KEUANGAN						144.464.089.920		144.723.317.153		145.322.590.304		146.640.853.135		145.682.301.385	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.550.000.000		5.550.000.000		5.550.000.000		5.550.000.000		5.500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	91,67	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	84,22	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						129.560.075.420		129.807.849.513		130.300.752.970		131.707.284.756		130.869.095.466	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	Persen (%)	88,89	100	100		100		100		100		100		
	Persentase dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						392.856.700		401.500.000		503.441.200		407.665.295		411.546.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						8.380.000.000		8.380.000.000		8.380.000.000		8.380.000.000		8.300.000.000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	80,56	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						581.157.800		583.967.640		588.396.134		595.903.084		601.659.919	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase penambahan Wajib Pajak	Persen (%)	1,51	1,1	1,15		1,17		1,18		1,19		1,2		
	Persentase realisasi pajak daerah	Persen (%)	94,42	95	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase penyusunan laporan pajak dan retribusi tepat waktu	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
KEPEGAWAIAN						6.953.649.800		7.028.040.026		7.035.266.653		8.847.516.851		6.956.911.128	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		7.800.000.000		5.900.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	80,56	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	86,25	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						953.649.800		1.028.040.026		1.035.266.653		1.047.516.851		1.056.911.128	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen (%)	84	95	96	203.649.800	97	208.040.026	97	215.266.653	98	217.516.851	98	221.911.128	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen (%)	72,58	61,71	73,25	250.000.000	73,85	300.000.000	74	300.000.000	74,3	310.000.000	74,5	315.000.000	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persen (%)	82,33	85,7	86,07	450.000.000	86,33	470.000.000	86,67	470.000.000	86,83	470.000.000	87	470.000.000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						306.653.500		308.500.000		310.210.000		311.920.000		313.630.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						306.653.500		308.500.000		310.210.000		311.920.000		313.630.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Persen (%)	70,07	70,16	70,32	206.653.500	70,53	208.500.000	70,99	210.210.000	71,45	211.920.000	71,91	213.630.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Persen (%)	49,16	50,28	51,68	100.000.000	54,47	100.000.000	58,66	100.000.000	61,45	100.000.000	64,25	100.000.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						934.500.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						934.500.000									
Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Persen (%)	90	100	100										
	Jumlah Inovasi Daerah	Inovasi	3	5	8										



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH								900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen (%)	33,33	-	-	-	50		50	175.000.000	50		50		
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen (%)	66,67	-	-	-	50	200.000.000	50		50	225.000.000	50	250.000.000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen (%)	18,75	-	-	-	31,25	700.000.000	37,5	725.000.000	43,75	675.000.000	50	650.000.000	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						6.816.443.600		6.929.564.447		6.938.282.121		6.953.059.862		6.884.392.431	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.780.000.000		5.780.000.000		5.780.000.000		5.780.000.000		5.700.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	94,42	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						889.881.600		976.017.581		983.419.169		995.965.952		1.005.587.671	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Indeks manajemen risiko	Poin	2,33	2,4	2,5		2,6		2,7		2,8		2,9		
	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Poin	1,72	1,75	1,8		1,85		1,9		1,95		2		
PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						146.562.000		173.546.866		174.862.952		177.093.910		178.804.760	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Level kapabilitas APIP	Nilai (1-5)	2+	2+	3		3		3		3		3		
UNSUR KEWILAYAHAN						37.123.586.700		38.062.331.925		36.259.924.975		36.348.148.908		36.836.327.072	Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						8.534.500.000		10.334.500.000		8.534.500.000		8.534.500.000		8.484.500.000	KECAMATAN MENTOK
Meningkatnya Pemenuhan	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,96	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	86,82	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7.825.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000	KECAMATAN MENTOK
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4.497.315.400		4.479.148.851		4.460.178.749		4.513.415.411		4.551.792.104	KECAMATAN MENTOK
Meningkatnya desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KECAMATAN MENTOK
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						47.300.000		45.950.748		45.282.925		45.307.668		45.314.354	KECAMATAN MENTOK
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA						8.010.700		7.505.495		7.683.426		7.876.993		57.243.634	KECAMATAN MENTOK
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.650.000.000	KECAMATAN SIMPANG TERITIP
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	92,43	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN						6.072.500		9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000	KECAMATAN SIMPANG TERITIP



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	KECAMATAN SIMPAN TERITIP
Meningkatnya desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KECAMATAN SIMPAN TERITIP
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						146.300.000		76.000.000		77.750.000		78.790.000		79.590.000	KECAMATAN SIMPAN TERITIP
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA						26.034.775		24.392.860		24.971.135		25.600.227		163.541.810	KECAMATAN SIMPAN TERITIP
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						4.657.800.000		4.657.800.000		4.657.800.000		4.657.800.000		4.600.000.000	KECAMATAN JEBUS
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	90,69	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						275.318.300		275.000.000		278.000.000		282.000.000		284.000.000	KECAMATAN JEBUS
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	KECAMATAN JEBUS
Meningkatnya desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KECAMATAN JEBUS
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						146.300.000		76.000.000		77.750.000		78.790.000		79.590.000	KECAMATAN JEBUS
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA						22.029.425		20.640.112		21.129.422		21.661.731		139.919.993	KECAMATAN JEBUS
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.725.000.000		3.225.000.000		3.225.000.000		3.225.000.000		3.200.000.000	KECAMATAN PARITITGA
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	93,55	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						434.072.500		435.000.000		438.000.000		444.000.000		448.000.000	KECAMATAN PARITITGA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	100	100			100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	KECAMATAN PARITITGA



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KECAMATAN PARITIGA
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						146.300.000		76.000.000		77.750.000		78.790.000		79.590.000	KECAMATAN PARITIGA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA						20.026.750		18.763.739		19.208.565		19.692.483		128.109.085	KECAMATAN PARITIGA
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.135.000.000		5.135.000.000		5.135.000.000		5.135.000.000		5.115.000.000	KECAMATAN KELAPA
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	89,85	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						473.902.500		476.000.000		479.000.000		483.000.000		485.000.000	KECAMATAN KELAPA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						927.240.000		923.490.000		919.740.000		930.390.000		938.055.000	KECAMATAN KELAPA
Meningkatnya desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KECAMATAN KELAPA
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						146.300.000		76.000.000		77.750.000		78.790.000		79.590.000	KECAMATAN KELAPA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA						26.034.775		24.392.860		24.971.135		25.600.227		163.541.810	KECAMATAN KELAPA
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.472.000.000		3.472.000.000		3.472.000.000		3.472.000.000		3.450.000.000	KECAMATAN TEMPILANG
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	91,63	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						81.580.000		82.859.895		83.421.909		85.630.934		88.061.106	KECAMATAN TEMPILANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	KECAMATAN TEMPILANG
Meningkatnya desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIRAN UMUM						2.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KECAMATAN TEMPILANG



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						146.300.000		76.000.000		77.750.000		78.790.000		79.590.000	KECAMATAN TEMPILANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA						18.024.075		16.887.365		17.287.709		17.723.234		116.298.176	KECAMATAN TEMPILANG
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.457.606.700		7.604.499.123		7.644.611.858		7.701.793.377		43.640.702.718	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.550.000.000		3.550.000.000		3.550.000.000		3.550.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,49	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	95,53	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1.616.673.800		1.639.082.849		1.650.832.174		1.670.749.013		1.686.022.586	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen (%)	42,86	42,86	42,86		42,86		57,14		57,14		57,14		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.767.925.000		1.824.157.989		1.838.083.572		1.861.689.487		37.879.792.094	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik	Persen (%)	35	38	41		44		46		48		50		



Bidang Urusan Pemerintahan / Program	Indikator outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pada Kader Partai Politik														
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						42.670.000		52.633.285		63.951.112		74.489.877		86.903.038	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen (%)	60,61	61,76	62,50		63,21		63,89		64,55		65,18		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						107.907.400		160.500.000		160.500.000		160.500.000		160.500.000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, udaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penhayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen (%)	50,00	50,00	50,00		50,00		50,00		75,00		75,00		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						372.430.500		378.125.000		381.245.000		384.365.000		327.485.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik dan potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100		100		100		100		100		

Sumber: hasil olah data dan analisis oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari efektivitas dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta melaksanakan program pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengevaluasi dan mengukur capaian tersebut secara objektif, digunakan berbagai indikator yang bersifat makro dan sektoral. Tiga kelompok utama indikator yang digunakan antara lain adalah indikator makro ekonomi, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator makro ekonomi menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara umum, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Tabel yang menunjukkan capaian dan target indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka Barat selama periode 2020–2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020–2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-5,35	0,2	2	2,52	5,47	3,77 – 5,62	3,63– 5,61	3,49– 5,60	3,35– 5,59	3,21– 5,58	3,08– 5,56
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	65,71	74,6	79,86	82,98	91,21	93,8	97,1	100,2	103,1	105,8	108,5
3	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	Persen	17,6	17,9	17,5	17,1	18,2	18,3	18,45	18,6	18,75	18,9	19,05
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,12	3,83	4,86	4,77	4,88	4,8	4,75	4,7	4,65	4,6	4,55
5	Tingkat Kemiskinan	%	2,7	2,75	2,46	2,71	2,59	2,45 – 2,56	2,41– 2,52	2,36 – 2,47	2,30 – 2,40	2,24 – 2,34	2,18 – 2,27
6	Indeks Rasio Gini	Skor (0–1)	0,234	0,248	0,211	0,199	0,201	0,194 – 0,198	0,193 – 0,197	0,192 – 0,196	0,191 – 0,195	0,190 – 0,194	0,189 – 0,193
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor (0–100)	69,08	69,6	70,12	71,13	71,36	71,71	72,01	72,31	72,61	72,9	73,18
8	Emisi Gas Rumah Kaca	CO2eq Gg				-868,04	290,48	275,04	249,6	229,17	208,73	193,29	182,85
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor (0–100)	63,29	69,21	69,39	64,76	70,84	74,22	74,39	74,56	74,73	74,9	75,07

Sumber: hasil olah data dan analisis oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025

Sementara itu, IKU berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah yang bersifat lintas sektor dan berorientasi pada outcome. Di sisi lain, IKD menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan.



Melalui pemantauan dan evaluasi atas ketiga kelompok indikator ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan sesuai sasaran, mengidentifikasi tantangan secara dini, serta merumuskan strategi intervensi yang tepat. Penyusunan capaian dan target indikator dalam RPJMD juga menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik secara teknokratis maupun politis. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya dinilai dari realisasi program semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.



4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4. 4
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,59	2,45 - 2,56	2,41 - 2,52	2,36 - 2,47	2,30 - 2,40	2,24 - 2,34	2,18-2,27
2	Indeks Rasio Gini	Skala 0-1	0,201	0,194-0,198	0,193 - 0,197	0,192-0,196	0,191 - 0,195	0,190 - 0,194	0,189 - 0,193
3	Indeks Ketahanan Pangan	Skor (0-100)	60,25	60,95	61,91	63,49	65,14	66,92	68,86
4	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	Persen (%)	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	70,36	70,41	70,47	70,84	71,22	71,6	71,98
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen (%)	79,82	80,3	80,78	81,26	81,74	82,22	82,7
7	SPM Pemerintah Daerah	Persen (%)	99,16	100	100	100	100	100	100
8	Prevalensi ketidkacukupan konsumsi pangan	Persen (%)	10,85	10,61	10,21	9,79	9,21	8,77	8,40
9	Persentase Desa Mandiri	Persen (%)	48,33	68,33	81,67	100	95,24	96,83	98,41
10	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Persen (%)	13,37	9,07	39,02	56,17	70,87	72,23	73,87
11	Indeks Ketimpangan Gender	Skor (0-1)	0,373	0,361	0,349	0,337	0,324	0,312	0,300
12	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor (0-100)	61,03	61,69	62,35	63,88	64,22	64,98	65,74
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen (%)	5,47	3,77-5,62	3,63-5,61	3,49-5,60	3,35-5,59	3,21-5,58	3,08-5,56
14	Tingkat Inflasi	Persen (%)	-0,30	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26
15	Rasio PDRB Sektor Pertanian	Persen (%)	13,53	13,58	13,62	13,67	13,71	13,75	13,80
16	Persentase Kewirausahaan Daerah	Persen (%)	5,8	5,91	6,00	6,13	6,33	6,59	6,88
17	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum	Persen (%)	1,41	1,43	1,44	1,46	1,47	1,49	1,50
18	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen (%)	46,47	46,58	46,59	46,61	46,8	46,95	47,1
19	Net Ekspor	Miliar Rupiah	5.541,90	5.869,58	6.197,27	6.524,95	6.852,63	7.180,32	7.508,00
20	Indeks Konektifitas	Skor	1,39	1,40	1,41	1,41	1,42	1,43	1,43
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen (%)	18,32	18,55	18,79	19,03	19,28	19,52	19,83



NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Nilai Investasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	1.651	1.425 - 1.921	1.682 - 2.031	1.721 - 2.232	1.962 - 2.413	2.332 - 2.624	2.466 - 2.902
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor (0-100)	70,84	74,22	74,39	74,56	74,73	74,9	75,07
24	Emisi Gas Rumah Kaca	(CO2eq Gg)	290,48	275,04	249,6	229,17	208,73	193,29	182,85
25	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen (%)	28,15*	1,98	2,22	4,92	9,22	15,33	21,87
26	Indeks Risiko Bencana	Skor	145,28	137,73	128,19	119,25	111,469	103,688	96,907
27	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor (0-100)	71,36	71,71	72,01	72,31	72,61	72,9	73,18
28	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,51	7,63	7,78	7,99	8,16	8,33
29	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	11,79	11,85	11,89	12,03	12,07	12,11	12,15
30	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,08	72,19	72,39	72,58	72,77	72,97	73,16
31	Angka Prevalensi Stunting	Persen (%)	19,90	19,7	19,4	19,1	18,8	18,5	18,2
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor (0-100)	77,16	78,84	79,24	79,64	80,05	80,45	80,85
33	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor (0-100)	67,77	68,01	68,4	68,83	69,32	69,79	70,24
34	Indeks Pelayanan Publik	Skor (0-5)	3,70	3,85	3,92	3,99	4,06	4,13	4,2
35	Indeks Integritas Nasional	Skor (0-100)	65,33	66,02	67,05	67,84	68,92	69,81	70,65
36	Indeks Inovasi Daerah	Skor (0-100)	31,11	40,01	43,01	48,01	51, 65	56,63	66,42
37	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	Kapasitas fiskal	Skor	1,457	1,474	1,491	1,518	1,541	1,564	1,587
39	Indeks Pemerintahan Digital	Skor (0-5)	N/A	N/A	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3

Sumber: hasil olah data dan analisis oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025



4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Tabel 4. 5
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASLINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor (0-100)	60,25	60,95	61,91	63,49	65,14	66,92	68,86	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	10,85	10,61	10,21	9,79	9,21	8,77	8,40	
3	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian	Persen (%)	42,44	42,96	44,14	45,31	46,49	47,67	48,85	
4	Jumlah Pelanggan PLN	Pelanggan	77.852	79.839	81.571	83.303	85.034	87.766	96.498	
5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	N/A	951,27	975,6	999,93	1.024,26	1.048,59	1.072,92	
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen (%)	82,26	82,93	83,09	83,24	83,4	83,56	83,71	
7	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,185	0,19	0,21	0,23	0,23	0,25	0,26	
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Poin	145,28	137,73	128,19	119,25	111,47	103,69	96,91	
9	Jumlah Penduduk	Jiwa	217.859	220.990	224.458	227.925	231.393	234.860	238.328	
10	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	76,47	77,6	79	80,4	81,79	83,19	84,59	
11	Pertumbuhan Penduduk	Persen (%)	1,6	1,44	1,57	1,54	1,52	1,5	1,48	
12	Rasio Penduduk (Jenis Kelamin)	Persen (%)	106,8	106,86	106,99	107,12	107,25	107,38	107,51	
13	Emisi Gas Rumah Kaca	CO2eq Gg	290,48	275,04	249,6	229,17	208,73	193,29	182,85	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor (0-100)	71,36	71,71	72,01	72,31	72,61	72,9	73,18	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen (%)	5,47	3,77-5,62	3,63-5,61	3,49-5,60	3,35-5,59	3,21-5,58	3,08-5,56	
3	PDRB ADHK	Rp T	11,4	11,66-11,68	11,94-11,99	12,23-12,33	12,54-12,69	12,86-13,08	13,2-49	
4	PDRB ADHB	Rp T	19,68	20,14 - 20,18	20,62 - 20,72	21,13-21,3	21,66-21,92	22,22-22,59	22,81-23,59	
5	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	91,21	93,8	97,1	100,2	103,1	105,8	108,5	
6	Tingkat Inflasi	Persen (%)	-0,3	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	2,35-3,26	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Indeks Rasio Gini	Skor (0-1)	0,201	0,194-0,198	0,193 - 0,197	0,192-0,196	0,191 - 0,195	0,190 - 0,194	0,189 - 0,193	
8	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	2,59	2,45 - 2,56	2,41 - 2,52	2,36- 2,47	2,30 - 2,40	2,24- 2,34	2,18-2,27	
9	Angka Prevalensi Stunting	Persen (%)	19,90	19,7	19,4	19,1	18,8	18,5	18,2	
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,08	72,19	72,39	72,58	72,77	72,97	73,16	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,51	7,63	7,78	7,99	8,16	8,33	
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,79	11,85	11,89	12,03	12,07	12,11	12,15	
13	Angka Literasi SD	Persen (%)	73,93	75,58	77,22	78,71	80,34	81,96	83,59	
14	Angka Literasi SMP	Persen (%)	72,25	70,54	70,54	70,72	70,88	71,05	71,21	
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	83,84	85,81	87,78	89,75	91,72	93,69	94,66	
16	Indeks Zakat Nasional	Poin	N/A	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	
17	Pemeringkatan Cagar Budaya	Objek	33	33	33	39	41	43	45	
18	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Skor	7,7	10,89	11,15	11,85	13,22	14,46	15,7	
19	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	61,03	61,69	62,35	63,88	64,22	64,98	65,74	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tingkat/Rasio Ketergantungan	Persen (%)	45,3	45,2	45,1	45	44,9	44,8	44,7	
2	Rasio Penduduk Usia Produktif	Persen (%)	69	68,6	68,7	68,7	68,7	68,8	68,8	
3	Rasio Penduduk Usia Non-Produktif	Persen (%)	31	31,4	31,3	31,3	31,3	31,2	31,2	
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen (%)	46,47	46,58	46,59	46,61	46,8	46,95	47,1	
5	Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen (%)	13,52	15,31	15,42	15,47	15,51	15,73	15,94	
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen (%)	5,8	5,91	6,00	6,13	6,33	6,59	6,88	
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen (%)	70,36	70,41	70,47	70,84	71,22	71,6	71,98	
8	Indeks Inovasi Daerah	Poin	31,11	40,01	43,01	48,01	51, 65	56,63	66,42	
9	Rasio PDRB Sektor Pertanian	Persen (%)	13,53	13,58	13,62	13,67	13,71	13,75	13,80	
10	Nilai PMDN	Rp Miliar	1.570,80	1.696,46	1.832,18	1.978,76	2.137,06	2.308,02	2.492,66	
11	Pertumbuhan PMDN	Persen (%)	-18,4	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
12	Nilai PMA	Rp Miliar	80,43	86,87	93,82	101,32	109,43	118,18	127,64	
13	Pertumbuhan PMA	Persen (%)	-80,95	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Rp miliar	3.606	3.867	4.017,00	4.167,00	4.317,00	4.467,00	4.617,00	
15	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK	Rp miliar	1.740	1.751	1.778,00	1.806,00	1.833,00	1.861,00	1.888,00	
16	Proporsi PMTB terhadap PDRB ADHB	Persen (%)	18,32	18,55	18,79	19,03	19,28	19,52	19,83	
17	Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHK)	Rp miliar	4.061	4.071	4.171	4.271	4.371	4.471	4.571	
18	Proporsi Net Ekspor terhadap PDRB ADHB	Persen (%)	28,15	30,73	33,63	36,54	39,45	42,36	45,26	
19	Rata-Rata Indeks Kesulitan Geografis	Persen (%)	31,88	30,22	28,78	26,84	25,15	23,46	21,27	
20	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	Persen (%)	60,77	61,1	61,77	62,61	63,05	63,97	64,68	
21	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen (%)	97,99	97,69	97,99	98,22	98,8	99,11	99,62	
22	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen (%)	4,42	4,69	4,915	5,14	5,365	5,59	5,815	
23	Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	Persen (%)	4,42	4,69	4,81	5,05	5,21	5,39	5,57	
24	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan (TPA & TPST)	Persen (%)	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
25	Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen (%)	97,99	98,22	98,54	98,71	98,98	99,25	99,42	
26	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen (%)	28,15	29,87	30,21	31,92	32,64	33,36	34,08	
27	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen (%)	4,87	4,99	5,15	5,28	5,42	5,56	5,7	
28	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Persen (%)	76,47	79,01	81	83	85,99	87,98	89,97	
29	Jumlah sampah yang dikelola	Ton	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	
30	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen (%)	1,70	1,98	2,22	4,92	9,22	15,33	21,87	
31	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen (%)	4,10	9,56	9,99	10,42	10,85	11,28	11,71	
32	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen (%)	93,36	94,47	95,62	96,76	97,91	98,05	99,19	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB	Persen (%)	0,17	0,272 - 0,273	0, 276 - 0,277	0,286 - 0,288	0,289 - 0,293	0,304 - 0,307	0,325 - 0,327	
34	Rasio Pengeluaran Makanan	Persen (%)	55,7	55,8	56,05	56,25	56,5	56,8	56,95	
35	Rasio Pengeluaran Non-Makanan	Persen (%)	44,3	44,2	43,95	43,75	43,5	43,2	43,05	
36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen (%)	1,41	1,43	1,44	1,46	1,47	1,49	1,5	
37	Return on Asset BUMD	Persen (%)	3,03	2,98	3,05	3,15	3,27	3,35	3,45	
38	Indeks Masyarakat Digital	Poin	47,54	49,14	51,74	53,34	55,94	57,54	60,14	
39	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen (%)	8,44	8,85	9,20	9,55	9,85	10,15	10,45	
40	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	Persen (%)	43,86	44,83	46,33	47,83	49,33	50,83	52,59	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,16	78,84	79,24	79,64	80,05	80,45	80,85	
2	Indeks Integritas Nasional	Poin	65,33	66,02	67,05	67,84	68,92	69,81	70,65	
3	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,38	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Harmoni Indonesia	Skor	N/A	5,5	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8	
5	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,7	3,85	3,92	3,99	4,06	4,13	4,2	
6	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen (%)	85,81	87,45	88,94	90,43	91,91	93,4	94,89	
7	Persentase Penegakan Perda	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen (%)	72,78	73,42	74,06	74,7	75,34	75,98	76,62	
9	Jumlah Kriminal	Kasus	232	219	217	215	213	211	208	
10	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,54	3,6	3,69	3,78	3,89	3,98	4,08	
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Skor	N/A	3,34	3,38	3,42	3,47	3,51	3,53	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen (%)	96,15	96,40	96,75	97,10	97,45	97,8	98,15	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen (%)	83,30	83,45	83,65	83,75	83,95	84,10	84,25	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen (%)	11,43	12,20	12,96	13,72	14,48	15,25	16,01	
4	Presentase Capaian Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	Persen (%)	76,33	77,07-79,48	78,29-70,38	79,07-80,49	80,29-81,39	81,07-79,50	78,29-70,40	
5	Presentase Capaian Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	Persen (%)	70,97	73,28-75,11	75,54-77,12	77,24-79,31	79,54-81,15	81,28-83,22	83,31-85,40	
B	Kesehatan									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen (%)	90,2	100	100	100	100	100	100	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen (%)	98,98	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	136,7	130	116	102	88	74	60	
4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen (%)	99,11	99,38	100	100	100	100	100	
5	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen (%)	95,59	98,91	100	100	100	100	100	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen (%)	99,39	98,67	98,88	99,09	99,3	99,51	99,72	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen (%)	85,95	97,52	98,23	99,72	100	100	100	
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen (%)	86,05	89,49	91,25	93	94,75	96,5	98,25	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen (%)	94,87	95,21	95,55	95,89	96,23	96,57	96,91	
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
13	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (treatment coverage)	Persen (%)	42,53	62,27	63,18	64,21	65,16	66,13	67,1	
14	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (treatment success rate)	Persen (%)	79,83	83,47	83,99	84,52	85,04	85,57	86,09	
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
16	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen (%)	97,96	98,05	98,25	98,55	98,85	99,15	99,45	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen (%)	28,45	29,39	29,83	30,11	30,5	30,86	31,22	
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Persen (%)	79,82	80,30	80,78	81,26	81,74	82,22	82,70	
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
F	Sosial									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
G	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen (%)	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen (%)	70,36	70,41	70,47	70,84	71,22	71,6	71,98	
3	Upah Minimum Kabupaten	Rp	3.640.000	3.733.333	3.826.666	3.919.999	4.013.332	4.106.665	4.199.998	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,42	90,67	90,94	91,2	91,47	91,73	92	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,373	0,361	0,349	0,337	0,324	0,312	0,300	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,33	64,62	65,1	65,57	66,04	66,52	67,00	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen (%)	52,07	52,65	53,05	53,53	54,02	54,51	55,00	
5	Jumlah Pernikahan Usia Anak Umur 0-18 Tahun	Kasus	31	29	27	25	23	21	19	
6	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	40	35	32	29	26	23	20	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Pangan									
1	Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi	Kkal/Kap/Hr	1.902	2.001,67	2.101,34	2.201,01	2.300,68	2.400,35	2.500,02	
2	Ketersediaan Protein untuk Dikonsumsi	Gram/Kap/Hr	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	
3	Kemandirian Pangan – Energi	Kkal/Kap/Hr	583,3	652,75	722,2	791,65	861,1	930,55	1000	
4	Kemandirian Pangan – Protein	Gram/Kap/Hr	52,6	53,5	54,4	55,3	56,2	57,1	58,0	
5	Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen (%)	88,9	91	92	93	94	95	95	
6	Luas Panen Padi	Ha	1.947,95	2.039,96	2.131,97	2.223,98	2.315,99	2.408,00	2.500,01	
7	Produksi Padi	Ton	4.219,82	4.683,18	5.146,54	5.609,90	6.073,26	6.536,62	6.999,98	
8	Produktivitas Padi	Ku/hektar	21,66	22,96	24,14	25,22	26,22	27,15	28,00	
K	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor (0-100)	70,84	74,22	74,39	74,56	74,73	74,9	75,07	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor (0-100)	91,02	82,88	83,08	83,28	83,48	83,68	83,88	
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor (0-100)	67,04	71,37	71,57	71,77	71,97	72,17	72,37	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Skor (0-100)	40,06	63,08	63,15	63,22	63,29	63,36	63,43	
5	Produksi Sampah	Ton	31.307	30.240,83	29.592,66	28.944,49	28.296,32	27.648,15	26.999,98	
6	Sampah yang ditangani/diangkut	Ton	8.813	6.691,67	6.953,34	7.215,01	7.476,68	7.738,35	8.000,02	
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Penduduk Memiliki KTP	Persen (%)	99,3	99,42	99,53	99,65	99,77	99,89	100	
2	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persen (%)	55,83	57,36	58,89	60,41	61,94	63,47	65	
3	Pasangan Memiliki Akta Nikah	Persen (%)	62,60	64,67	66,73	68,80	70,87	72,94	75,00	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin								
	- Mandiri	Persen (%)	48,33	68,33	81,67	100	95,24	96,83	98,41	
	- Maju	Persen (%)	51,67	31,67	18,33	0	4,76	3,17	1,59	
	- Berkembang	Persen (%)	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase PKK aktif	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Posyandu Aktif	Persen (%)	93,55	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen (%)	79,82	75,68	76,32	76,92	80,00	80,49	80,95	
2	Peserta KB Aktif	Orang	29.507	31.464	33.675	35.885	38.096	40.306	42.517	
3	Pasangan Usia Subur (PUS)	Orang	61,03	37.823	38.464	39.105	39.746	40.387	41.028	
O	Perhubungan									
1	Arus Penumpang Masuk dan Keluar Pelabuhan Tanjung Kalian	Orang	727.170	734.442	741.714	748.986	756.257	763.529	770.800	
2	Arus Barang Masuk dan Keluar (Bongkar Muat) Pelabuhan Tanjung Kalian	Ton	682.670	689.497	696.323	703.150	709.977	716.804	723.630	
3	Jumlah Rambu - rambu Lalu Lintas (Unit)	Unit	752	570	612	653	695	736	778	
4	Jumlah Traffic Light	Lokasi/unit	5/29	5/29	5/29	5/29	5/29	5/29	5/29	
5	Panjang Pagar Pengaman Jalan	Meter	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
6	Jumlah Deliniator	Unit	542	542	542	542	542	542	542	
7	Panjang Marka Jalan	Meter	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
8	Jumlah Warning Light	Meter	21	24	24	24	24	24	24	
9	Jumlah Traffic Cone	Unit	32	156	156	156	156	156	156	
10	Panjang Median Jalan	Meter	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83	
P	Komunikasi dan Informatika									
1	Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel	Persen (%)	N/A	83,76	85,01	86,26	87,51	88,76	90,01	
2	Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet	Persen (%)	N/A	65,13	67,10	69,07	71,04	73,01	74,98	
3	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	N/A	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Koperasi Aktif	Persen (%)	85,71	87,43	87,94	88,45	88,96	89,47	89,98	
2	Jumlah Koperasi	Unit	133	133	136	139	142	145	148	
3	Peningkatan Usaha Mikro	Persen (%)	5,65	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7	7,0	
4	Jumlah Usaha Mikro	Unit	38.923	39.162	40.034	40.906	41.779	42.651	43.523	
5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen (%)	0,89	1,06	1,23	1,4	1,57	1,74	1,91	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen (%)	99,78	100	100	100	100	100	100	
R	Penanaman Modal									
1	Pertambahan Nilai Investasi	Miliar Rp	- 492	132,10	142,67	154,08	166,41	179,72	194,10	
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen (%)	48,93	49,93	50,93	51,93	52,93	53,93	54,93	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen (%)	10,87	10,92	10,97	11,07	11,17	11,27	11,37	
3	Prestasi Olahraga	Jumlah medali	17	40	29	30	31	32	32	
T	Statistik									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
U	Persandian									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen (%)	75,97	76,94	77,91	79,88	80,85	91,82	92,79	
V	Kebudayaan									
1	Cagar Budaya yang telah Ditetapkan	Cagar Budaya	33	34	35	37	39	41	43	
2	Terlestarikannya cagar Budaya	Persen (%)	84,85	85,63	86,28	87,94	89,39	91,24	92,89	
W	Perpustakaan									
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	6.512	6.512	6.520	6.530	6.540	6.550	6.560	
2	Jumlah Koleksi Buku	Buku	29.767	33.612	37.567	41.521	45.476	49.430	53.384	
3	Jumlah Judul Buku	Judul	14.049	15.654	17.495	19.337	21.178	23.020	24.862	
X	Kearsipan									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Y	Perikanan									
1	Perikanan Tangkap	Ton	41.355,35	41.769	42.270	42.777	43.333	43.897	44.336	
2	Budidaya Air Tawar	Ton	184,23	157.70	176.25	194.80	213.35	231.90	250.45	
3	Budidaya Air Laut	Ton	1.051,71	753.29	866.02	978.75	1.091.48	1.204.21	1.316.94	
4	Perikanan Tangkap	Rp Miliar	1.258,35	2.426,08	2.711,50	2.996,92	3.282,34	3.567,76	3.853,18	
5	Budidaya Air Tawar	Rp Miliar	5,23	4,24	4,74	5,24	5,74	6,24	6,74	
6	Budidaya Air Laut	Rp Miliar	74,99	35,71	41,69	47,67	53,65	59,62	65,60	
Z	Pariwisata									
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	337.448	275.000	300.000	310.000	330.000	350.000	360.000	
2	Jumlah Hotel dan Penginapan	Unit	58	61	64	66	69	72	75	
3	Jumlah Tamu Wisatawan (Menginap)	Orang	22.653	25.285	26.771	28.257	29.743	31.229	32.715	
AA	Pertanian									
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen (%)	13,53	13,58	13,62	13,67	13,71	13,75	13,8	
2	Luas Areal Hortikultura	Ha	1.618,04	1.583,19	1.626,55	1.669,91	1.713,27	1.756,63	1.799,99	
3	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	5.192,32	5.921,39	6.337,11	6.752,83	7.168,55	7.584,27	7.999,99	
4	Nilai Produksi Hortikultura	Rp	54.192.623.500	62.805.249.792	65.244.199.834	67.683.149.876	70.122.099.918	72.561.049.960	75.000.000.002	
BB	Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Jumlah Pelanggan Perusahaan Listrik Negara	Pelanggan	77.852	78.190	82.990	85.790	89.590	92.390	96.190	
CC	Perindustrian									
1	Jumlah Industri Kecil	Unit	3.574	3741	3909	4078	4247	4416	4584	
2	Pertumbuhan Industri Kecil	Persen (%)	5,09	5,10	5,14	5,18	5,22	5,26	5,30	
DD	Perdagangan									
1	Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHB)	Rp miliar	5.541,90	5.869,58	6.197,27	6.524,95	6.852,63	7.180,32	7.508,00	

Sumber: hasil olah data, analisis dan proyeksi oleh Bapperida Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyusun, 2025



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen RPJMD ini merupakan turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah yang dituangkan secara sistematis ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program-program perangkat daerah maupun lintas sektor, lengkap dengan indikasi pendanaannya untuk periode tahun 2025–2030. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RPJMD berperan penting sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di tingkat daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun. Untuk memastikan pelaksanaannya efektif dan selaras dengan visi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah, diperlukan penegasan kaidah pelaksanaan RPJMD. Kaidah ini mengatur tata kelola, peran dan koordinasi lintas perangkat daerah, mekanisme perencanaan – penganggaran – pelaksanaan – monitoring – evaluasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha agar capaian pembangunan Kabupaten Bangka Barat terukur dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Bangka Barat menjadi acuan/pedoman bagi penyusunan RKPD tahunan serta Renstra Perangkat Daerah, sehingga seluruh program, indikator, dan pendanaan bersifat konsisten dan terarah. Kaidah pelaksanaan pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat meliputi:

1. Bupati Bangka Barat berkewajiban menyebarluaskan Perda RPJMD 2025–2029 kepada masyarakat secara transparan dan partisipatif, memastikan akses informasi yang mudah, serta membuka kanal umpan balik publik sebagai wujud *good governance* (akuntabilitas, keterlibatan warga).
2. Penyusunan RKPD wajib berpedoman pada RPJMD, dengan menjaga konsistensi perencanaan – penganggaran (program/ kegiatan, indikator, dan pendanaan selaras prioritas daerah) serta menerapkan pendekatan adaptif agar responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Seluruh Perangkat Daerah segera menyusun Renstra PD beracuan RPJMD, berbasis data dan bukti (indikator kinerja jelas, baseline–target



terukur), dan mengintegrasikan kolaborasi lintas-Perangkat Daerah untuk mengurangi tumpang tindih serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

4. Pemerintah Kabupaten bersama pemangku kepentingan (pemerintah pusat – provinsi – desa/ kelurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas) mendukung pencapaian target RPJMD melalui sinergi lintas level dan integrasi kebijakan – program – anggaran, disertai partisipasi publik (konsultasi, kemitraan, dan pengawasan masyarakat) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran, Pemerintah Kabupaten menerapkan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan SPIP, memperkuat tata kelola berbasis data (monitoring–evaluasi berkala), serta menjalankan manajemen adaptif (perbaikan berkelanjutan) guna menjaga efektivitas program.
6. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD dengan prinsip efektivitas – efisiensi anggaran, akuntabilitas pelaporan, dan kepatuhan regulasi, disertai mekanisme pelibatan masyarakat (sosialisasi, konsultasi publik, dan penanganan keluhan) untuk memastikan hasil yang relevan dan inklusif.
7. DPRD dan seluruh pemangku kepentingan mengawal pelaksanaan RPJMD melalui fungsi penganggaran dan pengawasan yang selaras dokumen perencanaan, pemanfaatan forum data terintegrasi untuk penilaian kinerja, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi capaian.
8. Bapperida Kabupaten Bangka Barat melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD sekurang – kurangnya sekali dalam lima tahun dengan evaluasi berbasis bukti, rekomendasi perbaikan lintas-sektor, dan penyelarasan hasil evaluasi ke RKPD/perubahan RKPD sebagai bagian dari siklus perencanaan adaptif.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan kinerja pembangunan daerah sesuai target RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025–2029, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terarah sebagai satu kesatuan dalam siklus perencanaan. Pengendalian bertujuan menjamin bahwa proses pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahap ini, seluruh program/ kegiatan dipantau



secara berkala oleh perangkat daerah dengan berfokus pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan sebagai berikut.

1. Pengendalian risiko strategis pemerintah daerah.

Pengendalian dilaksanakan secara berkesinambungan dan partisipatif untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan, dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Kegiatan mencakup pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan. Sistem elektronik yang terintegrasi dari hulu-hilir dihubungkan dengan pengelolaan data yang andal sehingga mendorong pengambilan kebijakan pembangunan berbasis bukti.

2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Untuk menilai capaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta target kinerja jangka menengah, Bapperida Kabupaten Bangka Barat berkewajiban melakukan evaluasi hasil RPJMD sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, penyesuaian kebijakan, dan optimalisasi alokasi sumber daya agar pelaksanaan RPJMD tetap berada pada lintasan target.



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029



LAMPIRAN

A. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029

1. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator: Tingkat Kemiskinan	
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

2. Indeks Gini

Nama Indikator: Indeks Gini	
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i n = Jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:



Nama Indikator: Indeks Gini	
	1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

3. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator: Indeks Ketahanan Pangan															
Definisi	Indeks Ketahanan Pangan adalah skor komposit yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi <i>ketahanan pangan dan gizi</i> di suatu wilayah—baik kabupaten/kota maupun provinsi. Skor ini memungkinkan perbandingan antarwilayah dan menjadi dasar prioritas intervensi penguatan ketahanan pangan. IKP termasuk dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang disusun Badan Pangan Nasional.														
Rumus Perhitungan	Indeks Ketahanan Pangan disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan, dimana pada setiap dimensi terdapat beberapa indikator secagai ukuran.														
Interpretasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI IKP</th><th>INTERPRETASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIORITAS 1</td><td>Sangat Rentan</td></tr> <tr> <td>PRIORITAS 2</td><td>Rentan</td></tr> <tr> <td>PRIORITAS 3</td><td>Agak Rentan</td></tr> <tr> <td>PRIORITAS 4</td><td>Agak Tahan</td></tr> <tr> <td>PRIORITAS 5</td><td>Tahan</td></tr> <tr> <td>PRIORITAS 6</td><td>Sangat Tahan</td></tr> </tbody> </table>	KATEGORI IKP	INTERPRETASI	PRIORITAS 1	Sangat Rentan	PRIORITAS 2	Rentan	PRIORITAS 3	Agak Rentan	PRIORITAS 4	Agak Tahan	PRIORITAS 5	Tahan	PRIORITAS 6	Sangat Tahan
KATEGORI IKP	INTERPRETASI														
PRIORITAS 1	Sangat Rentan														
PRIORITAS 2	Rentan														
PRIORITAS 3	Agak Rentan														
PRIORITAS 4	Agak Tahan														
PRIORITAS 5	Tahan														
PRIORITAS 6	Sangat Tahan														
Sumber Data	Badan Pangan Nasional														
Frekuensi	Tahunan														

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka	
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif



Nama Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka	
	mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PAK}{P_{(15+)}} \times 100$ Dimana: TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) P₍₁₅₊₎ = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

6. Rumah Tangga Dengan Hunian Layak (%)

Nama Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak(%)	
Definisi	Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni.
Rumus Perhitungan	Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak $PLH = \frac{JRTHL}{JRT} \times 100$



Nama Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak(%)	
	Keterangan: PLH = Persentase rumah tangga hunian layak JRTHL =Jumlah rumah tangga hunian layak JRT = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan masyarakat dari sektor perumahan
Sumber Data	Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

7. SPM Pemerintah Daerah

Nama Indikator: SPM Pemerintah Daerah	
Definisi	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah persentase rata-rata pencapaian pemenuhan target SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang bersifat esensial.
Rumus Perhitungan	$SPM\ PEMDA = \frac{\sum_{i=1}^6 Capaian\ SPM\ Urusan_i}{6}$ Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial
Interpretasi	Semakin tinggi capaian, menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

8. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Nama Indikator: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	
Definisi	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya



Nama Indikator: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). F(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator: Persentase Desa Mandiri	
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Desa $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ Keterangan: ID: Indeks Desa D: Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi,



Nama Indikator: Persentase Desa Mandiri	
	lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Pelestarian Kebudayaan

Nama Indikator: Persentase Pelestarian Kebudayaan	
Definisi	Persentase Pelestarian Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan langkah-langkah strategis (Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan) terkait kemajuan pembangunan kebudayaan fokus pada dimensi warisan budaya. Dimensi warisan budaya yang digunakan adalah; a) 10 Objek Pemajuan Kebudayaan : Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Tradisional, dan Olahraga Tradisional. b) Cagar Budaya.
Rumus Perhitungan	$PPK = \frac{OPK + CB}{ALL\ OPK + CB} \times 100$ Keterangan : PPK : Persentase Pelestarian Kebudayaan OPK+CB: Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang telah dilakukan perlindungan/pengembangan/pemanfaatan/pembinaan. ALL OPK+CB: Seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang tertuang dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) atau tertuang dalam Dapobud.
Interpretasi	Semakin tinggi Persentase Pelestarian Kebudayaan maka semakin baik kemajuan pembangunan kebudayaan pada dimensi warisan budaya
Sumber Data	Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

11. Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator: Indeks Ketimpangan Gender	
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$



Nama Indikator: Indeks Ketimpangan Gender	
	$G_p = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki - MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan - MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik - IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi - IP = Indeks dimensi pemberdayaan - IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik - IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 – 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator: Indeks Pembangunan Keluarga	
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.



Nama Indikator: Indeks Pembangunan Keluarga	
	Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Penilaian Indeks Pembangunan Keluarga terdiri dari 3 dimensi, 11 indikator dan 17 variabel.
Rumus Perhitungan	Indeks Pembangunan Keluarga diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan.
Interpretasi	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: • Kurang baik (rentan) apabila nilainya <40. • Cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. • Baik (tangguh) apabila nilainya >70.
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Frekuensi	Tahunan

13. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	
Definisi	Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Laju Pertumbuhan ekonomi adalah indikator mendasar yang menggambarkan perekonomian suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$LPE = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100$ Dimana: $PDRB_t$ = PDRB tahun sekarang $PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya
Interpretasi	Laju Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kesuksesan atau kemajuan ekonomi yang tercipta dalam perekonomian. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan atau kemunduran dalam produksi riil pada perekonomian daerah tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan perekonomian dalam daerah tersebut mengalami pertumbuhan/kemajuan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

14. Inflasi

Nama Indikator: Inflasi	
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi



Nama Indikator: Inflasi	
	kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui IHK di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Tahunan.

15. Rasio PDRB Sektor Pertanian

Nama Indikator: Rasio PDRB Industri Pertanian	
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Sektor yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Pertanian terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Pertanian} = \frac{\text{Nilai tambah sektor Pertanian}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio sektor Pertanian terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, semakintinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator: Rasio Kewirausahaan Daerah	
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran



Nama Indikator: Rasio Kewirausahaan Daerah	
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional. Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus).

17. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum} = \frac{\text{Nilai tambah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

18. RasioPDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator: RasioPDRB Industri Pengolahan	
Definisi	RasioProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakintinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

19. Net Ekspor

Nama Indikator: Net Ekspor	
Definisi	Net ekspor didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah.
Rumus Perhitungan	Nilai Ekspor Barang dan Jasa – Nilai Impor Barang dan Jasa (Atas Dasar Harga Berlaku)
Interpretasi	Net ekspor antar daerah hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar



Nama Indikator: Net Ekspor	
	daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

20. Indeks Konektivitas

Nama Indikator: Indeks Konektivitas	
Definisi	Indeks Konektivitas adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan (<i>connectivity</i>) jaringan jalan dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana jaringan jalan mampu menghubungkan simpul-simpul (<i>nodes</i> , misalnya persimpangan atau pusat kegiatan) dengan efektif
Rumus Perhitungan	$n = \frac{\text{Jumlah Jaringan Jalan/Simpul Jalan}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}}$
Interpretasi	Nilai indeks konektivitas yang semakin tinggi menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak jalan yang tersedia untuk menghubungkan berbagai titik dalam suatu wilayah, sehingga interaksi dan kemudahan akses antar wilayah lebih baik
Sumber Data	Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator: Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan <i>share</i> PMTB terhadap PRDB kabupaten.
Rumus Perhitungan	$PMTB (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB ADHK} \times 100$ Keterangan: PMTB : PMTB berdasarkan PDRB sisi pengeluaran (miliar rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



22. Nilai Investasi Penanaman Modal

Nama Indikator: Nilai Investasi Penanaman Modal	
Definisi	Nilai Investasi Penanaman Modal adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha, yang dihitung dari penjumlahan modal tetap dan modal kerja.
Rumus Perhitungan	$NIPM = PMA + PMDN$ NIPM = Nilai Investasi Penanaman Modal PMA = Nilai Investasi Penanaman Modal Asing PMDN = Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Interpretasi	Semakin besar nilai investasi penanaman modal menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan, mendorong produksi barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).	
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,3760 \times IKA) + (0,4050 \times IKU) + (0,1712 \times IKL) + (0,0478 \times IKEG)$	
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Nomor	Kategori
	1	Sangat Baik
	2	Baik
	3	Sedang
	4	Kurang
	5	Sangat Kurang
Sumber Data	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup	
Frekuensi	Tahunan	

24. Emisi Gas Rumah Kaca (CO₂eq Gg)

Nama Indikator: Emisi Gas Rumah Kaca (CO ₂ eq Gg)	
Definisi	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. emisi GRK adalah angka emisi GRK daerah di titik tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Emisi/Penyerapan GRK = AD x EF Keterangan : AD : data kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia yang menghasilkan emisi atau serapan GRK



Nama Indikator: Emisi Gas Rumah Kaca (CO ₂ eq Gg)	
	EF : faktor emisi atau serapan GRK per satuan unit kegiatan yang dilakukan
Interpretasi	Semakin rendah Emisi GRK, maka kualitas lingkungan hidup semakin baik
Sumber Data	1. Sistem AKSARA Bappenas 2. Sistem <i>SIGN SMART</i> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

25. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; - Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. - Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.



Nama Indikator: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TSRT: Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Semakin tinggi sampah yang terolah, maka semakin baik kinerja pengolahan sampah di daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator: Indeks Risiko Bencana	
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan



Nama Indikator: Indeks Risiko Bencana	
	kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacitiy}$ Keterangan <i>Hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai IRB, diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat IRB sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 – 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup terkait capaian pembangunan manusia yang berbasis tiga dimensi dasar yaitu: 1) Dimensi umur panjang dan hidup sehat atau <i>a long and healthy life</i>; 2) Dimensi pengetahuan atau <i>knowledge</i>; dan 3) Dimensi standar hidup layak atau <i>decent standard of living</i>. IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia dalam memperoleh standar kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang layak untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM pada dimensi umur panjang dan hidup sehat didapatkan dari indikator Usia Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kemudian dimensi pengetahuan didapatkan dari indikator Harapan Lama Sekolah yang menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sementara itu, dimensi standar hidup layak didapatkan dari indikator pengeluaran perkapita yang merupakan gambaran dari pola konsumsi rumah tangga secara umum



Nama Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	
	dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.
Rumus Perhitungan	1. Kesehatan $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ 2. Pendidikan $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ 3. Pengeluaran $I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$ 4. Indeks Pembangunan Manusia $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$
Interpretasi	Nilai IPM dikelompokkan menjadi 4 kelompok untuk melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Kelompok nilai IPM tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$ 2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$ 3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$ 4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

28. Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator: Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
Definisi	Rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:



Nama Indikator: Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
	1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$RLS_{15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} : Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i : Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 = 7,47 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kabupaten Bangka Barat yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,47 tahun atau telah menamatkan kelas VII.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

29. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator: Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
Definisi	Harapan Lama Sekolah (HLS) amanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$HLS = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK : Faktor koreksi pesantren E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : Usia (7,8,...,n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 11,73 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,73 tahun atau setara dengan kelas XI (jenjang SMA)
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

30. Usia Harapan Hidup

Nama Indikator: Usia Harapan Hidup (Tahun)	
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah



Nama Indikator: Usia Harapan Hidup (Tahun)	
	tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

31. Angka Prevalensi *Stunting*

Nama Indikator: Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	
Definisi	<i>Stunting</i> (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis pada balita yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0$ b. Pendek: $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5) P\ stunting}{JAB(5)} \times 100.000$ Keterangan: PAB(5)P<i>stunting</i>: Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>) JAB(5) P<i>stunting</i>: Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5) SP\ stunting}{JAB(5)} \times 100.000$ Keterangan: PAB(5)SP<i>stunting</i> : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>) JAB(5) SP<i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ Stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP$
Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di



Nama Indikator: Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	
	wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i>.
Sumber Data	Survei Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan.
Frekuensi	Tahunan

32. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi																										
Definisi	Indeks ini digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pengukuran didasarkan pada aspek-aspek seperti manajemen, pelayanan, integritas, dan sistem birokrasi yang modern dan akuntabel. IRB mencakup dua kerangka utama: • RB General (indikator umum) • RB Tematik (indikator khusus sesuai tema prioritas) Setiap instansi diberi skor dan predikat berdasarkan akumulasi penilaian ini.																									
Rumus Perhitungan	Indeks RB total = RB General + RB Tematik (proporsi sebagaimana ditetapkan Kementerian PANRB)																									
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi, artinya semakin baik pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga dimaksud. Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td>>30 –50</td><td>CC</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>> 80 – 90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr></table>		Range Nilai	Kategori	Makna	> 0 – 30	D	Sangat Kurang	>30 –50	CC	Kurang	> 50 – 60	C	Cukup	> 60 – 70	B	Baik	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	> 80 – 90	A	Memuaskan	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
Range Nilai	Kategori	Makna																								
> 0 – 30	D	Sangat Kurang																								
>30 –50	CC	Kurang																								
> 50 – 60	C	Cukup																								
> 60 – 70	B	Baik																								
> 70 – 80	BB	Sangat Baik																								
> 80 – 90	A	Memuaskan																								
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																								
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																									
Frekuensi	Tahunan																									



33. Nilai SAKIP

Nama Indikator: Nilai SAKIP																										
Definisi	Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah—baik pusat maupun daerah—yang menunjukkan sejauh mana sistem manajemen kinerja diimplementasikan secara efektif dan akuntabel, meliputi empat komponen utama SAKIP.																									
Rumus Perhitungan	<table><tr><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100</td></tr></table>		Komponen	Bobot	Perencanaan Kinerja	30	Pengukuran Kinerja	30	Pelaporan Kinerja	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	TOTAL	100												
Komponen	Bobot																									
Perencanaan Kinerja	30																									
Pengukuran Kinerja	30																									
Pelaporan Kinerja	15																									
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																									
TOTAL	100																									
Interpretasi	Semakin tinggi nilai SAKIP, artinya semakin baik pelaksanaan system akuntabilitas kinerja di lembaga dimaksud. Perhitungan Nilai SAKIP dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td>>30 –50</td><td>CC</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>> 80 – 90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr></table>		Range Nilai	Kategori	Makna	> 0 – 30	D	Sangat Kurang	>30 –50	CC	Kurang	> 50 – 60	C	Cukup	> 60 – 70	B	Baik	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	> 80 – 90	A	Memuaskan	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
Range Nilai	Kategori	Makna																								
> 0 – 30	D	Sangat Kurang																								
>30 –50	CC	Kurang																								
> 50 – 60	C	Cukup																								
> 60 – 70	B	Baik																								
> 70 – 80	BB	Sangat Baik																								
> 80 – 90	A	Memuaskan																								
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																								
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																									
Frekuensi	Tahunan																									

34. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator: Indeks Pelayanan Publik	
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. - Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per Indikator} = \left(\frac{\text{Nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ - Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per Aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ - Menentukan indeks $\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$



Nama Indikator: Indeks Pelayanan Publik																															
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>Transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>Useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
	Range Nilai	Kategori	Makna																												
	0 – 1,00	F	Gagal																												
	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																												
	1,51 – 2,00	D	Buruk																												
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

35. Indeks Integritas Nasional

Nama Indikator: Indeks Integritas Nasional	
Definisi	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Ekspert (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. IIN didapat dari hasil perhitungan Survei Penilaian Integritas yang merupakan survei untuk mengukur tingkat/risiko korupsi di suatu K/L/PD.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan



36. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator: Indeks Inovasi Daerah											
Definisi	Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Permendagri No. 104 Tahun 2018). Indeks Inovasi Daerah adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek jumlah inovasi daerah (<i>quantity</i>), aspek mutu inovasi daerah (<i>quality</i>) dan aspek dampak/manfaat inovasi daerah (<i>beneficial</i>). Hasil perpaduan penilaian antara berbagai bentuk/bidang inovasi daerah dengan aspek-aspek inovasi daerah menjadi dasar untuk menentukan pemerintah daerah inovatif.										
Rumus Perhitungan	a) Penghitungan Skor Total $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{\text{MAX}(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $\text{Skor Total} = SPD + SID$ Keterangan: n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi MAX(10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250.										
Interpretasi	Indeks Inovasi Daerah diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap tipe dan indikator pembentuknya. Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah, menunjukkan semakin tinggi tingkat inovasi suatu daerah. Indeks inovasi daerah dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaaya saing. Skala Indeks Inovasi Daerah adalah 0 s.d. 100 dengan Skor dan Kategori sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td><td>60,01 - 100,00</td></tr> <tr> <td>Inovatif</td><td>35,00 – 60,00</td></tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 - 34,99</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dinilai</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 - 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 - 34,99	Tidak Dapat Dinilai	0
Kategori	Rentang Skor										
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00										
Inovatif	35,00 – 60,00										
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99										
Tidak Dapat Dinilai	0										
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia										
Frekuensi	Tahunan										



37. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Nama Indikator: Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah											
Definisi	Opini BPK atas LKPD merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan pemerintah daerah dalam laporan keuangan.										
Rumus Perhitungan	Penentuan opini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas 4 kriteria utama: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Kecukupan Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)										
Interpretasi	Tipe Opini yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Opini</th><th>Makna</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wajar Tanpa Pengecualian</td><td>Laporan keuangan dianggap menyajikan informasi secara wajar sesuai SAP, bebas dari salah saji material, dengan pengendalian intern dan kepatuhan yang memadai.</td></tr> <tr> <td>Wajar Dengan Pengecualian</td><td>Laporan keuangan wajar, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dikecualikan (misalnya salah saji material terbatas).</td></tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td><td>Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai SAP; terdapat penyimpangan material.</td></tr> <tr> <td>Disclaimer/ Tidak Memberikan Opini</td><td>BPK tidak dapat menyatakan opini karena bukti pemeriksaan tidak cukup (misalnya catatan keuangan sangat buruk).</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Opini	Makna	Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan keuangan dianggap menyajikan informasi secara wajar sesuai SAP, bebas dari salah saji material, dengan pengendalian intern dan kepatuhan yang memadai.	Wajar Dengan Pengecualian	Laporan keuangan wajar, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dikecualikan (misalnya salah saji material terbatas).	Tidak Wajar	Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai SAP; terdapat penyimpangan material.	Disclaimer/ Tidak Memberikan Opini	BPK tidak dapat menyatakan opini karena bukti pemeriksaan tidak cukup (misalnya catatan keuangan sangat buruk).
Jenis Opini	Makna										
Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan keuangan dianggap menyajikan informasi secara wajar sesuai SAP, bebas dari salah saji material, dengan pengendalian intern dan kepatuhan yang memadai.										
Wajar Dengan Pengecualian	Laporan keuangan wajar, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dikecualikan (misalnya salah saji material terbatas).										
Tidak Wajar	Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai SAP; terdapat penyimpangan material.										
Disclaimer/ Tidak Memberikan Opini	BPK tidak dapat menyatakan opini karena bukti pemeriksaan tidak cukup (misalnya catatan keuangan sangat buruk).										
Sumber Data	BPK RI										
Frekuensi	Tahunan										

38. Kapasitas Fiskal

Nama Indikator: Kapasitas Fiskal													
Definisi	Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai. Indikator ini digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, serta sebagai dasar kebijakan transfer fiskal ke daerah.												
Rumus Perhitungan	$RKFD = \frac{KFD}{\text{Belanja Pegawai}}$ Note :Rumusan KFD sering berubah, disesuaikan dengan kondisi yang ditentukan oleh pihak Kementerian Keuangan.												
Interpretasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI KFD</th><th>INTERPRETASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANGAT TINGGI</td><td>Daerah dengan kemampuan fiskal sangat kuat; relatif mandiri dalam pendanaan.</td></tr> <tr> <td>TINGGI</td><td>Daerah dengan kemampuan fiskal kuat, sebagian besar kebutuhan dapat dibiayai.</td></tr> <tr> <td>SEDANG</td><td>Daerah dengan kemampuan fiskal moderat.</td></tr> <tr> <td>RENDAH</td><td>Daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat.</td></tr> <tr> <td>SANGAT RENDAH</td><td>Daerah dengan kapasitas fiskal paling lemah, hampir seluruh kebutuhan dari pusat.</td></tr> </tbody> </table>	KATEGORI KFD	INTERPRETASI	SANGAT TINGGI	Daerah dengan kemampuan fiskal sangat kuat; relatif mandiri dalam pendanaan.	TINGGI	Daerah dengan kemampuan fiskal kuat, sebagian besar kebutuhan dapat dibiayai.	SEDANG	Daerah dengan kemampuan fiskal moderat.	RENDAH	Daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat.	SANGAT RENDAH	Daerah dengan kapasitas fiskal paling lemah, hampir seluruh kebutuhan dari pusat.
KATEGORI KFD	INTERPRETASI												
SANGAT TINGGI	Daerah dengan kemampuan fiskal sangat kuat; relatif mandiri dalam pendanaan.												
TINGGI	Daerah dengan kemampuan fiskal kuat, sebagian besar kebutuhan dapat dibiayai.												
SEDANG	Daerah dengan kemampuan fiskal moderat.												
RENDAH	Daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat.												
SANGAT RENDAH	Daerah dengan kapasitas fiskal paling lemah, hampir seluruh kebutuhan dari pusat.												



Nama Indikator: Kapasitas Fiskal	
Sumber Data	Kementerian Keuangan RI
Frekuensi	Tahunan

39. Indeks Pemerintahan Digital

Nama Indikator: Indeks Pemerintahan Digital																				
Definisi	Indeks Pemerintahan Digital (IPD) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dan penerapan transformasi digital dalam pemerintahan. IPD mengukur berbagai aspek, termasuk infrastruktur digital, layanan online, keamanan siber, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik berbasis digital.																			
Rumus Perhitungan	INDEKS PEMDI = Σ (NDj x BDj) Keterangan: • NDj:Indeks Domain ke-j (merupakan nilai yang diperoleh dari evaluasi setiap domain Pemdi). • BDj:Bobot Domain (merupakan nilai bobot yang diberikan pada setiap domain Pemdi, yang mencerminkan tingkat kepentingan domain tersebut).																			
Interpretasi	Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE/Pemerintahan Digital dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel berikut : <table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 - 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 - < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 - < 3,5</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 - < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																		
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																		
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																		
3	2,6 - < 3,5	Baik																		
4	1,8 - < 2,6	Cukup																		
5	< 1,8	Kurang																		
Sumber Data	Kementerian PAN-RB																			
Frekuensi	Tahunan																			



B. RUMUSAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH RPJMD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029

Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini.	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD [dibagi] Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada kabupaten yang bersangkutan [dikali] 100.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar[dibagi] Jumlah anak usia 7 -15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan [dikali] 100.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan.	Jumlah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan [dibagi] Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan [dikali] 100.
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik sesuai standar.	Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik [dibagi] jumlah guru [dikali] 100.
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal.	Jumlah Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal [dibagi] jumlah Pendidikan Dasar [dikali] 100.
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki jamkes.	jumlah penduduk yang memiliki jamkes dibagi jumlah penduduk [dikali] 100.
	Persentase FKTP pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.	jumlah FKTP pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar [dibagi] jumlah FKTP pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian [dikali] 100.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar.	jumlah SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar [dibagi] jumlah SDM bidang kesehatan [dikali] 100.
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang telah memenuhi ketentuan.	jumlah sarana farmasi (apotik dan toko obat), alat kesehatan (toko alat kesehatan, optik), makanan minuman (IRTP dan TPP) yang telah memenuhi ketentuan [dibagi] jumlah



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
		sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman [dikali] 100.
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS.	jumlah desa ber-PHBS [dibagi] jumlah desa yang disurvei [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luasan Kawasan Rawan Banjir yang ditangani.	Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangani [dibagi] luas total kawasan rawan banjir [dikali] 100.
	Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob.	Luasan Kawasan rawan Abrasi dan Banjir Rob yang dilindungi [dibagi] luas total Kawasan rawan Abrasi dan Banjir Rob [dikali] 100.
	Persentase Luas Layanan Irigasi.	Luas Irigasi yang terlayani [dibagi] luas total daerah Irigasi [dikali] 100.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM).	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM) [dibagi] Total Rumah Tangga [dikali] 100.
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan TPA/ TPST/ TPS3R.	Jumlah sarana persampahan TPA/ TPST/ TPS3R yang tersedia [dibagi] sarana persampahan TPA/ TPST/ TPS3R yang seharusnya tersedia [dikali] 100.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi aman.	Jumlah sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi aman [dibagi] total sarana prasarana sistem air limbah domestik [dikali] 100.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik.	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik [dibagi] Total Panjang Drainase [dikali] 100.
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani.	Jumlah bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani [dibagi] bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya [dikali] 100.
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertata.	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertata [dibagi] total Penataan Bangunan dan Lingkungan [dikali] 100.
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang [dibagi] total panjang jalan kabupaten [dikali] 100.
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi bersertifikat.	Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikat [dibagi] target tenaga terampil konstruksi bersertifikat [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah produk rencana tata ruang (surat permohonan persetujuan substansi) [dibagi] target produk rencana tata ruang yang ditetapkan [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni [dibagi] jumlah rumah yang tertimpa bencana alam [dikali] 100.
Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten yang ditangani.	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dibagi total luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten [dikali] 100.
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan kumuh yang Tertangani [dibagi] jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh [dikali] 100.
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Untulitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU.	Jumlah wilayah RT yang sudah dilengkapi PSU [dibagi] jumlah wilayah RT di Kabupaten Bangka Barat [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana [dibagi] jumlah penduduk yang tertimpa bencana [dikali] 100.
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan.	Perda dan Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditegakkan [dibagi] total perda dan perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berlaku [dikali] 100.
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas.	Jumlah gangguan Tibumtranmas yang ditangani [dibagi] total gangguan Tibumtranmas yang dilaporkan [dikali] 100.
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman Penyelamatan dan evakuasi oleh instansi terkait.	Jumlah Layanan Pemadaman Penyelamatan dan evakuasi dalam waktu tanggap oleh instansi terkait [dibagi] Jumlah Kasus Kebakaran [dikali] 100.
	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan.	Jumlah Layanan pemadaman dalam waktu tanggap yang dilakukan oleh kelompok relawan [dibagi] Jumlah Kejadian Kebakaran [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran).	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran) [dibagi] total kondisi yang membahayakan manusia (non Kebakaran) [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif.	Jumlah PSKS yang aktif [dibagi] jumlah PSKS se-kabupaten [dikali] 100.
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi.	PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi (dibagi) jumlah PPKS Keseluruhan (dikali) 100.
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	PPKS yang memperoleh jamsos [dibagi] jumlah PPKS keseluruhan [dikali] 100.
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani.	Jumlah korban bencana yang tertangani [dibagi] jumlah korban bencana [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya.	jumlah peserta yang mendapat sertifikat keahlian dasar [dibagi] jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan [dikali] 100.
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan .	Jumlah tenaga kerja yang diikuti pelatihan [dibagi] jumlah tenaga kerja yang ditempatkan [dikali] 100.
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan dialog sosial.	Jumlah perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan dialog sosial [dibagi] jumlah perusahaan [dikali] 100.
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran resfonsif gender (ARG).	Jumlah ARG pada belanja APBD [dibagi] Jumlah seluruh belanja di APBD [dikali] 100.
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar.	Jumlah keluarga yang diberikan pembelajaran keluarga (puspaga) berperspektif gender dan hak anak dibagi jumlah keluarga (pus) dikali 100.
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak.	Jumlah data gender dan anak yang disusun [dibagi] Jumlah data gender dan anak yang seharusnya tersusun [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif [dibagi] total korban kekerasan terhadap perempuan [dikali] 100.
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase rekomendasi hak anak yang ditindaklanjuti.	Jumlah rekomendasi pemenuhan hak anak yang dikeluarkan.
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.	Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif [dibagi] total korban kekerasan terhadap anak [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi).	Persentase kontribusi energi konsumsi aktual [dikali] bobot kelompok pangan.
	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan).	Persentase kontribusi energi ketersediaan aktual [dikali] bobot kelompok pangan.
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan.	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan [dibagi] Total Desa/Kelurahan [dikali] 100.
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan.	Jumlah Pangan Segar yang aman [dibagi] Jumlah Pangan Segar yang diawasi [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.	Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan [dibagi] total sengketa tanah garapan [dikali] 100.
Program Penatagunaan Tanah	Persentase aset tanah bersertifikat.	Jumlah Aset tanah bersertifikat [dibagi] total aset tanah [dikali] 100.
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase fasilitasi objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.	Jumlah fasilitasi Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dilaksanakan [dibagi] total Fasilitasi Tanah Objek Landreform (TOL) yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang direncanakan [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia [dibagi] jumlah dokumen lingkungan



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
		hidup yang seharusnya dimiliki [dikali] 100.
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang mengelola Limbah B3.	Jumlah Pelaku Usaha yang mengelola Limbah B3 [dibagi] jumlah pelaku usaha yang dibina [dikali] 100.
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL) [dibagi] total Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina [dikali] 100.
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup.	Jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditindaklanjuti [dibagi] total pengaduan [dikali] 100.
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan.	Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan adiwiyata [dibagi] total sekolah yang mengikuti program Adiwiyata [dikali] 100.
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Air.	Sesuai dengan perhitungan peraturan perundangan.
	Indeks Kualitas Udara.	Sesuai dengan perhitungan peraturan perundangan.
	Persentase sumber emisi GRK yang diinventarisasi.	Jumlah sumber emisi GRK yang diinventarisasi [dibagi] jumlah sumber emisi GRK di Kab. Bangka Barat [dikali] 100.
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH dalam kondisi baik.	Luasan RTH dalam kondisi baik [dibagi] Total luasan RTH [dikali] 100.
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang diberikan penyuluhan lingkungan hidup.	Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang diberikan penyuluhan lingkungan hidup [dibagi] jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan [dikali] 100.
Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang di kelola.	Jumlah sampah yang dikelola pertahun (ton).
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan.	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan [dibagi] jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen administrasi kependudukan [dikali] 100.
Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil.	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil [dibagi] jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen catatan sipil [dikali] 100.
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan.	Jumlah data/informasi kependudukan yang disampaikan ke instansi/mitra [dibagi] jumlah data/informasi kependudukan yang diminta/dibutuhkan oleh instansi/mitra [dikali] 100.
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan.	Jumlah profil kependudukan yang tersusun [dibagi] profil yang seharusnya disusun [dikali] 100.
Urusan Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa.	Kebijakan penataan desa yang diterapkan [dibagi] jumlah kebijakan yang berlaku [dikali] 100.
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik.	Jumlah Pemerintahan desa/kelurahan yang berkinerja baik [dibagi] total desa/kelurahan [dikali] 100.
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan desa (LKD) yang aktif [dibagi] total keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dalam satu wilayah (Kabupaten) [dikali] 100.
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi.	Jumlah kerjasama yang terimplementasi [dibagi] keseluruhan kerja sama yang masih berlaku [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (TFR).	$TFR = \sum ASFR_i \times 5$ (jika rentang waktu 5 tahun).
	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR).	Jumlah kelahiran perempuan umur (15-19)/Jumlah perempuan umur (15-19) *konstanta (1000).
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR).	Banyaknya Peserta KB Aktif Modern (Modern PA) [dibagi] dengan Banyaknya Peserta KB Aktif [dikali] 100..



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need).	PUS bukan peserta KB (IAT +TIAL) [dibagi] Total PUS [dikali] 100.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga BKB yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Jumlah keluarga BKB yang menjadi anggota poktan BKB [dibagi] Jumlah sasaran Keluarga BKB [dikali] 100.
	Persentase keluarga BKR yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Jumlah keluarga BKR yang menjadi anggota poktan BKR [dibagi] Jumlah sasaran Keluarga BKR [dikali] 100.
	Persentase keluarga BKL yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Jumlah keluarga lansia yang menjadi anggota poktan BKL [dibagi] Jumlah sasaran Keluarga BKL [dikali] 100.
	Persentase keluarga UPPKA yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok UPPKA [dibagi] Jumlah keluarga [dikali] 100
	Persentase remaja yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Jumlah Remaja yang menjadi anggota Poktan PIK R [dibagi] Jumlah Sasaran Remaja PIK R [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang terpasang sesuai standar.	Jumlah perlengkapan jalan yang telah terpasang pada Kabupaten/Kota [dibagi] jumlah kebutuhan perlengkapan jalan pada Kabupaten [dikali] 100.
	Konektivitas Darat.	Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota [dibagi] jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten [dikali] 100.
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengembangan pelabuhan.	Jumlah pengembangan sisi darat pelabuhan [dibagi] rencana pengembangan pelabuhan [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan konten informasi publik yang disebarluaskan.	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan pada Tahun N [dikurang] Jumlah Konten informasi publik yang disebarluaskan pada Tahun N-1 [dibagi] Jumlah Konten informasi publik yang disebarluaskan pada Tahun N-1 [dikali] 100.
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan Pemerintahan Digital.	Jumlah OPD yang menyelenggarakan administrasi



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
		Pemerintahan secara Digital [dibagi] total perangkat daerah [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang di fasilitasi.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang di fasilitasi [dibagi] Total Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam [dikali] 100.
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan [dibagi] total koperasi yang melaksanakan RAT [dikali] 100.
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP sehat.	Jumlah KSP/USP sehat [dibagi] Total KSP/USP yang dinilai [dikali] 100.
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan.	Jumlah koperasi yang diberikan pelatihan [dibagi] Total koperasi aktif [dikali] 100.
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT.	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT [dibagi] Total Koperasi Aktif [dikali] 100.
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang memiliki izin.	Jumlah usaha mikro yang memiliki NIB [dibagi] Total usaha mikro [dikali] 100.
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan.	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan [dibagi] Total usaha mikro [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi.	Realisasi investasi tahun N [dibagi] target investasi Tahun N [dikali] 100.
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi.	Jumlah NIB yang diterbitkan tahun N [dikurang] jumlah NIB yang terbit Tahun N-1 [dibagi] jumlah NIB terbit Tahun N-1 [dikali] 100.
Program Pelayanan Penanam Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.	Jumlah izin yang keluar [dibagi] jumlah permohonan pelaku usaha yang mengajukan izin usaha yang sesuai ketentuan [dikali] 100.
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanam Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.	Jumlah Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha yang terselesaikan [dibagi] jumlah Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha [dibagi] Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) [dikali] 100.
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan [dibagi] Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) [dikali] 100.
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi Olahraga.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga Provinsi/ Nasional.
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan pramuka aktif.	Jumlah gugus depan pramuka yang aktif [dibagi] Total gugus depan pramuka [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS).	Hasil Proses Penilaian yang dilakukan oleh BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap penilaian mandiri untuk mengukur tingkat pematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah yang meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam jaringan Komunikasi Sandi yang aman.	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam jaringan Komunikasi Sandi yang aman [dibagi] total perangkat daerah [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan.	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah daerah [dibagi] Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan [dikali] 100.
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Seni yang dilestarikan dan dikembangkan.	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Seni yang dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah daerah [dibagi] Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Seni [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal.	Jumlah Partisipan (Masyarakat) Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan [dibagi] jumlah total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda [dikali] 100.
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum.	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum .
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.	Jumlah total Pengunjung Perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling pada Tahun N.
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Teridentifikasi.	Jumlah naskah kuno baru yang teridentifikasi pada Tahun N.
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.	$T = (a+i+s+j) / 4$; Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a); Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i); Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s); Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j).
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$T = (m+b+g+a+c+i) / 6$; m: Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK; b:Persentase Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK; g:Persentase Kesesuaian Kegiatan penyelamatan arsip PD Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK; a:Persentase kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK; c:Persentase kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK; i:Persentase kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK.	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dibagi Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK.
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N (darat dan laut).
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun N (darat, payau dan laut).
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah pelaku usaha yang taat peraturan perundangan yang berlaku [dibagi] jumlah pelaku usaha yang diverifikasi [dikali] 100.
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan.	Jumlah produksi hasil Olahan Perikanan Tahun N.
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola dengan baik.	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola dengan baik.
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan.	Jumlah pengunjung wisatawan ke DTW dan event yang dilaksanakan.
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual.	Jumlah Pelaku ekraf yang memiliki HAKI [dibagi] Jumlah Pelaku Ekraf [dikali] 100.
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi.	Jumlah Pelaku usaha pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi [dibagi] Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekraf [dikali] 100.
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun N [dikurang] jumlah produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun N-1 [dibagi] produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun N-1 [dikali] 100.
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Tahun N [dikurang] jumlah Produksi Komoditas Peternakan Tahun N-1 [dibagi] Produksi Komoditas Peternakan Tahun N-1 [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Peningkatan Produksi Perkebunan.	Jumlah Produksi Perkebunan Tahun N [dikurang] jumlah produksi Perkebunan Tahun N-1 [dibagi] produksi Perkebunan Tahun N-1 [dikali] 100.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Kualitas dan fungsi Lahan Pertanian (LP2B).	Jumlah luas lahan yang terdampak kegiatan pada tahun N [dibagi] Luas lahan LP2B [dikali] 100.
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).	Jumlah kasus PHMS yang tertangani [dibagi] Jumlah kasus PHMS yang dilaporkan [dikali] 100.
	Persentase Peningkatan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner).	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tahun N [dikurang] Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tahun N-1 [dibagi] Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan [dikali] 100.
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi.	Luasan bencana pertanian (yang disebabkan OPT) yang tertanggulangi [dibagi] Luasan bencana pertanian (yang disebabkan OPT) yang dilaporkan [dikali] 100.
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian.	Jumlah pelaku usaha pertanian yang dilakukan pengawasan [dibagi] jumlah pelaku usaha pertanian [dikali] 100.
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian.	Poktan/ Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian [dibagi] Total Poktan / Gapoktan [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Tahura dalam kondisi baik.	Luas tutupan lahan tahura dalam kondisi baik [dibagi] luas lahan tahura [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi.	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan usaha [dibagi] Jumlah pelaku usaha yang mengajukan [dikali] 100.
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya.	Jumlah sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya [dibagi] Jumlah sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemda [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Selisih harga antar waktu [dibagi] harga awal [dikali] 100.
Program Pengembangan Ekspor	Persentase fasilitasi pengembangan ekspor bagi pelaku usaha.	Jumlah fasilitasi pengembangan ekspor bagi pelaku usaha yang dilakukan [dibagi] total total jenis fasilitasi pengembangan ekspor bagi pelaku usaha [dikali] 100.
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang.	Jumlah wajib tera yang melakukan tera/tera ulang [dibagi] Total wajib tera [dikali] 100.
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha lokal yang difasilitasi dalam pemasarannya.	Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi pemasaran [dibagi] jumlah pelaku usaha (ber NIB) [dikali] 100.
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
Program Perencana dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM.	Jumlah Sentra IKM di kabupaten bangka barat per tahun.
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan.	Jumlah usaha yang diterbitkan izinnya [dibagi] Jumlah usaha industri yang mendaftar [dikali] 100.
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang menyampaikan laporan secara tertib melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah IKM yang menyampaikan laporan secara tertib melalui SIINas [dibagi] jumlah IKM yang memiliki Akun SIINas [dikali] 100.
Unsur Pendukung Sekretariat Daerah		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang ditetapkan.	Jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat (minimal SE) yang ditetapkan di tahun berjalan.
	Jumlah Kebijakan Penataan Pemerintahan yang ditetapkan.	Jumlah kebijakan daerah bidang penataan pemerintahan (minimal SE) yang ditetapkan di tahun berjalan.
	Persentase produk hukum yg diundangkan.	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah, Informasi Hukum dan Pembinaan Hukum yang ditetapkan [dibagi] jumlah Produk Hukum Daerah, Informasi Hukum dan Pembinaan Hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah [dikali] 100.
Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan.	Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan jasa (minimal SE) yang ditetapkan di tahun berjalan.
	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan	Jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Pembangunan yang ditetapkan.	(minimal SE) yang ditetapkan di tahun berjalan.
Unsur Pendukung Sekretariat DPRD		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Integrasi Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.	Jumlah Program DPRD dalam Melaksanakan Fungsinya yang diakomodir dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD [dibagi] Jumlah Program DPRD dalam Melaksanakan Fungsinya yang seharusnya diakomodir [dikali] 100.
Unsur Penunjang Perencanaan		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah.	Jumlah Program pada RKPD [dibagi] jumlah Program pada RPJMD [dikali] 100.
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Jumlah Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada RKPD [dibagi] jumlah Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada RPJMD [dikali] 100.
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA pada RKPD [dibagi] jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA pada RPJMD [dikali] 100.
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Jumlah Program bidang infrastruktur dan kewilayahan pada RKPD [dibagi] jumlah Program bidang infrastruktur dan kewilayahan pada RPJMD [dikali] 100.
Unsur Penunjang Keuangan		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah.	Persentase Keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah [ditambah] Persentase Kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan daerah [dibagi] 2.
	Persentase dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu.	jumlah dokumen penganggaran daerah yang ditetapkan tepat waktu [dibagi] jumlah dokumen penganggaran daerah [dikali] 100.
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai	Laporan barang milik daerah yang disusun [dibagi] laporan barang milik daerah yang seharusnya



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	peraturan perundang-undangan.	(sesuai peraturan perundang-undangan) [dikali] 100.
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penambahan Wajib Pajak.	jumlah wajib pajak baru [dibagi] jumlah wajib pajak N-1 [dikali] 100.
	Persentase realisasi pajak daerah.	realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah [dikali] 100.
	Persentase penyusunan laporan pajak dan retribusi tepat waktu.	Jumlah laporan pajak yang disusun tepat waktu pada tahun N [dibagi] jumlah laporan yang seharusnya disusun [dikali] 100.
Unsur Penunjang Kepegawaian		
Program Kepegawaian Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.	Jumlah Pegawai yang lulus CASN [dibagi] jumlah formasi yang ditetapkan [dikali] 100.
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya [dibagi] jumlah ASN yang telah melaksanakan pengembangan karir ASN [dikali] 100.
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya.	Jumlah ASN yang memiliki penilaian kinerja minimal baik dikurangi Jumlah ASN yang mendapat hukuman disiplin) [dibagi] jumlah seluruh ASN [dikali] 100.
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik.	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas [dibagi] jumlah seluruh ASN [dikali] 100.
Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional.	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional [dibagi] jumlah seluruh ASN jabatan manajerial dan fungsional [dikali] 100.
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis [dibagi] jumlah seluruh ASN jabatan teknis [dikali] 100.
Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah.	Jumlah kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah [dibagi] jumlah kajian tahun berjalan [dikali] 100.
	Jumlah Inovasi Daerah.	Inovasi daerah meliputi: seluruh inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan ataupun inovasi bentuk lainnya.
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam	Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.	Daerah yang dilaksanakan [dibagi] total Kajian Berbasis Bukti [dikali] 100.
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah.	Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang dilaksanakan [dibagi] total Kajian Berbasis Bukti [dikali] 100.
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah.	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki inovasi [dibagi] jumlah total Perangkat Daerah [dikali] 100.
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks manajemen risiko.	Penilaian terhadap 8 komponen proses manajemen risiko yang terdiri dari 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan.
	Indeks efektivitas pengendalian korupsi.	Nilai Indeks efektivitas pengendalian korupsi.
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level kapabilitas APIP.	Penilaian berdasarkan pedoman teknis penilaian mandiri kapabilitas APIP (BPKP).
Unsur Kewilayahan		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan [dibagi] jumlah kewenangan yang ada [dikali] 100.
Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat [dibagi] total desa/kelurahan [dikali] 100.
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum [dibagi] jumlah koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan [dikali] 100.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan.	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan [dibagi] jumlah kewenangan yang ada [dikali] 100.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan	Jumlah pembinaan yang diberikan [dibagi] total pembinaan yang seharusnya diberikan [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	
Urusan Pemerintahan Umum		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Jenis kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan [dibagi] jenis kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang seharusnya dilakukan (7 jenis) [dikali] 100.
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik.	Jumlah Kader Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik [dibagi] jumlah kader Partai Politik [dikali] 100.
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif.	Jumlah Ormas yg aktif [dibagi] Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya [dikali] 100.
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, udaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penhayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan.	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (4 kebijakan) dikali 100.
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik dan potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti.	Jumlah potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti [dibagi] Jumlah potensi Konflik Sosial [dikali] 100.
Program Penunjang		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi kinerja Perangkat Daerah.	Rata-rata Capaian Kinerja Subkegiatan Perangkat Daerah [dibagi] Rata-rata Target Kinerja Subkegiatan [dikali] 100.



Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Rumusan Indikator Program
	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah Anggaran Perangkat Daerah [dibagi] Realisasi/ Capaian Anggaran Perangkat Daerah [dikali] 100.
	Jumlah kebijakan daerah terkait Bidang penataan organisasi yang ditetapkan [KHUSUS UNTUK SEKRETARIAT DAERAH] .	Jumlah kebijakan daerah bidang penataan organisasi (minimal SE) yang ditetapkan di tahun berjalan.
	Persentase layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD [KHUSUS UNTUK SEKRETARIAT DPRD] .	Jumlah Layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada DPRD [dibagi] Jumlah layanan yang seharusnya diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada DPRD [dikali] 100.



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

2025-2029